



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPD

2025 - 2045

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

2025 - 2045

PROVINSI NUSA TENGGARA

BAPPERIDA PROVINSI NTT

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatnya maka Penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2025-2045 dapat dilaksanakan secara baik.

Dokumen RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang dengan periode 20 tahun ke depan. Pelaksanaan pembangunan RPJPD Periode 2005-2025 Provinsi NTT telah selesai dilaksanakan. Dari hasil evaluasi pencapaian masih terdapat permasalahan dan tantangan daerah yang menjadi rekomendasi perhatian untuk perencanaan pembangunan Daerah ke depannya.

Penyusunan Dokumen Rancangan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan turunan regulasinya sampai pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Termasuk di dalamnya mempedomani RPJPN, RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Adapun proses penyusunan RPJPD ini dilakukan dengan pendekatan proses dan substansi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Secara garis besar RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 memuat arahan dan pedoman tentang Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.

Upaya menjamin keberlanjutan pembangunan di Daerah, telah dilakukan integrasi perencanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tertuang di dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.

RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mendorong daya saing daerah.

Nusa Tenggara Timur yang mandiri maju dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

Kupang, Desember 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Sebagai dokumen perencanaan makro yang komprehensif, RPJPN menjadi pedoman utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis keadilan sosial. Salah satu target utama RPJPN adalah menurunkan angka kemiskinan hingga 0,5-0,8 persen, dengan memastikan bahwa pengukuran kesejahteraan rakyat bersifat absolut dan dapat dibandingkan secara akurat antar waktu dan antar wilayah. Untuk mewujudkan target tersebut, pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial-ekonomi menjadi prinsip utama yang harus diterjemahkan secara konkret dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di setiap provinsi, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam rangka memastikan keselarasan kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah, penyusunan RPJPD Provinsi NTT 2025-2045 juga merujuk pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa visi, misi, arah pembangunan, serta indikator yang digunakan dalam RPJPD tetap sejalan dengan RPJPN sehingga kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan. Selain itu, RPJPD ini juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahun guna menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan bukti.

Untuk mencapai tujuan tersebut, RPJPD Provinsi NTT 2025-2045 menegaskan keberpihakan terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan publik, khususnya dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Strategi pembangunan yang diadopsi sejalan dengan RPJPN, mencakup diversifikasi ekonomi berbasis desa, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pemberdayaan komunitas, penguatan koperasi, serta optimalisasi potensi ekonomi lokal menjadi prioritas utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Namun, dalam mewujudkan visi tersebut, tantangan besar yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, efektivitas implementasi RPJPD harus didukung dengan pendekatan berbasis bukti melalui pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi, seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Pendekatan berbasis data ini bertujuan untuk memperkuat proses perencanaan, penganggaran, serta intervensi kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran guna memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Selain itu, RPJPD Provinsi NTT 2025-2045 juga menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilakukan dengan memastikan keterlibatan aktif kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya dalam seluruh aspek pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), yang menjadi salah satu pilar utama dalam perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

RPJPD Provinsi NTT memberikan harapan besar bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mencapai masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Konsistensi dalam memanfaatkan RPJPD sebagai panduan dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, berbasis indikator yang terukur dan berkelanjutan, guna memastikan setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berbasis bukti, pada awal tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT ditetapkan sebagai salah satu lokasi kerja Program “Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar” (SKALA). Program ini berada di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Program ini bertujuan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antar daerah melalui peningkatan akses serta kualitas layanan dasar, terutama bagi masyarakat rentan di wilayah tertinggal. Dalam konteks ini, program SKALA turut berperan dalam memberikan asistensi teknis dalam penyusunan dokumen RPJPD Provinsi NTT 2025-2045, guna memastikan bahwa dokumen perencanaan ini selaras dengan kebijakan nasional dan berbasis data yang akurat. Dukungan substansi dan teknis telah diberikan melalui berbagai pertemuan, rapat, dan diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

Saya mengucapkan selamat kepada Penjabat (PJ) Gubernur NTT serta Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT beserta jajarannya atas kolaborasi yang sangat baik dalam penyusunan RPJPD ini. Penghargaan juga saya sampaikan kepada UNICEF, program SIAP SIAGA, program PRISMA, serta mitra pembangunan lainnya yang telah memberikan kontribusi signifikan melalui analisis dan masukan teknis sesuai dengan bidang kepakarannya.

Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi NTT dalam proses perencanaan dan penganggaran yang semakin baik guna menurunkan angka kemiskinan di Provinsi NTT serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik dalam penyusunan dokumen RPJPD ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Desember 2024



Tirta Sutedjo, ST, MWRM

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas)
Co-Chair Komite Teknis Program SKALA



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2025- 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Telah

Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
3. Rencana.....

(lima) tahun.

4. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
5. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah basil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai basil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonornis, efisien dan efektif.

15. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 15. Daerah.....
16. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:
- a. memberi arah pembangunan jangka panjang bagi Pemerintah Daerah dengan mempedomani arah pembangunan jangka panjang Nasional;
 - b. sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka panjang yang diselaraskan dengan RTRW;
 - c. secara politik menjadi acuan bagi Calon Kepala Daerah untuk merumuskan visi dan misi pembangunan daerah;
 - d. secara materiil menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - e. secara materiil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Tujuan dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - b. menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah NTT Tahun 2025-2045 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - d. sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam jangka menengah; dan
 - e. sebagai.....

- e. sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD

Pasal 3

(1) Sistematika RPJPD meliputi:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
- e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
- f. Bab VI Penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Desember 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 5 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 5-302/2024

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025- 2045

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat nilai-nilai konstitusional, seperti Pancasila sebagai dasar negara, negara kesatuan Republik Indonesia, demokrasi, keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan nasional. Nilai-nilai konstitusional ini kemudian menjadi acuan bagi seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah, dalam menjalankan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. RPJPD Provinsi adalah instrumen strategis yang dirancang untuk mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. RPJPD ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan maupun integrasi antara rencana pembangunan nasional dan daerah tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sejalan dengan visi dan misi daerah serta kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan hukum utama penyusunan RPJPD Provinsi menegaskan bahwa setiap daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga mengatur kewajiban dan kewenangan pemerintah

daerah untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing sebagai bagian dari perwujudan otonomi daerah.

Salah satu cara untuk memahami kebutuhan masyarakat di dalam penyusunan RPJPD Provinsi adalah melalui jaring aspirasi dan musyawarah yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJPD Provinsi menunjukkan rencana pembangunan daerah yang dibuat merupakan dokumen perencanaan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kearifan lokal juga merupakan aspek penting yang dipertimbangkan dalam penyusunan RPJPD Provinsi ini. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai, tradisi, dan praktik yang telah lama berkembang di masyarakat dan terbukti efektif dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonomi. Integrasi kearifan lokal dalam RPJPD Provinsi dapat membantu menciptakan rencana pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia memiliki letak strategis terdiri dari beberapa kepulauan besar dan kecil yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan tradisi. Gambaran umum wilayah Nusa Tenggara tersebut kemudian menjadi landasan kuat dalam penyusunan RPJPD 2025-2045 yang digagas pada tahun 2024 ini. RPJPD Provinsi merupakan dokumen penting yang digunakan sebagai landasan strategis dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Timur 20 tahun ke depan. Selain digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, RPJPD Provinsi ini juga merupakan panduan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui RPJPD di 22 kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mewujudkan hal tersebut maka dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 diangkat Visi **“Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**. Visi ini dibangun dengan spirit integratif bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan

kemanfaatan seluruh masyarakat Provinsi NTT dan Indonesia secara keseluruhan. Visi ini sejalan dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provisi NTT tentang RPJPD Tahun 2025-2045 terdiri dari 4 (lima) Pasal dan dilengkapi lampiran berupa sistematika dan isi RPJPD yang terdiri dari 6 (enam) Bab, meliputi: Bab. I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, Bab IV Visi dan Misi Daerah, Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, dan Bab VI Penutup. Keberadaan RPJPD ini diharapkan menjadi pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan jangka panjang secara teintegrasi di Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR

LAMPIRAN.....

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur	ii
Kata Pengantar Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Co-Chair Komite Teknis Program SKALA	iii
Perda Provinsi NTT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2025-2045	v
Daftar Isi	xv
Daftar Tabel	xix
Daftar Gambar	xxi
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Lainnya	6
1.4 Maksud dan Tujuan	7
1.4.1 Maksud	7
1.4.2 Tujuan	8
1.5 Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045	8
Bab 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah	11
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	11
2.1.1 Geografi	11
2.1.1.1 Topografi Daratan	11
2.1.1.2 Topografi Lautan	12
2.1.1.3 Garis Pantai	13
2.1.1.4 Iklim	13
2.1.1.5 Suhu Udara	17
2.1.1.6 Tutupan Lahan	17
2.1.1.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	18
2.1.1.8 Indeks Resiko Bencana	19
2.1.1.9 Indeks Ketahanan Pangan	20
2.1.1.10 Ketahanan Energi	20
2.2.1.11 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	22
2.1.1.12 Ketahanan Air	23
2.1.2 Demografi	28
2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk	28
2.1.2.2 Komposisi Penduduk	28
2.1.2.3 Kepadatan Penduduk	29
2.1.2.4 Keberadaan Masyarakat Hukum Adat	30

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	30
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	30
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	30
2.2.1.2 Ketimpangan.....	31
2.2.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP).....	32
2.2.1.4 Angka Kemiskinan.....	33
2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	35
2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia	35
2.2.1.7 Mata Pencaharian Penduduk	36
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya.....	38
2.2.2.1 Indeks Kualitas Keluarga	38
2.2.2.2 Kesejahteraan Gender, Disabilitas dan Sosial Inklusi (Gedsi).....	40
2.2.2.3 Indeks Pembangunan Pemuda.....	45
2.2.2.4 Indeks Pembangunan Kebudayaan.....	46
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	47
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	47
2.3.1.1 PDRB.....	47
2.3.1.2 PDRB Perkapita.....	49
2.3.1.4 Indeks Ekonomi Hijau.....	50
2.3.1.5 Indeks Ekonomi Biru.....	51
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	51
2.3.2.1 Indeks Modal Manusia	51
2.3.2.2 Indeks Pendidikan.....	52
2.3.2.3 Angka Literasi dan Numerasi	52
2.3.2.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	53
2.3.2.5 Indeks Literasi Digital	53
2.3.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	54
2.3.2.7 Angka Ketergantungan.....	54
2.3.3 Daya Saing Infrastruktur Wilayah	55
2.3.3.1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	55
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	55
2.3.4.1 Indeks Demokrasi.....	55
2.3.4.2 Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	56
2.3.4.3 Indeks Daya Saing Daerah	57
2.3.4.4 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	58
2.3.4.5 Penanaman Modal	59
2.3.5 Daya Saing Sektor Unggulan Daerah	60
2.3.5.1 Pariwisata.....	60
2.3.5.2 Peternakan	61
2.3.5.3 Perkebunan.....	62
2.3.5.4 Kelautan dan Perikanan.....	62
2.4 Aspek Pelayanan Umum	63
2.4.1 Indeks Pelayanan Publik.....	63
2.4.2 Indeks Inovasi Daerah.....	63
2.4.3 Indeks SPBE	64
2.4.4 Indeks SAKIP.....	64
2.4.5 Indeks Reformasi Birokrasi.....	64

2.4.6 Standar Pelayanan Minimal.....	65
2.4.6.1 Pendidikan.....	65
2.4.6.2 Kesehatan.....	66
2.4.6.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	67
2.4.6.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	68
2.4.6.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	68
2.4.6.6 Sosial.....	69
2.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025.....	70
2.5.1 Ringkasan Capaian RPJPD Provinsi NTT 2005-2025.....	70
2.5.2 Sumber Daya Manusia yang Membai.....	71
2.5.2.1 Kondisi Pendidikan Yang Membai.....	71
2.5.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Terus Meningkat.....	72
2.5.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka yang Menurun.....	73
2.5.3 Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun	74
2.5.4 Situasi Ekonomi Regional Yang Lebih Baik.....	74
2.5.5 Kualitas Lingkungan Hidup Yang Tetap Terjaga	75
2.5.6 Pembangunan Kewilayahan yang Terus Dilanjutkan	75
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	76
2.6.1 Proyeksi Demografi.....	76
2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	81
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	85
2.7.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Indonesia Emas 2045.....	85
2.7.2 Pengembangan Pusat – Pusat Pertumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	87
2.7.2.1 Penyelarasan Muatan RPJPD dan RTRW Provinsi NTT	87
2.7.2.2 Fokus Utama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju Indonesia Emas 2045	88
2.7.3 Arah Pengembangan Provinsi NTT dalam RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 - 2043.....	95
2.7.3.1 Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang Provinsi NTT Tahun 2023-2043	95
2.7.3.2 Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi NTT	98
2.7.4 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Se-NTT	103
Bab 3. Permasalahan dan Isu Strategis	107
3.1 Permasalahan	107
3.1.1 Geografi dan Demografi	107
3.1.2 Belum Optimalnya Kesejahteraan Masyarakat.....	109
3.1.3 Rendahnya Daya Saing Daerah.....	112
3.1.4 Belum Optimalnya Pelayanan Umum.....	114
3.1 Isu Strategis	115
3.2.1 Isu Strategis Global	116
3.2.2 Isu Strategis Nasional	118
3.2.3 Isu Strategis Daerah.....	126

Bab 4. Visi dan Misi Daerah.....	139
4.1 Visi.....	139
4.1.1 Sasaran Visi Daerah.....	140
4.1.2 Indikator Sasaran Visi Daerah.....	141
4.2 Misi	141
4.3 Keselarasan Visi, Misi RPJPD dengan Visi, Misi RPJPN	146
Bab 5. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok	149
5.1 Arah Kebijakan	149
5.2 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045	161
5.3 Upaya Transformasi Super Prioritas NTT (<i>Game Changers NTT</i>)	166
Bab 6. Penutup	169

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ketinggian Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT (Mdpl) Tahun 2022	12
Tabel 2.2	Komponen Tutupan Lahan Provinsi NTT	18
Tabel 2.3	Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Per Sektor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2050 (<i>Million Tonnes of Oil Equivalent/ MTOE</i>).....	21
Tabel 2.4	Hasil Pemodelan Kebutuhan Energi Final Per Jenis Untuk Seluruh Sektor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2050 (<i>Million Tonnes of Oil Equivalent/ MTOE</i>).....	21
Tabel 2.5	Gambaran Indikator Kelistrikan di NTT 2011-2021.....	22
Tabel 2.6	Jumlah Bendungan di Provinsi NTT 1981-2023	26
Tabel 2.7	Neraca Air Pada Wilayah Sungai di Provinsi NTT Tahun 2016	26
Tabel 2.8.	Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status Teregistrasi, Terverifikasi dan Tersertifikasi Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur kondisi sampai dengan Tahun 2023.....	30
Tabel 2.9	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Lapangan Usaha, 2017 – 2022	48
Tabel 2.10	Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Provinsi NTT Tahun 2024-2026.....	50
Tabel 2.11	Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Provinsi NTT Tahun 2006-2022	59
Tabel 2.12	Populasi Ternak Unggulan Provinsi NTT Tahun 2000 sampai dengan 2022	61
Tabel 2.13	Luas Tanaman Perkebunan Unggulan Provinsi NTT Tahun 2013-2021 (Ribu Ha)	62
Tabel 2.14	Jumlah Produksi Komoditas Utama Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2017-2022.....	63
Tabel 2.15	Asumsi Proyeksi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	76
Tabel 2.16	Kriteria/Tipologi Bonus Demografi.....	81
Tabel 2.17	Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	81
Tabel 2.18	Hasil Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.....	82
Tabel 2.19	Hasil Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.....	82
Tabel 2.20	Hasil Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.....	83
Tabel 2.21	Hasil Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.....	83
Tabel 2.22	Hasil Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Sekolah) di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.....	84
Tabel 2.23	Hasil Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) menurut Kelompok Umur Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	84
Tabel 2.24	Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Provinsi NTT	98
Tabel 2.25	Program Utama Perwujudan Pola Ruang Provinsi NTT	99
Tabel 2.26	Kawasan Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	103

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Masalah Pokok dan Isu Strategis Provinsi NTT Tahun 2025-2045	134
Tabel 4.1	Sasaran Visi dan Indikator Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur	141
Tabel 4.2	Keselarasan Visi, Misi RPJPD dengan Visi, Misi RPJPN	146
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	149
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Transformatif Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	151
Tabel 5.3	Sasaran Pokok Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.....	161
Tabel 5.4	Game Changers NTT Tahun 2025-2045.....	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD Provinsi NTT 2025 – 2045 dengan Dokumen Lainnya	7
Gambar 2.1	Peta Kedalaman Laut di wilayah Provinsi NTT	13
Gambar 2.2	Laju Perubahan Curah Hujan Tahunan Periode 1981-2022.....	14
Gambar 2.3	Laju Perubahan Hari Hujan Periode 1981-2022.....	14
Gambar 2.4	Proyeksi Perubahan Curah Hujan Musiman Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5	15
Gambar 2.5	Proyeksi Perubahan Hari Kering Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5.....	15
Gambar 2.6	Proyeksi Perubahan Awal Musim Hujan Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5	16
Gambar 2.7	Proyeksi Perubahan Panjang Musim Hujan Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 September, Oktober, November Skenario RCP4.5	16
Gambar 2.8	Laju Perubahan Suhu Rata-Rata Tahunan Periode 1981-2022.....	17
Gambar 2.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTT 2010-2022	19
Gambar 2.10	Indeks Resiko Bencana Provinsi NTT 2015-2022	19
Gambar 2.11	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi NTT 2019-2022	20
Gambar 2.12	Emisi dari Sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan dan Limbah Provinsi NTT Tahun 2000-2021.....	23
Gambar 2.13	Gambaran Umum Tantangan Terkait Air di Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2022....	24
Gambar 2.14	Kelangkaan air pada musim kemarau di Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah sungai menyumbang 60 Persen dari PDB Tahun 2045.....	25
Gambar 2.15	Status Pencemaran Air Permukaan di Seluruh Indonesia Tahun 2021.....	25
Gambar 2.16	Persentase Penduduk Yang Terlayani BUMD Air Minum Provinsi NTT Tahun 2012-2021.....	27
Gambar 2.17	Kinerja BUMD Air Minum Provinsi NTT Tahun 2012-2021.....	28
Gambar 2.18	Proyeksi Laju pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2022 (%)	28
Gambar 2.19	Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi NTT Tahun 2022	29
Gambar 2.20	Kepadatan Penduduk Provinsi NTT Tahun 2002-2022	29
Gambar 2.21	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2010-2022	31
Gambar 2.22	Gini Ratio Provinsi NTT Tahun 2009-2022	31
Gambar 2.23	Indeks Williamson Provinsi NTT Tahun 2009-2022	32
Gambar 2.24	Nilai Tukar Petani Provinsi NTT Tahun 2008-2022	33
Gambar 2.25	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2022.....	34
Gambar 2.26	Persentase Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi NTT Tahun 2021 dan 2022 (%)	34
Gambar 2.27	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi NTT Tahun 2005-2022	35
Gambar 2.28	Perkembangan IPM Provinsi NTT Tahun 2010-2022	35
Gambar 2.29	Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Provinsi NTT Tahun 2010-2022.....	36
Gambar 2.30	Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023.....	37
Gambar 2.31	Mata Pencaharian Penduduk Provinsi NTT Tahun 2023.....	38

Gambar 2.32	Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT Tahun 2019-2021.....	39
Gambar 2.33	Komponen Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT Tahun 2021 dan 2022	39
Gambar 2.34	Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Provinsi NTT Tahun 2019-2021.....	40
Gambar 2.35	Komponen Pembentuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Provinsi NTT Tahun 2020-2021.....	41
Gambar 2.36	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2022	41
Gambar 2.37	Komponen Indeks Pembangunan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022	42
Gambar 2.38	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2022	43
Gambar 2.39	Komponen Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2022	43
Gambar 2.40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2022..	44
Gambar 2.41	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenisnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023.....	45
Gambar 2.42	Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2015-2022	46
Gambar 2.43	Komponen Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi NTT Tahun 2022	46
Gambar 2.44	Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2018-2022 ..	47
Gambar 2.45	Komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2022.....	47
Gambar 2.46	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Menurut Lapangan Usaha di level Provinsi (Juta Rupiah), 2022	49
Gambar 2.47	Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi NTT Tahun 2010-2022.....	50
Gambar 2.48	Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) Provinsi NTT Tahun 2015-2018	51
Gambar 2.49	Indeks Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2010-2018	52
Gambar 2.50	Angka Literasi dan Numerasi Provinsi NTT Tahun 2022-2023.....	52
Gambar 2.51	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2020-2022.....	53
Gambar 2.52	Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, Tahun 2020-2022	54
Gambar 2.53	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2012-2022	54
Gambar 2.54	Rasio Ketergantungan Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2010-2020	55
Gambar 2.55	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT Tahun 2009-2022.....	56
Gambar 2.56	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi NTT Tahun 2021-2023.....	56
Gambar 2.57	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi NTT Tahun 2019-2022	57
Gambar 2.58	Komponen IDSD Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2022.....	57
Gambar 2.59	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2012-2022	58
Gambar 2.60	Komponen Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2012-2022.....	58
Gambar 2.61	Jumlah Tamu Hotel Wisatawan Mancanegara dan Domestik Provinsi NTT Tahun 2010-2022	60
Gambar 2.62	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Provinsi NTT Tahun 2010-2022 (%).....	60
Gambar 2.63	Rata-Rata Lama Menginap Tamu Pada Hotel Bintang Di Provinsi NTT Tahun 2004-2022 (hari).....	61

Gambar 2.64	Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2021-2022	63
Gambar 2.65	Indeks SPBE Provinsi NTT Tahun 2020-2022	64
Gambar 2.66	Indeks SAKIP Provinsi NTT Tahun 2018-2022	64
Gambar 2.67	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2019-2022	65
Gambar 2.68	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%).....	65
Gambar 2.69	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%)	66
Gambar 2.70	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%)	67
Gambar 2.71	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%).....	67
Gambar 2.72	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%)	68
Gambar 2.73	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%).....	69
Gambar 2.74	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT Tahun 2022 (%)	70
Gambar 2.75	Refleksi Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2005-2025.....	71
Gambar 2.76	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.....	77
Gambar 2.77	Kondisi Demografi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	77
Gambar 2.78	Jumlah Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045	78
Gambar 2.79	Piramida Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.....	79
Gambar 2.80	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.....	80
Gambar 2.81	Delapan Misi (Agenda) dan 17 (Tujuh Belas) Arah Pembangunan Indonesia Emas	86
Gambar 2.82	Penyelarasan Muatan RTRW, RPJPD dan RPJMD	87
Gambar 2.83	Koridor Ekonomi Bali- Nusa Tenggara dalam kerangka Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	88
Gambar 2.84	Skema Pengembangan Ekonomi Hijau NTT.....	89
Gambar 2.85	Skema Pengembangan Ekonomi Biru NTT	93
Gambar 3.1	Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional dan Daerah	116
Gambar 3.2	Total <i>Factor Productivity Index</i> 2010-2019 (2010 = 1,0).....	121
Gambar 3.3	Kontribusi Manufaktur terhadap PDB (%PDB)	122
Gambar 3.4	Produktivitas Pertanian (Juta Rupiah/Pekerja).....	122
Gambar 3.5	Kondisi Hiper Regulasi.....	125
Gambar 5.1	Koridor Ekonomi Bali- Nusa Tenggara dalam kerangka Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	167



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Frasa perubahan dalam pengertian di atas menegaskan bahwa, pembangunan adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai kemajuan atau kesejahteraan. Paralel dengan pengertian tersebut, Pembangunan Nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Karena itu pelaksanaan pembangunan nasional mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Pembangunan Daerah adalah sub-sistem dari Pembangunan Nasional, merupakan serangkaian tindakan Pemerintah Daerah bersama semua elemen di dalam masyarakat untuk mencapai kemajuan berupa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Karena itu sinergitas pembangunan daerah dan pembangunan nasional harus terjadi untuk menjamin terciptanya hubungan simetris yang saling menguntungkan.

Pengaturan selengkapnya tentang pembangunan nasional dan pembangunan daerah dalam jangka panjang diatur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Substansi kedua dokumen rencana pembangunan jangka panjang tersebut harus koheren, agar sinergitas yang menjamin terjadinya hubungan simetris yang saling menguntungkan dapat diwujudkan.

Di dalam rancangan akhir RPJPN Tahun 2025 – 2045, ditetapkan **Visi Indonesia Emas, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ciri nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan serta budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat mencakup ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman. Maju mencakup berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil. Berkelanjutan mencakup lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Visi Indonesia Emas tersebut menjadi landasan materiil pembangunan jangka panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di dalam dokumen **RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025**, ditetapkan Visi sebagai berikut: **Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD NTT Tahun 2005 – 2025, visi pembangunan jangka panjang NTT tersebut belum sepenuh terwujud, akan tetapi secara materiil, maknanya dipandang koheren dengan Visi Indonesia Emas Tahun 2025 – 2045. Karena itu, di dalam RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045, cita-cita mewujudkan NTT yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap dipertahankan maknanya dengan sejumlah penyesuaian agar konsisten dan merupakan penjabaran Visi Indonesia Emas Tahun 2025 – 2045 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud, dipandang penting untuk menyelaraskan kandungan makna dalam rumusan visi pembangunan jangka panjang NTT dan Nasional, mengakomodasi kebijakan nasional untuk Provinsi NTT, dan sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan arah pembangunan jangka panjangnya. Karena itu RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045 bersifat makro, dan tetap mempedomani substansi pembangunan sektoral sebagaimana ditetapkan di dalam RTRW Provinsi NTT. Selain itu, untuk kepentingan perencanaan jangka menengah, RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045, menjadi dasar bagi Kepala Daerah terpilih untuk menyusun dan menetapkan RPJMD pada periode kepemimpinannya.

Penyusunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 bersifat imperatif berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Bappenas Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, dimana Visi, Sasaran Visi, Misi, Arah Pembangunan dan Indikator yang digunakan pada RPJPD sama dengan Visi, Sasaran Visi, Misi, Arah Pembangunan dan Indikator yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045.

Di samping itu, di dalam menjalankan amanat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang – Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan masional dan pembangunan daerah, maka proses penyusunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 dianggap penting di dalam mendukung rencana pembangunan nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Demikianpun, untuk mencapai sasaran nasional di Tahun 2045, diperlukan konstribusi pembangunan di tingkat lokal secara maksimal baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan terkait sesuai dengan peran dan kewenangan masing – masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah. Maka rangkaian penyusunan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 akan mengikuti beberapa Tahapan seusai pentahapan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 meliputi:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Konsultasi Rancangan Awal;
- d. Penyusunan Rancangan;
- e. Musrenbang;
- f. Perumusan Rancangan Akhir;
- g. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- h. Penyampaian Ranperda kepada DPRD;
- i. Pembahasan Ranperda;
- j. Evaluasi Ranperda; dan
- k. Penetapan Ranperda.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, maka proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun harus memperhatikan pendekatan – pendekatan baik mengacu pada pasal 7 dan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maupun Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berupa perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan yang bersifat:

- a. Teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. Partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Politis, merumuskan dan menetapkan visi dan misi jangka panjang Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh setiap kepala daerah terpilih.
- d. Atas-bawah (*Top-Down*) dan bawah – atas (*Bottom-Up*), hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan Daerah secara substansi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat:

- a. *Holistik-tematik*, mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. *Integratif*, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. *Spasial*, mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 memperhatikan:

1. Arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.
2. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 yang disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045.
3. Hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.
4. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu – isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.
5. Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043.
6. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, antara lain Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Pariwisata, Rencana Induk percepatan pembangunan pulau sumba tahun 2023 - 2042 dan Dokumen Rencana Induk lainnya

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyusunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti UU No.2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6841);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69)
10. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
21. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara republic Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTT Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Timur Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT No. 0132));
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023;
31. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

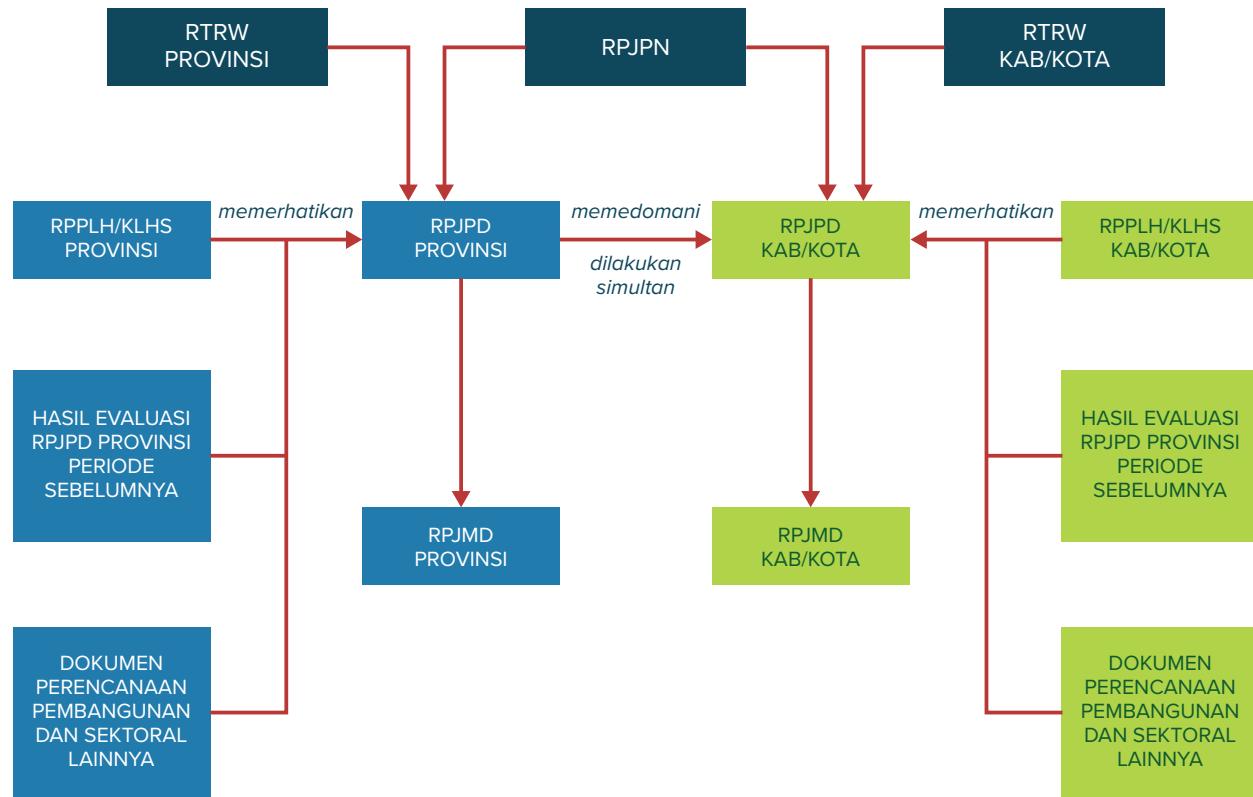
1.3 HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Penyusunan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dilakukan dengan mempedomani dan memperhatikan dokumen lainnya sebagai berikut:

- a. Penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dilakukan selaras dan berpedoman pada RPJPN 2025 – 2045;
- b. Penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPN 2025-2045;
- c. Penyusunan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 memperhatikan hasil evaluasi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 (periode sebelumnya) dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi Hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045;
- d. Penyusunan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. Substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati serta permasalahan dan isu – isu strategis;
- e. Penyusunan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW. Substansi RTRW yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah baik pada struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis serta rencana program dan kebijakan

Keterkaitan penyusunan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 sebagaimana dijelaskan di atas dengan dokumen lainnya disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 1.1 KETERKAITAN RPJPD PROVINSI NTT 2025 – 2045 DENGAN DOKUMEN LAINNYA



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberi arah pembangunan jangka panjang bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mempedomani arah pembangunan jangka panjang Nasional;
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka panjang yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
3. Secara politik menjadi acuan bagi Calon Kepala Daerah untuk merumuskan visi dan misi pembangunan daerah;
4. Secara materiil menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan rancana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
5. Secara materiil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi NTT.

1.4.2 Tujuan

RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025 -2045;
2. Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka panjang daerah;
3. Menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025 – 2045;
4. Sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaianya dalam jangka menengah;
5. Sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaianya dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

1.5 SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2025-2045

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat tentang Aspek Geografi dan Demograf, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Memuat tentang Permasalahan dan Isu Strategis daerah.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Memuat tentang Visi Daerah Tahun 2025-2045 dan Misi Daerah Tahun 2025-2045.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Memuat tentang Arah kebijakan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.

Bab VI Penutup

Memuat catatan-catatan penutup untuk seluruh dokumen ini.





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geografi

Provinsi NTT terletak di sebelah selatan katulistiwa pada posisi 8° - 12° Lintang Selatan dan 118° - 125° Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuthakiran Kode, Data Wilayah Admininstrasi Pemerintahan dan Pulau, Provinsi NTT terdiri dari 609 Pulau yang meliputi 21 Kabupaten dan 1 Kota Madya, 315 Kecamatan, 305 Kelurahan dan 3.137 Desa dengan total luas wilayah yaitu 46.446,644 km². Kabupaten Sumba Timur merupakan wilayah terluas yaitu sebesar 6.984 km² dan Kota Kupang merupakan wilayah paling kecil dengan luas 159 km². Sebanyak 82 persen desa/kelurahan di NTT terletak di daerah lereng dengan rincian, 20 desa/kelurahan berada di lembah, 2.849 desa/ kelurahan berada di lereng dan 581 desa/kelurahan berada di dataran.

Secara fisik batas wilayah Provinsi NTT, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Samudera Hindia (Negara Australia)
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Laut Timor
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Selat Sape (Provinsi Nusa Tenggara Barat)

2.1.1.1 Topografi Daratan

Kondisi topografis NTT sebagian besar berbukit-bukit dan bergunung. Kawasan yang tergolong datar hingga landai menyebar secara sporadis pada gugusan-gugusan yang sempit, di antara lekukan perbukitan atau memanjang mengikuti garis pantai. Lahan dengan kemiringan <40 , yang cocok untuk kawasan budidaya mencapai 64,54 persen, sebagian besar di antaranya (38,07 persen dari total luas lahan) memiliki kemiringan 15 – 40 persen. Sisanya, 35,46 Persen merupakan lahan dengan kemiringan >40 persen, dan tidak dapat dikelola sebagai areal budidaya. Kondisi geomorfologis/bentang alam yang demikian menimbulkan potensi erosi yang sangat tinggi. Akibatnya, laju degradasi sumberdaya lahan yang tinggi.

TABEL 2.1 KETINGGIAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI NTT (MDPL) TAHUN 2022

No	Kabupaten/ Kota	Nama Ibu Kota	Tinggi Wilayah (Mdpl)
1.	Ngada	Bajawa	1.204,50
2.	Manggarai	Ruteng	1.173,08
3.	Timor Tengah Selatan	So'e	901,60
4.	Sumba Tengah	Waibakul	437,30
5.	Sumba Barat	Waikabubak	436,50
6.	Belu	Atambua	398,78
7.	Timor Tengah Utara	Kefamenanu	389,29
8.	Manggarai Timur	Borong	266,08
9.	Rote Ndao	Ba'a	158,00
10.	Manggarai Barat	Labuan Bajo	78,23
11.	Sumba Timur	Waingapu	62,90
12.	Kota Kupang	Kupang	61,13
13.	Sabu Raijua	Seba	56,66
14.	Sumba Barat Daya	Tambolaka	52,80
15.	Alor	Kalabahi	36,60
16.	Nagekeo	Mbay	34,93
17.	Ende	Ende	31,35
18.	Kupang	Oelamasi	28,85
19.	Flores Timur	Larantuka	27,06
20.	Sikka	Maumere	14,48
21.	Malaka	Betun	14,21
22.	Lembata	Lewoleba	12,35

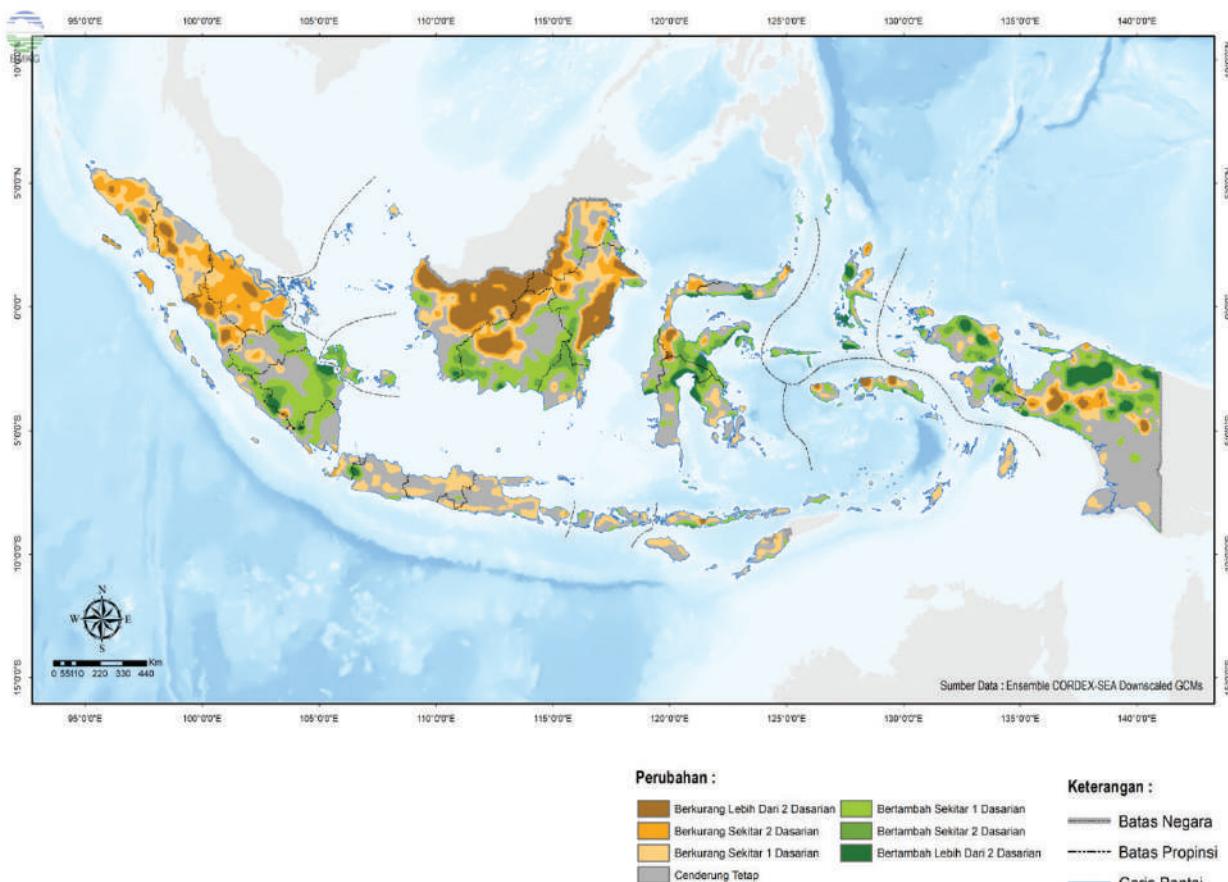
Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG)

2.1.1.2 Topografi Lautan

Perairan pesisir NTT sampai batas 12 mil memiliki kedalaman yang bervariasi, dari yang dangkal sampai kedalaman lebih dari 300 m seperti perairan di selatan Lembata dan Tenggara Alor. Mengacu kepada kriteria laut dalam (kedalaman lebih dari 200 m), maka pada jarak sampai 4 mil diukur dari daratan, perairan yang berada di hadapan daratan sebagian besar kabupaten/kota di NTT merupakan perairan dangkal sampai perairan dalam.

Kabupaten yang tidak memiliki perairan dalam pada jarak 4 mil dari darat adalah Sumba Barat Daya, Malaka, TTS, dan Kota Kupang. Pada jarak antara 4-12 mil, kondisi batimetri perairan di NTT umumnya akan makin dalam lagi kecuali pada wilayah tertentu yang berdekatan dengan pulau-pulau lainnya atau bukit bawah laut yang umumnya terdapat di wilayah Flores. Perairan dangkal umumnya berada pada perairan yang berada pada wilayah selat dan yang berdampingan dengan daratan. Dari sudut lokasi, wilayah utara NTT seperti Flores sampai Alor memiliki kondisi batimetri yang lebih dalam dibanding bagian selatan NTT seperti dari Sumba sampai Timor.

GAMBAR 2.1 PETA KEDALAMAN LAUT DI WILAYAH PROVINSI NTT



Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi NTT Tahun 2019

2.1.1.3 Garis Pantai

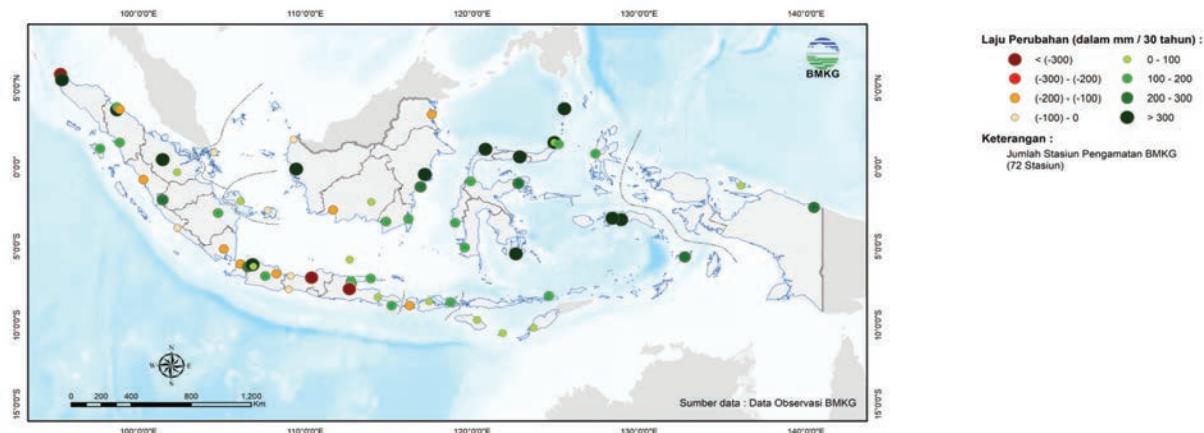
Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis laut dapat berubah karena adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2019, maka panjang garis pantai Provinsi NTT adalah 5.700 km.

2.1.1.4 Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang dipicu oleh naiknya suhu rata-rata atmosfir bumi seiring meningkatnya gas rumah kaca di atmosfir. Perubahan suhu global ini berdampak pada perubahan iklim seperti perubahan pola hujan menjadikan tidak menentunya musim, naik dan turunnya hujan disuatu wilayah yang berpotensi menimbulkan bencana banjir maupun kekeringan. Selain itu wilayah NTT juga dipengaruhi oleh fenomena iklim global lain yang dapat memperngaruhi variabilitas iklim seperti fenomena *El Nino Southern Oscilation* (ENSO) dan *Indian Dipole Mode* (IOD).

Dampak variabilitas dan perubahan iklim tersebut akan semakin buruk pada suatu wilayah yang memiliki kerentanan dengan kategori tinggi. Salah satu faktor yang menentukan kerentanan adalah kemampuan adaptasi suatu wilayah dan tingginya sensitivitas dan keterpaparan menjadikan wilayah tersebut menjadi rentan terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu indikasi fenomena perubahan iklim dapat diamati dari perubahan pola curah hujan rata-rata pada suatu wilayah.

GAMBAR 2.2 LAJU PERUBAHAN CURAH HUJAN TAHUNAN PERIODE 1981-2022

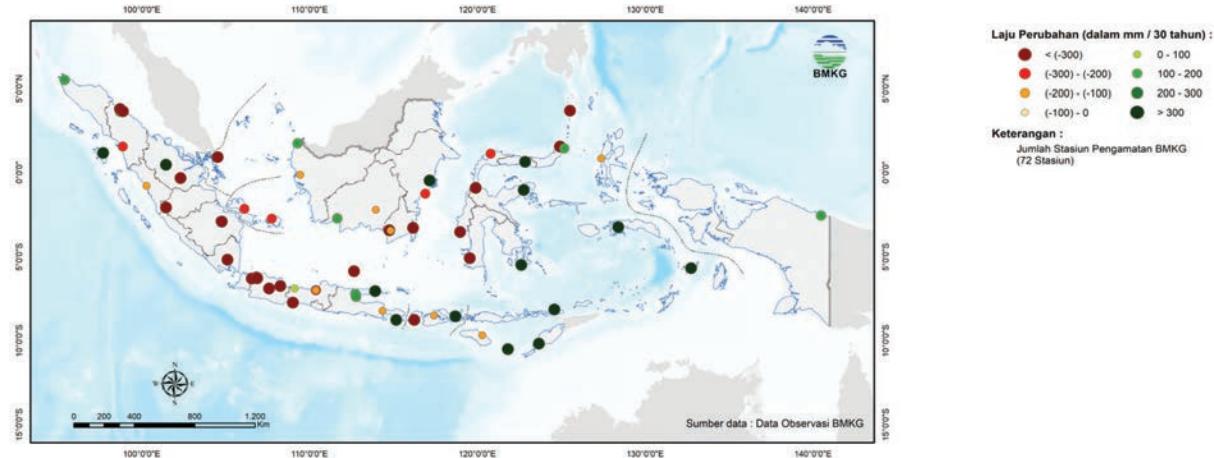


Sumber: BMKG 2023

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk laju perubahan curah hujan tahunan periode 1981 sampai dengan 2022, Provinsi NTT khusus wilayah Timor, Sabu dan Sumba memiliki laju perubahan curah hujan tahunan atau mengalami kenaikan dalam rentang 0-100 mm/30 tahun. Sedangkan Pulau Alor memiliki laju perubahan curah hujan tahunan atau mengalami kenaikan dalam rentang 100-200 mm/30 tahun.

Demikian juga untuk kategori laju perubahan hari hujan dalam kurun waktu 1981 sampai dengan 2022, Provinsi NTT khususnya wilayah Timor, Sabu dan Alor memiliki laju perubahan hari hujan >6 hari/ 30 tahun. Sedangkan untuk wilayah Sumba memiliki laju perubahan hari hujan atau mengalami kenaikan dalam rentang (-3)-0 hari/30 tahun sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

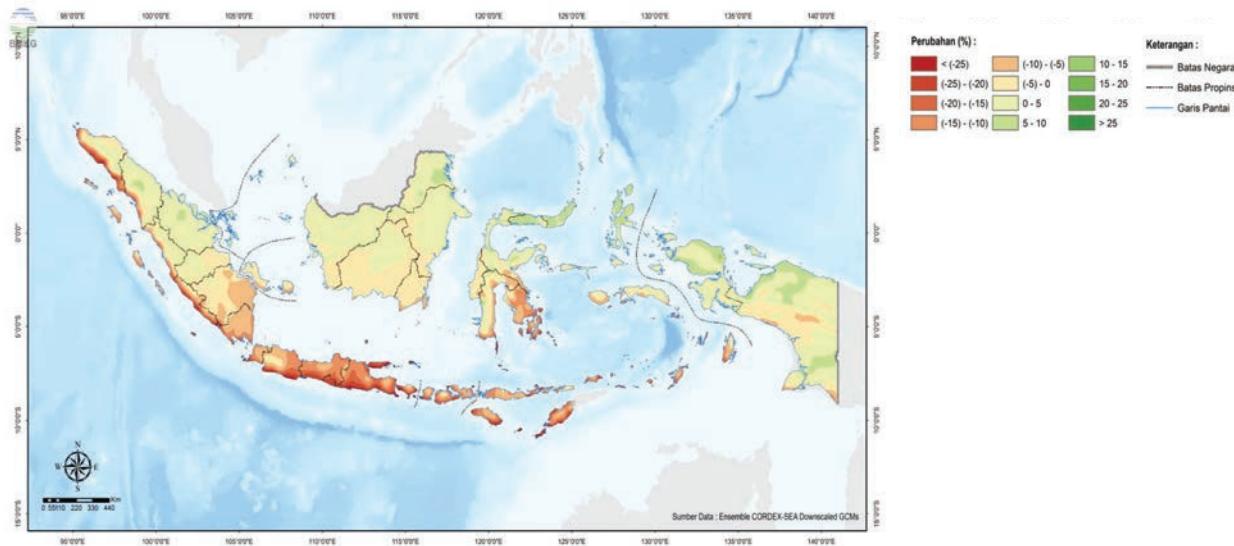
GAMBAR 2.3 LAJU PERUBAHAN HARI HUJAN PERIODE 1981-2022



Sumber: BMKG 2023

Proyeksi curah hujan musiman wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami penurunan dalam rentang (-0,5)-0 sampai dengan (-25)-(-20) persen, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

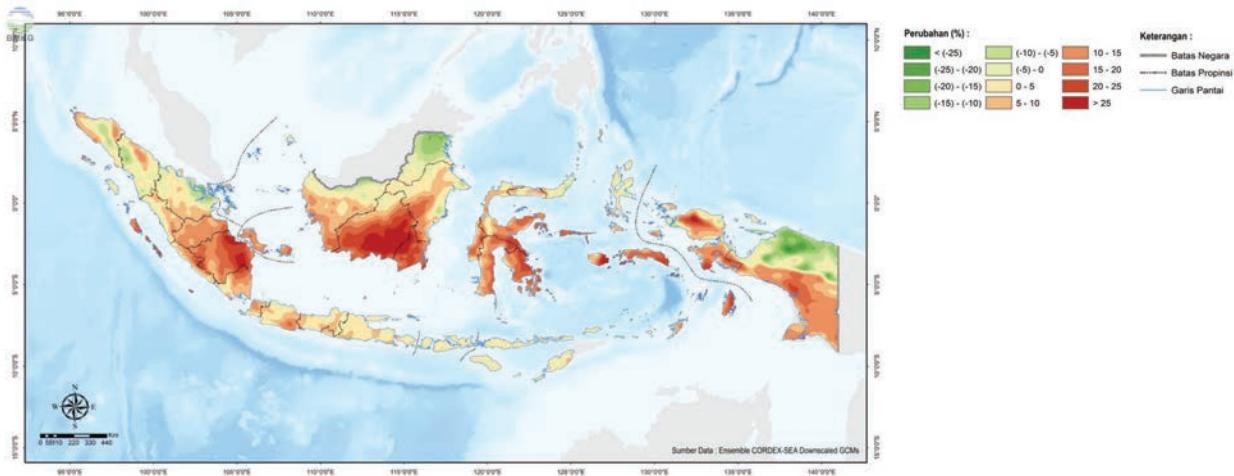
GAMBAR 2.4 PROYEKSI PERUBAHAN CURAH HUJAN MUSIMAN PERIODE 2020-2049 TERHADAP 1976-2005 SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER SKENARIO RCP4.5



Sumber: BMKG 2023

Proyeksi perubahan hari kering wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami kenaikan dalam rentang 0-5 persen, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

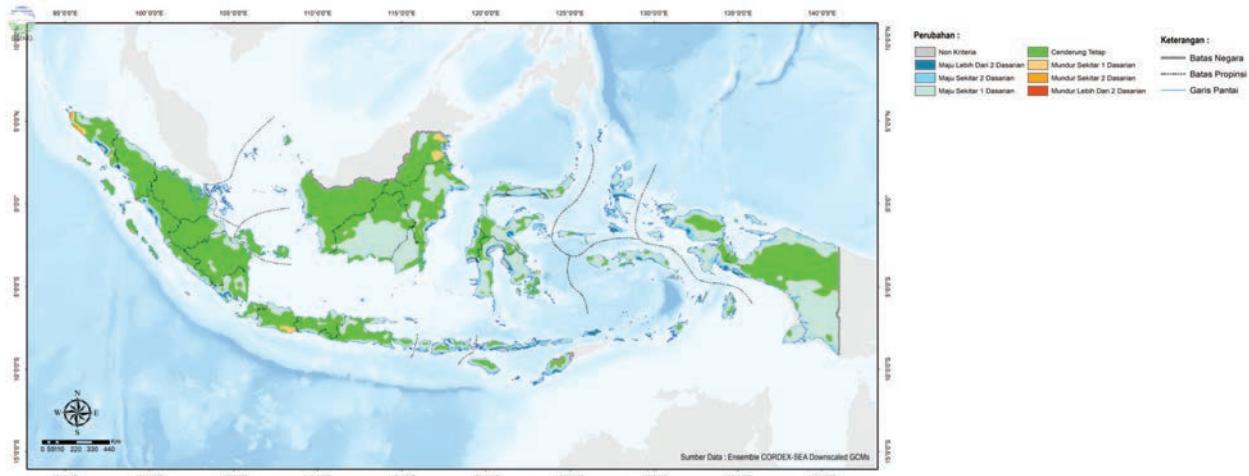
GAMBAR 2.5 PROYEKSI PERUBAHAN HARI KERING PERIODE 2020-2049 TERHADAP 1976-2005 SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER SKENARIO RCP4.5



Sumber: BMKG 2023

Proyeksi perubahan awal musim hujan wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami kemajuan dalam kategori rentang maju lebih dari 2 dasarian sampai cenderung tetap, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

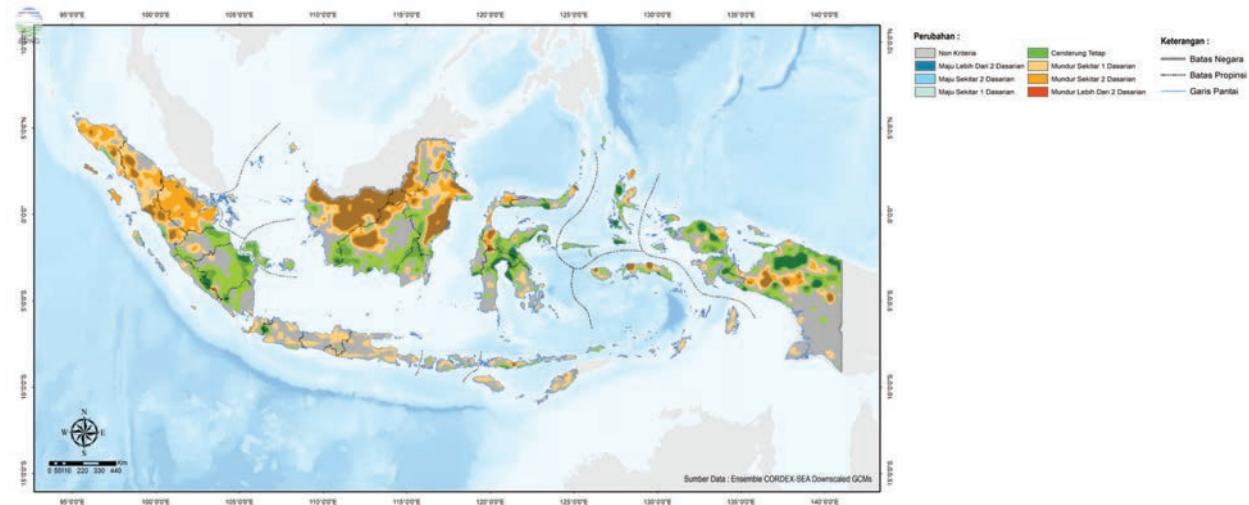
GAMBAR 2.6 PROYEKSI PERUBAHAN AWAL MUSIM HUJAN PERIODE 2020-2049 TERHADAP 1976-2005 SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER SKENARIO RCP4.5



Sumber: BMKG 2023

Proyeksi perubahan panjang musim hujan wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November cukup bervariasi, sebagian besar wilayah di Provinsi NTT mengalami pengurangan dalam kategori rentang berkangurang lebih dari 2 dasarian sampai cenderung tetap, dan sebagian kecil bertambah dalam rentang 1 sampai 2 dasarian, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.7 PROYEKSI PERUBAHAN PANJANG MUSIM HUJAN PERIODE 2020-2049 TERHADAP 1976-2005 SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER SKENARIO RCP4.5



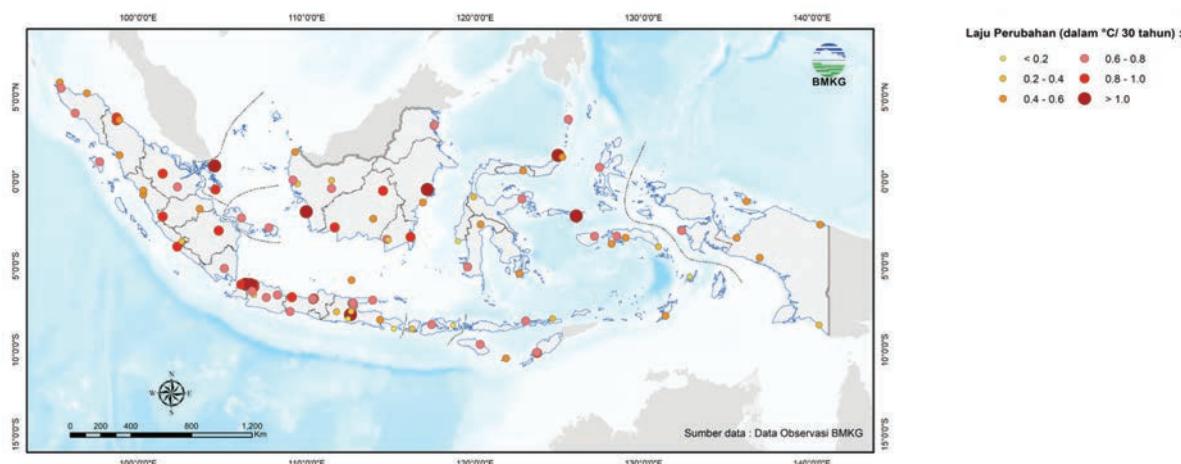
Sumber: BMKG 2023

2.1.1.5 Suhu Udara

Perubahan iklim juga identik dengan meningkatnya suhu udara yang berdampak pada perubahan musim dan peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrim. Peningkatan nilai suhu udara dapat terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) seperti CO_2 , CH_4 , N_2O , HFC, PFC, dan SF_6 di atmosfer. Selain dari alam, emisi GRK dapat bersumber dari buatan manusia seperti sektor industri dan energi serta akibat dari adanya migrasi penduduk sehingga terjadi peningkatan konsentrasi jumlah penduduk pada suatu wilayah yang turut memberikan kontribusi salah satunya dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Peningkatan suhu udara permukaan memberikan respon baik buruk yang cukup signifikan terhadap kondisi alam dan pola hidup manusia. Berdasarkan analisis BMKG terkait laju perubahan suhu rata-rata tahunan periode 1981 sampai dengan 2022 untuk wilayah Provinsi NTT pada umumnya meningkat. Wilayah Timor, Flores dan Sumba berada dalam rentang 0,6-0,8°C/ 30 Tahun, wilayah Sabu Raijua berada dalam rentang 0,4-0,6°C/ 30 Tahun. Sedangkan untuk wilayah Alor berada dalam rentang 0,2-0,4°C/ 30 Tahun. Rincian selengkapnya terkait lanjut perubahan suhu rata-rata Tahunan Periode 1981-2022, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.8 LAJU PERUBAHAN SUHU RATA-RATA TAHUNAN PERIODE 1981-2022



Sumber: BMKG 2023

2.1.1.6 Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Provinsi NTT terbagi menjadi 21 tipe tutupan lahan, yaitu Badan Air, Bandara/Pelabuhan, Awan, Belukar, Belukar Rawa, Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Tanaman, Permukiman, Perkebunan, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur, Rawa, Savanna/Padang Rumput, Sawah, Tambak dan

Tutupan lahan dominan yang menempati posisi pertama di Provinsi NTT adalah hutan lahan kering sekunder yaitu seluas 1.603.390,22 ha (34,67 Persen), kemudian semak/belukar seluas 1.219.989,79 ha (26,38 Persen) serta savanna/padang rumput seluas 820.995,28 ha (17,75 Persen). Sedangkan tutupan lahan paling sempit adalah hutan rawa primer seluas 89,85 ha (0,002 Persen).

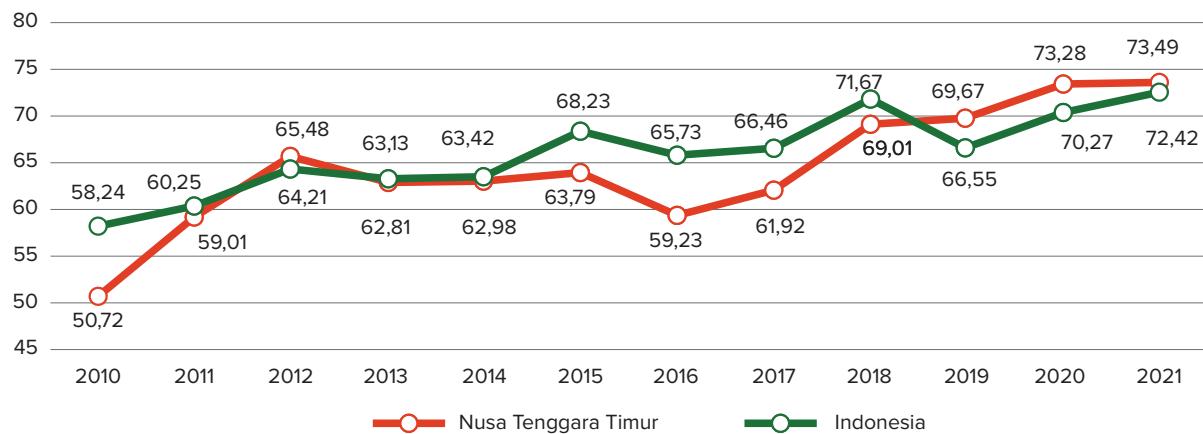
TABEL 2.2 KOMPONEN TUTUPAN LAHAN PROVINSI NTT

No.	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persen
1.	Awan	96,21	0,00
2.	Badan Air	3.147,92	0,07
3.	Bandara/ Pelabuhan	588,21	0,01
4.	Belukar	1.219.989,79	26,38
5.	Belukar Rawa	8.126,63	0,18
6.	Hutan Lahan Kering Primer	268.180,46	5,80
7.	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.603.390,22	34,67
8.	Hutan Mangrove Primer	14.601,43	0,32
9.	Hutan Mangrove Sekunder	7.857,17	0,17
10.	Hutan Rawa Primer	89,85	0,00
11.	Hutan Rawa Sekunder	698,18	0,02
12.	Hutan Tanaman	18.984,08	0,41
13.	Permukiman	31.581,84	0,68
14.	Perkebunan	2.462,11	0,05
15.	Pertanian Lahan Kering	192.482,82	4,16
16.	Pertanian Lahan Kering Campur	319.967,72	6,92
17.	Rawa	5.817,40	0,13
18.	Savanna/ Padang rumput	820.955,28	17,75
19.	Sawah	52.052,66	1,13
20.	Tambak	1.036,12	0,02
21.	Tanah Terbuka	52.505,44	1,14
Total		4.624.611,54	100,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi NTT Tahun 2019

2.1.1.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan komposisi dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH Provinsi NTT dalam kurun waktu sejak 2010 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2010 nilai IKLH Provinsi NTT senilai 50,72 yang naik menjadi 73,49 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

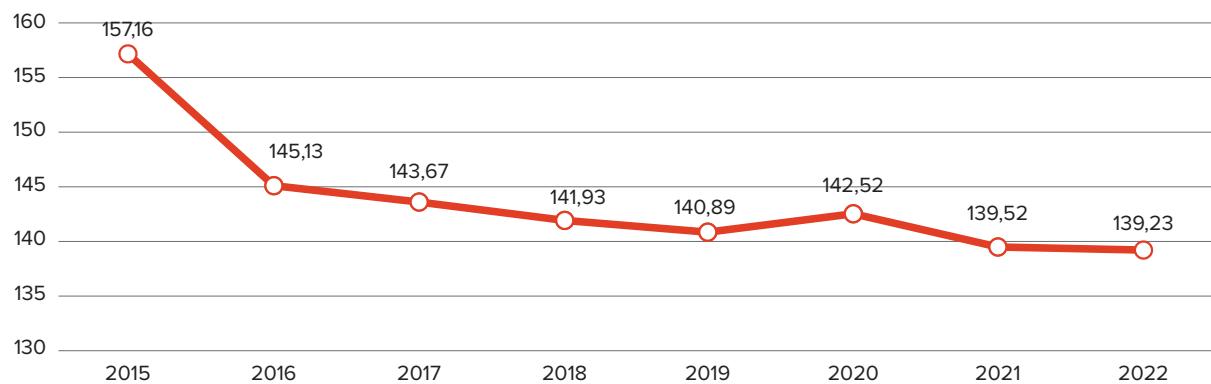
GAMBAR 2.9 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) PROVINSI NTT 2010-2022

Sumber: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, KLHK RI

2.1.1.8 Indeks Resiko Bencana

Wilayah Provinsi NTT dilewati oleh patahan sesar *Flores Back Arc Thrust*, sesar *Bondowatu Fault*, sesar *Sumba Strike-slip Fault*, sesar *Sumba Ridge Thrust*, sesar *Savu Thrust*, sesar *Semau Fault* dan sesar *Sape Strike-slip Fault* (PusGen, 2017). Dalam perspektif klimatologi, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari s.d Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah (BPS NTT 2022). Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terlah terjadi 576 kejadian bencana di NTT. bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung, diikuti oleh banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Sejak Tahun 2015 nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi NTT memiliki indeks risiko senilai 157,16 dengan kategori tinggi kemudian turun menjadi 139,23 pada Tahun 2022 dengan kategori sedang. Ancaman Bencana pada wilayah ini meliputi: Gempa Bumi, Tsunami, Gunung Api, Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Gelombang Ekstrim/ Abrasi, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Cuaca Ekstrim. Rincian perkembangan nilai Indeks Resiko Bencana Provinsi NTT Tahun 2015-2022 selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.10 INDEKS RESIKO BENCANA PROVINSI NTT 2015-2022

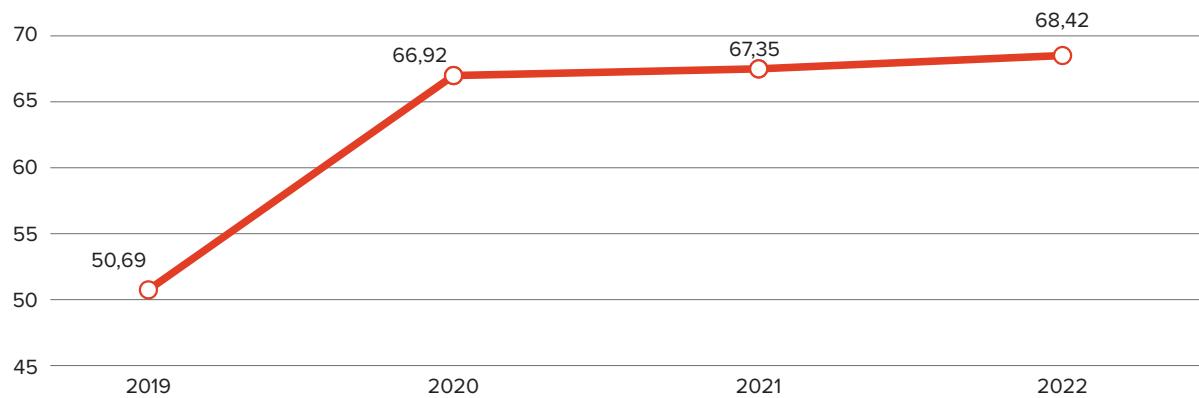
Sumber: Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI 2022, BNPB

2.1.1.9 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi NTT cenderung naik. Pada tahun 2019, nilai IKP Provinsi NTT senilai 50,69 dan naik menjadi 68,42 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.11 INDEKS KETAHANAN PANGAN (IKP) PROVINSI NTT 2019-2022



Sumber: Indeks Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional

2.1.1.10 Ketahanan Energi

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTT Tahun 2019-2050, menggambarkan aspek penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan konservasi energi daerah yang disesuaikan dengan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki. Secara garis besar pemodelan dalam RUED Provinsi NTT menunjukkan target bauran energi primer tahun 2025 adalah 24 Persen kontribusi dari energi baru dan terbarukan (EBT), 12 persen dipasok dari batu bara dan 10 persen pasokan dari gas bumi dan sisanya sebesar 54 persen masih dipasok dari minyak bumi. Sedangkan pada tahun 2050 diharapkan sebesar 39 persen kontribusi dari EBT, 16 persen dipasok dari batu bara dan 14 persen pasokan dari Gas Bumi dan sisanya sebesar 31 persen masih tetap membutuhkan minyak bumi sebagai pemasok energi primer.

TABEL 2.3 HASIL PEMODELAN KEBUTUHAN ENERGI FINAL PER SEKTOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2050 (MILLION TONNES OF OIL EQUIVALENT/ MTOE)

No.	Sektor	2025	2035	2050
1.	Rumah Tangga	0,32	5,56	9,78
2.	Komersial	0,46	0,97	2,72
3.	Transportasi	6,71	10,13	17,29
4.	Industri	3,32	0,63	1,52
5.	Sektor Lainnya	0,22	0,37	0,72
Total		11,03	17,66	32,03

Sumber: Pedoman Umum Rencana Umum Energi Daerah NTT 2019-2050

Secara kuantitas nilai absolut dari total pasokan energi primer tahun 2025 untuk provinsi NTT diperkirakan sebesar 2,6 MTOE (juta ton setara minyak) dimana dapat menghasilkan pembangkit listrik sebesar 1 GW dengan porsi EBT sekitar 0,54 GW. Sedangkan untuk tahun 2050 diperkirakan sebesar 8,3 MTOE dimana dapat menghasilkan pembangkit sebesar 4,24 GW dengan porsi EBT sekitar 2,24 GW.

TABEL 2.4 HASIL PEMODELAN KEBUTUHAN ENERGI FINAL PER JENIS UNTUK SELURUH SEKTOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2050 (MILLION TONNES OF OIL EQUIVALENT/ MTOE)

No.	Sektor	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1.	Listrik	597	1.431	2.342	3.391	4.738	6.389	8.405	10.750
2.	Gas Bumi	39	254	611	853	1.164	1.154	2.038	2.622
3.	Premium	1.990	1.789	798	883	938	960	950	907
4.	Avtur	311	417	295	336	354	327	223	-
5.	Minyak Tanah	83	2	1	1	-	-	-	-
6.	Minyak Solar	1.558	1.241	685	18	13	9	4	-
7.	Minyak Bakar	8	6	6	6	4	4	4	4
8.	LPG	539	1.029	1.114	1.171	1.219	1.259	1.289	1.214
9.	Batu Bara	99	126	171	242	336	462	620	822
10.	Avgas	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4
11.	Bio Solar	274	976	2.001	3.300	4.036	4.888	5.861	6.960
12.	Bio Premium	-	929	2.347	2.815	3.247	3.660	4.065	4.473
13.	Minyal Diesel	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	Biomasa Komersial	26	35	49	70	98	134	186	249
15.	Bioavtur	-	-	295	504	826	1.307	2.007	3.001
16.	EBT Lainnya	-	28	217	307	403	505	610	724
Total		5.525	8.235	10.715	13.590	16.973	20.553	26.262	31.726

Sumber: Pedoman Umum Rencana Umum Energi Daerah NTT 2019-2050

Dalam RUED Provinsi NTT hasil pemodelan untuk konservasi energi pada sisi kebutuhan tahun 2025 sebesar 7,06 persen dan sebesar 25 persen pada tahun 2050. Sedangkan elastisitas energi tahun 2025 dan tahun 2050 sebesar 0,74 dan 0,65 yakin sejalan dengan tren nasional dalam RUEN yang berjalan flat ditahun 2025 sampai dengan 2050.

Gambaran kelistrikan di Provinsi NTT meliputi kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik, daya mampu pembangkit listrik, serta jaringan transmisi periode 2011 sampai dengan 2021 guna mencapai rasio elektrifikasi serta desa berlistrik 100% dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.5 GAMBARAN INDIKATOR KELISTRIKAN DI NTT 2011-2021

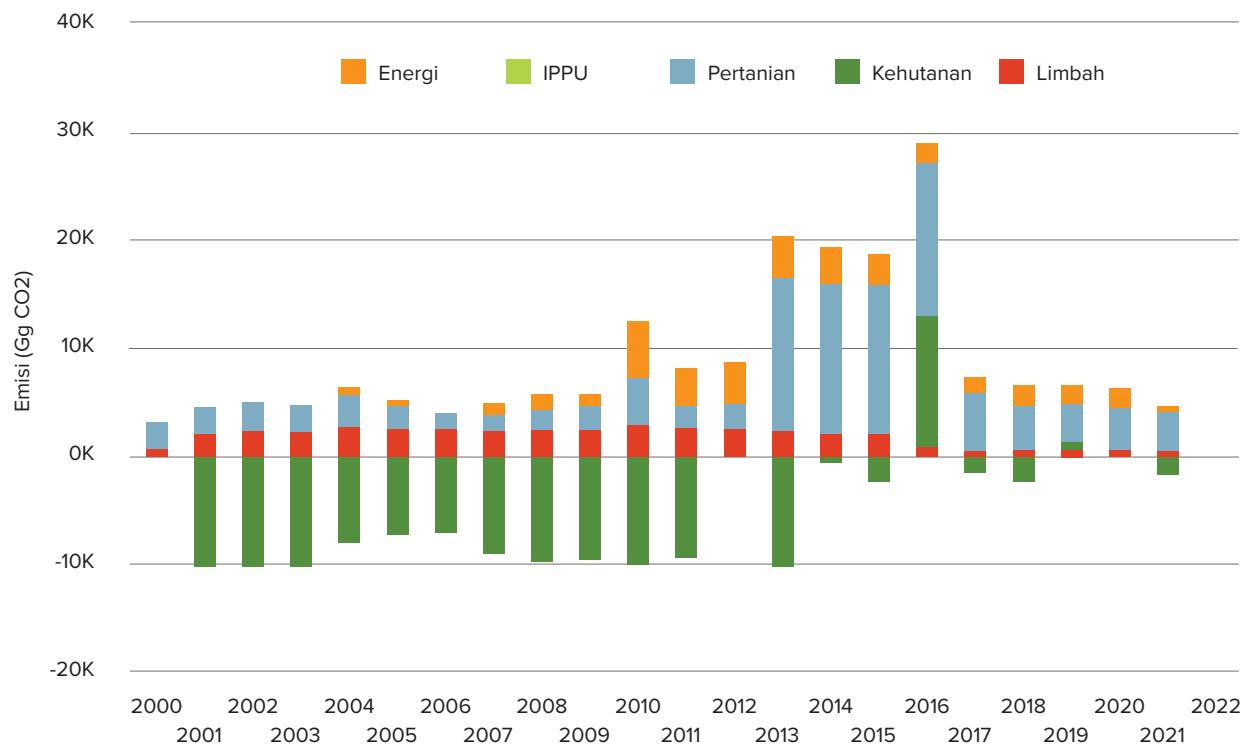
No.	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Nasional (MW)	n.a.	n.a.	413,54	467,77	519,05	534,39
2.	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik PLN (MW)	216,79	276,79	374,85	424,54	475,82	488,55
3.	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik Non PLN (MW)	8,77	39,77	38,69	43,22	43,22	45,85
4.	Daya Mampu Pembangkit Tenaga Listrik Nasional (MW)	n.a.	n.a.	328,07	328,07	433,58	448,02
5.	Daya Mampu Pembangkit Listrik PLN (MW)	79,06	92,74	289,88	339,57	390,85	403,58
6.	Daya Mampu Pembangkit Listrik Non PLN (MW)	n.a.	n.a.	38,19	42,72	42,72	45,35
7.	Jumlah Pembangkit Tenaga Listrik PLN (Unit)	447	441	437	437	474	493
8.	Jumlah Transmisi PLN (Kms)	256,2	624,87	776,06	1164,76	1335,06	1589,91
9.	Jumlah Transmisi PLN Gardu Induk (MVA)	270	195	405	565	565	745
10.	Rasio Elektrifikasi (%)	58,93	59,85	61,9	85,84	87,62	89,91
11.	Rasio Desa Berlistrik (%)	99,45	99,48	99,82	99,85	100	100

Sumber: Statistik Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM

2.2.1.11 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perencanaan pembangunan rendah karbon merupakan transformasi strategi dari penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Capaian total penurunan emisi GRK Provinsi NTT sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2021 mengalami penurunan. Total emisi GRK Provinsi NTT pada Tahun 2000 sejumlah 1.297.758,66 Gg CO₂ yang turun menjadi 805.301,73 Gg CO₂ pada Tahun 2021. Rincian perkembangan emisi GRK Provinsi NTT Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.12 EMISI DARI SEKTOR ENERGI, IPPU, PERTANIAN, KEHUTANAN DAN LIMBAH PROVINSI NTT TAHUN 2000-2021



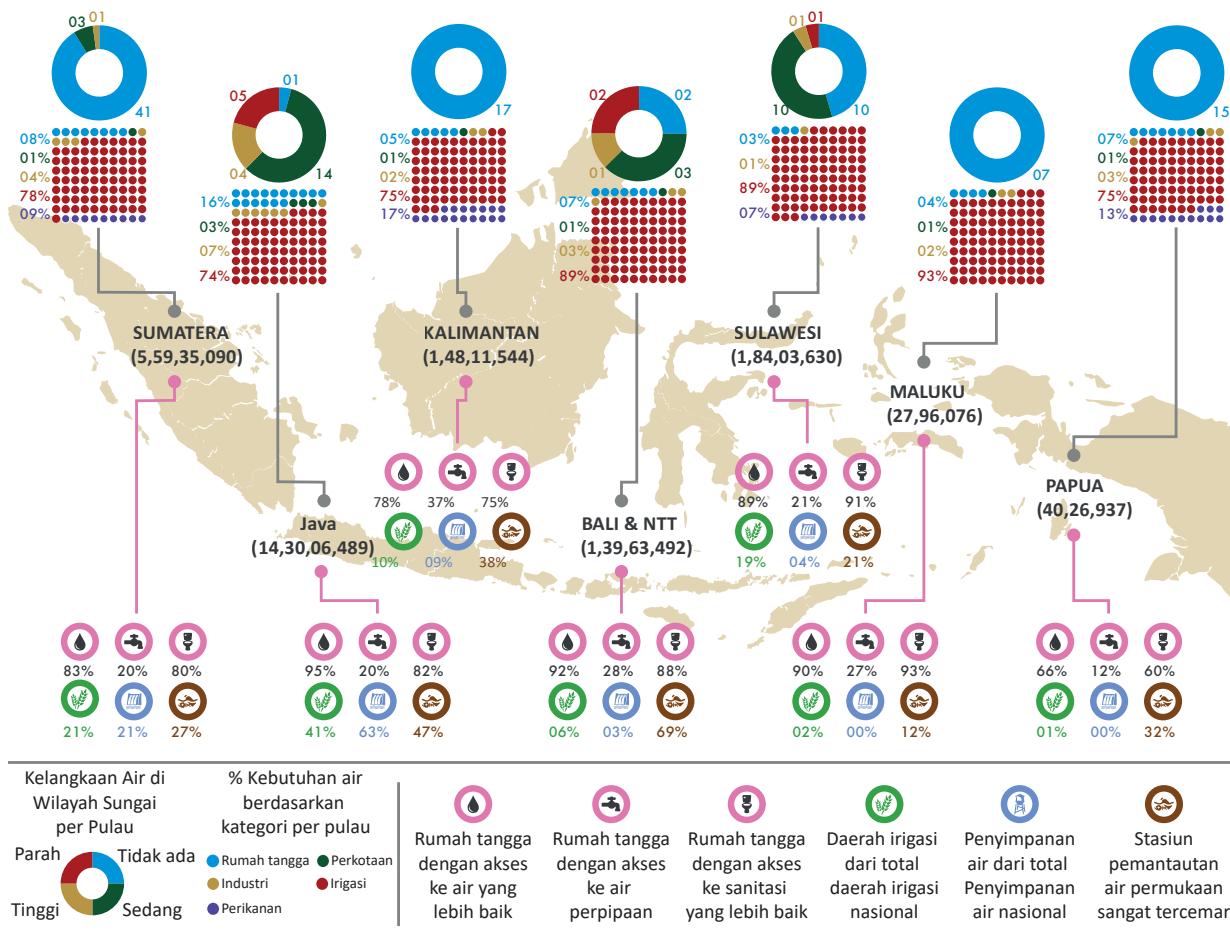
Sumber: KLHK, 2023

2.1.1.12 Ketahanan Air

Berdasarkan studi oleh World Bank dan Bappenas yang dilakukan pada Tahun 2021, gambaran Status Kelangkaan air di wilayah sungai untuk region Bali dan NTT pada Tahun 2022 yaitu 89 persen kategori parah, 0,3 persen kategori tinggi, 0,1 kategori Sedang dan 0,7 persen tidak memiliki kelangkaan air di wilayah sungai. Sedangkan untuk status pemanfaatan region bali dan NTT terdapat 92 persen rumah tangga dengan akses ke air yang lebih baik, 28 persen rumah tangga dengan akses ke air perpipaan, 88 persen rumah tangga dengan akses ke sanitasi yang lebih baik, 0,6 persen daerah irigasi dari total daerah irigasi nasional, 0,3 persen memiliki penyimpanan air dari total penyimpanan air nasional serta terdapat 12 persen memiliki Stasiun pemantauan air permukaan sangat tercemar.

Meskipun sumber daya air pada umumnya melimpah di Indonesia, namun penyebarannya tidak merata. Kini, setengah dari total PDB dihasilkan dari wilayah sungai yang mengalami kelangkaan air ‘tinggi’ atau ‘parah’ di musim kemarau. Jika tidak ada perubahan, diperkirakan dua pertiga (67 persen) dari PDB akan dihasilkan dari wilayah sungai yang mengalami kelangkaan air yang sangat tinggi atau sangat parah pada tahun 2045.

GAMBAR 2.13 GAMBARAN UMUM TANTANGAN TERKAIT AIR DI SELURUH WILAYAH INDONESIA TAHUN 2022



Sumber: Visi Indonesia 2045 Menuju Ketahanan Air, 2022

Lebih dari separuh sungai di Indonesia mengalami pencemaran yang cukup parah, dan dua sistem sungai utama di Indonesia termasuk dalam sungai yang paling tercemar di dunia. Berdasarkan pengujian air, sekitar 85 persen populasi terpapar polusi tinja koliform di sumber air. Lebih dari 70 persen PDB dihasilkan di wilayah sungai dengan sebagian besar sampel airnya dikategorikan sebagai ‘tercemar parah’.

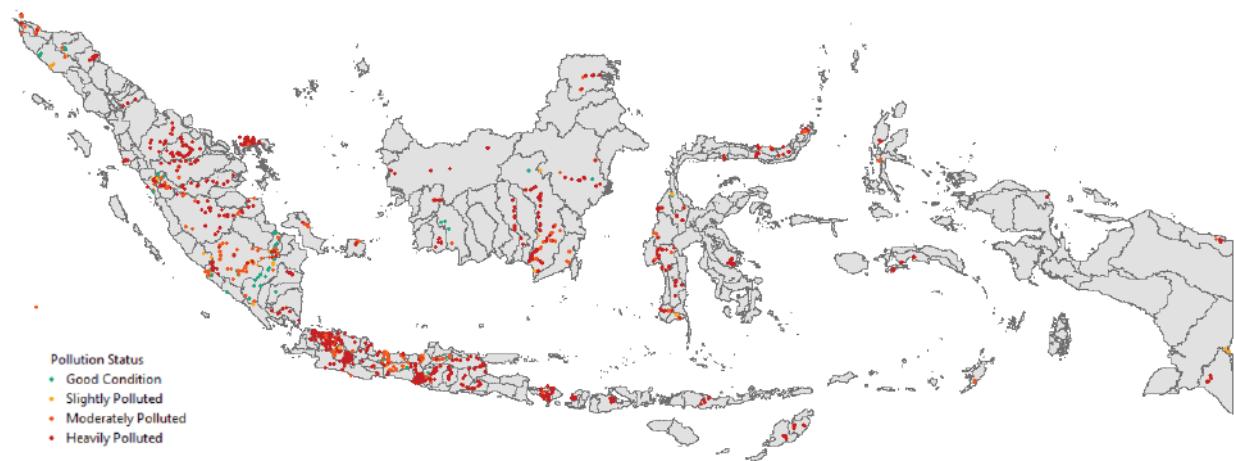
Kualitas air tanah memburuk, dengan lebih dari empat perlima (93 persen) sampel air tanah melebihi ambang batas polutan. Sekitar 70 persen pencemaran air tanah di Indonesia berasal dari tangki kakus yang bocor dan limbah yang sengaja dibuang ke saluran air. Sungai menyumbang lebih dari 80 persen plastik yang mengalir ke lingkungan laut dari sumber berbasis darat di Indonesia.

GAMBAR 2.14 KELANGKAAN AIR PADA MUSIM KEMARAU DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN WILAYAH SUNGAI MENYUMBANG 60 PERSEN DARI PDB TAHUN 2045



Sumber: Visi Indonesia 2045 Menuju Ketahanan Air, 2022

GAMBAR 2.15 STATUS PENCEMARAN AIR PERMUKAAN DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Visi Indonesia 2045 Menuju Ketahanan Air, 2022

Tujuan pembangunan bendungan ada dua yaitu *single purpose dam* dan *multi purpose dam*. *Single purpose dam* merupakan bendungan yang dibangun dengan tujuan khusus, misal hanya sebagai penyedia air irigasi atau pengendali banjir. *Multi purpose dam* dibangun dengan manfaat beragam seperti penyedia air irigasi, air baku atau air minum, sebagai pembangkit listrik, dan tempat wisata disaat yang bersamaan. Provinsi NTT memiliki 18 bendungan beroperasi yang telah dibangun sejak Tahun 1981 sampai dengan 2016 dan 3 bendungan pada tahun 2023 masih dalam tahap konstruksi yaitu bendungan Mbay, Manikin dan Temef. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.6 JUMLAH BENDUNGAN DI PROVINSI NTT 1981-2023

No.	Nama Bendungan	Lokasi	Tahun Pembangunan	Kondisi Bangunan	Volume Tampung Total (m ³)
1.	Danau Tua	Rote Ndao	1981	Beroperasi	1.740.133
2.	Lokojange	Sumba Tengah	1995	Beroperasi	54.249.846
3.	Rakawatu	Sumba Timur	1995	Tidak Beroperasi	n.a.
4.	Kapalangga	Rote Ndao	1987	Beroperasi	670.128.000
5.	Lere	Sabu Raijua	1994	Tidak Beroperasi	n.a.
6.	Manubulu	Rote Ndao	1994	Beroperasi	790.365
7.	Tilong	Kab. Kupang	1998	Beroperasi	190.700
8.	Benkoko	Kab. Kupang	1994	Beroperasi	29.137.395
9.	Haekrit	Belu	2008	Beroperasi	5.389.217
10.	Waerita	Sikka	1994	Beroperasi	n.a.
11.	Haliwen	Belu	2003	Beroperasi	n.a.
12.	Karinga	Sumba Timur	1993	Beroperasi	449.354
13.	Matasio	Rote Ndao	1996	Beroperasi	n.a.
14.	Padang Panjang	Alor	1996	Beroperasi	n.a.
15.	Oeltua	Kab. Kupang	1996	Beroperasi	225.241
16.	Raknamo	Kab. Kupang	2015	Beroperasi	18.774.100
17.	Rotiklot	Belu	2015	Beroperasi	2.900.000
18.	Napun Gete	Sikka	2016	Beroperasi	n.a.
19.	Mbay	Nagekeo	2023	Tahap Konstruksi	n.a.
20.	Manikin	Kab. Kupang	2023	Tahap Konstruksi	n.a.
21.	Temef	TTS	2023	Tahap Konstruksi	n.a.

Sumber: <https://sigi.pu.go.id/>, Kementerian PUPR 2023

Neraca air adalah keseimbangan antara kebutuhan air dan jumlah air yang tersedia. Dengan memahami neraca air pada suatu wilayah sungai, maka dapat diidentifikasi seberapa kritis kondisi kekurangan air yang dapat terjadi atau seberapa rawan terhadap ancaman kekeringan pada wilayah sungai yang bersangkutan. Berikut ini adalah neraca air pada 15 sungai yang berada pada wilayah Provinsi NTT dimana berdasarkan hasil analisis, terdapat 2 sungai dengan kategori Tidak Kritis, 6 Sungai dengan kategori Kritis ringan, 5 Sungai dengan kategori kritis Sedang dan 2 sungai dengan kategori kritis berat.

TABEL 2.7 NERACA AIR PADA WILAYAH SUNGAI DI PROVINSI NTT TAHUN 2016

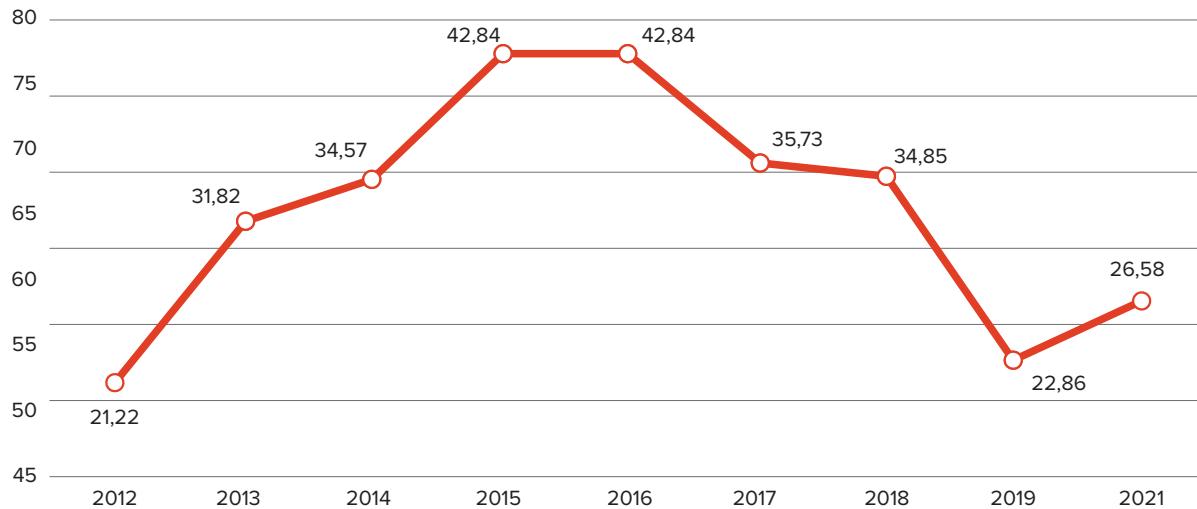
No	Nama Neraca Air	Ketersediaan Air Total (m ³ /det)	Kebutuhan Air Total (m ³ /det)	Neraca Air Permukaan (Surplus, Defisit)	Indeks Pemakaian Air (%)	Klasifikasi Indeks Pemakaian Air (%)
1.	WD Golo Ketak Nangalili	30,4	30,57	-0,17	100,55	Kritis Berat
2.	WD Pocong Sangan Kalo	67,51	31,09	36,43	46,05	Kritis Ringan
3.	WD Sumba Barat	43,38	18,41	24,97	42,45	Kritis Ringan
4.	WD Sumba Timur	57,12	29,3	27,82	51,29	Kritis Sedang
5.	WD Aesesha	41,53	26,16	15,37	63,00	Kritis Sedang

No	Nama Neraca Air	Ketersediaan Air Total (m ³ /det)	Kebutuhan Air Total (m ³ /det)	Neraca Air Permukaan (Surplus, Defisit)	Indeks Pemakaian Air (%)	Klasifikasi Indeks Pemakaian Air (%)
6.	WD Alor	19	5	14	26,33	Kritis Ringan
7.	WD Flotim	6,96	1,69	5,27	24,32	Tidak Kritis
8.	WD Lembata	10,04	3,15	6,89	31,39	Kritis Ringan
9.	WD Nebe Waiwajo	24,22	10	14,22	41,29	Kritis Ringan
10	WD Rotendao	3,87	3,14	0,73	81,18	Kritis Sedang
11.	WD Sabu Raijua	5,7	1,08	4,63	18,89	Tidak Kritis
12.	WD Bima	12,35	29,84	-17,5	241,72	Kritis Berat
13.	WD Benanain A	16,53	6,51	10,02	39,38	Kritis Ringan
14.	WD Benanain B	40,08	16,46	23,62	41,08	Kritis Ringan
15.	WD Kupang	71,76	28,21	43,56	39,31	Kritis Ringan

Sumber: <https://sigi.pu.go.id/>, Kementerian PUPR 2023

Penyelenggaran Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha. Di Provinsi NTT penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh BUMD Air Minum dengan cakupan layanan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2021 cenderung berfluktuatif. Pada Tahun 2012, cakupan layanan BUMD Air Minum di Provinsi NTT mencapai 21,32 persen yang meningkat menjadi 42,84 persen pada Tahun 2015 dan 2016 dan turun menjadi 26,68 persen pada Tahun 2021.

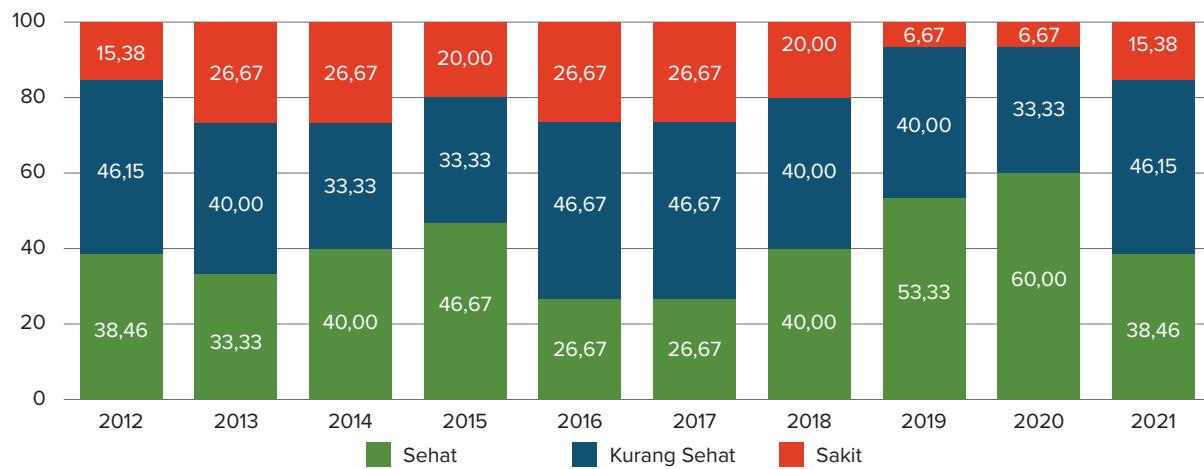
GAMBAR 2.16 PERSENTASE PENDUDUK YANG TERLAYANI BUMD AIR MINUM PROVINSI NTT TAHUN 2012-2021



Sumber: Kinerja BUMD Air Minum, Kementerian PUPR

Demikian juga dengan hasil penilaian atas kinerja BUMD Air minum Provinsi NTT yang dilakukan secara rutin oleh Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR diperoleh informasi bahwa pada Tahun 2021 terdapat 38,46 persen BUMD dengan kategori sehat, 46,15 persen BUMD Penyedia Air Minum dengan kategori kinerja kurang sehat serta sebanyak 15,38 persen BUMD Air Minum dengan kategori sakit. Rincian selengkapnya tentang Kinerja BUMD Air Minum di Provinsi NTT selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.17 KINERJA BUMD AIR MINUM PROVINSI NTT TAHUN 2012-2021



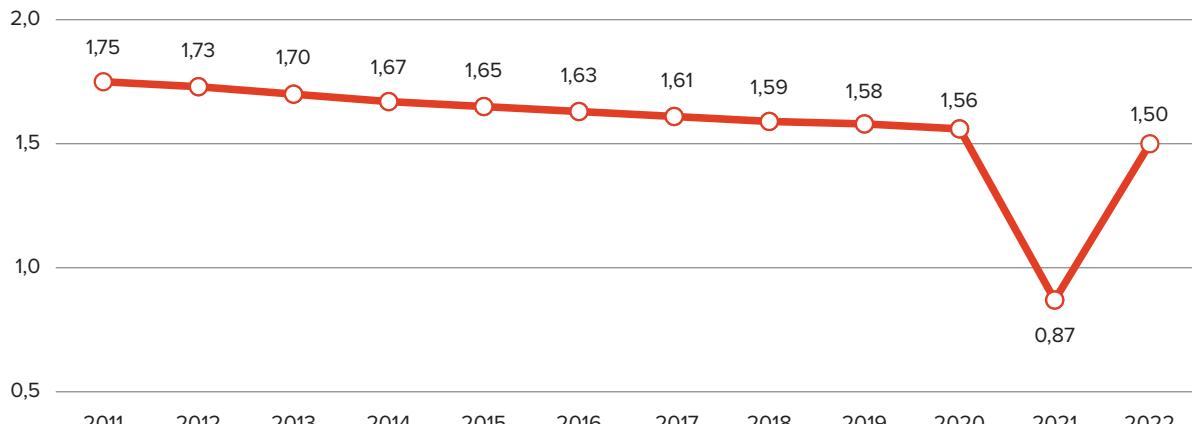
Sumber: Kinerja BUMD Air Minum, Kementerian PUPR

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi Laju pertumbuhan penduduk NTT Tahun sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2022 cenderung menurun. Pada Tahun 2011 diproyeksikan laju pertumbuhan penduduk NTT sebesar 1,75% yang terus menurun hingga Tahun 2022 sebesar 1,50%. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.18 PROYEKSI LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011-2022 (%)

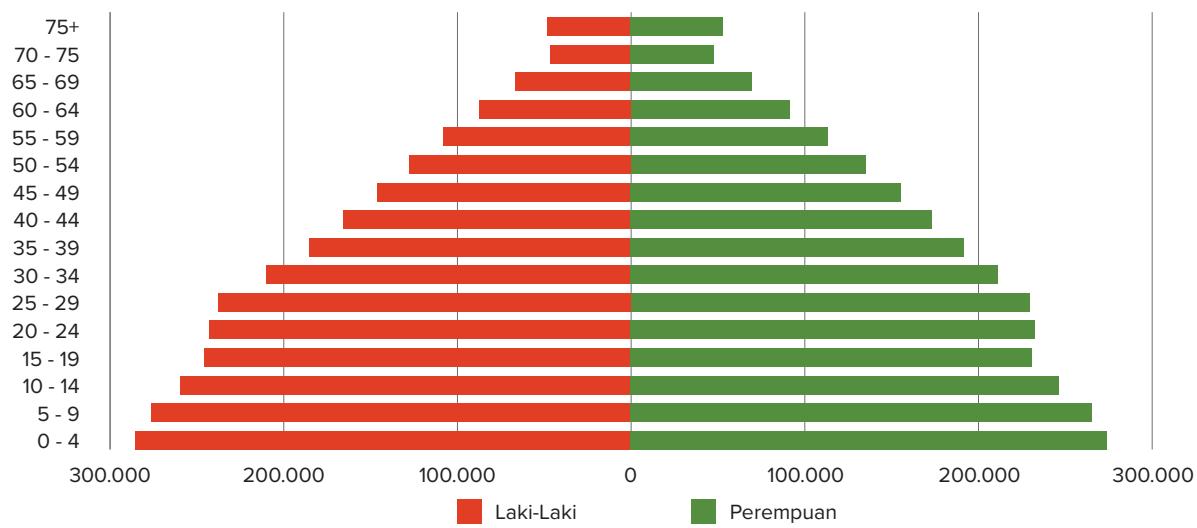


Sumber: BPS NTT Tahun 2023

2.1.2.2 Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Provinsi NTT Tahun 2022 berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk dengan rentang usia 0-4 tahun diikuti oleh 5-9 tahun dan terus berkurang sampai kategori usia 75 tahun keatas. Sedangkan untuk komposisi penduduk Provinsi NTT Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh penduduk jenis kelamin perempuan.

GAMBAR 2.19 KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN PROVINSI NTT TAHUN 2022

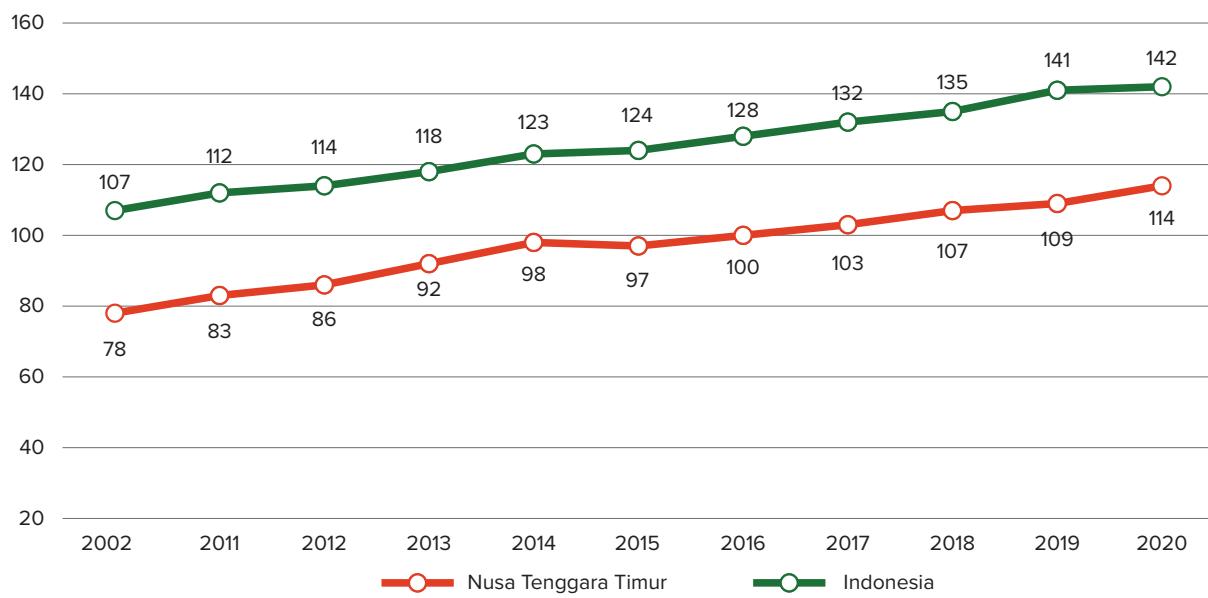


Sumber: BPS NTT 2023

2.1.2.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Provinsi NTT dalam kurun waktu 20 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada Tahun 2002 kepadatan penduduk Provinsi NTT senilai 78 jiwa/km² yang mengalami peningkatan sampai Tahun 2010 menjadi 98 jiwa/km² dan terus meningkat hingga Tahun 2022 senilai 114 jiwa/km². Kepadatan Provinsi NTT sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2022 masih berada di bawah kepadatan penduduk secara nasional.

GAMBAR 2.20 KEPADATAN PENDUDUK PROVINSI NTT TAHUN 2002-2022



Sumber: BPS NTT 2023

2.1.2.4 Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang dalam bentuknya sebagai persekutuan hukum, terikat dalam kesatuan nilai dan hidup bersama pada wilayah geografis tertentu, memiliki ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, serta memiliki pranata adat dan pemerintahan adat sedangkan wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dengan batas-batas tertentu yang secara turun temurun dan berkelanjutan dikuasai, dihuni, dikelola dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya.

Di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Tahun 2023, terdapat 39 masyarakat hukum adat dengan status teregistrasi pada BRWA sejumlah 23 masyarakat hukum adat, status terverifikasi sejumlah 11 masyarakat hukum adat, serta dengan status terteverifikasi sejumlah 5 masyarakat hukum adat yang berada pada 7 kabupaten. Dari ke 39 masyarakat hukum adat tersebut, terdapat 31 masyarakat hukum adat yang telah memperoleh pengakuan, dan 8 lainnya belum memperoleh pengakuan. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.8. JUMLAH WILAYAH ADAT PADA BRWA DENGAN STATUS TEREGISTRASI, TERVERIFIKASI DAN TERSEFTIFIKASI BERDASARKAN KABUPATEN/ KOTA DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KONDISI SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status: Teregistrasi	Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status: Terverifikasi	Jumlah Wilayah Adat pada BRWA dengan status: Tersertifikasi	Status Pengakuan
1.	Alor	3	-	-	1
2.	Ende	1	5	-	6
3.	Flores Timur	1	-	-	-
4.	Manggarai	2	-	-	2
5.	Manggarai Barat	1	-	-	1
6.	Manggarai Timur	4	6	5	15
7.	Sikka	11	-	-	6
Total		23	11	5	31

Sumber: Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) 2023

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

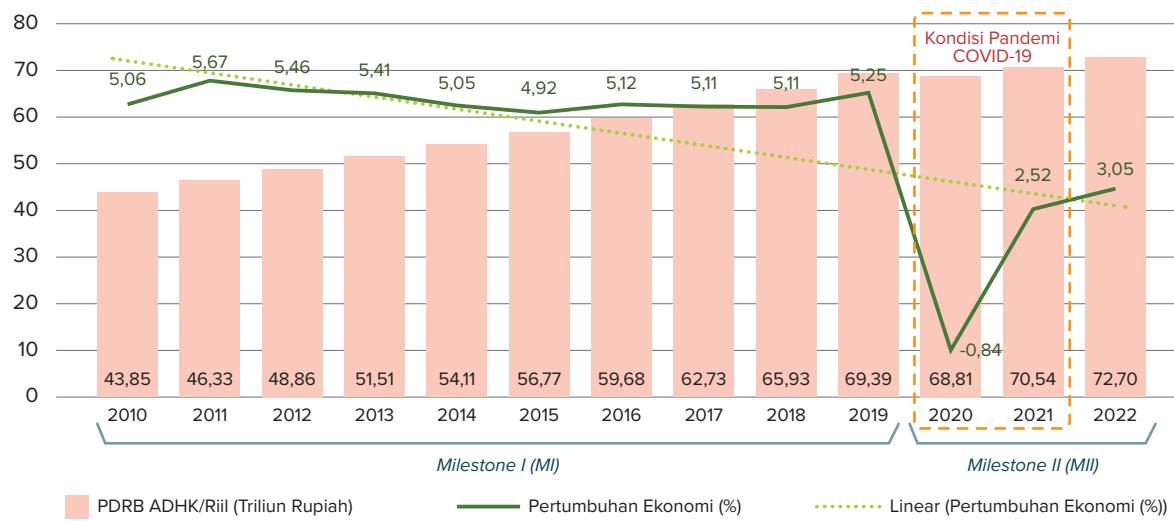
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Selama periode 2010-2022, pertumbuhan rata-rata ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 4,38 persen. Capaian pertumbuhan tertinggi sebesar 5,67 persen di Tahun 2011 dan terendah saat mengalami kontraksi sebesar -0,84 di Tahun 2020. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami penurunan sebesar 2,01 persen selama periode 2010-2022. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010 mencapai 5,06 persen dan kemudian melambat hingga mencapai 3,05 persen pada Tahun 2022.

Perlambatan ini dikontribusi oleh kondisi pandemi yang menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi mencapai -0,84 persen pada Tahun 2020. Dampak pandemi juga dapat diamati dari rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode MI (2012-2019) yang mencapai 5,22 persen, namun melambat pada periode MII (2020-2022) yang hanya mencapai 1,58 persen.

GAMBAR 2.21. PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NTT TAHUN 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

2.2.1.2 Ketimpangan

Gini rasio di Indonesia menggambarkan tentang kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kondisi ketimpangan pengeluaran masih berada dalam kategori moderat mendekati rendah (0,3-0,5) dan cenderung menurun. Kondisi ini dapat diamati dari garis trend linier yang terus melandai. Pada Tahun 2009, nilai gini rasio sebesar 0,357 kemudian menurun menjadi 0,354 pada Tahun 2020 dan 0,325 pada Tahun 2023.

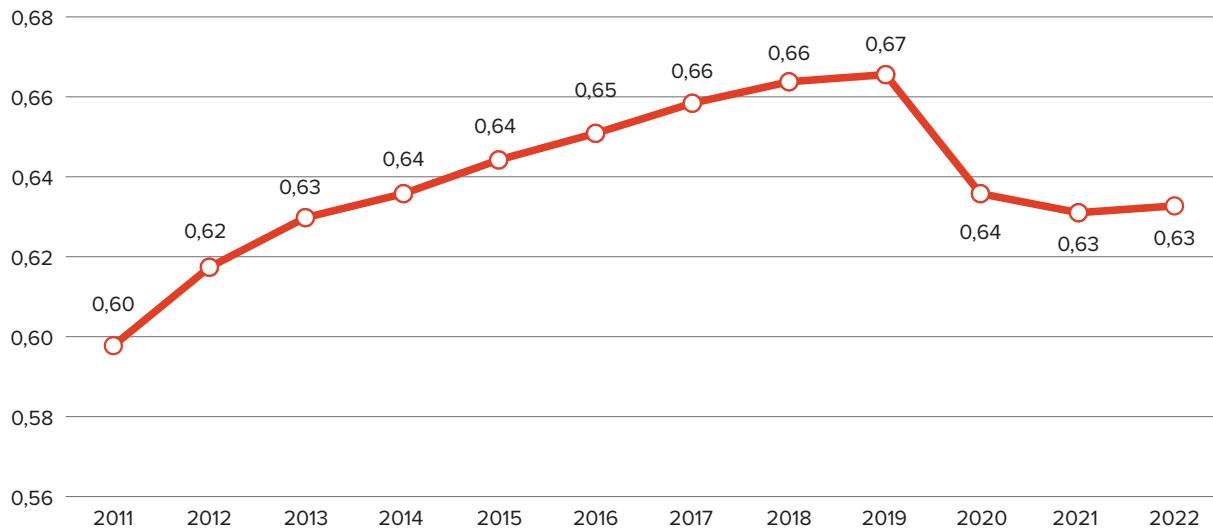
GAMBAR 2.22 GINI RATIO PROVINSI NTT TAHUN 2009-2022



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diukur dengan indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Perkembangan nilai indeks Williamson Provinsi NTT sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 cenderung meningkat dan pada periode 2019 sampai dengan 2022 mengalami Penurunan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.23 INDEKS WILLIAMSON PROVINSI NTT TAHUN 2009-2022

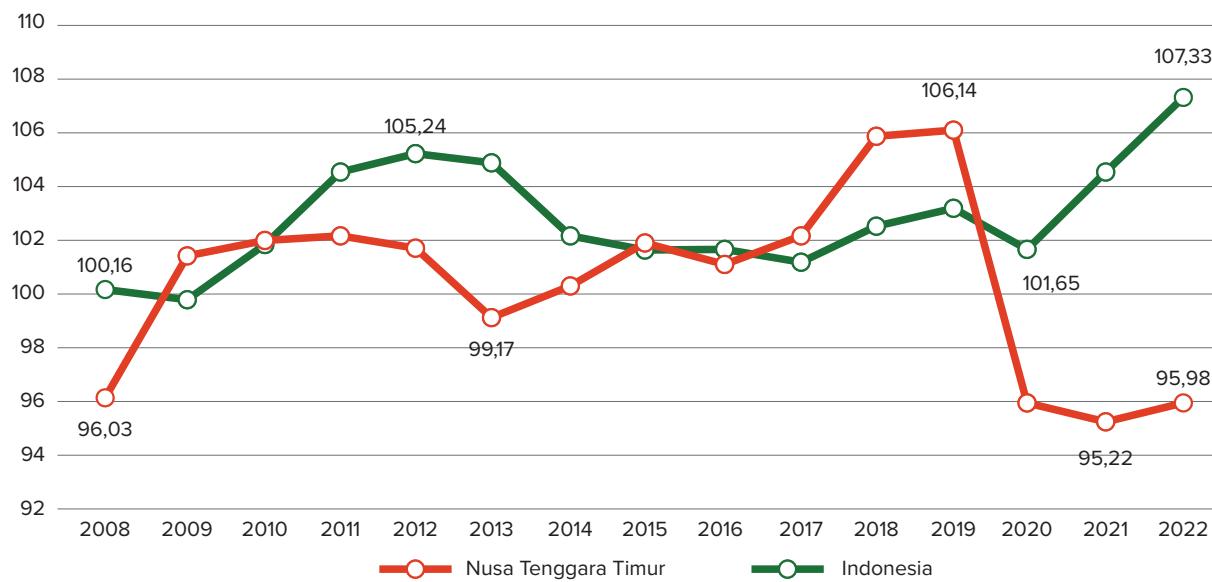


Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

2.2.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relative semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relative lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

NTP Provinsi NTT sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2022 cenderung bergerak secara fluktuasi. Pada Tahun 2008 nilai NTP Provinsi NTT senilai 96,03 yang naik pada 2019 menjadi 106,14 dan turun secara signifikan menjadi 95,98. Secara umum dapat disimpulkan bahwa apabila nilai NTP <100 maka indeks harga yang diterima oleh petani lebih kecil dari pada indeks harga yang dibayar oleh petani sehingga petani mengalami penurunan daya beli atau dengan kata lain terjadi penurunan tingkat kesejahteraan petani. Rincian perkembangan NTP Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.24 NILAI TUKAR PETANI PROVINSI NTT TAHUN 2008-2022

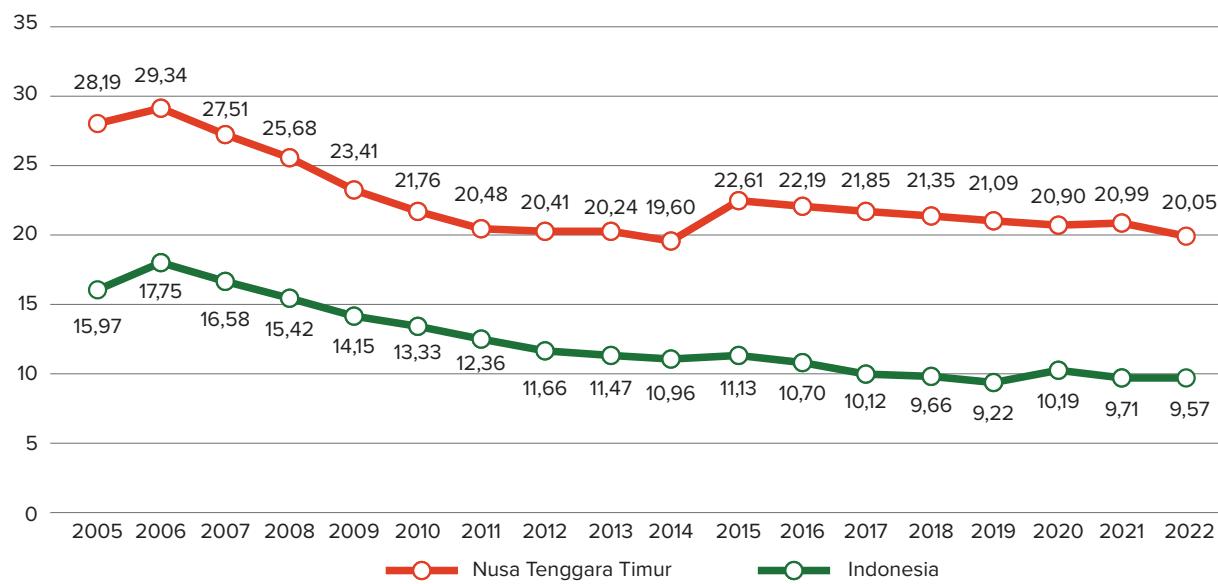
Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

2.2.1.4 Angka Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *hand book on poverty and inequality* yang diterbitkan oleh *world bank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Secara kumulatif, perkembangan penurunan persentase kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2023 yaitu sebesar 8,23% dari tahun *baseline* 2005 sebesar 28,19% menjadi 19,96% pada bulan Maret 2023 atau masih berada diatas capaian kumulatif penurunan kemiskinan nasional yaitu sebesar 6,61% pada periode yang sama. Rincian penurunan persentase kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional selengkapnya, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

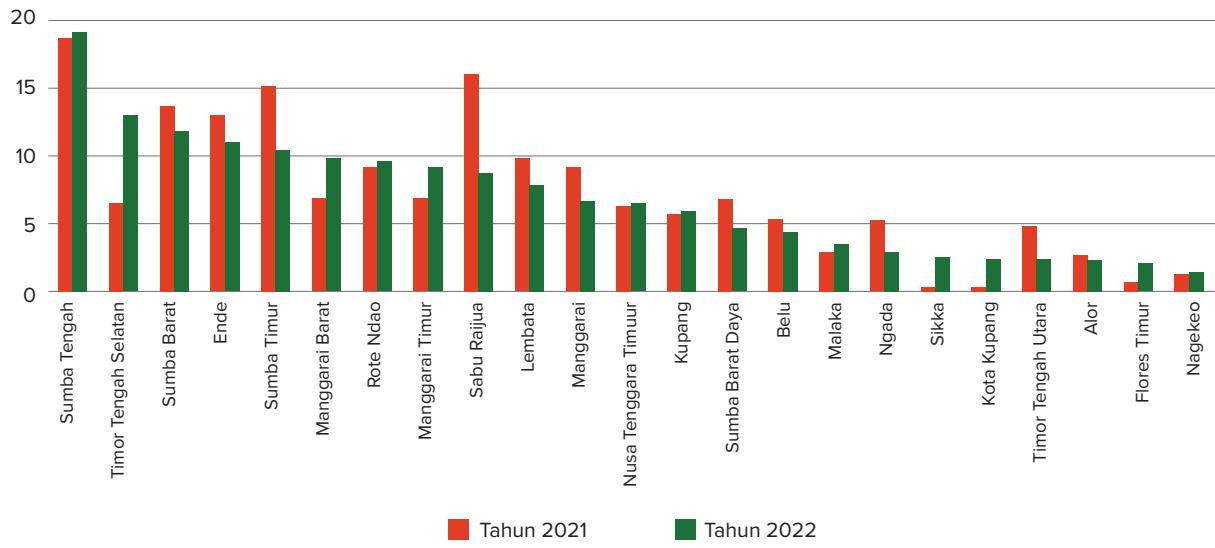
GAMBAR 2.25 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2005-2022



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk dengan pendapatan kurang dari US \$ 1,9 PPP (*purchasing power parities*). Pada Tahun 2021 Persentase penduduk miskin ekstrem di Provinsi NTT senilai 6,44 persen atau sejumlah 358,95 ribu jiwa yang meningkat menjadi 6,56 persen pada Tahun 2022 atau sejumlah 370,46 ribu jiwa yang tersebar pada 22 kabupaten/kota dengan Timor Tengah Selatan sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak pada Tahun 2022 yaitu sejumlah 61,57 ribu jiwa.

GAMBAR 2.26 PERSENTASE KEMISKINAN EKSTREM BERDASARKAN KABUPATEN/ KOTA DI WILAYAH PROVINSI NTT TAHUN 2021 DAN 2022 (%)

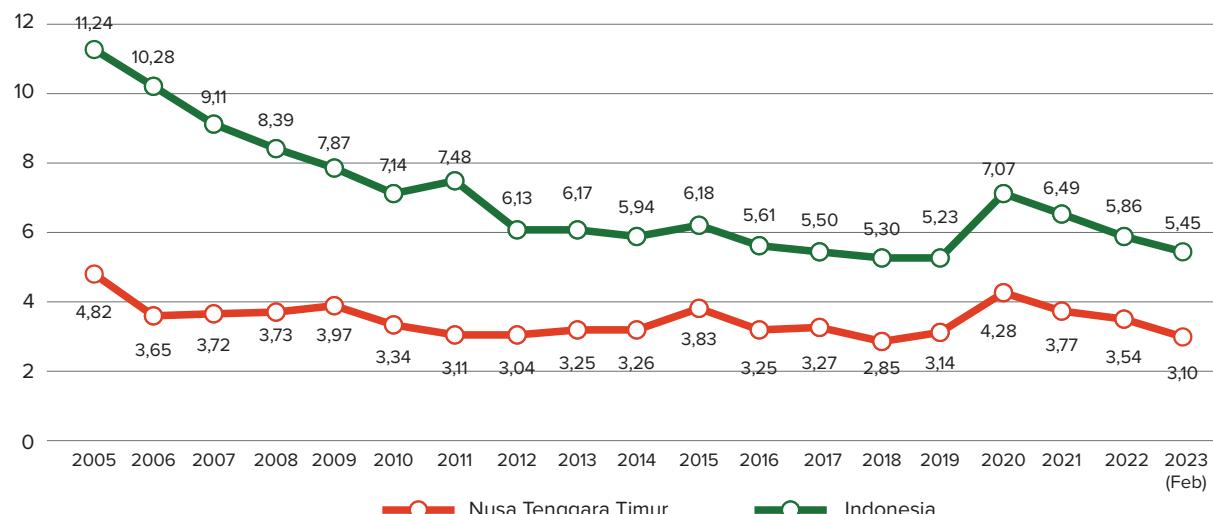


Sumber: P3KE, Kemenko PMK 2023 (diolah)

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Secara kumulatif, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2005 sampai dengan 2023 mengalami penurunan sebesar 1,18% atau masih jauh di bawah capaian penurunan kumulatif nasional untuk periode yang sama, yaitu senilai 5,79%.

GAMBAR 2.27 PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI NTT TAHUN 2005-2022

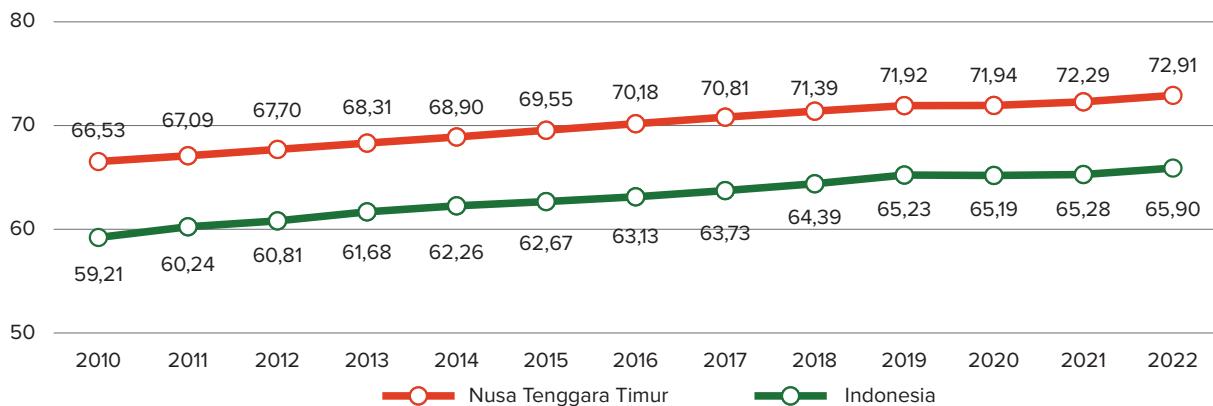


Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022. Jika diamati secara kumulatif, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat sebesar 6,69 Poin atau 59,21 pada Tahun 2010 yang menjadi 65,90 di Tahun 2022. Peningkatan kumulatif ini masih berada diatas nasional untuk periode yang sama, yaitu sebesar 6,38 poin dari tahun 2020 senilai 66,53 menjadi 72,91 pada Tahun 2023. Rincian pertumbuhan IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional selama periode 2010 sampai dengan 2023, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

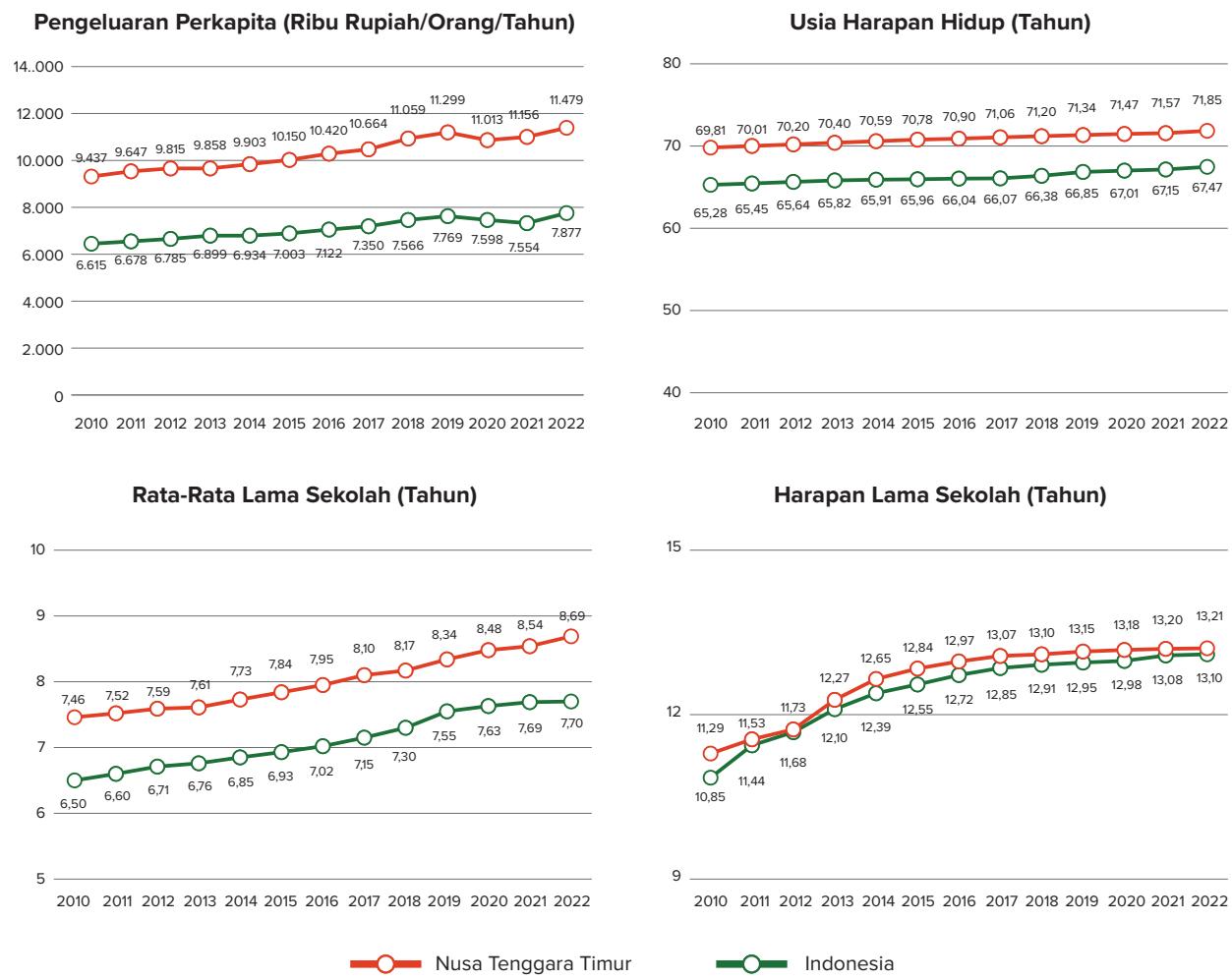
GAMBAR 2.28 PERKEMBANGAN IPM PROVINSI NTT TAHUN 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Secara kumulatif, perkembangan Pengeluaran perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sebesar 1.262 ribu rupiah/orang/tahun dalam periode 2010 hingga 2022, atau masih berada di bawah capaian nasional yaitu 2.042 untuk periode yang sama. UHH Provinsi Nusa Tenggara Timur juga secara kumulatif bertumbuh senilai 2,19 tahun sejak 2010 hingga 2020 atau masih berada diatas capaian nasional yaitu 2,04 tahun untuk periode yang sama. RLS juga mengalami pertumbuhan kumulatif senilai 1,20 tahun atau berada di bawah capaian nasional senilai 1,23 tahun untuk periode yang sama. Demikian juga HLS mengalami pertumbuhan kumulatif senilai 2,36 tahun atau berada diatas capaian kumulatif nasional senilai 1,81 untuk periode yang sama. Berikut rincian selengkapnya, perkembangan indikator pembentuk IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022 selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.29 PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBENTUK IPM PROVINSI NTT TAHUN 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

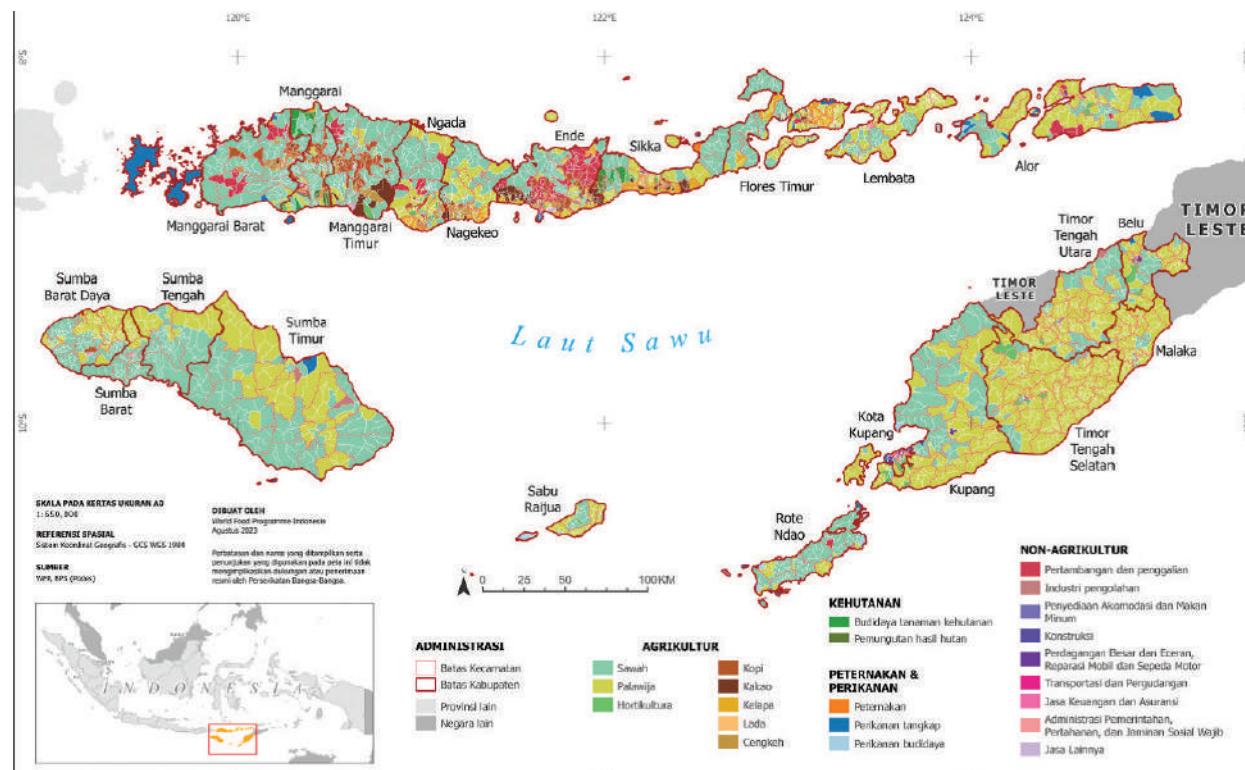
2.2.1.7 Mata Pencaharian Penduduk

Rata-rata mata pencaharian utama di Provinsi NTT menyumbang sebesar 40 persen pendapatan rumah tangga. Mata pencaharian di wilayah Flores lebih beragam apabila dibandingkan dengan di wilayah Timor dan Sumba yang kemungkinan disebabkan karena akses, ketersediaan infrastruktur dan kondisi tanah serta iklim yang lebih baik sehingga memberikan peluang yang lebih baik bagi perkembangan berbagai mata pencaharian.

Pulau Sumba dan Pulau Timor mempunyai sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Flores, dimana terlihat sebagian besar Pulau Sumba dan Pulau Timor didominasi oleh warna orange. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik unik dari masing-masing kelompok pulau di NTT (yaitu Pulau Flores, Sumba, dan Timor) berdampak pada sensitivitas mata pencaharian. Sensitivitas sektor pertanian di NTT lebih tinggi dibandingkan non-pertanian dengan mata pencaharian pada pertanian musiman dan perikanan menjadi kategori mata pencaharian paling sensitif.

Kondisi ini dianggap wajar karena sektor pertanian pada umumnya rentan terhadap bencana, variabilitas cuaca, dan iklim. Sedangkan mata pencaharian Non-pertanian walaupun sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan mata pencaharian lain, namun secara keseluruhan sensitivitasnya masih tinggi.

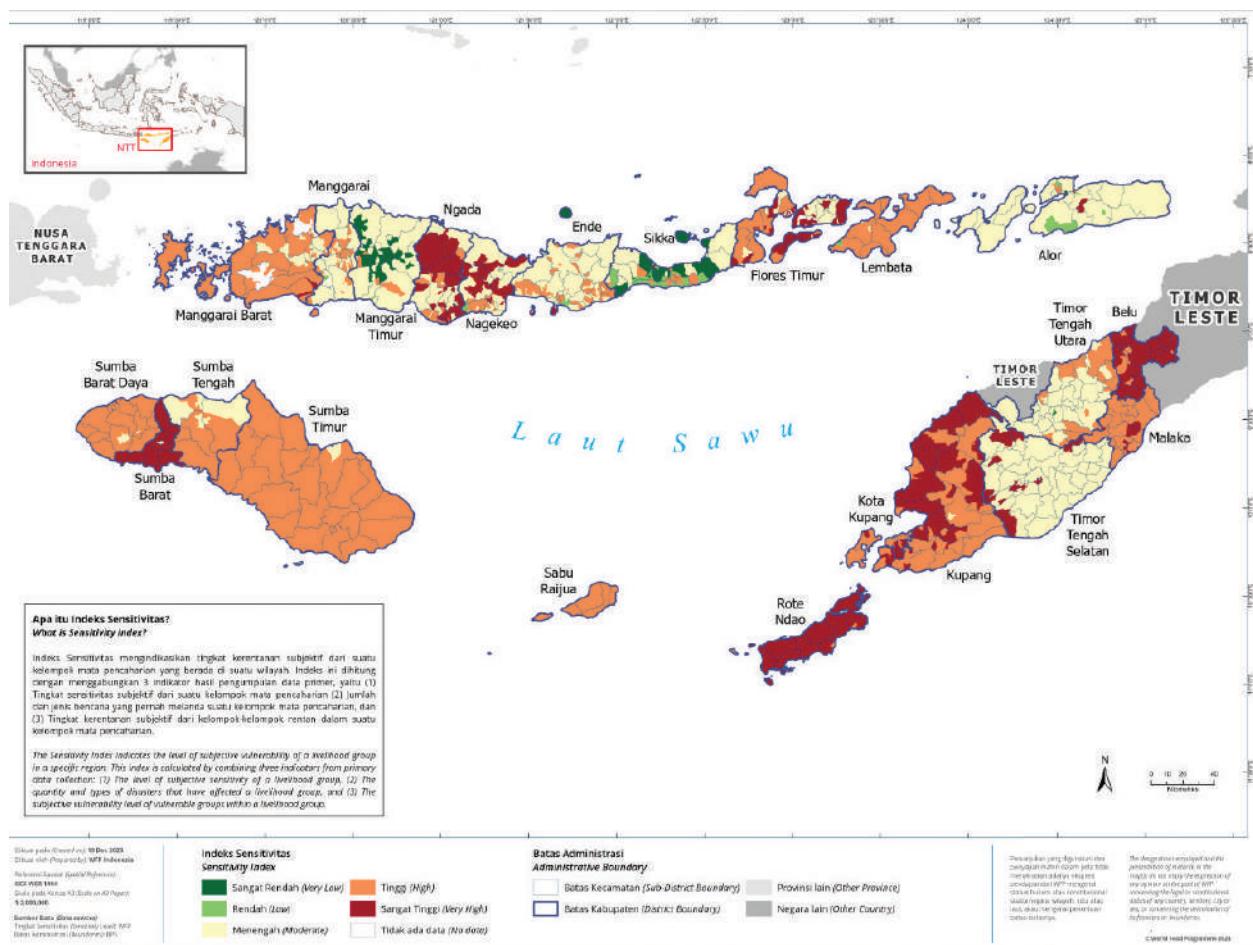
GAMBAR 2.30 MATA PENCAHARIAN PENDUDUK PROVINSI NTT TAHUN 2023



Sumber: WFP Indonesia

Kemudian, kelompok masyarakat yang memiliki lebih banyak alternatif mata pencaharian juga lebih sensitif. Sehingga baik pertanian maupun non pertanian dan yang memiliki alternatif mata pencaharian pun tetap memiliki sensitivitas terhadap perubahan iklim.

GAMBAR 2.31 MATA PENCAHARIAN PENDUDUK PROVINSI NTT TAHUN 2023

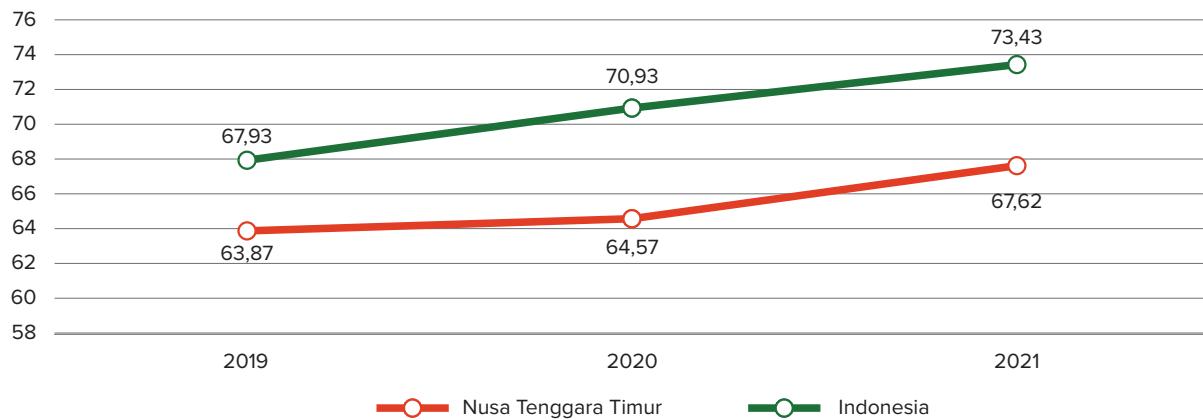


Sumber: WFP Indonesia

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

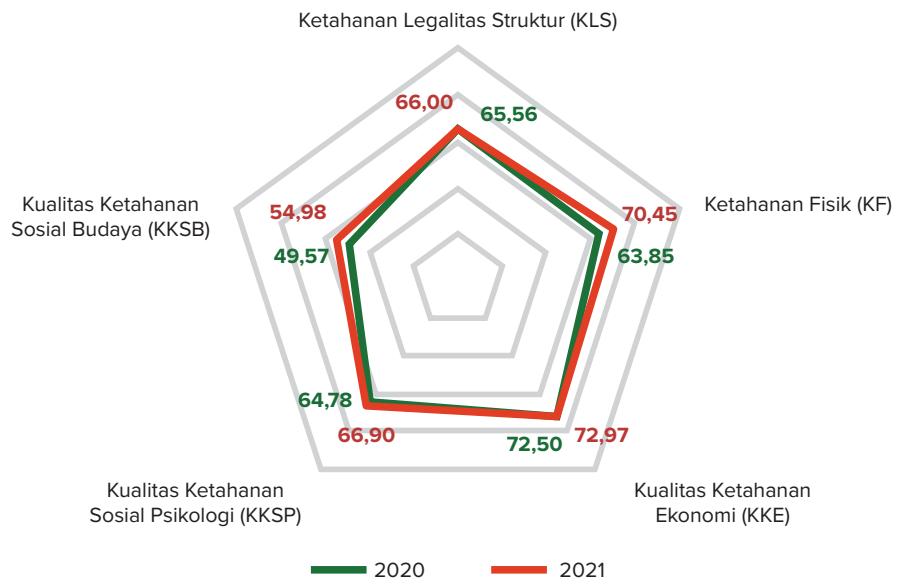
2.2.2.1 Indeks Kualitas Keluarga

Mengukur ketahanan dan kualitas keluarga digunakan indikator-indikator kualitas keluarga mencakup kecukupan akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, aspek legalitas, serta relasi setara gender, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keeratan sosial. Pekembangan nilai Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang positif walaupun masih berada di bawah capaian nasional untuk periode yang sama. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.32 INDEKS KUALITAS KELUARGA PROVINSI NTT TAHUN 2019-2021

Sumber: BPS dan KemenPPA, 2023

Secara umum, komponen pembantuk Indeks Kualitas Keluarga Provinsi NTT tahun 2020 dan 2021 cenderung membaik. Komponen yang mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu komponen Ketahanan Fisik dan komponen Kualitas Ketahanan Sosial Budaya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.33 KOMPONEN INDEKS KUALITAS KELUARGA PROVINSI NTT TAHUN 2021 DAN 2022

Sumber: BPS dan KemenPPA, 2023

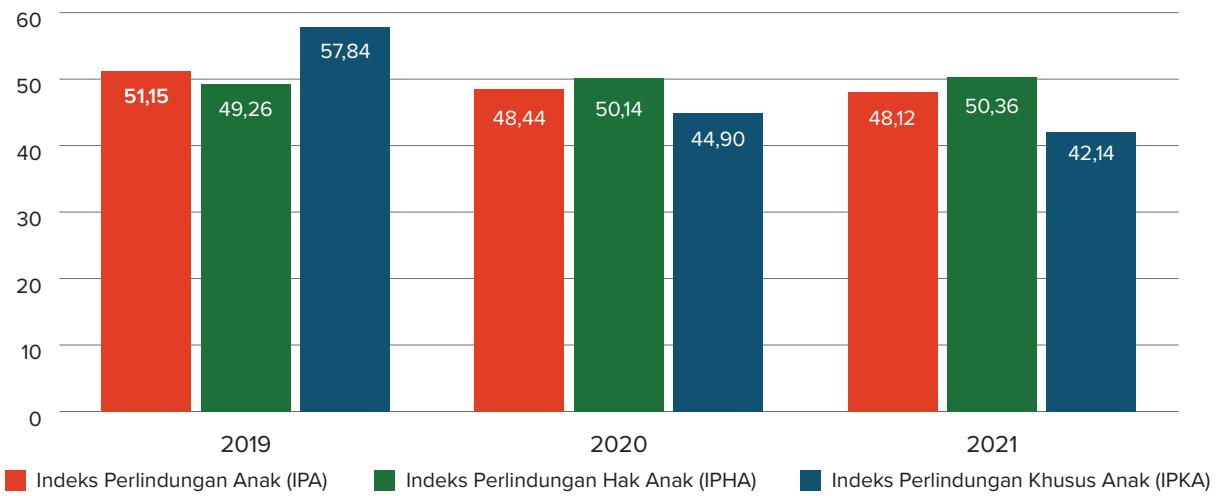
2.2.2.2 Kesejahteraan Gender, Disabilitas dan Sosial Inklusi (Gedsi)

a. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia yang meliputi Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang dan Kegiatan Budaya, dan Perlindungan Khusus. Dalam 3 Tahun terakhir nilai IPA Provinsi NTT terjadi penurunan. Pada Tahun 2019 nilai IPA Provinsi NTT senilai 51,15 yang turun menjadi 48,44 pada Tahun 2020 dan turun menjadi 48,12. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Pada Tahun 2019 nilai IPHA Provinsi NTT senilai 49,26 yang meningkat menjadi 50,14 pada Tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 50,36 pada Tahun 2021.

Indeks Pemenuhan Hak Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. Nilai IPKA Provinsi NTT juga mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, dimana pada Tahun 2019 nilai IPKA Provinsi NTT yaitu 57,84 yang turun menjadi 44,90 pada Tahun 2020 dan turun menjadi 42,14 pada Tahun 2021.

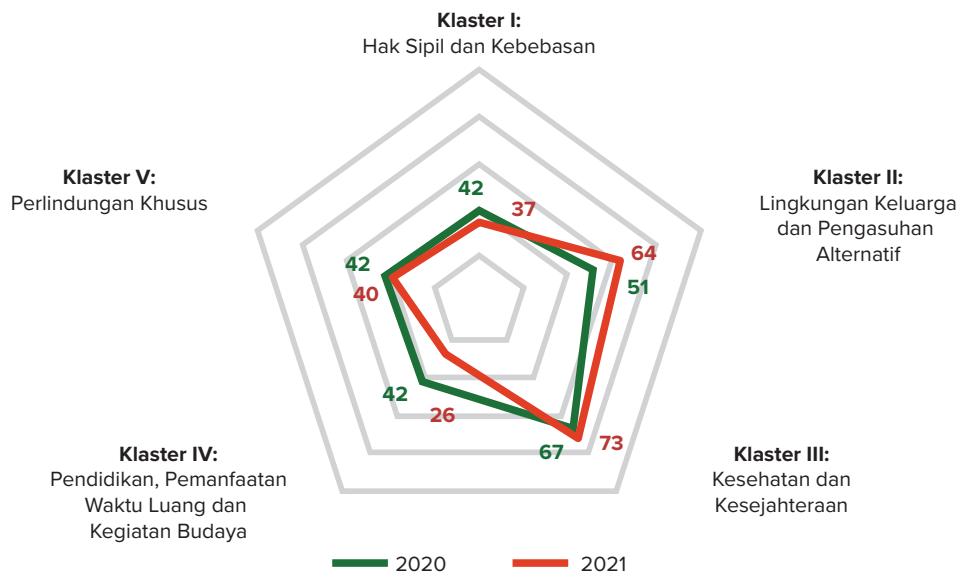
GAMBAR 2.34 INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA), INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA) DAN INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA) PROVINSI NTT TAHUN 2019-2021



Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2021, KemenPPPA & BPS 2022

Komponen pembentuk IPA dan IPHA terdiri atas 5 klaster dan klaster yang menjadi catatan bagi Provinsi NTT yaitu klaster I: Hak sipil dan kebebasan yang memiliki capaian 41,69 yang turun menjadi 37,19 pada Tahun 2021, kemudian Klaster IV: Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pada Tahun 2021 senilai 41,57 yang turun menjadi 25,68 pada Tahun 2022 serta klaster V: Perlindungan Khusus dimana pada Tahun 2020 senilai 42,24 yang juga mengalami penurunan menjadi 39,91 pada Tahun 2021. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.35 KOMPONEN PEMBENTUK INDEKS PERLINDUNGAN ANAK (IPA) DAN INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA) PROVINSI NTT TAHUN 2020-2021

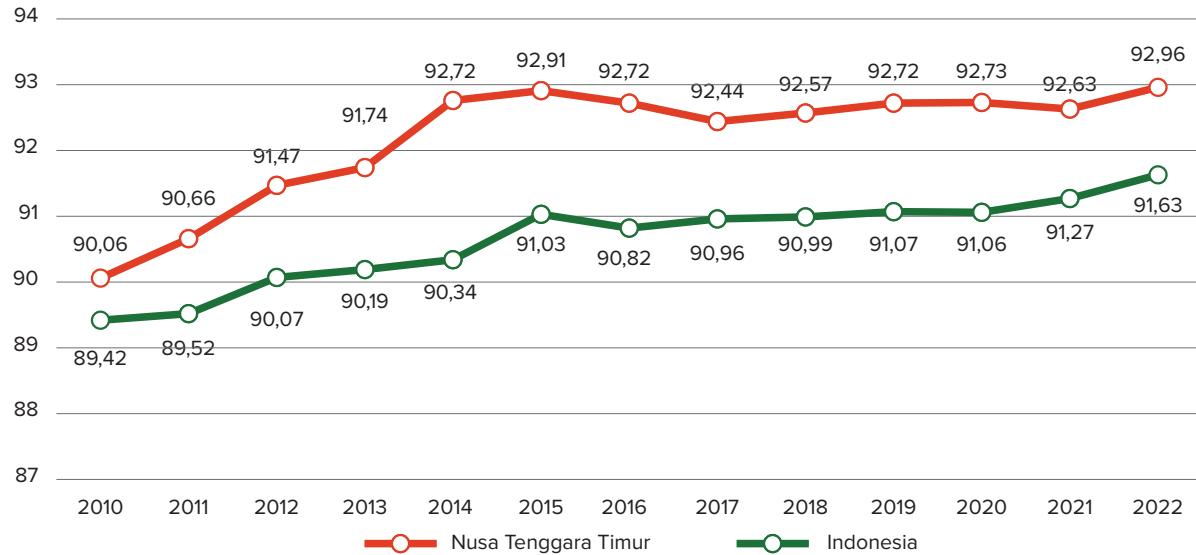


Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2021

b. Indeks Pembangunan Gender

Kesetaraan gender dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar yang setara bagi laki-laki maupun Perempuan. Hak dasar yang dimaksud di antaranya terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan lingkungan sosial yang layak. Dengan hak dasar yang setara ini, laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam menciptakan pembangunan sosial ekonomi suatu negara.

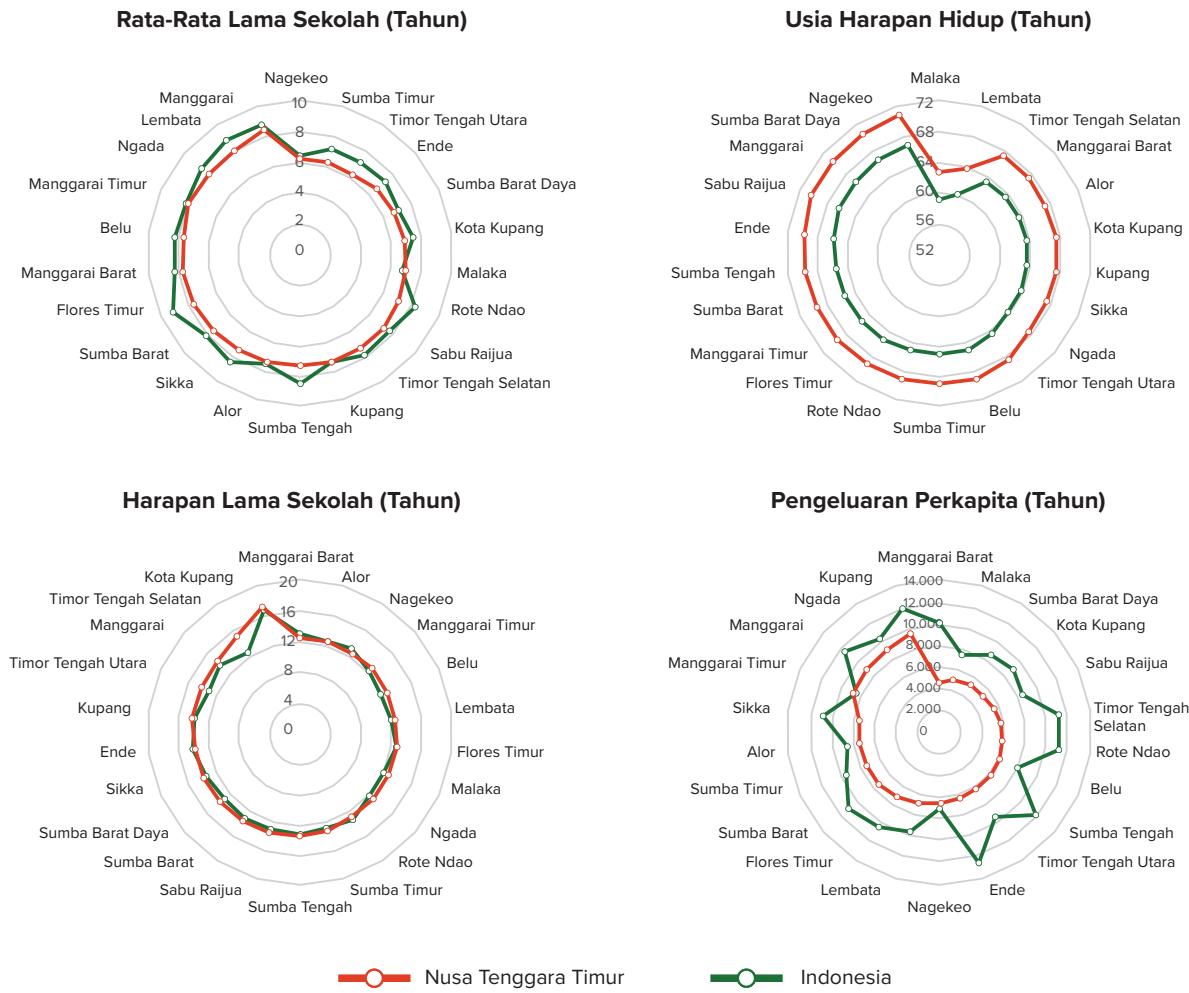
GAMBAR 2.36 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010-2022



Sumber: BPS NTT, 2023

Capaian IPD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama pada periode 2010-2022. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa di awal periode (2010) IPD NTT sebesar 90,06 poin dan mengalami kenaikan secara bertahap mencapai 92,91 poin pada 2015. Perkembangan IPD NTT mengalami stagnansi pada 2015-2022 dimana IPD bergerak di kisaran 92 poin dengan kondisi terakhir 92,96 poin pada 2022. Dibandingkan dengan capaian nasional, perkembangan IPD NTT berada di atas capaian nasional. Capaian IPD nasional pada 2010 sebesar 89,42 dan secara bertahap naik menjadi 91,63 poin pada 2022. Hal ini mengindikasikan kondisi pembangunan gender di NTT sedikit lebih baik dibandingkan dengan kondisi secara nasional.

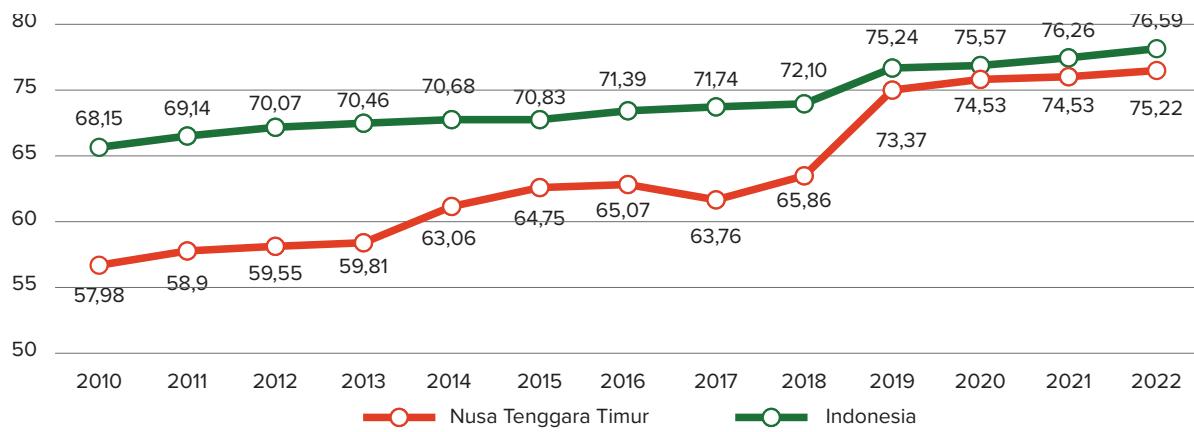
GAMBAR 2.37 KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022



c. Indeks Pemberdayaan Gender

Selain IPG, UNDP juga memperkenalkan ukuran komposit lainnya yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal peranan aktif dan power dari sisi politik, ekonomi, pendapatan dan pengambilan Keputusan. Peran gender dari sisi politik dan pengambilan Keputusan dilakukan proksi dengan keterlibatan perempuan di parlemen. Selanjutnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional merupakan pendekatan dari sisi ekonomi sementara sisi pendapatan dilakukan pendekatan dengan kontribusi pendapatan yang dihasilkan perempuan.

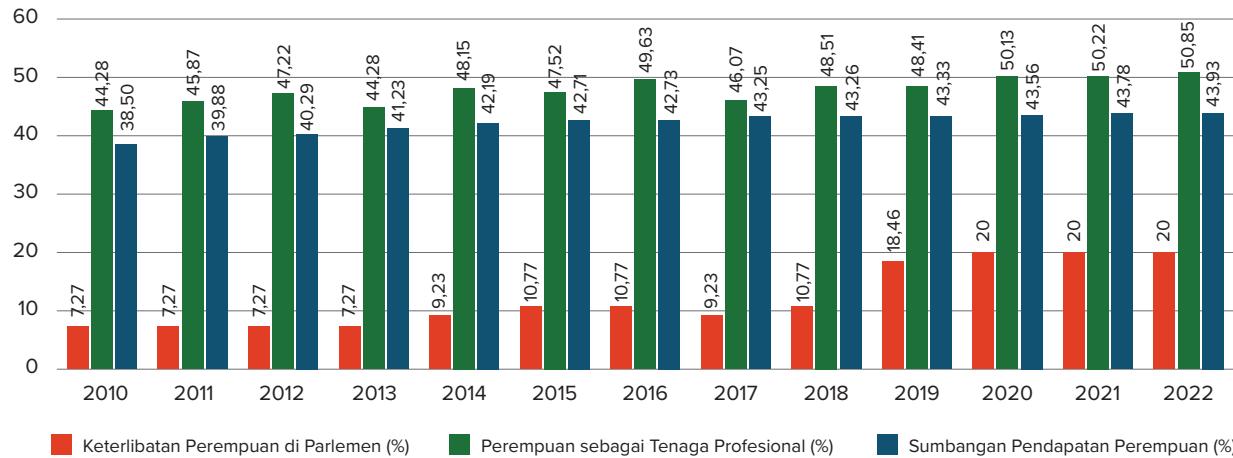
GAMBAR 2.38 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010-2022



Sumber: BPS NTT, 2023

Berdasarkan gambar 2.38 terlihat bahwa di awal periode (2010) capaian IDG Provinsi NTT sebesar 57,98 poin, sementara di tingkat nasional sebesar 68,15 poin. IDG NTT terus mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 73,37 poin pada 2019, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 75,24 poin di di tahun yang sama. Selanjutnya perkembangan IDG NTT maupun nasional mengalami peningkatan secara stagnan dengan kondisi di akhir periode (2022) masing-masing sebesar 75,22 poin dan 76,59 poin.

GAMBAR 2.39 KOMPONEN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010-2022



Sumber: BPS NTT, 2023

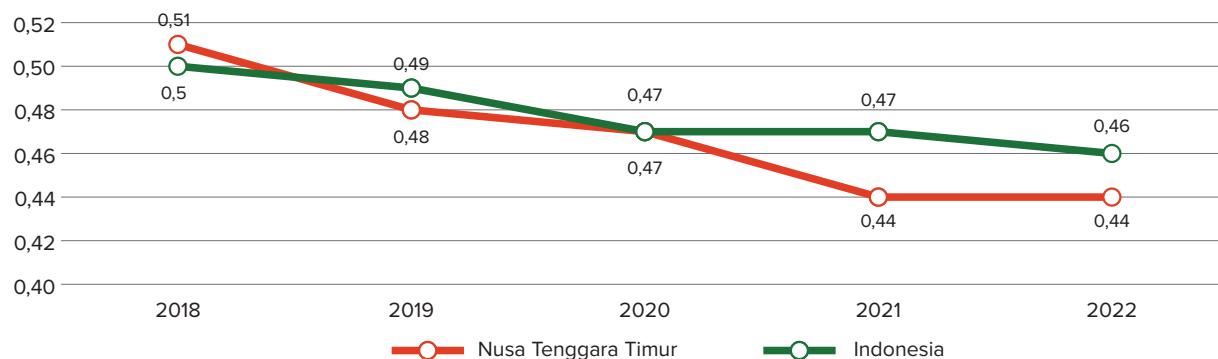
Dilihat dari komponen pembentuknya, dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan di parlemen memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan IDG di NTT. Demikian juga untuk komponen perempuan sebagai tenaga profesional dalam dua dekade terakhir yang persentasenya terus meningkat. Untuk komponen sumbangan pendapatan perempuan terjadi perkembangan yang stagnan sejak 2017-2022 dimana persentasenya bergerak di posisi 43 persen. Kenaikan IDG NTT selama dua dekade terakhir mengindikasikan bahwa peranan aktif dan daya perempuan di NTT dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik mengalami peningkatan.

d. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Ketimpangan gender Provinsi NTT sejak tahun 2018 hingga 2022 secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018, IKG berkurang sebesar 0,075 poin, rata-rata turun 0,019 poin per tahun. Hal ini mengidikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik.

Ketimpangan gender Provinsi NTT sejak tahun 2018 hingga 2022 secara konsisten menurun. Sejak tahun 2018, IKG berkurang sebesar 0,075 poin, rata-rata turun 0,019 poin per tahun. Hal ini mengidikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik.

GAMBAR 2.40 INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2022



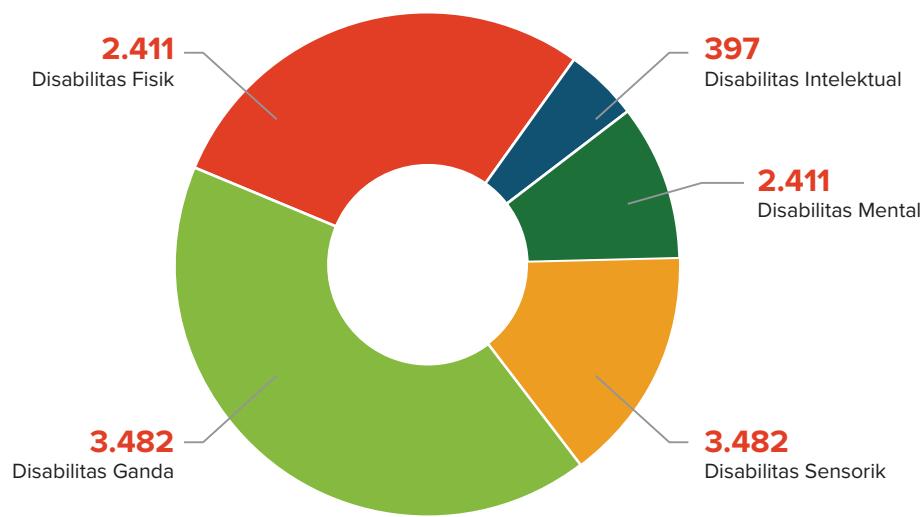
Sumber: BPS NTT, 2023

e. Kesejahteraan Disabilitas

Pada tahun 2022, terdapat 8.147 penyandang disabilitas di Provinsi NTT, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik dan ganda. Kelengkapan data cukup memadai karena dilengkapi rincian by name by address, tetapi masih terdapat sebagian yang belum memiliki dokumen kependudukan. Merujuk pada penerapan SPM, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penanganan penyandang disabilitas dilakukan didalam Panti Sosial. Karena itu akses penyandang disabilitas terhadap program rehabilitasi/pemberdayaan sangat tergantung pada kapasitas Panti Sosial yang tersedia dan alokasi anggaran yang memadai. Pada tahun 2023, terdapat 116 LKS/Panti Swasta, yang menampung 891 penyandang disabilitas. Terdapat variasi kapasitas/daya tampung diantara 116 LKS/Panti Swasta tersebut. Selain itu, alokasi anggaran dari Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas pada Panti Sosial relatif terbatas. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

Penanganan terhadap penyandang disabilitas yang bersifat menyeluruh telah ditetapkan dalam RAD bagi Penyandang Disabilitas, akan tetapi implementasinya membutuhkan dukungan program dan anggaran (PFM) yang memadai dan perbaikan kualitas layanan terkait SPM. Persoalan utama yang dihadapi dalam jangka pendek dan menengah adalah bagaimana mempromosikan isu penyandang disabilitas pada perangkat daerah terkait, sehingga mendapat perhatian penting dalam penyusunan program dan anggaran untuk pendataan, rehabilitasi/pemberdayaan dan ketersediaan sarana publik yang ramah disabilitas.

GAMBAR 2.41 JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS MENURUT JENISNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 2023



Sumber: Dinas P3A Provinsi NTT, 2023

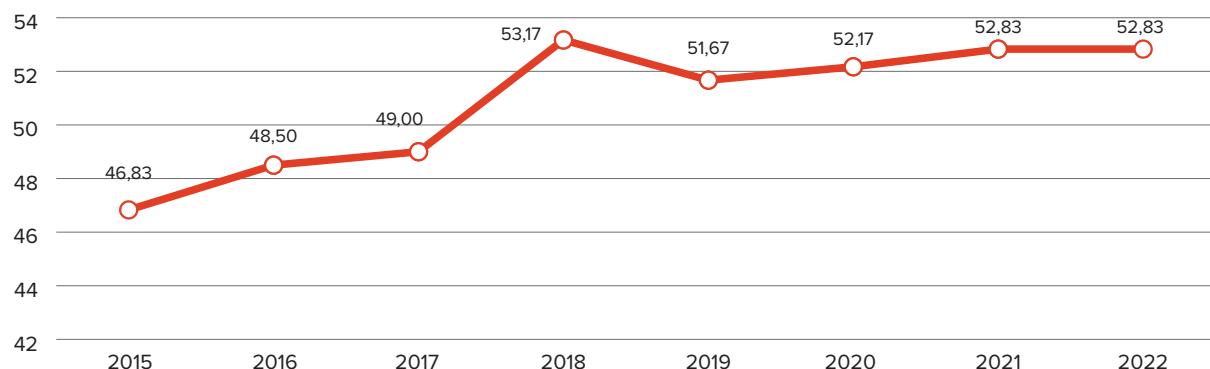
f. Kesejahteraan Pendudukan Lanjut Usia (Lansia)

Berdasarkan struktur umur, pada tahun 2020, penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) berjumlah 322.499 orang, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 368.673 orang. Pendataan terhadap penduduk lanjut usia sudah cukup memadai, karena telah dilakukan *by name by address*. Namun demikian, jumlah LKS Lanjut Usia terbatas, yakni 35 LKS. Pemerintah Daerah hanya memiliki 2 LKS dan 33 LKS lainnya dimiliki masyarakat. Secara keseluruhan, 35 LKS tersebut hanya mampu menampung penduduk lanjut usia sebanyak 4.162 orang. Keberadaan sebagian besar penduduk lanjut usia diluar LKS tidak diketahui, karena tidak tersedia data/informasi.

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) memberikan gambaran kemajuan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Perkembangan IPP Provinsi NTT sejak Tahun 2015 sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan positif dengan nilai IPP pada tahun 2015 sebesar 46,83 yang terus meningkat sampai dengan tahun 2022 senilai 52,83.

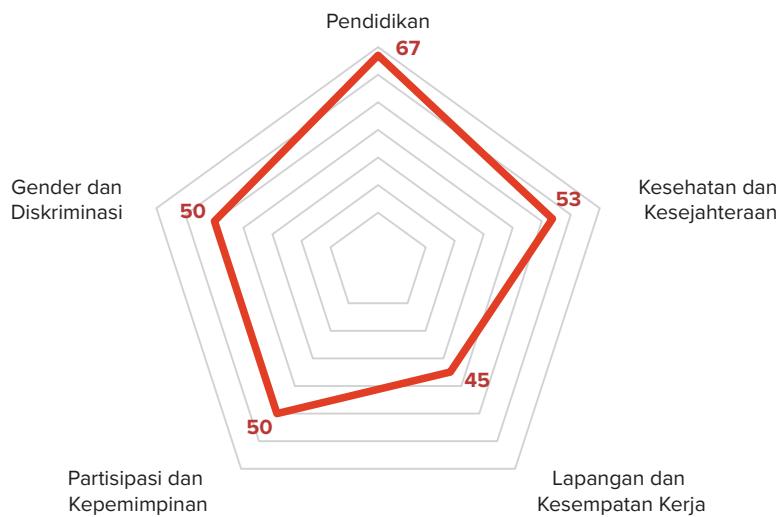
GAMBAR 2.42 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA PROVINSI NTT TAHUN 2015-2022



Sumber: Kemenpora, 2023

Komponen pembentuk IPP di Provinsi NTT Tahun 2022 antara lain komponen pendidikan senilai 67, komponen kesehatan dan kesejahteraan senilai 53, komponen lapangan dan kesempatan kerja senilai 45, komponen partisipasi dan kepemimpinan senilai 50, serta komponen gender dan diskriminasi senilai 50 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.43 KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA PROVINSI NTT TAHUN 2022

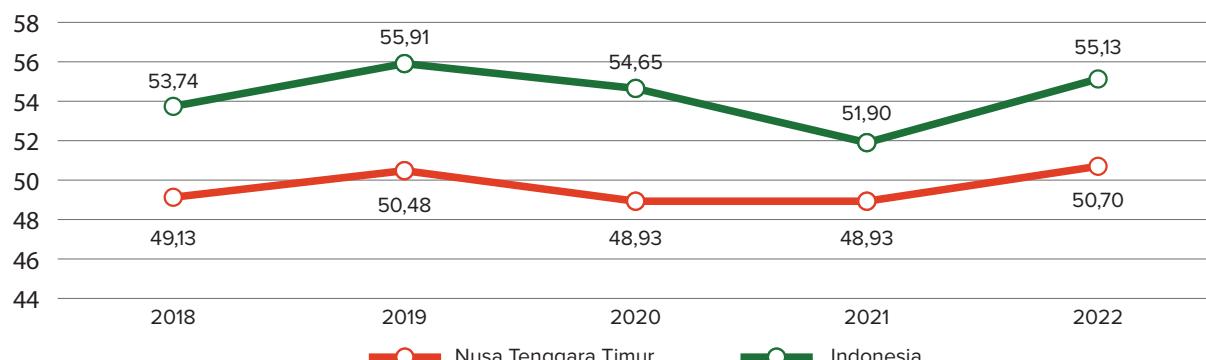


Sumber: Kemenpora, 2023

2.2.2.4 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu indstrumen dalam memberikan gambaran terkait kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 nilai IPK Provinsi NTT mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dimana pada Tahun 2018 nilai IPK Provinsi NTT senilai 49,13 naik menjadi 50,48, turun menjadi 48,93 pada Tahun 2020 dan kemudian meningkat menjadi 50,70 pada Tahun 2022.

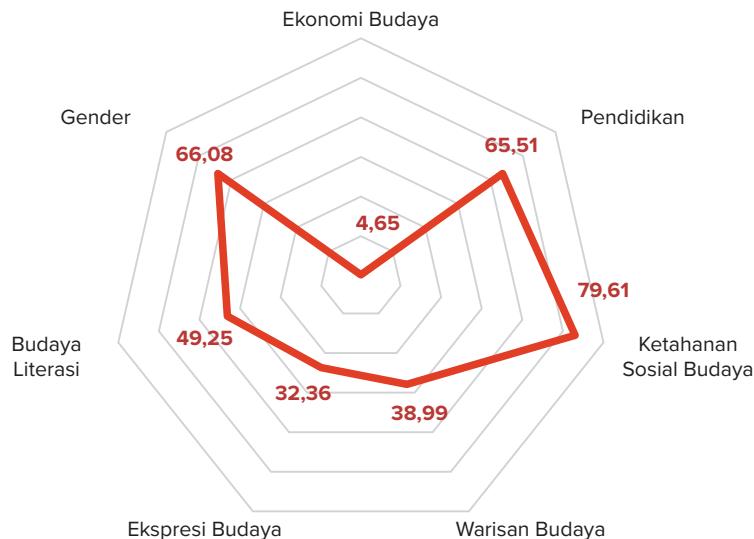
GAMBAR 2.44 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTT TAHUN 2018-2022



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Komponen IPK terdiri dari komponen ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi serta gender. Nilai komponen IPK di Provinsi NTT Tahun 2022 yang masih tergolong rendah yaitu komponen ekonomi budaya, warisan budaya serta ekspresi budaya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.45 KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTT TAHUN 2022



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data statistika atas pertumbuhan maupun tingkat pendapatan masyarakat yang merangkum keseluruhan akibat dari kegiatan ekonomi yang berupa perolehan nilai tambah, selama periode waktu tertentu di suatu wilayah. PDRB juga berguna sebagai alat yang dapat menjadikan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi, pemahaman atas akibat dari fenomena yang terjadi, maupun bahan kajian atas rencana pembangunan selanjutnya baik dalam sektor nasional maupun regional yang melibatkan pemerintah pusat atau daerah, termasuk swasta.

PDRB sendiri dihitung melalui dua cara, yaitu PDRB harga konstan di mana perhitungan menggunakan harga tahun dasar, dan PDRB harga berlaku dimana perhitungan menggunakan harga barang dan jasa tahun berjalan. PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan pertumbuhan ekonomi tahunan riil yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Sementara itu, PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan kapasitas sumber daya ekonomi, pergeseran atau perubahan, dan struktur ekonomi suatu wilayah.

TABEL 2.9 DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO HARGA BERLAKU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA, 2017 – 2022

No	Lapangan Usaha	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,81	28,34	27,93	28,51	29,17	29,60
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,30	1,21	1,17	1,08	1,07	1,06
3.	Industri Pengolahan	1,26	1,27	1,32	1,28	1,18	1,21
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
6.	Konstruksi	10,71	10,86	10,87	9,82	10,36	10,20
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,97	11,14	11,49	11,16	11,48	12,05
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,44	5,52	5,47	4,62	4,56	4,84
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,74	0,76	0,75	0,56	0,55	0,62
10.	Informasi dan Komunikasi	6,83	6,64	6,63	7,44	7,41	7,28
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	4,12	4,04	4,36	4,46	4,53
12.	Real Estate	2,55	2,5	2,32	2,28	2,23	2,32
13.	Jasa Perusahaan	0,31	0,3	0,29	0,18	0,15	0,15
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,89	13,38	13,65	14,26	13,41	12,82
15.	Jasa Pendidikan	9,66	9,54	9,64	10,08	9,56	9,07
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,14	2,17	2,18	2,40	2,58	2,44
17.	Jasa lainnya	2,14	2,12	2,12	1,83	1,69	1,67
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS NTT, 2023

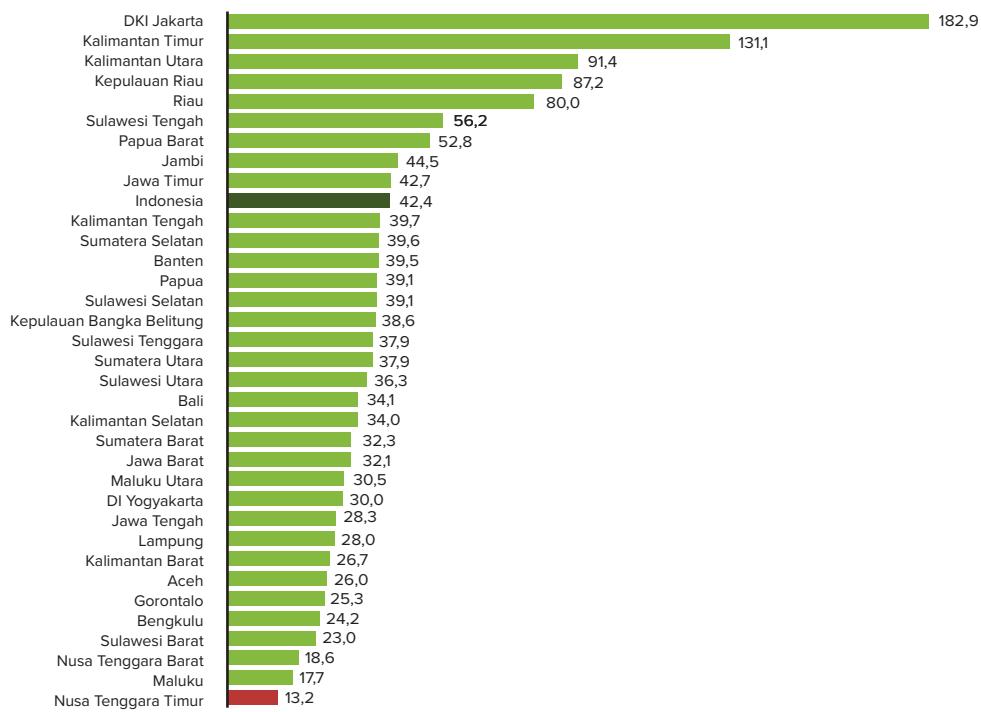
Tabel 2.9. merincikan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut 17 Sektor atau Lapangan Usaha tahun 2017 – 2022. Selama periode ini, terdapat tiga sektor yang mengalami tren peningkatan proporsi/ *share* pada distribusi Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni 1) Pengadaan Listrik dan Gas, 2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan 3) Jasa Keuangan dan Asuransi. Di sisi lain, terdapat enam sektor yang mengalami tren penurunan proporsi/ *share* pada distribusi Produk Domestik Regional Bruto, yakni 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Real Estate, 5) Jasa Perusahaan, dan 6) Jasa lainnya. Sementara itu, sektor lainnya mengalami fluktuasi selama periode dimaksud.

2.3.1.2 PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita mengukur pendapatan rata-rata penduduk pada sebuah wilayah. PDRB per Kapita diperoleh dari pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai PDRB per Kapita maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk pada sebuah wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Menurut Lapangan Usaha di level Provinsi pada tahun 2022. Tampak pada Gambar 2.45 bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB per Kapita tertinggi di Indonesia, yakni sebesar Rp 182,9 juta, disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur (Rp 131,1 juta) dan Provinsi Kalimantan Utara (Rp 91,4 juta). Sementara itu, Provinsi NTT merupakan provinsi dengan PDRB per Kapita terendah di Indonesia di tahun 2022, yakni hanya sebesar Rp 13,2 juta, disusul provinsi Maluku (17,7 juta) dan provinsi NTB (18,6 juta). Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

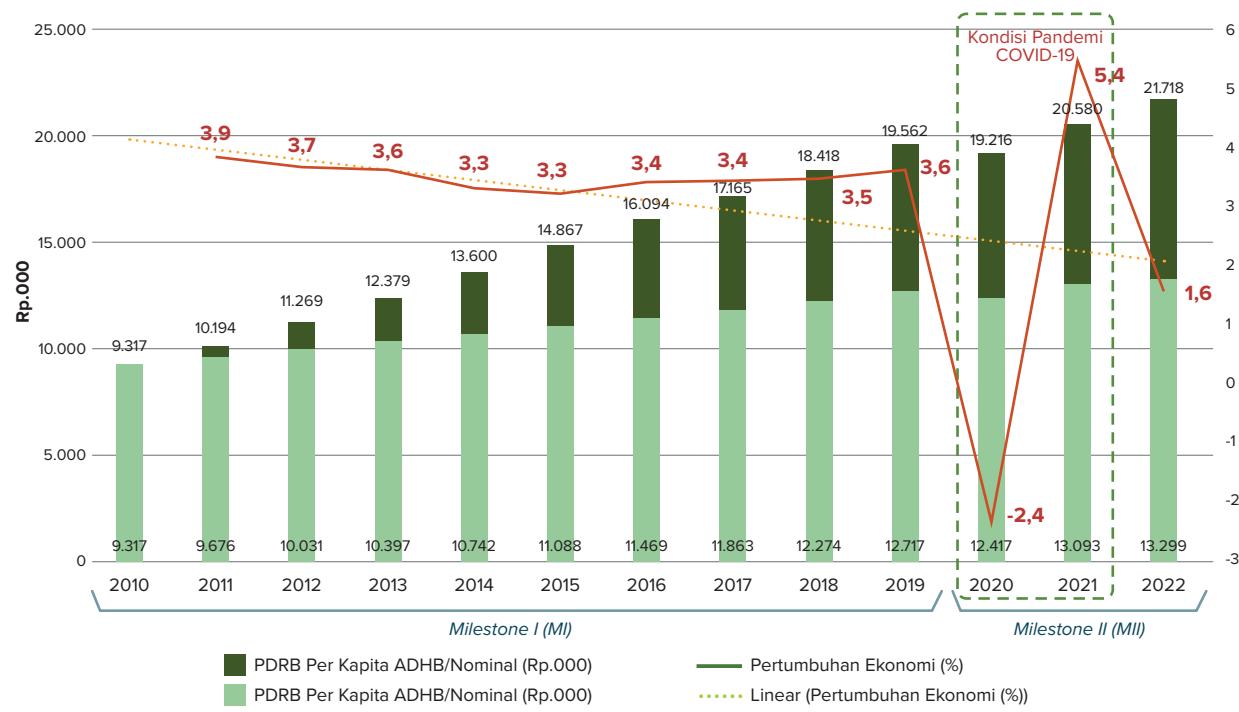
GAMBAR 2.46 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA MENURUT LAPANGAN USAHA DI LEVEL PROVINSI (JUTA RUPIAH), 2022



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

Secara umum, PDRB per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama periode 2010-2022. Pada Tahun 2010, PDRB riil per kapita sebesar 9.317 ribu rupiah kemudian meningkat menjadi 13.299 ribu rupiah pada Tahun 2022. Selain itu, PDRB nominal per kapita juga meningkat dari 9.317 ribu rupiah pada Tahun 2010 menjadi 21.718 ribu rupiah pada Tahun 2022. Secara rata-rata, pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 3,03 persen yang diamati dari nilai ADHK, dan sempat mengalami penurunan nilai pada periode MII di Tahun 2020. Capaian ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang dapat diamati dari rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita pada MI sebesar 3,52 persen dan pada MII 1,55 persen. Selain itu, pertumbuhan PDRB per kapita cenderung menurun, diamati dari garis trend linier pertumbuhan yang melandai.

GAMBAR 2.47 PERKEMBANGAN PDRB PER KAPITA PROVINSI NTT TAHUN 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2023 (diolah)

2.3.1.4 Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau (*Green Economy Index/ GEI*) merupakan salah satu alat untuk mengukur transformasi ekonomi guna menilai interaksi sosial ekonomi lingkungan dalam lingkup ekonomi hijau serta mengidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk merancang kebijakan ekonomi hijau yang lebih baik pada masa yang akan datang. Indeks ekonomi hijau terdiri dari 15 indikator terpilih yang memiliki 3 (tiga) pilar *Sustainable Development* yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

TABEL 2.10 INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENDUKUNG TIGA PILAR EKONOMI HIJAU PROVINSI NTT TAHUN 2024-2026

PILAR	INDIKATOR	TARGET NUSA TENGGARA TIMUR		
		2024	2025	2026
SOSIAL	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,66%-3,37%	2,51%-2,35%	2,25%-2,05%
	Tingkat Kemiskinan	20,00%-19,63%	19,35%-18,85%	18,50%-17,03
	Angka Harapan Hidup	67,5 thn	68 thn	69 thn
	Rata-Rata Lama Sekolah	7,75 thn	7,93 thn	8,2 thn
EKONOMI	Pertumbuhan Ekonomi	4,55%-5,35%	4,75%-5,65%	5,15%-6,01%
	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	68 poin	68,25 poin	68,5 poin
	Pengeluaran Perkapita	Rp7.598.000	Rp7.762.000	Rp7.954.000
	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	31	32	33
LINGKUNGAN	Rasio Elektrifikasi	93%	94%	95%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,62 poin	73,95 poin	74,28 poin
	Indeks Risiko Bencana	140 poin	138 poin	135 poin

2.3.1.5 Indeks Ekonomi Biru

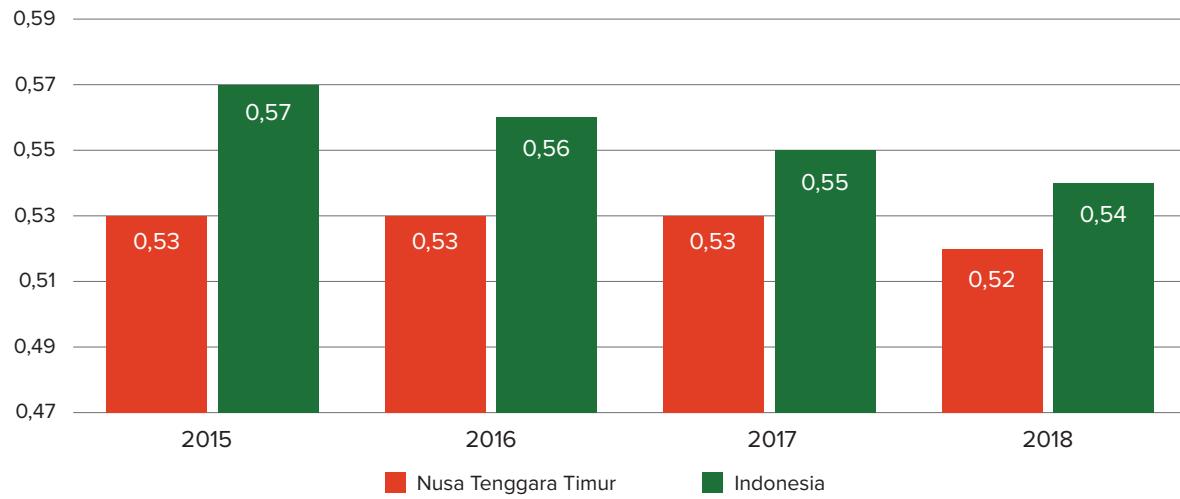
Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan alat untuk mengukur kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam Sektor Ekonomi Biru. Indeks Ekonomi Biru terdiri dari 35 (tiga puluh lima) indikator yang mewakili 3 (tiga) pilar yaitu pilar ekonomi yang menekankan pada analisis rantai nilai produksi dan perdagangan antar daerah, pilar sosial yang menekankan pada potensi perempuan dan kelompok marginal untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap sector ekonomi biru, serta pilar lingkungan yang menekankan pada pengelolaan sampah khususnya sampah laut.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.2.1 Indeks Modal Manusia

Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) merupakan indeks yang mengukur sumber daya manusia yang dapat dicapai oleh seorang anak yang dilahirkan saat ini pada usia 18 tahun, mengingat resiko terhadap pendidikan dan kesehatan yang buruk dinegara tempat ia tinggal. Nilai Indeks Modal Manusia Provinsi NTT masih berada di bawah capaian nasional. Sejak Tahun 2015 sampai dengan 2017 berada pada nilai 0,53 dan turun menjadi 0,52 pada Tahun 2018. Artinya setiap anak yang lahir di Provinsi NTT pada Tahun 2018 akan menjadi lebih produktif 52 persen ketika ia tumbuh dewasa, dengan catatan mereka menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan akses kesehatan yang baik.

GAMBAR 2.48 INDEKS MODAL MANUSIA (HUMAN CAPITAL INDEX) PROVINSI NTT TAHUN 2015-2018

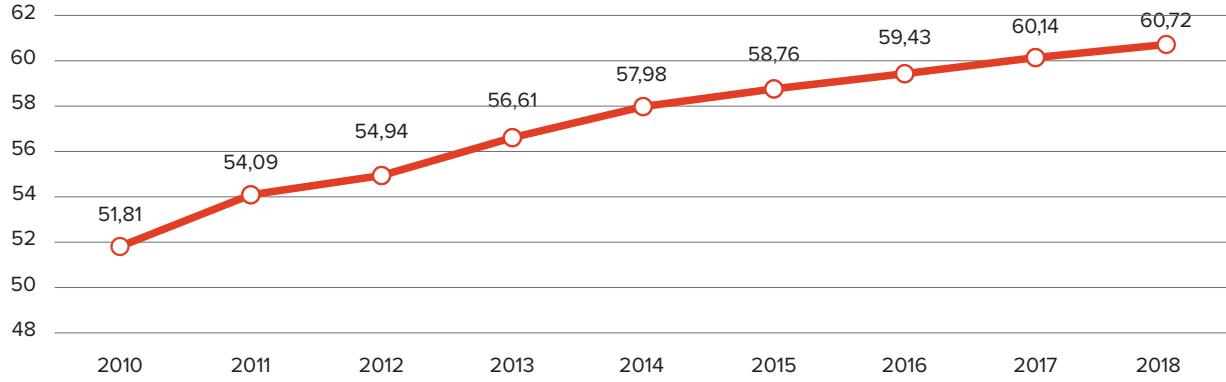


Sumber: Kajian Indeks Modal Manusia dan Peranannya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2018

2.3.2.2 Indeks Pendidikan

Pencapaian indeks pendidikan Provinsi NTT sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 nilai indeks pendidikan Provinsi NTT sebesar 51,81 dan meningkat menjadi 60,72 pada Tahun 2018. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.49 INDEKS PENDIDIKAN PROVINSI NTT TAHUN 2010-2018

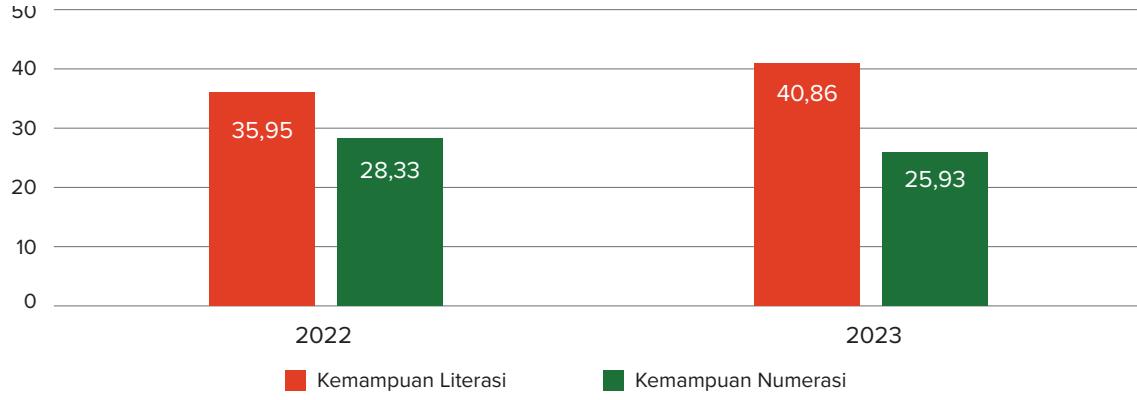


Sumber: BPS 2023

2.4.2.3 Angka Literasi dan Numerasi

Pada Tahun 2023, kurang dari 40 persen peserta didik di Provinsi NTT yang telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca dan kurang dari 25 persen peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi.

GAMBAR 2.50 ANGKA LITERASI DAN NUMERASI PROVINSI NTT TAHUN 2022-2023

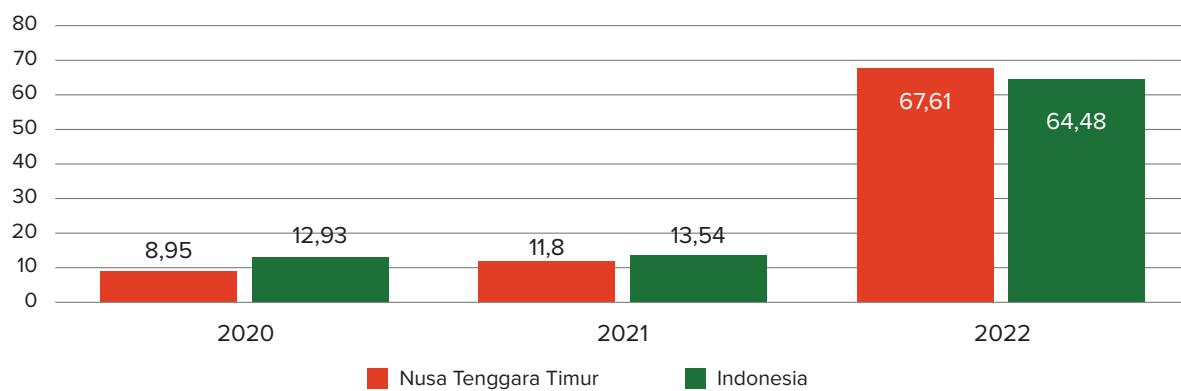


Sumber: Asesmen Nasional Kemendibudristek RI 2023

2.3.2.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan hasil agregasi 7 (tujuh) unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi, dan Anggota perpustakaan. Pengukuran IPLM telah dilakukan sejak Tahun 2018 namun data secara lengkap sampai dengan level Provinsi baru tersedia pada tiga tahun terakhir, yakni 2020-2022, sedangkan pada level Kabupaten/ Kota hanya pada Tahun 2022.

GAMBAR 2.51 INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN INDONESIA, 2020-2022



Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2021-2023

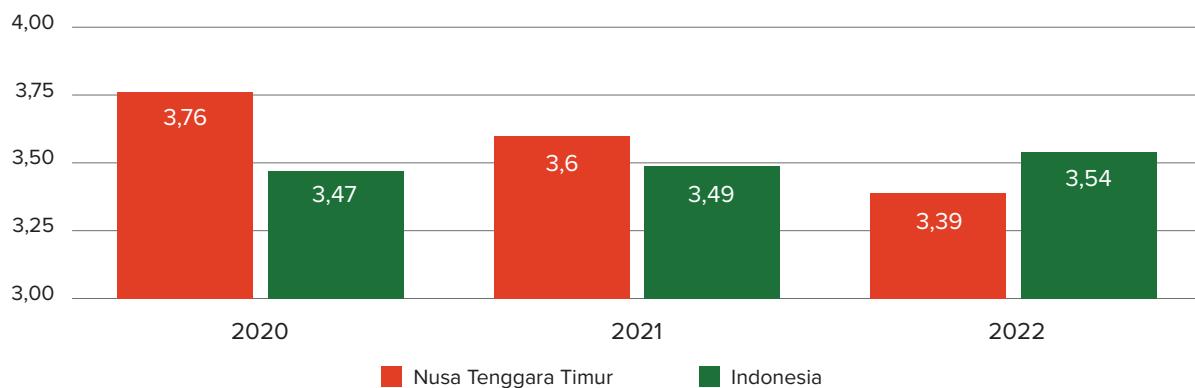
yakni 12,93. Pada tahun selanjutnya, IPLM Provinsi Nusa Tenggara Timur sedikit mengalami penurunan menjadi 11,8 poin. Sementara itu, IPLM nasional meningkat menjadi 13,54. Pada Tahun 2022, IPLM Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat secara signifikan menjadi 67,61 dan berada di atas rata-rata nasional, yang mana hanya mencapai 64,48.

2.3.2.5 Indeks Literasi Digital

Dalam Laporan Status Literasi Digital di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kominfo RI, dijelaskan bahwa pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia mengacu kepada kerangka kerja dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024. Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis untuk merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024.

Pada tahun 2020, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,76, dimana lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yakni 3,47. Pada tahun selanjutnya, Indeks Literasi Digital Provinsi ini mengalami penurunan menjadi 3,6. Sementara itu, IPLM nasional sedikit mengalami peningkatan menjadi 3,49. Pada tahun 2022, Indeks Literasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan kembali menjadi 3,39 dan berada di bawah rata-rata nasional, yang terus mengalami peningkatan menjadi 3,54.

GAMBAR 2.52 INDEKS LITERASI DIGITAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN INDONESIA, TAHUN 2020-2022

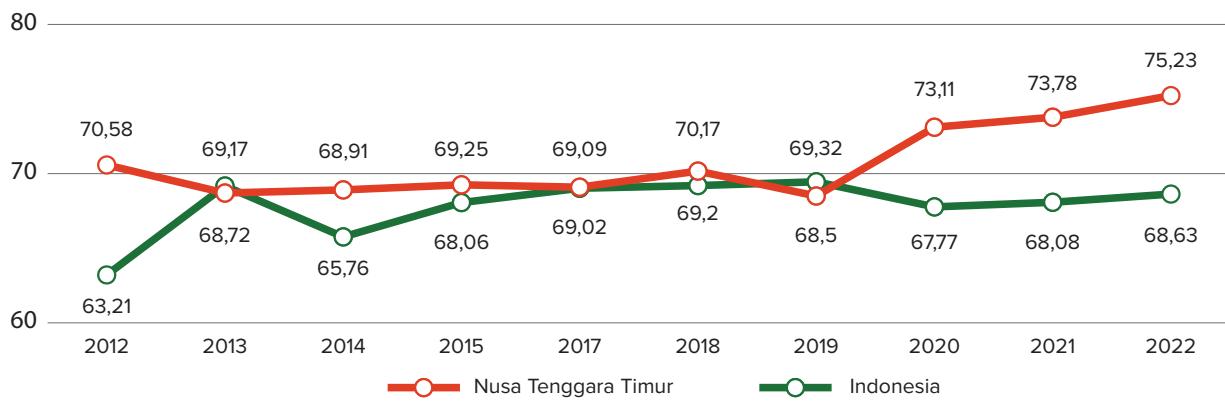


Sumber: Kementerian Kominfo (2022)

2.3.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada awal periode, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 70,58, berada jauh di atas rata-rata nasional, yakni 63,21. Pada tahun-tahun selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia sama-sama mengalami fluktuasi namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung berada di atas rata-rata nasional. Pada akhir periode, 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 75,23, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Indonesia sebesar 68,63.

GAMBAR 2.53 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN INDONESIA, 2012-2022

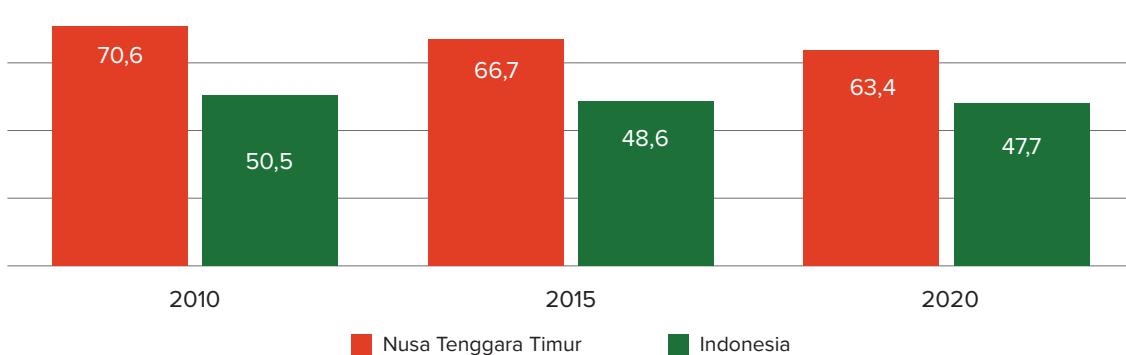


Sumber: BPS NTT, 2023

2.3.2.7 Angka Ketergantungan

Pada Tahun 2010, Rasio Ketergantungan provinsi ini sebesar 70,6 poin, dimana masih berada jauh lebih tinggi dibanding Rasio Ketergantungan Indonesia (50,5). Pada lima tahun selanjutnya, Rasio Ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan menjadi 66,7, sementara itu, Rasio Ketergantungan Indonesia mengalami penurunan pula menjadi 48,6 (2015), yang mengindikasikan pula bahwa Indonesia telah memasuki awal periode bonus demografi. Pada tahun 2020, Rasio Ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 63,4, sedangkan Rasio Ketergantungan Indonesia 47,7.

GAMBAR 2.54 RASIO KETERGANTUNGAN HASIL PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN INDONESIA, 2010-2020



Sumber: BPS NTT, 2023

2.3.3 Daya Saing Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

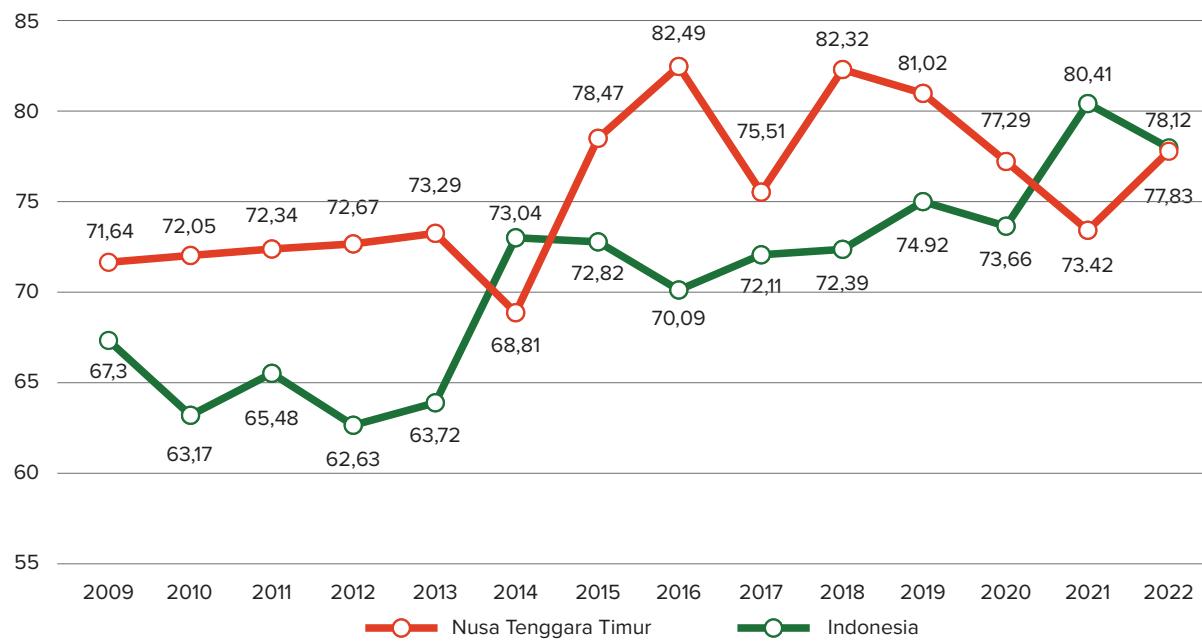
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran IKLI memberikan informasi baik dalam perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Saat ini, perkembangan pembangunan cukup pesat sehingga membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Komponen IKLI terdiri atas ketersediaan fisik (*availability*), kualitas fisik (*quality*), kesesuaian (*appropriateness*), efektivitas pemanfaatan (*utility*), penyerapan tenaga kerja (*job creation*) dan kontribusi pada perekonomian.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi baik di nasional maupun di tingkat daerah. Perkembangan IDI di Provinsi NTT sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2022 mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2009, nilai IDI Provinsi NTT sebesar 71,64 yang meningkat menjadi 82,49 pada Tahun 2016 dan kemudian mengalami penurunan menjadi 77,83 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.55 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI NTT TAHUN 2009-2022



Sumber: BPS

2.3.4.2 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) merupakan ukuran tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama yang meliputi dimensi toleransi, kerjasama dan kesetaraan. Provinsi NTT merupakan provinsi dengan capaian indeks KUB tertinggi secara nasional. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Perkembangan capaian komponen Indeks KUB Provinsi NTT dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang baik khususnya untuk dimensi kesetaraan dan kerjasama.

GAMBAR 2.56 INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (KUB) PROVINSI NTT TAHUN 2021-2023



Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI

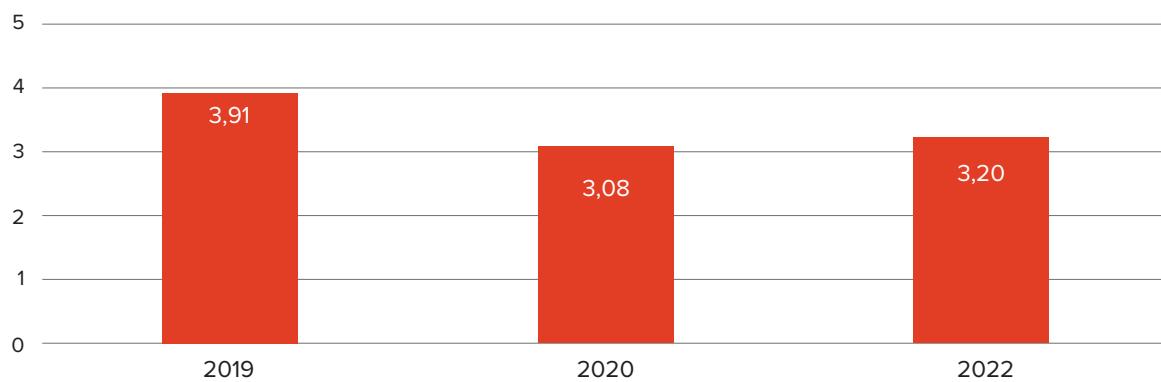
Pada Tahun 2022 dimensi toleransi Provinsi NTT sebesar 83,93 yang naik menjadi 83,95 pada Tahun 2023, dimensi Kesetaraan Tahun 2022 senilai 81,20 yang naik menjadi 87,19 pada Tahun 2023, serta dimensi Kerjasama pada Tahun 2022 senilai 83,16 yang naik menjadi 85,77 pada Tahun 2023.

2.3.4.3 Indeks Daya Saing Daerah

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui lebih spesifik kondisi suatu daerah. Model pengukuran IDSD ini dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi - BRIN untuk mengukur potensi dan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IDSD menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.

Capaian IDSD Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan dimana nilai IDSD Provinsi NTT Tahun 2019 senilai 3,91 yang turun menjadi 3,08 pada Tahun 2020 dan Turun menjadi 3,20 pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

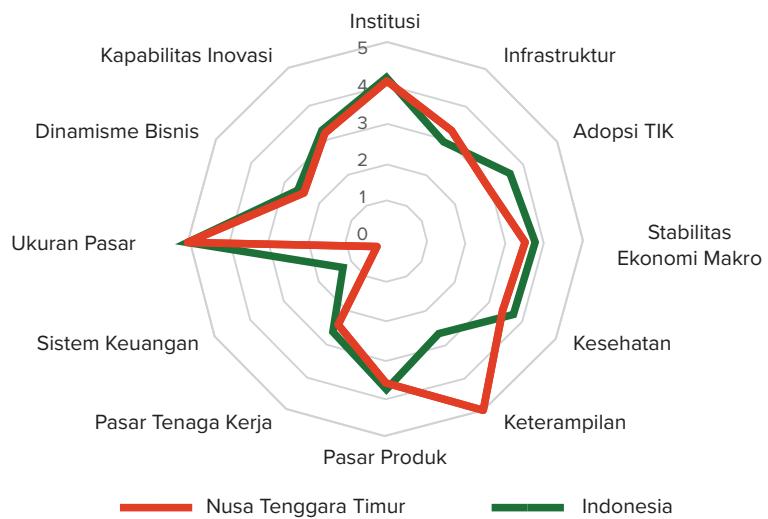
GAMBAR 2.57 INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD) PROVINSI NTT TAHUN 2019-2022



Sumber: BRIN 2023

Komponen IDSD meliputi 12 (dua belas) komponen diantaranya Instisusi, Infrastruktur, Adposi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis serta Kapabilitas Inovasi. Komponen IDSD Provinsi NTT Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.58 KOMPONEN IDSD PROVINSI NTT DAN NASIONAL TAHUN 2022

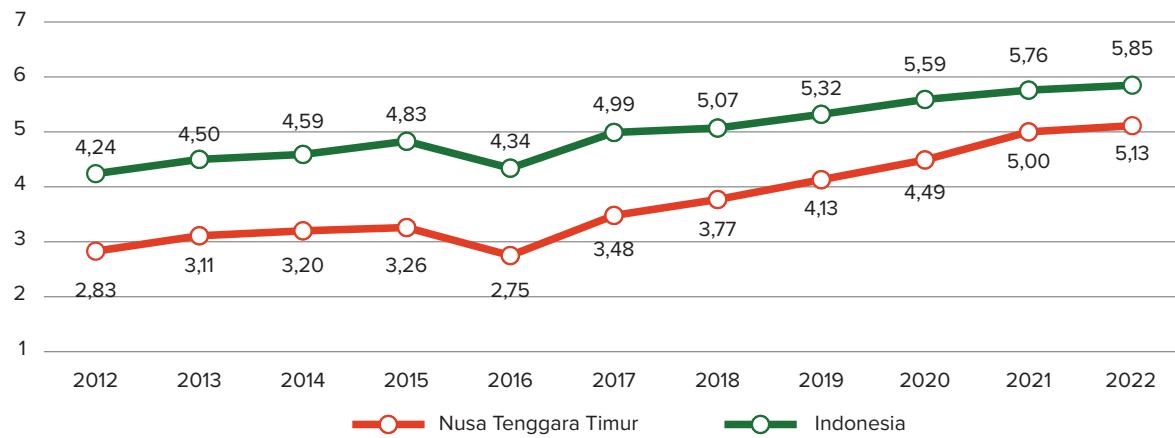


Sumber: BRIN 2023

2.3.4.4 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan suatu wilayah menuju masyarakat informasi. Dalam 10 Tahun terakhir, perkembangan IPTIK Provinsi NTT mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2012 nilai IPTIK Provinsi NTT sebesar 2,83 yang sempat turun menjadi 2,75 pada Tahun 2016 kemudian meningkat menjadi 5,13 pada Tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

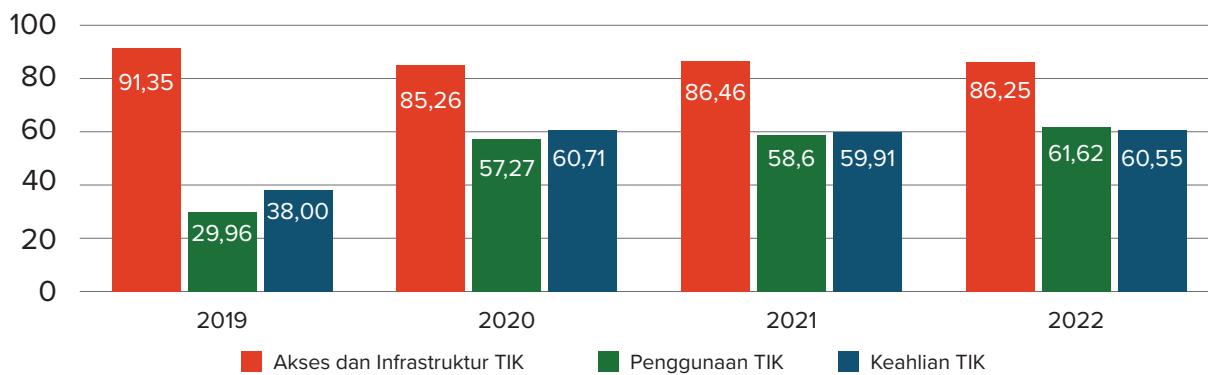
GAMBAR 2.59 INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI NTT TAHUN 2012-2022



Sumber: BPS

IPTIK terdiri dari 3 komponen sub indeks yaitu akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK. Komponen sub indeks akses dan infrastruktur TIK di Provinsi NTT sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan, dimana nilai sub indeks akses dan infrastruktur TIK Provinsi NTT Tahun 2019 senilai 91,35 yang turun menjadi 85,26 dan mengalami pertumbuhan menjadi 86,25 pada Tahun 2022. Komponen sub indeks penggunaan TIK di Provinsi NTT cenderung mengalami peningkatan yang konsisten dimana pada Tahun 2019 nilai sub indeks penggunaan TIK senilai 29,96 yang naik menjadi 57,27 pada Tahun 2020 dan terus naik menjadi 61,62 pada Tahun 2022. Demikian juga sub indeks keahlian TIK Provinsi NTT juga mengalami pertumbuhan sejak Tahun 2019 senilai 38 dan pada Tahun 2022 menjadi 60,35. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.60 KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROVINSI NTT TAHUN 2012-2022



Sumber: BPS

2.3.4.5 Penanaman Modal

Penanaman Modal merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh baik oleh penanam modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 realisasi penanaman modal dalam negeri dari sisi jumlah proyek, Provinsi NTT masih mendapatkan proporsi yang tergolong sangat kecil atau di bawah 1 persen. Demikian juga dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri di Provinsi NTT sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022 juga masih mendapatkan proporsi di bawah 1 persen kecuali pada Tahun 2018 senilai 1,3 persen. Sedangkan untuk jumlah proyek penanaman modal luar negeri di Provinsi NTT sejak Tahun 2010 sampai dengan 2022 juga masih mendapatkan Proporsi di bawah 1 persen, demikian juga dengan realisasi nilai investasi Provinsi NTT mendapatkan porsi di bawah 0,4 persen. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.11 JUMLAH PROYEK DAN NILAI INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI PROVINSI NTT TAHUN 2006-2022

No.	Komponen Penanaman Modal	2010	2014	2018	2022
1.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi NTT (Proyek)	4	1	82	1202
2.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri secara Nasional (Proyek)	875	1.652	10.815	124.582
	Proporsi Jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Nusa Tenggara Timur terhadap Nasional (%)	0,46	0,06	0,76	0,96
3.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi NTT (Miliar Rupiah)	0,1	3,6	4246,1	3.459,3
4.	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri secara Nasional (Miliar Rupiah)	60.626	156.126	328.605	552.769
	Proporsi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Nusa Tenggara Timur terhadap Nasional (%)	0,0002	0,002	1,3	0,6
5.	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri di Provinsi NTT (Proyek)	12	57	175	281
6.	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri secara Nasional (Proyek)	3.076	8.885	21.972	32.681
	Proporsi Jumlah Proyek Penanaman Modal Luar Negeri Nusa Tenggara Timur terhadap Nasional (%)	0,39	0,64	0,80	0,86
7.	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri di Provinsi NTT (Miliar Rupiah)	3,8	15,1	58,2	73,3
8.	Realisasi Penanaman Modal Luar Negeri secara Nasional (Miliar Rupiah)	16.214,8	28.529,7	28.964,1	45.605,0
	Proporsi Nilai Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Nusa Tenggara Timur terhadap Nasional (%)	0,02	0,05	0,20	0,16

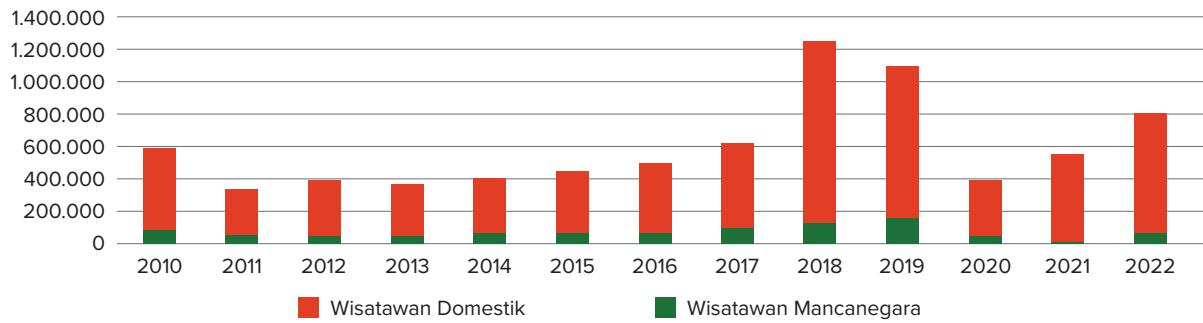
Sumber: BPS, diolah

2.3.5 Daya Saing Sektor Unggulan Daerah

2.3.5.1 Pariwisata

Pemerintah Indonesia telah menetapkan lima kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) atau Bali Baru dengan status super prioritas (DSP) yaitu Danau Toba, Bodobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Kelima DSP ini merupakan bagian dari program “10 Bali baru” yang diharapkan menjadi diversifikasi destinasi selain Bali yang lebih dulu identik sebagai destinasi utama wisata Indonesia. Berdasarkan statistik dalam kurun waktu 20 Tahun terakhir, jumlah tamu wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Provinsi NTT mengalami pasang surut. Pada Tahun 2010 jumlah total wisatawan yang berkunjung ke Provinsi NTT sejumlah 578.999 jiwa yang naik menjadi 1.239.432 jiwa pada Tahun 2018 kemudian turun secara signifikan menjadi 387.066 pada Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 dan pasca Pandemi Covid-19, jumlah wisatawan naik menjadi 802.641 jiwa pada Tahun 2022.

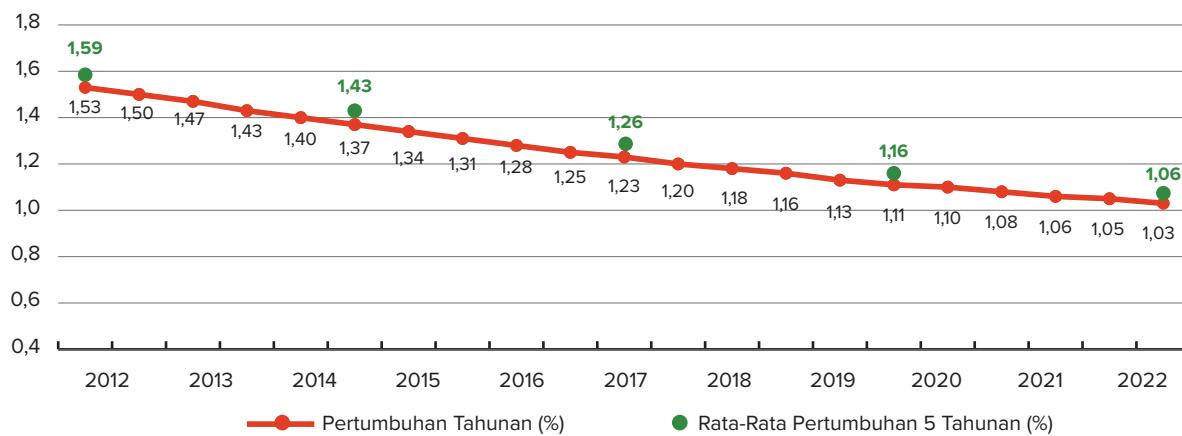
GAMBAR 2.61 JUMLAH TAMU HOTEL WISATAWAN MANCANEGARA DAN DOMESTIK PROVINSI NTT TAHUN 2010-2022



Sumber: BPS

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel di Provinsi NTT juga turut terdampak akibat Pandemi Covid-19. TPK Hotel Bintang Provinsi NTT Tahun 2010 senilai 50,38 persen yang turun menjadi 30,90 persen pada Tahun 2020 dan kemudian perlahan naik menjadi 39,83 persen pada Tahun 2022. Demikian juga TPK Hotel Non Bintang Provinsi NTT pada Tahun 2010 senilai 20,49 persen yang turun menjadi 9,62 persen pada Tahun 2020 dan kemudian naik perlahan menjadi 15,07 persen pada Tahun 2022.

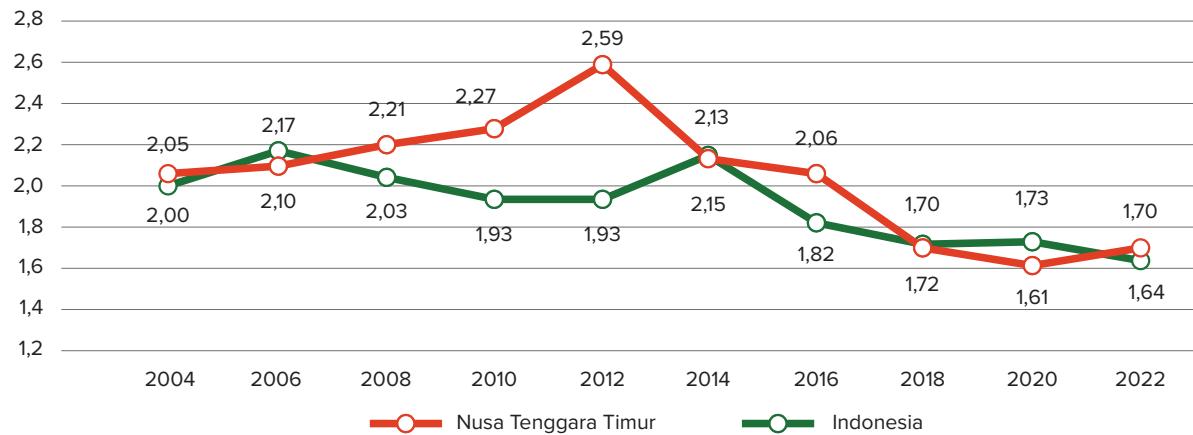
GAMBAR 2.62 TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR (TPK) HOTEL DI PROVINSI NTT TAHUN 2010-2022 (%)



Sumber: BPS

Perkembangan rata-rata lama menginap tamu di Provinsi NTT secara umum berada diatas rata-rata lama menginap secara nasional. Pada Tahun 2004 rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang selama 2,05 hari yang naik menjadi 2,59 hari pada Tahun 2012 lalu kemudian turun menjadi 1,70 hari pada Tahun 2022.

GAMBAR 2.63 RATA-RATA LAMA MENGINAP TAMU PADA HOTEL BINTANG DI PROVINSI NTT TAHUN 2004-2022 (HARI)



Sumber: BPS

2.3.5.2 Peternakan

Peternakan termasuk dalam sektor usaha yang dijalankan oleh masyarakat di Provinsi NTT. Peternakan merupakan kegiatan untuk mengembangbiakan serta budidaya hewan untuk mendapatkan manfaatnya. Provinsi NTT merupakan salah satu Provinsi dengan kontribusi peternakan besar yang cukup signifikan secara nasional. Terdapat 5 (lima) ternak di Provinsi NTT yang telah menjadi komoditas unggulan sejak Tahun 2000 sampai dengan saat ini meliputi Babi, Kerbau, Kuda, Sapi Potong serta Kambing. Pada Tahun 2022 Provinsi NTT memiliki populasi Babi dan Kerbau yang terbesar secara nasional, diikuti oleh Kuda, Sapi Potong serta Kambing. Rincian selengkapnya dapat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.12 POPULASI TERNAK UNGGULAN PROVINSI NTT TAHUN 2000 SAMPAI DENGAN 2022

No.	Provinsi	2000	2010	2020	2022	Peringkat Nasional Tahun 2022
1.	Populasi Babi Provinsi NTT (Ekor)	725.457	1.724.591	2.352.441	2.325.020	
	Populasi Babi Nasional (Ekor)	5.356.834	7.476.665	7.622.724	7.280.310	
	% Terhadap Populasi Nasional	13,54	23,07	30,86	31,94	Peringkat 1
2.	Populasi Kerbau Provinsi NTT (Ekor)	124.049	163.551	179.708	172.850	
	Populasi Kerbau Nasional (Ekor)	2.405.277	1.999.604	1.154.226	1.170.209	
	% Terhadap Populasi Nasional	5,16	8,18	15,57	14,77	Peringkat 1
3.	Populasi Kuda Provinsi NTT (Ekor)	82.814	113.367	118.338	125.302	
	Populasi Kuda Nasional (Ekor)	412.384	418.618	384.109	394.341	
	% Terhadap Populasi Nasional	20,08	27,08	30,81	31,78	Peringkat 2

No.	Provinsi	2000	2010	2020	2022	Peringkat Nasional Tahun 2022
4.	Populasi Sapi Potong Provinsi NTT (Ekor)	485.329	600.923	1.176.317	1.243.884	
	Populasi Potong Indonesia (Ekor)	11.008.017	13.581.570	17.440.393	18.610.148	
	% Terhadap Populasi Nasional	4,41	4,42	6,74	6,68	Peringkat 5
5.	Populasi Kambing Provinsi NTT (Ekor)	361.714	579.376	964.350	1.059.223	
	Populasi Kambing Indonesia (Ekor)	12.565.569	16.619.599	18.689.711	19.397.960	
	% Terhadap Populasi Nasional	2,88	3,49	5,16	5,46	Peringkat 5

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian RI, 2023 diolah

2.3.5.3 Perkebunan

Usaha Perkebunan termasuk dalam sektor unggulan Provinsi NTT dengan hasil utama meliputi Kelapa, Kopi serta Kakao. Sejak Tahun 2013 ketiga produk tanaman perkebunan unggulan Provinsi NTT tersebut mengalami peningkatan dalam hal luas Tanaman dalam lima tahun terakhir kecuali Kelapa. Pada Tahun 2013 Luas areal tanaman perkebunan Kelapa di Provinsi NTT seluas 152,72 turun menjadi 140,10 ribu hektar pada Tahun 2021. Luas tanaman perkebunan komoditas Kopi pada Tahun 2013 seluas 72,10 ribu hektar yang meningkat menjadi 80,70 ribu hektar pada Tahun 2021 serta Kakao pada Tahun 2013 memiliki luas areal tanam sebesar 53,95 persen yang meningkat menjadi 63,90 ribu hektar pada Tahun 2021.

TABEL 2.13 LUAS TANAMAN PERKEBUNAN UNGGULAN PROVINSI NTT TAHUN 2013-2021 (RIBU HA)

No.	Komoditas Perkebunan Unggulan	2013	2015	2017	2019	2021	Peringkat Nasional Tahun 2022
1.	Kelapa	152,72	140,20	143,90	144,30	140,10	Peringkat 8
2.	Kopi	72,10	65,70	70,30	71,10	80,70	Peringkat 7
3.	Kakao	53,95	53,90	57,30	61,80	63,90	Peringkat 8

Sumber: BPS 2023

2.3.5.4 Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan termasuk dalam sektor unggulan Provinsi NTT yang dijalankan oleh 62.502 rumah tangga perikanan di Provinsi NTT pada Tahun 2022. Komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTT meliputi Rumput Laut, Ikan Tuna, Ikan Tongkol, serta Ikan Cakalang. Pada tahun 2022, Provinsi NTT merupakan Provinsi kedua tertinggi secara nasional dalam hal jumlah produksi rumput laut sebesar 1.392.539 Ton atau sebesar 19 persen dari total produksi rumput laut secara nasional. Komoditas unggulan kelautan dan perikanan lainnya juga menunjukkan peningkatan jumlah produksi sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL 2.14 JUMLAH PRODUKSI KOMODITAS UTAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT
TAHUN 2017-2022**

No	Komponen	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Produksi Rumput Laut Provinsi NTT (Ton)	1.803.806	1.600.028	2.158.903	1.392.539
	Jumlah Produksi Rumput Laut Nasional (Ton)	9.187.331	8.547.212	8.445.264	7.245.731
	% Terhadap Produksi Nasional	19,63	18,72	25,56	19,22
2.	Jumlah Produksi Ikan Tuna Provinsi NTT (Ton)	2.612	3.213	3.422	6.904
	Jumlah Produksi Ikan Tuna Nasional (Ton)	409.016	323.884	300.803	359.143
	% Terhadap Produksi Nasional	0,64	0,99	1,14	1,92
3.	Jumlah Produksi Ikan Tongkol Provinsi NTT (Ton)	19.866	13.190	20.418	24.350
	Jumlah Produksi Ikan Tongkol Nasional (Ton)	542.782	503.564	580.804	593.901
	% Terhadap Produksi Nasional	3,66	2,62	3,52	4,10
4.	Jumlah Produksi Ikan Cakalang Provinsi NTT (Ton)	2.453	24.433	13.315	21.316
	Jumlah Produksi Ikan Cakalang Nasional (Ton)	510.686	512.846	468.269	432.851
	% Terhadap Produksi Nasional	0,48	4,76	2,84	4,92

Sumber: Database Validasi Nasional Satu Data Kelautan Perikanan

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

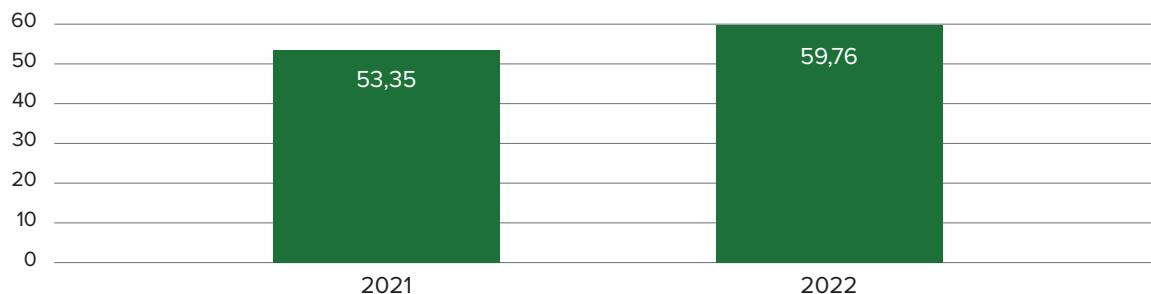
2.4.1 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Provinsi NTT pada Tahun 2021 mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik dengan kategori Cukup.

2.4.2 Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi Daerah Provinsi NTT mengalami peningkatan pada periode 2021 dan 2022 dimana nilai capaian pada Tahun 2021 sebesar 53,35 dan meningkat menjadi 59,76 pada Tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.64 INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI NTT TAHUN 2021-2022

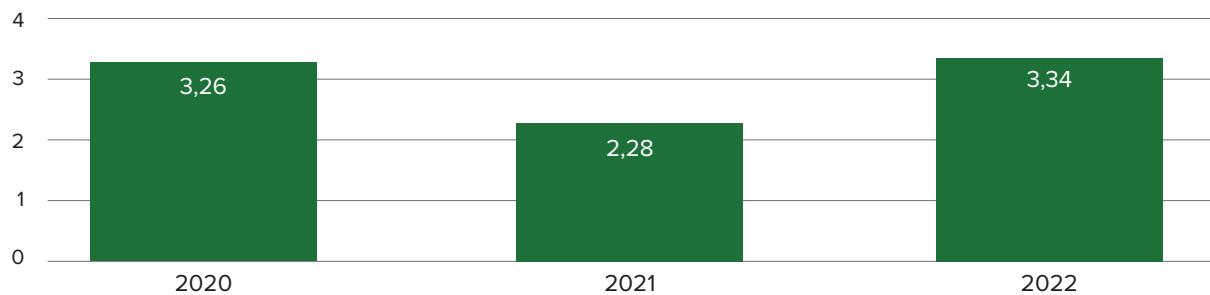


Sumber: Kementerian Dalam Negeri

2.4.3 Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Nilai Indeks SPBE Provinsi NTT pada Tahun 2020 sebesar 3,26 yang turun menjadi 2,28 pada Tahun 2021 dan naik menjadi 3,34 pada Tahun 2022 atau masih berada dalam rentang kategori 2,6-3,5 dengan predikat Baik.

GAMBAR 2.65 INDEKS SPBE PROVINSI NTT TAHUN 2020-2022

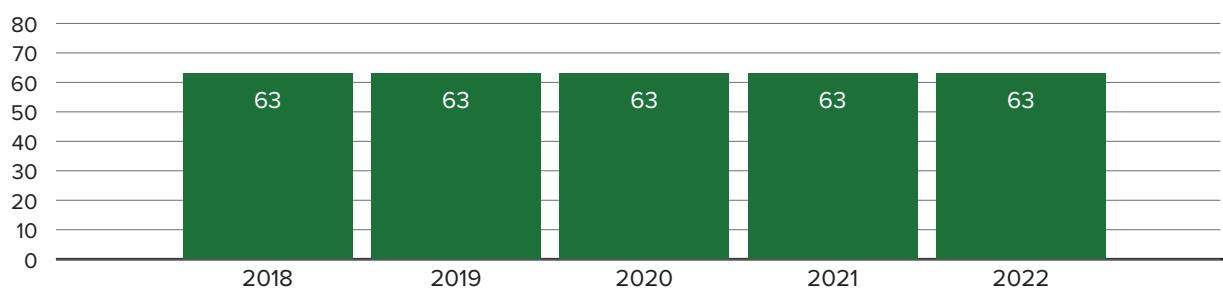


Sumber: KemenpanRB 2023

2.4.4 Indeks SAKIP

Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Provinsi NTT dalam 5 Tahun terakhir memiliki nilai Indeks SAKIP senilai 63 atau berada dalam rentang >60-70 dengan predikat Baik.

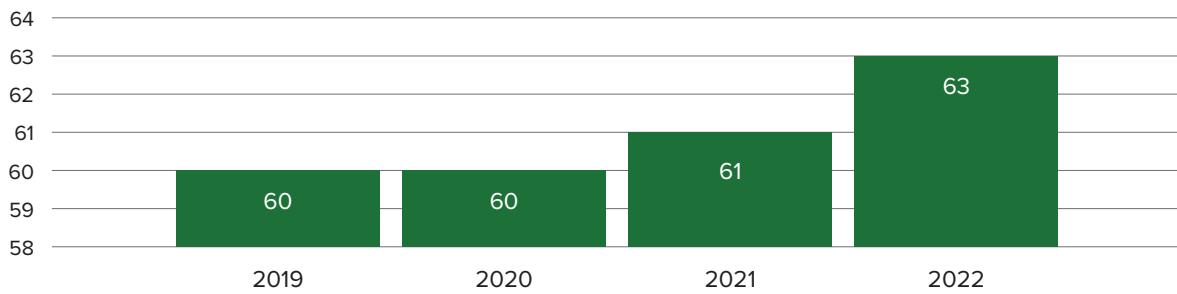
GAMBAR 2.66 INDEKS SAKIP PROVINSI NTT TAHUN 2018-2022



Sumber: KemenpanRB 2023

2.4.5 Indeks Reformasi Birokrasi

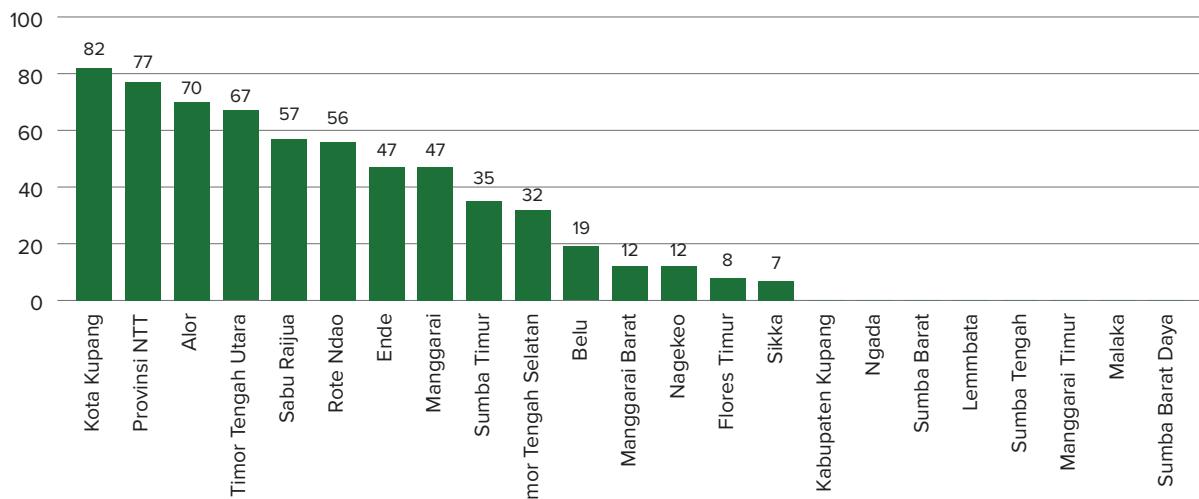
Indeks Reformasi Birokrasi digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja. Pemerintah Provinsi NTT pada Tahun 2019 dan 2020 memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi senilai 60 dengan kategori Cukup dan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 memiliki nilai 61 dan 63 dengan kategori Baik.

GAMBAR 2.67 INDEKS REFORMASI BIROKRASI PROVINSI NTT TAHUN 2019-2022

Sumber: KemenpanRB 2023

2.4.6 Standar Pelayanan Minimal

Pada Tahun 2022 terdapat 15 pemerintahan daerah termasuk pemerintah Provinsi NTT yang memiliki data capaian SPM dimana Kota Kupang memiliki persentase capaian tertinggi atau sebesar 82% selanjutnya Provinsi NTT dengan capaian 77% serta Kabupaten Alor dengan capaian 70%. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

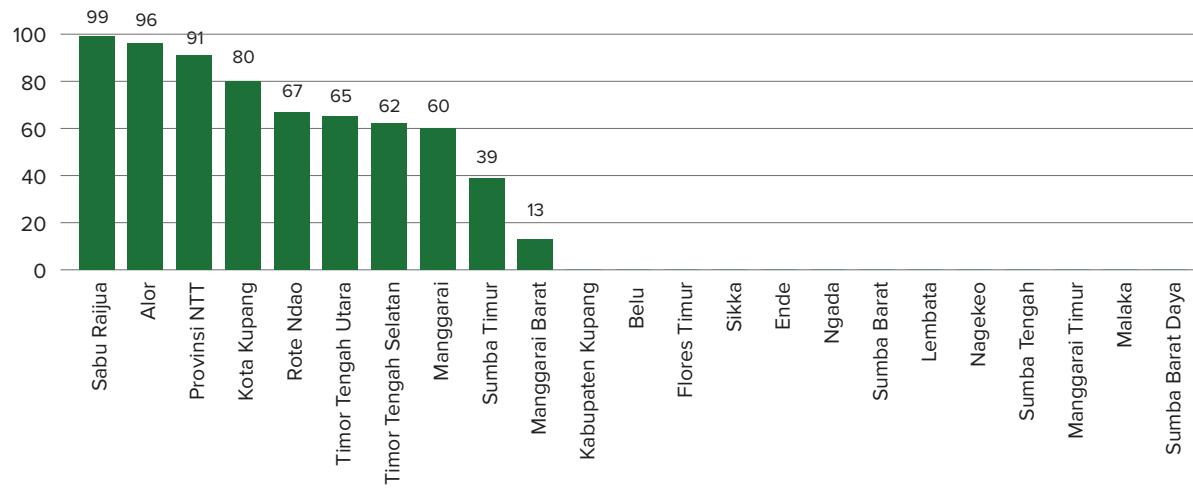
GAMBAR 2.68 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BERDASARKAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2022 (%)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

2.4.6.1 Pendidikan

SPM bidang pendidikan untuk provinsi meliputi pendidikan menengah dan pendidikan khusus sedangkan SPM bidang pendidikan untuk kabupaten/ kota meliputi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan anak usia dini. Capaian SPM bidang pendidikan Provinsi NTT pada Tahun 2022 senilai 91 persen sedangkan capaian SPM bidang pendidikan kabupaten/ kota di Provinsi NTT tertinggi yaitu Kabupaten Sabu Raijua sebesar 99 persen, Kabupaten Alor sebesar 96 persen serta Kota Kupang sebesar 90 persen. Masih terdapat 13 kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum mengukur capaian SPM bidang pendidikan pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.69 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN BERDASARKAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2022 (%)



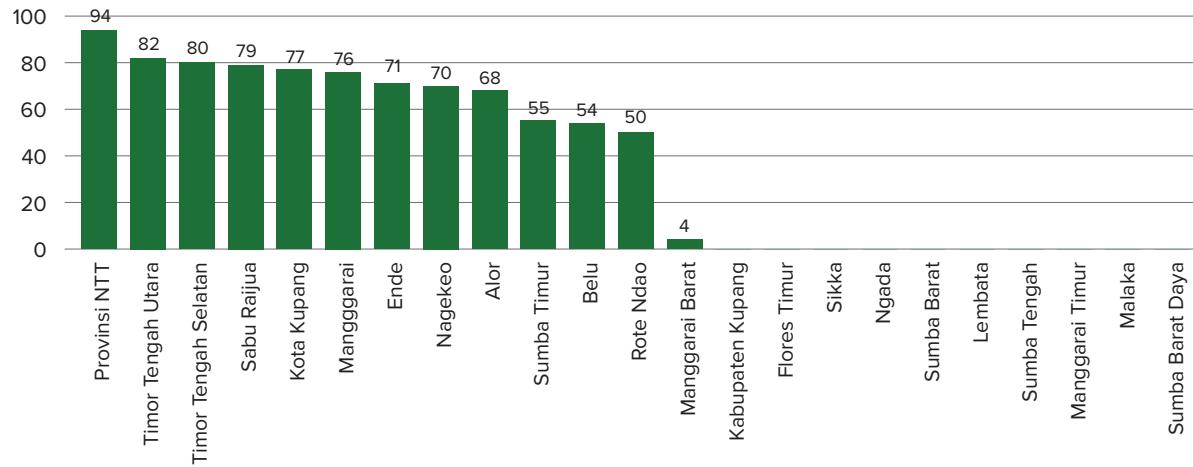
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

2.4.6.2 Kesehatan

SPM Bidang Kesehatan untuk provinsi meliputi pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. SPM Bidang Kesehatan untuk kabupaten/ kota meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis, serta pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia.

Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 94 persen. Capaian SPM Bidang Kesehatan kebupaten/ kota pada Tahun 2022 tertinggi yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 82 persen, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 80 persen serta Kabupaten Sabu Raijua sebesar 80 persen. Masih terdapat 10 kabupaten di Provinsi NTT yang tidak memiliki data capaian SPM pada tahun 2022.

GAMBAR 2.70 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KESEHATAN BERDASARKAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2022 (%)



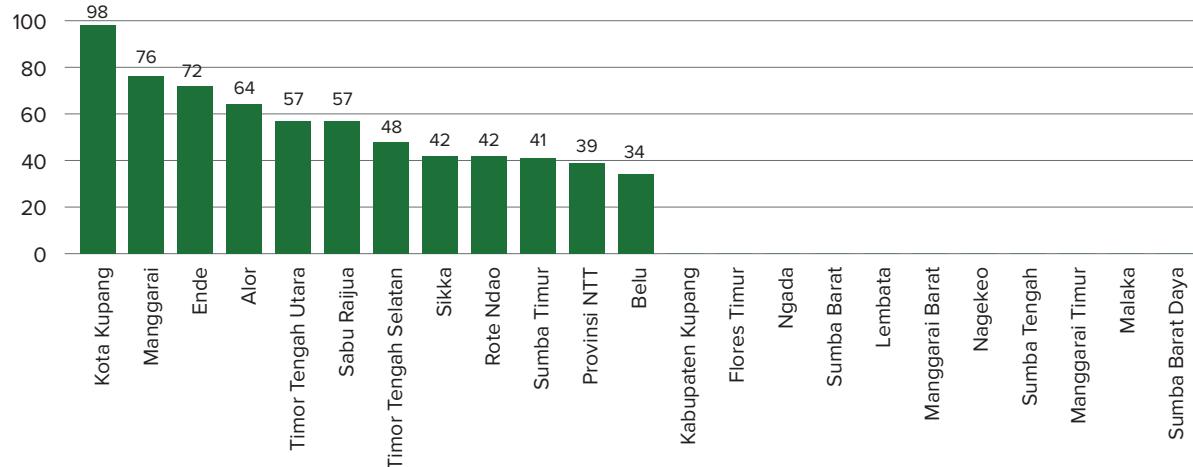
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

2.4.6.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi meliputi pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota. Sedangkan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten/ kota meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 39 persen. Capaian SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten/ kota pada Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 98 persen, Kabupaten Manggarai sebesar 76 persen serta Kabupaten Ende sebesar 72 persen. Masih terdapat 11 kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.71 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2022 (%)



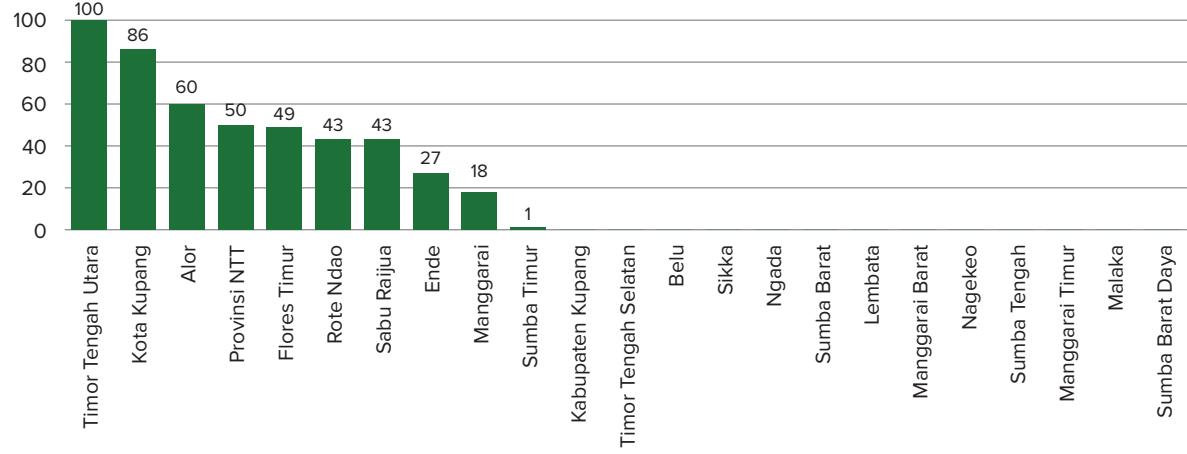
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

2.4.6.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman provinsi meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/ Kota meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT Tahun 2022 sebesar 50 persen. Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/ Kota Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 100 persen, Kota Kupang sebesar 86 persen serta Kabupaten Alor sebesar 60 persen. Masih terdapat 13 Kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.72 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN BERDASARKAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2022 (%)



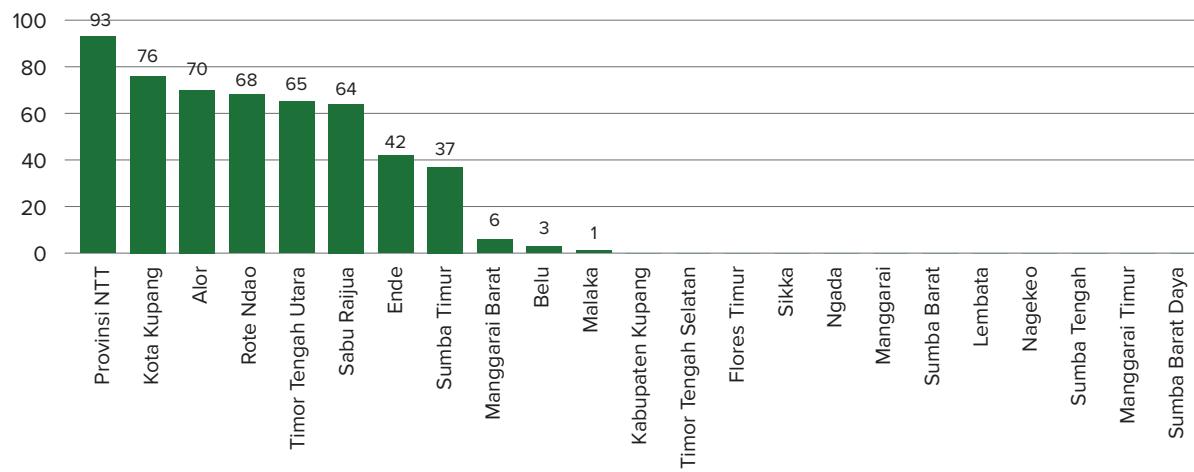
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

2.4.6.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat provinsi meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi sedangkan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/ kota meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat kabupaten/ kota, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 93 persen. Capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kabupaten/ kota Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 76 persen, Kabupaten Alor sebesar 70 persen serta Kabupaten Rote Ndao sebesar 68 persen. Masih terdapat 12 kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2022. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.73 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BERDASARKAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2022 (%)



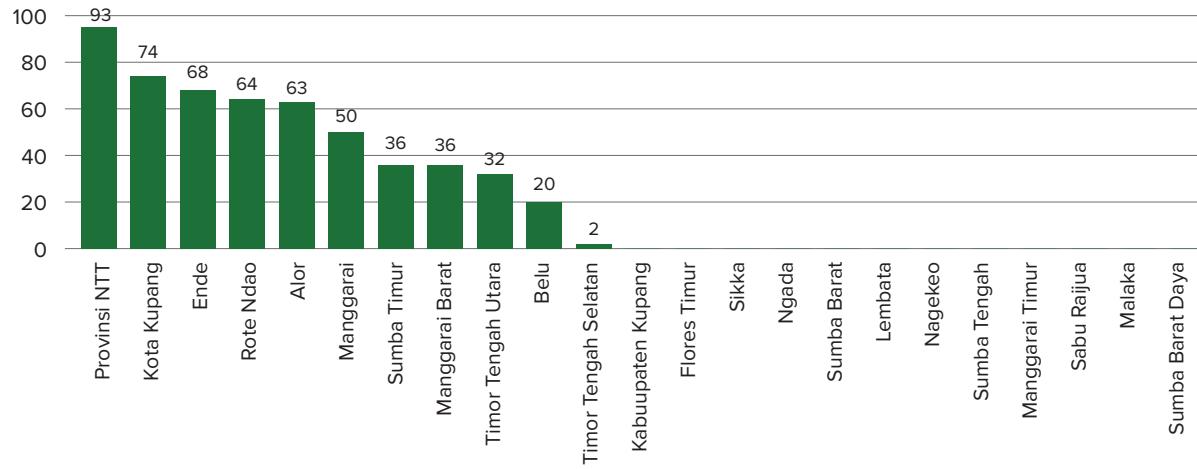
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

2.4.6.6 Sosial

SPM Bidang Sosial provinsi meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. SPM bidang sosial kabupaten/ kota meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 95 persen. Capaian SPM Bidang Sosial kabupaten/ kota pada Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 74 persen, Kabupaten Ende sebesar 68 persen, serta Kabupaten Rote Ndao sebesar 64 persen. Masih terdapat 11 Kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.74 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SOSIAL BERDASARKAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI NTT TAHUN 2022 (%)



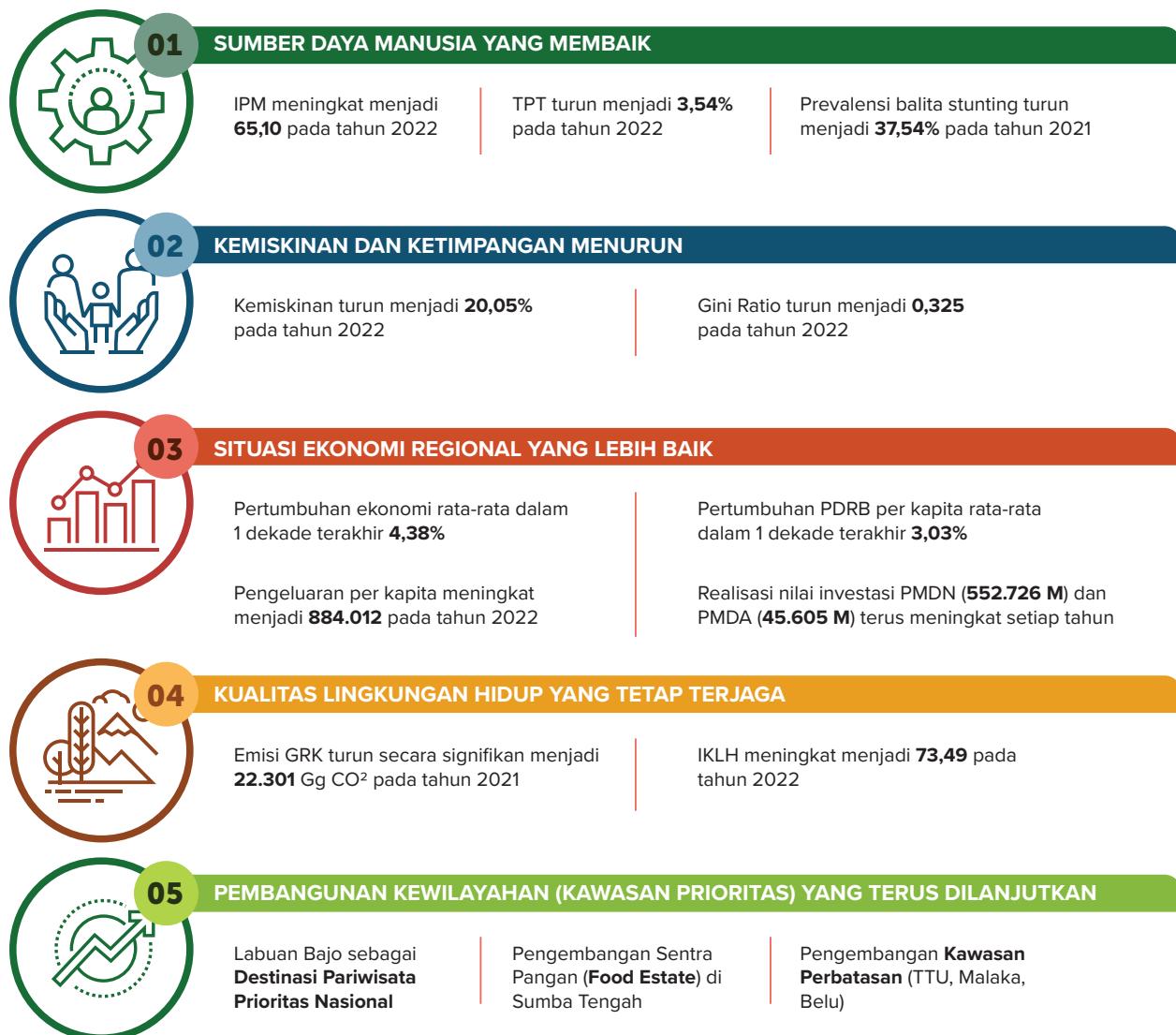
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023

2.5 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJPD PROVINSI NTT TAHUN 2005-2025

2.5.1 Ringkasan Capaian RPJPD Provinsi NTT 2005-2025

Provinsi NTT melalui pelaksanaan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 telah memberikan hasil dengan adanya perbaikan dalam berbagai dimensi pembangunan di tengah dinamika internal maupun eksternal yang begitu tinggi. Tantangan Provinsi NTT untuk menjadi Provinsi yang dapat menghapus status daerah tertinggal pada beberapa wilayah kabupaten, masih membutuhkan paket kebijakan yang strategis yang mumpuni.

GAMBAR 2.75 REFLEKSI PEMBANGUNAN PROVINSI NTT TAHUN 2005-2025



2.5.2 Sumber Daya Manusia Yang Membai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022. Jika diamati secara kumulatif, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat sebesar 6,69 Poin atau 59,21 pada Tahun 2010 yang menjadi 65,90 di Tahun 2022. Peningkatan kumulatif ini masih berada diatas nasional untuk periode yang sama, yaitu sebesar 6,38 poin dari tahun 2020 senilai 66,53 menjadi 72,91 pada Tahun 2023.

2.5.2.1 Kondisi Pendidikan Yang Membai

a. Akses pendidikan yang terus membaik

Hal ini dapat dilihat dari Rata-rata lama sekolah Provinsi NTT pada Tahun 2010 selama 6,5 Tahun naik menjadi 7,7 tahun pada Tahun 2022 serta harapan lama sekolah yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 senilai 10,85 Tahun sampai dengan Tahun 2022 selama 3,10 Tahun.

b. Mutu pendidikan yang cenderung membaik

Hal ini dapat dilihat dari jumlah Sekolah Dasar (SD) Tahun 2015 yang belum terakreditasi sejumlah 46,7 persen yang turun menjadi 23,83 persen pada Tahun 2022. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum terakreditasi pada Tahun 2015 sebanyak 54,7 persen yang turun menjadi 22,45 persen pada Tahun 2022. Demikian juga untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) yang belum terakreditasi pada Tahun 2015 sebanyak 47 persen yang turun menjadi 12,88 persen pada Tahun 2022, serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum terakreditasi pada Tahun 2015 sebesar 65,7 persen yang turun menjadi 19,26 persen pada Tahun 2022. Sedangkan untuk jenjang PAUD pada Tahun 2018 terdapat 96,37 persen PAUD yang belum terakreditasi yang turun menjadi 71,01 persen pada Tahun 2022. Kategori PKBM pada Tahun 2018 terdapat 93,10 persen yang belum terakreditasi yang turun menjadi 82,46 persen pada Tahun 2022.

c. Kualifikasi guru yang semakin membaik

Kualifikasi Guru minimal berijazah Diploma IV/ Strata 1 Provinsi NTT Tahun 2015 jenjang SD sebesar 37 persen yang naik menjadi 94 persen pada Tahun 2022, jenjang SMP sebesar 55 persen pada Tahun 2015 naik menjadi 97,6 persen pada Tahun 2022, jenjang SMA sebesar 71 persen pada Tahun 2015 naik menjadi 98,1 persen, jenjang SMK sebesar 70 persen pada Tahun 2015 naik menjadi 94,4 persen pada Tahun 2022 serta jenjang SLB Tahun 2018 sebesar 79,1 persen naik menjadi 93,4 persen.

d. Kondisi Sarana sekolah yang cenderung semakin ditingkatkan

Rasio kelas siswa Provinsi NTT Tahun 2015 jenjang SD yaitu 1:37 yang turun menjadi 1:18 pada Tahun 2022, jenjang SMP sebesar 1:42 turun menjadi 1:27, jenjang SMA sebesar 1:38 turun menjadi 1:28 dan jenjang SMK 1:28 turun menjadi 1:25. Demikian juga dengan kondisi ruang kelas dengan kategori rusak berat Tahun 2017 jenjang SD sebesar 16,05 persen yang turun menjadi 13,21 persen, jenjang SMP sebesar 11,08 persen yang turun menjadi 7,59 persen, jenjang SMA sebesar 7,04 persen yang naik menjadi 7,67 persen serta SMA sebesar 4,95 persen yang naik menjadi 6,67 persen.

e. Penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi yang ditamatkan terus meningkat

Komposisi penduduk NTT berusia 15 tahun keatas dengan kualifikasi pendidikan tinggi yang ditamatkan jenjang universitas pada Tahun 2022 sebesar 11,64 persen atau meningkat dari Tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,11 persen.

2.5.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Terus Meningkat

a. Status kesehatan masyarakat terus membaik

Capaian usia harapan hidup penduduk Provinsi NTT yang meningkat. Pada Tahun 2010 usia harapan hidup penduduk di Provinsi NTT sebesar 65,28 tahun yang naik menjadi 67,47 tahun pada Tahun 2022.

b. Angka kematian ibu, bayi, dan balita menurun

Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi NTT Tahun 2007 sebesar 57 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) yang turun menjadi 10 per 1.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan NTT 2021). Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi NTT Tahun 2007 sebesar 80 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) turun menjadi 1 per 1.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan NTT 2021). Sedangkan Angka Kematian Ibu Tahun 2007 sebesar 306 per 100.000 kelahiran hidup turun menjadi 184,2 per 100.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan NTT 2021).

c. Prevalensi balita stunting dan wasting menurun

Prevalensi balita stunting Provinsi NTT Tahun 2007 sebanyak 46,8 persen yang turun menjadi 37,8 persen pada Tahun 2021 serta prevalensi balita wasting Provinsi NTT Tahun 2007 sebanyak 20 persen yang turun menjadi 10,1 persen di Tahun 2021.

d. Penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis

Treatment coverage adalah jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. Pada Tahun 2021 Provinsi NTT memiliki angka *treatment coverage* (TC) sebesar 26,8 persen atau masih jauh berada di bawah capaian nasional yaitu 47,1 persen. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis Provinsi NTT Tahun 2021 sebesar 88,4 persen dan sudah berada diatas capaian nasional yaitu 86 persen.

e. Eliminasi Malaria

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut *Plasmodium*. Provinsi NTT pada tahun 2021 memiliki capaian eliminasi malaria untuk kabupaten/kota sebesar 22,7 persen dan masih berada jauh di bawah nasional 67,5 persen.

f. Angka kelahiran wanita usia produktif menurun

Total Fertility Rate (TFR) Provinsi NTT pada Tahun 2007 sebesar 4,2 yang turun menjadi 2,79 pada Tahun 2020.

g. Ketersediaan tenaga kesehatan semakin meningkat

Rasio dokter (spesialis dan umum) Provinsi NTT Tahun 2014 sebesar 7,86 per 100.000 penduduk yang naik menjadi 10 per 100.000 penduduk pada Tahun 2021. Rasio dokter Gigi (termasuk spesialis) Provinsi NTT Tahun 2014 sebanyak 1,75 per 100.000 penduduk yang naik menjadi 4 per 100.000 penduduk. Rasio Bidan Provinsi NTT Tahun 2014 sebesar 64 per 100.000 penduduk yang naik menjadi 132 per 100.000 penduduk. Sedangkan Rasio perawat Provinsi NTT Tahun 2014 sebesar 13 per 100.000 penduduk yang naik menjadi 206 per 100.000 penduduk Tahun 2020.

h. Kepemilikan jaminan kesehatan meningkat

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Provinsi NTT Tahun 2014 sebesar 50,24 persen yang naik menjadi 84,30 persen pada Tahun 2021 atau masih berada di bawah capaian nasional yaitu sebesar 87,00 persen pada Tahun 2021.

2.5.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka yang Menurun

a. Tingkat pengangguran terbuka menurun

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 cenderung mengalami penurunan. Secara kumulatif, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2005 sampai dengan 2023 mengalami penurunan sebesar 1,18% atau masih jauh di bawah capaian penurunan kumulatif nasional untuk periode yang sama, yaitu senilai 5,79%.

b. Penduduk yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi yang meningkat

Jumlah tenaga kerja Provinsi NTT dengan kategori *skilled* pada Tahun 2021 sejumlah 253.821 (9,15 persen), *semi skilled* sejumlah 2.155.008 (77,70 persen) dan *basic skilled* sejumlah 364.592 (13,14 persen).

c. Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

Kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja terdiri dari segmen penerima upah, segmen bukan penerima upah dan jasa konstruksi. Total cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Provinsi NTT Tahun 2021 sejumlah 257.592 jiwa yang terdiri atas segmen penerima upah aktif sebanyak 107.980 jiwa dan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bukan penerima upah sebanyak 60.423 jiwa serta kepersertaan jasa konstruksi sebanyak 89.189 jiwa.

2.5.3 Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun

Secara kumulatif, perkembangan persentase kemiskinan Provinsi NTT dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2023 mengalami penurunan sebesar 8,23% dari tahun *baseline* 2005 sebesar 28,19% menjadi 19,96% pada bulan Maret 2023 atau masih berada diatas capaian kumulatif penurunan kemiskinan nasional yaitu sebesar 6,61% pada periode yang sama. Kondisi ketimpangan pengeluaran di Provinsi NTT masih berada dalam kategori moderat mendekati rendah (0,3-0,5) dan cenderung menurun. Kondisi ini dapat diamati dari garis trend linier yang terus melandai. Pada Tahun 2009, nilai gini rasio sebesar 0,357 kemudian menurun menjadi 0,354 pada Tahun 2020 dan 0,325 pada Tahun 2023.

2.5.4 Situasi Ekonomi Regional Yang Lebih Baik

Selama periode 2010-2022, pertumbuhan rata-rata ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 4,38 persen. Capaian pertumbuhan tertinggi sebesar 5,67 persen di Tahun 2011 dan terendah saat mengalami kontraksi sebesar -0,84 di Tahun 2020. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami penurunan sebesar 2,01 persen selama periode 2010-2022. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010 mencapai 5,06 persen dan kemudian melambat hingga mencapai 3,05 persen pada Tahun 2022.

Secara umum, PDRB per kapita Provinsi NTT mengalami peningkatan selama periode 2010-2022. Pada Tahun 2010, PDRB riil per kapita sebesar 9.317 ribu rupiah kemudian meningkat menjadi 13.299 ribu rupiah pada Tahun 2022. Selain itu, PDRB nominal per kapita juga meningkat dari 9.317 ribu rupiah pada Tahun 2010 menjadi 21.718 ribu rupiah pada Tahun 2022. Secara rata-rata, pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 3,03 persen yang diamati dari nilai ADHK, dan sempat mengalami penurunan nilai pada periode MII di Tahun 2020. Capaian ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang dapat diamati dari rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita pada MI sebesar 3,52 persen dan pada MII 1,55 persen. Selain itu, pertumbuhan PDRB per kapita cenderung menurun, diamati dari garis trend linier pertumbuhan yang melandai.

Sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2020 realisasi penanaman modal dalam negeri dari sisi jumlah proyek, Provinsi NTT masih mendapatkan proporsi yang tergolong sangat kecil atau di bawah 1 persen. Demikian juga dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri di Provinsi NTT sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022 juga masih mendapatkan proporsi di bawah 1 persen kecuali pada Tahun 2018 senilai 1,3 persen. Sedangkan untuk jumlah proyek penanaman modal luar negeri di Provinsi NTT sejak Tahun 2010 sampai dengan 2022 juga masih mendapatkan Proporsi di bawah 1 persen, demikian juga dengan realisasi nilai investasi Provinsi NTT mendapatkan porsi di bawah 0,4 persen.

2.5.5 Kualitas Lingkungan Hidup Yang Tetap Terjaga

Capaian total penurunan emisi GRK Provinsi NTT sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2021 mengalami penurunan. Total emisi GRK Provinsi NTT pada Tahun 2000 sejumlah 1.297.758,66 Gg CO₂ yang turun menjadi 1.024.287,31 Gg CO₂ kemudian terjadi peningkatan pada Tahun 2018 menjadi 1.830.058,59 Gg CO₂ dan kemudian turun menjadi 805.301,73 Gg CO₂ pada Tahun 2021. Komposisi emisi GRK Provinsi NTT yang terbesar sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 202 yaitu emisi GRK dari Sektor Kehutanan. Pada Tahun 2021 emisi GRK Sektor Kehutanan Provinsi NTT menyumbang 53,89 persen, yang ikuti oleh emisi GRK Sektor Limbah sejumlah 20,94 persen, emisi GRK Sektor Pertanian sebesar 15,01 persen, emisi GRK Sektor Industri (IPPU/Industrial Processes and Product Use) sejumlah 7,42 persen serta Sektor Energi sejumlah 2,74 persen.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTT dalam kurun waktu sejak 2010 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada Tahun 2010 nilai IKLH Provinsi NTT senilai 50,72 yang naik menjadi 73,49 pada Tahun 2022. Nilai IKU Provinsi NTT juga mengalami pertumbuhan yang cukup dinamis, dimana pada Tahun 2012 nilai IKU Provinsi NTT senilai 92,19 turun menjadi 77,13 pada Tahun 2015 dan kemudian naik menjadi 91,52 pada Tahun 2022. atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Nilai IKA Provinsi NTT juga mengalami pertumbuhan yang stagnan, dimana pada Tahun 2011 nilai IKA Provinsi NTT senilai 56,73 turun menjadi 35,18 pada Tahun 2016 dan kemudian naik menjadi 52,62 pada Tahun 2022. Nilai IKL Provinsi NTT juga mengalami pertumbuhan yang berflutuatif, dimana pada Tahun 2012 nilai IKL Provinsi NTT senilai 57,31 naik menjadi 63,84 pada Tahun 2018 dan kemudian turun menjadi 58,74 pada Tahun 2022.

2.5.6 Pembangunan Kewilayahannya yang Terus Dilanjutkan

Presiden Indonesia ke-7 dalam rapat terbatas kabinet Tanggal 15 Juli 2019 di Jakarta, telah mencanangkan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di lima wilayah yaitu Danau Toba, Bodobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Labuan Bajo merupakan destinasi pariwisata yang meliputi 11 kabupaten dan Kawasan Cagar Biosfer Komodo serta wilayah otorita seluas 400 hektar sebagai suatu kawasan pariwisata terpadu yang masuk ke dalam program strategis nasional yaitu pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional.

Tujuan wisata utama di Labuan Bajo adalah wisata bahari, dan beberapa objek wisata utama yang dapat dikunjungi seperti Komodo, binatang purba yang hanya ada di Taman Nasional Komodo dan telah terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1991 (Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain disekitarnya). Selain melihat hewan purba Komodo, wisatawan Labuan Bajo dapat menyusuri keindahan alam pulau-pulau yang berada di sekitar Labuan Bajo, seperti Pulau Seraya, pulau Bidadari, Pulau Padar, Pulau Sabolo dan Kanawa. Di selatan Labuan Bajo terdapat rute menuju ke pulau Rinca dimana pada saat senja datang terlihat kelelawar beterbangun. Selanjutnya ada Air Terjun Cunca Wulang di Kawasan Hutan Mbeliling yang berada pada ketinggian 200 mdpl, yang akan terliat seperti *green canyon* versi lebih kecil, lalu ada Gua Rangko, Goa Batu Cermin, Bukit Cinta, Bukit Sylvia, Desa Tado, Kampung Melo, Pantai Pede, Pantai Pink Beach, Pantai Wae cicu, Dermaga Putih, dan Gili Laba.

Pengembangan kawasan *food estate* berbasis korporasi petani merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan mengembangkan *food estate* di berbagai daerah diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan pangan di masa mendatang karena pengelolaan pangan dan pertanian

tidak lagi ditempuh dengan cara biasa atau konvensional, tetapi dilakukan pada skala usaha yang luas (*economics of scale*) dengan penerapan inovasi teknologi serta pengembangan kelembagaan dan infrastruktur pendukung. Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada tahun 2022 - 2024 ditetapkan bertahap. Pada tahun 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, tahun 2023 menjadi 6.350 ha dan pada tahun 2024 menjadi 10.000 ha yang terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 hektar. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk pada level provinsi menggunakan skenario tren dengan sejumlah asumsi yang mendasari sesuai pola data atau fenomena di masing-masing wilayah. Asumsi tersebut diantaranya *Total Fertility Rate* (TFR), *Infant Mortality Rate* (IMR), dan asumsi *Net Migration Rate*.

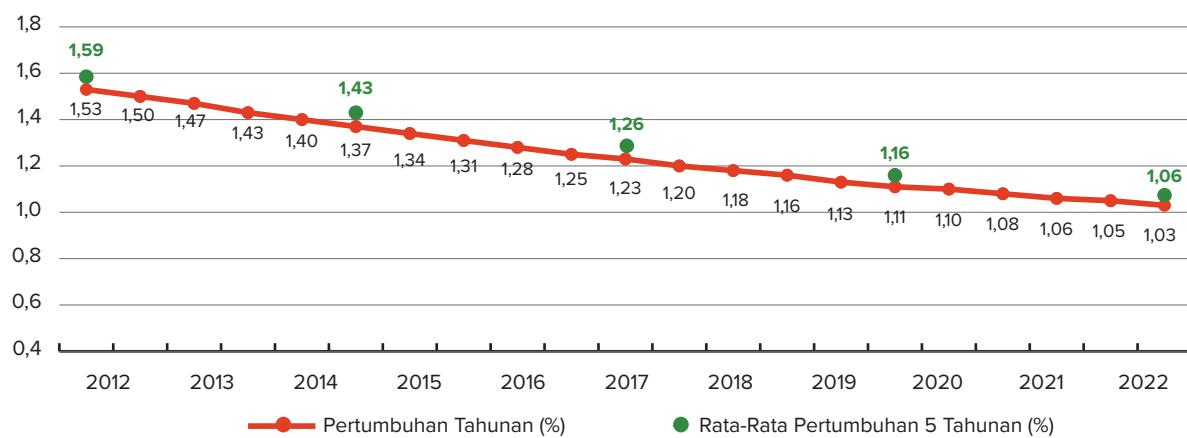
TABEL 2.15 ASUMSI PROYEKSI PENDUDUK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

Parameter	2025	2030	2035	2040	2045
FERTILITAS					
Total Fertility Rate (TFR)	2,64	2,53	2,45	2,39	2,36
Crude Birth Rate (CBR)	20,6	19,17	18,03	17,36	17,06
Jumlah Kelahiran (000)	118,33	118,23	118,47	120,82	125,18
MORTALITAS					
E0 Laki-laki	70,14	70,79	71,38	71,77	71,96
E0 Perempuan	73,89	74,9	75,99	76,72	77,16
E0 Laki-laki + Perempuan	71,98	72,8	73,64	74,2	74,51
IMR Laki-laki	25,3	22,17	18,34	15,7	14,24
IMR Perempuan	18,24	15,73	13,05	11,26	10,26
IMR Laki-laki + Perempuan	21,86	19,03	15,76	13,53	12,3
Crude Death Rate (CDR)	6,41	6,56	6,76	7,14	7,65
Jumlah Kematian (000)	36,81	40,43	44,41	49,67	56,11
MIGRASI					
Net Migration Rate	0,8	0,78	0,76	0,76	0,75

Sumber: BPS, 2023

Jumlah penduduk NTT diproyeksikan sebesar 5.742,56 ribu jiwa pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 7.337,81 ribu jiwa pada tahun 2045 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,53 persen pada tahun 2025 dan menurun menjadi 1,03 persen pada tahun 2045. Pada periode 2020-2025 pertumbuhan rata-rata penduduk sebesar 1,59 persen dan secara bertahap melambat menjadi menjadi 1,06 persen pada periode 2040-2045. Lebih lanjut, kepadatan penduduk meningkat dari 123,64 jiwa/km² pada tahun 2025 menjadi 157,98 jiwa/km² pada tahun 2045.

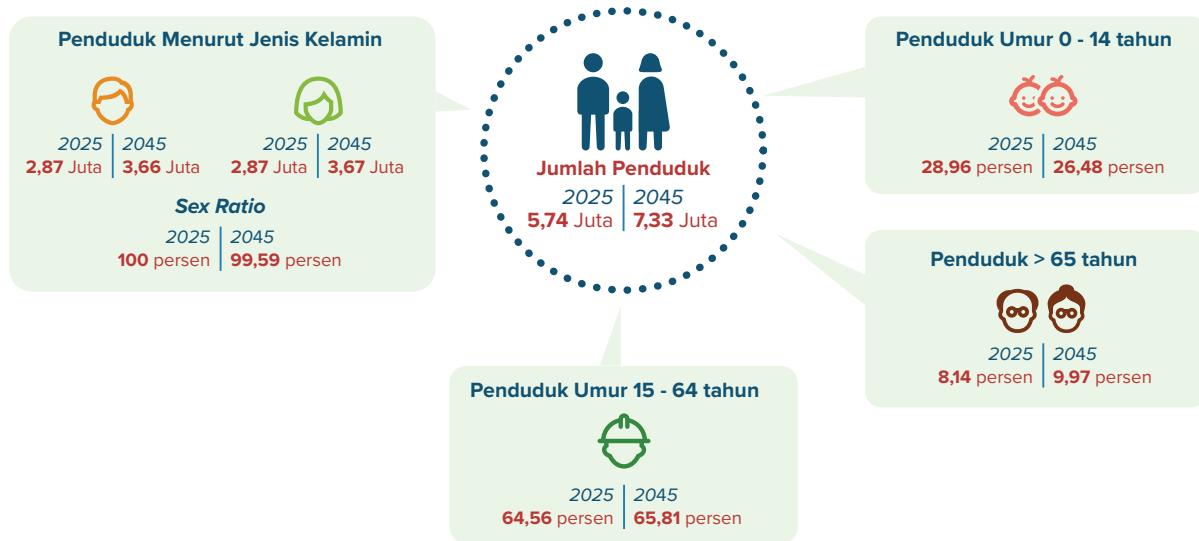
GAMBAR 2.76 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Komposisi penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.871,26 ribu jiwa dan perempuan sebesar 2.871,31, atau dengan proporsi yang cenderung seimbang. Pada tahun 2045, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 3.661,32 ribu jiwa, namun lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar 3.676,49 ribu jiwa. Kondisi perubahan komposisi ini juga tergambar dari *sex ratio* yang cenderung menurun antar periode. Angka *sex ratio* pada tahun 2025 sebesar 100 persen kemudian menurun menjadi 99,59 persen di tahun 2045, menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

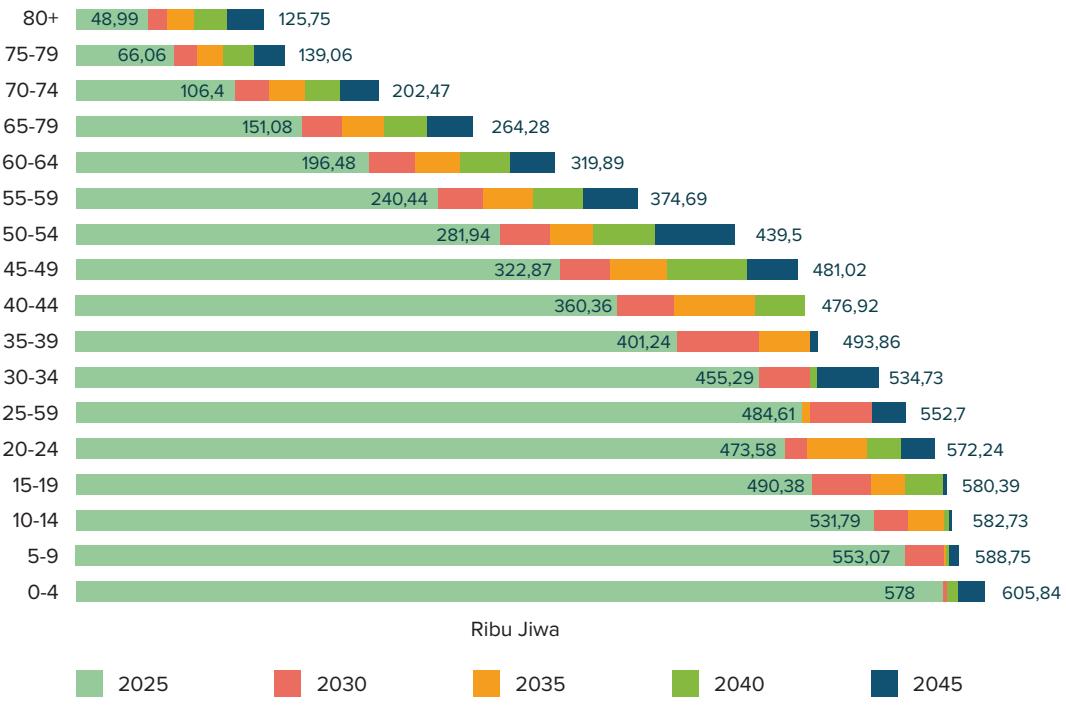
GAMBAR 2.77 KONDISI DEMOGRAFI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur meningkat pada tahun 2045 dibandingkan tahun 2025. Jumlah penduduk terbesar ialah pada usia 0-4 tahun yaitu sebesar 578 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 605,84 ribu jiwa pada tahun 2045. Namun, penambahan jumlah penduduk terbesar ialah pada kelompok umur 45-49 tahun. Pada tahun 2025 jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 322,87 ribu jiwa kemudian bertambah sebanyak 158,15 ribu jiwa menjadi 481,02 ribu jiwa pada tahun 2045.

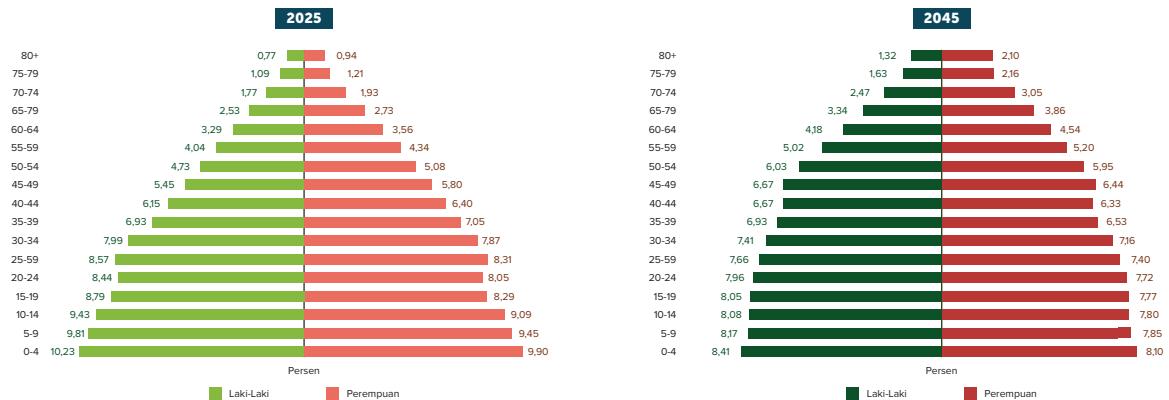
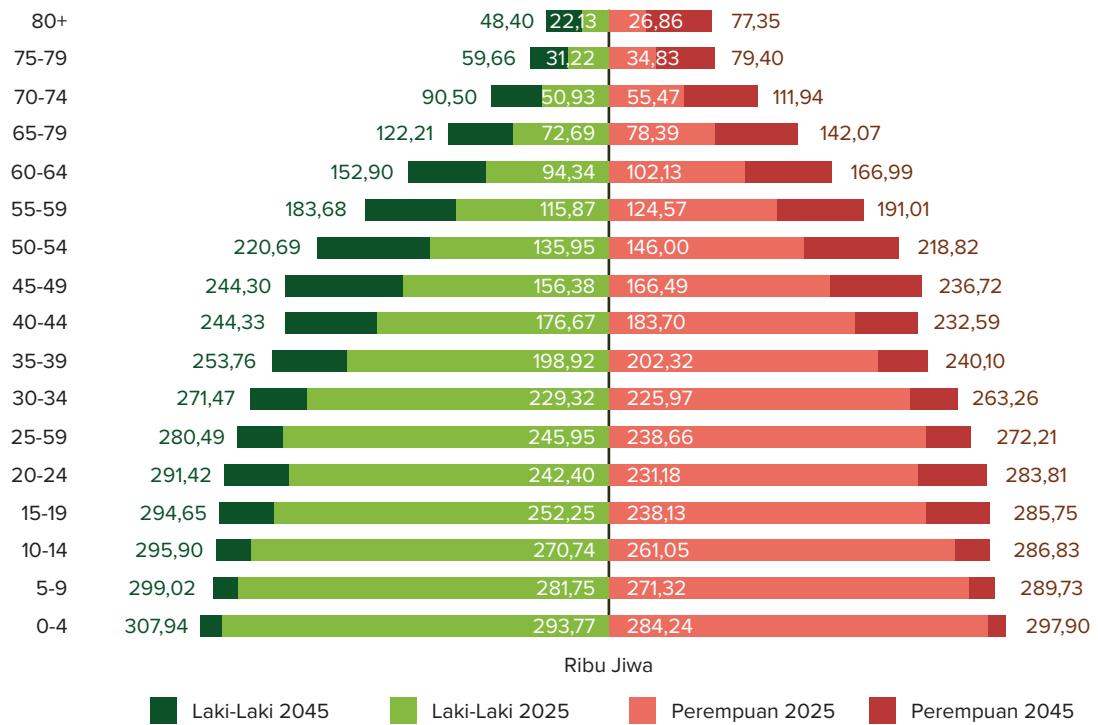
GAMBAR 2.78 JUMLAH PENDUDUK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Lebih lanjut, jika diamati berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk terbesar pada kelompok umur 0-4 tahun cenderung menurun meskipun jumlahnya bertambah selama periode 2025-2045. Persentase penduduk perempuan pada kelompok umur ini menurun dari 10,23 persen (293,77 ribu jiwa) pada tahun 2025 menjadi 8,41 persen (307,94 ribu jiwa) pada tahun 2045, sedangkan persentase penduduk laki-laki menurun dari 9,90 persen (284,24 ribu jiwa) pada tahun 2025 menjadi 8,10 persen (297,90 ribu jiwa) pada tahun 2045.

GAMBAR 2.79 PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Sementara itu, perubahan persentase penduduk perempuan tertinggi selama periode 2025-2045 ialah pada kelompok umur 80 tahun ke atas dari yaitu meningkat sebesar 1,17 persen. Pada penduduk laki-laki, kelompok umur 50-54 tahun mengalami peningkatan persentase tertinggi sebesar 1,29 persen. Secara jumlah, kelompok umur 50,54 tahun pada penduduk perempuan memiliki penambahan penduduk terbesar yaitu 72,82 ribu jiwa, dan pada penduduk laki-laki, kelompok umur 45-49 mengalami penambahan tertinggi yaitu sebesar 87,92 ribu jiwa.

Jumlah penduduk kelompok umur 0-14 tahun (di bawah 15 tahun) diproyeksikan bertambah selama periode 2025-2024. Pada tahun 2025, jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 1.662,86 ribu jiwa, bertambah menjadi 1.777,32 ribu jiwa pada tahun 2045. Meskipun demikian, persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun diproyeksikan menurun dalam periode yang sama. Pada tahun 2025, persentase kelompok umur ini sebesar 28,96 persen kemudian turun menjadi 26,48 persen pada tahun 2035 dan 24,22 persen pada tahun 2045.

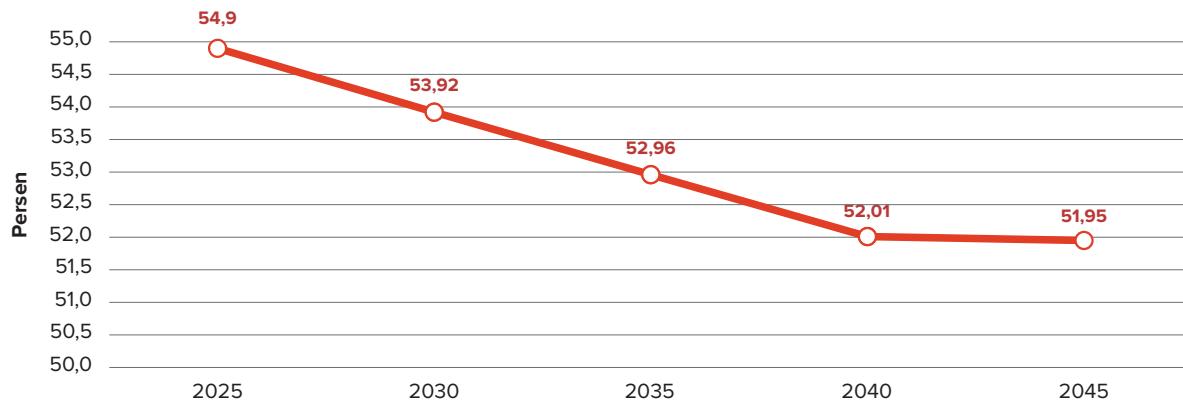
Kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) diproyeksikan meningkat baik persentase maupun jumlah selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, persentase penduduk umur 15-64 tahun sebesar 64,56 persen (3.707,19 ribu jiwa) kemudian meningkat menjadi 65,81 persen (4.825,94 ribu jiwa) pada tahun 2045.

Penduduk lanjut usia (lansia) atau di atas 60 tahun dari hasil proyeksi menunjukkan peningkatan baik jumlah maupun proporsi selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, jumlah penduduk lansia sebanyak 569,01 ribu jiwa (9,91 persen) bertambah menjadi 791,40 ribu jiwa (12,04 persen) pada tahun 2035 dan 1.051,45 ribu jiwa (14,33 persen) pada tahun 2045.

Sementara itu, untuk penduduk di atas 65 tahun juga mengalami peningkatan sama seperti penduduk lansia selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, jumlah penduduk di atas 65 tahun sebanyak 372,53 ribu jiwa (6,49 persen) bertambah menjadi 534,94 ribu jiwa (8,14 persen) pada tahun 2035 dan 731,56 ribu jiwa (9,97 persen) pada tahun 2045.

Rasio ketergantungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diproyeksikan menurun selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan sebesar 54,9 persen, artinya ada sebanyak 54-55 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Kondisi ini menurun di tahun 2045 yaitu sebesar 51,95 persen, atau terdapat 51-52 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

GAMBAR 2.80 RASIO KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Penentuan bonus demografi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merujuk pada klasifikasi global (*new typology of demographic change*) World Bank. Klasifikasi ini membagi bonus demografi ke dalam 4 (empat) kriteria berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu: 1) pertumbuhan persentase penduduk umur produktif tahun 2015-2030; 2) TFR tahun 1985; dan 3) TFR tahun 2015.

TABEL 2.16 KRITERIA/TIPOLOGI BONUS DEMOGRAFI

Pertumbuhan Persentase Penduduk Umur Produktif Tahun 2015-2030		TFR Tahun 1985	TFR Tahun 2015	
		> 2,1	≥ 2,1	> 4
≤ 0	Pasca bonus demografi (<i>post-dividend</i>)	Akhir bonus demografi (<i>late-dividend</i>)		≥ 4
> 0			Awal bonus demografi (<i>early-dividend</i>)	Pra bonus demografi (<i>pre-dividend</i>)

Berdasarkan kriteria/tipologi bonus demografi, beberapa kondisi dapat diamati dari proses dan keluaran demografis di Provinsi NTT, sebagai berikut.

1. Pertumbuhan persentase penduduk umur produktif yang lebih besar dari 0 (nol), yaitu sebesar 0,54 persen secara rata-rata.
2. TFR Provinsi NTT tahun 1985 bepatokan pada capaian pada tahun 1980 yaitu sebesar 5,54 anak per perempuan.
3. TFR Provinsi NTT tahun 2015 merujuk pada capaian TFR tahun 2012 dan 2017 yaitu di bawah 4 anak per perempuan.

Dengan mengacu pada beberapa kondisi di atas, maka Provinsi NTT dapat dikategorikan dalam kelompok wilayah yang mengalami awal bonus demografi (*early-dividend*). Kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan persentase penduduk umur produktif yang lebih besar dari 0 (nol) dan TFR Provinsi NTT tahun 2015 yang berada di bawah 4.

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Hasil proyeksi jumlah kebutuhan rumah/tempat tinggal berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Provinsi NTT ialah sebanyak 1,148 juta lebih unit di tahun 2025 dan meningkat menjadi 1,467 juta lebih unit di tahun 2045. Dari hasil proyeksi kebutuhan tersebut, selanjutnya dapat diestimasi jumlah penambahan rumah/tempat tinggal berdasarkan tahun dasar 2022. Sesuai dengan data kondisi awal, jumlah penambahan unit rumah hingga tahun 2045 yaitu sebanyak 407.487 unit.

TABEL 2.17 HASIL PROYEKSI JUMLAH KEBUTUHAN RUMAH/TEMPAT TINGGAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal	Kebutuhan				
		2022	2025	2030	2035	2040
Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	5.481,79	5.742,56	6.166,05	6.570,93	6.959,78	7.337,81
Proyeksi Rumah/Tempat Tinggal (unit)	1.060.075*	1.148.512	1.233.210	1.314.186	1.391.956	1.467.562

* Data hasil estimasi berdasarkan proyeksi jumlah rumah tangga (RT) (BPS NTT, 2023) dan persentase RT yang memiliki rumah sendiri (BPS NTT, 2023)

Total kebutuhan air minum di Provinsi NTT baik domestik maupun non domestik diproyeksikan sebesar 151,510 juta lebih m³/tahun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 215,110 juta lebih m³/tahun pada tahun 2045. Total kebutuhan air tersebut meningkat dibandingkan kondisi tahun 2023 sebesar 68,177 juta lebih m³/tahun.

Jika diamati total kebutuhan harian, maka jumlah konsumsi air minum akan meningkat dari 415,098 ribu m³/hari (4,8 ribu liter/detik) pada tahun 2025 menjadi 589,344 m³/hari (6,8 ribu liter/detik).

TABEL 2.18 HASIL PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023*	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	5.569.070	5.742.560	6.166.050	6.570.930	6.959.780	7.337.810
Total Kebutuhan Air (liter/detik)	4.659	4.804	5.732	6.108	6.470	6.821
Total Kebutuhan Air (m ³ /hari)	402.557	415.098	495.232	527.751	558.982	589.344
Total Kebutuhan Air/tahun (m ³ /tahun)	146.933.262	151.510.589	180.759.852	192.629.047	204.028.317	215.110.395

* Kondisi tahun 2023 adalah hasil estimasi/proyeksi (bukan data riil)

Kebutuhan listrik tahun 2025 sebanyak 1,024,493 unit Rumah 450 V dan Gardu (KVA) sebanyak 12,789 KVA dan Tahun 2045 dibutuhkan 170,114 unit Rumah 450 V dan Gardu (KVA) sebanyak 851 KVA.

TABEL 2.19 HASIL PROYEKSI KEBUTUHAN LISTRIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	5306,95	5742,56	6166,05	6570,93	6959,78	7337,81
Per unit Rumah 450 V per jiwa	1.559.659	2.584.152	2.774.723	2.956.919	3.131.901	3.302.015
Gardu listrik (setiap 200 KVA)	1.150	12.921	13.874	14.785	15.660	16.510

Volume timbulan sampah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 15.792 m³/hari, meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2045 sebesar 20.178 m³/hari. Dari volume timbulan sampah ini, maka dapat diproyeksikan kebutuhan fasilitas 20 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2025 kebutuhan kontainer penampung sampah mencapai 1.316 unit dan pada tahun 2045 dibutuhkan 1.682 unit. Lebih lanjut, kebutuhan armada pengangkut sampah untuk tahun 2025 dibutuhkan sebanyak 439 unit dan tahun 2045 sebanyak 561 unit.

TABEL 2.20 HASIL PROYEKSI KEBUTUHAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023*	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	5.481,79	5.742,56	6.166,05	6.570,93	6.959,78	7.337,81
Jumlah timbulan sampah (m ³ /hari)	15.074,92	15.792,04	16.956,64	18.070,06	19.139,40	20.178,98
TPS/kontainer sampah (unit/12 m ³)	1.256	1.316	1.413	1.506	1.595	1.682
Armada truk sampah (unit/12 m ³ /3x ritase)	419	439	471	502	532	561

* Kondisi tahun 2023 adalah hasil estimasi/proyeksi (bukan data riil)

Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan fasilitas Posyandu sejumlah 10.561 unit dan meningkat menjadi 10.645 unit pada tahun 2045.

Demikian pula proyeksi jumlah fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) pada tahun 2025 adalah sejumlah 1227 unit dan meningkat pada tahun 2045 menjadi 1227 unit.

Jumlah fasilitas puskesmas pada tahun 2025-2045 diproyeksi sesuai dengan jumlah wilayah administrasi kecamatan berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2019 yaitu setiap kecamatan memiliki minimal 1 (satu) puskesmas. Oleh sebab itu, berdasarkan jumlah kecamatan tahun 2022, maka jumlah puskesmas selama periode 2025-2045 sebanyak 450 unit, dan jumlahnya harus disesuaikan dengan jumlah kecamatan apabila ada penambahan atau pengurangan kecamatan ke depannya.

TABEL 2.21 HASIL PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi Tahun 2022	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	5.481,79	5.742,56	6.166,05	6.570,93	6.959,78	7.337,81
Posyandu	10.561	10.561	10.570	10.615	10.635	10.645
Pustu	1.227	1227	1227	1227	1227	1227
Puskesmas	436	436	438	440	445	450
Rumah Sakit	59	62	65	68	70	75

Pada tahun 2025 dibutuhkan 1.646 Taman Kanak-kanak dan 5.870 pada tahun 2045. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar membutuhkan 5.382 sarana pada tahun 2025 dan 5.412 pada tahun 2045.

Lebih lanjut, jenjang Sekolah Menengah Pertama/Sederajat penambahan setiap lima tahunnya karena jumlah sarana pada tahun *baseline* 2023 sejumlah 1.908 sudah melebihi jumlah sarana dan prasarana yang harus tersedia pada setiap lima tahunnya sehingga pada tahun 2045 menjadi 1.938. Pada jenjang pendidikan SMA/sederajat dibutuhkan jumlah sarana dan prasarana yang harus tersedia dari 973 pada tahun 2025 menjadi 1.529 pada tahun 2045.

TABEL 2.22 HASIL PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN (SEKOLAH) DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi Tahun 2022	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah penduduk (ribu jiwa)	5.481,79	5.742,56	6.166,05	6.570,93	6.959,78	7.337,81
Taman Kanak-kanak	1.646	4.594	4.933	5.257	5.568	5.870
Sekolah Dasar	5.382	5.382	5.392	5.397	5.405	5.412
SMP/Sederajat	1.908	1.918	1.923	1.928	1.932	1.938
SMA/Sederajat	973	1.196	1.285	1.369	1.450	1.529

Sementara itu, jika diamati dari jumlah penduduk menurut kelompok umur sekolah, maka sarana dan prasarana ruang kelas yang perlu ditambahkan hingga Tahun 2045 hanya ada pada tingkatan PAUD dan SMA/sederajat. Jumlah ruang kelas PAUD pada Tahun 2022 sebanyak 10.856 unit dan di Tahun 2045 diproyeksikan mencapai 11.877 unit. Sedangkan pada tingkat SMA/sederajat, jumlah ruang kelas pada Tahun 2022 sebanyak 11.267 unit dan meningkat menjadi 11.610 unit di tahun 2045.

TABEL 2.23 HASIL PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN (RUANG KELAS) MENURUT KELOMPOK UMUR SEKOLAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia PAUD	332,17	337,07	349,54	347,46	349,73	356,30
Jumlah Penduduk Usia SD/Sederajat	630,13	652,64	680,39	697,25	697,19	701,85
Jumlah Penduduk Usia SMP	294,95	309,50	327,68	342,76	349,51	348,97
Jumlah Penduduk Usia SMA	286,12	293,92	318,69	331,83	347,26	348,30
Ruang Kelas PAUD	10.856	11.236	11.651	11.582	11.658	11.877
Ruang Kelas SD/Sederajat	40.218	40.228	40.248	40.268	40.288	40.308
Ruang Kelas SMP/Sederajat	13.812	13.862	13.912	13.942	13.962	13.992
Ruang Kelas SMA/Sederajat	11.27	11.267	11.367	11.467	11.575	11.610

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Pada Sub bab ini secara umum akan menggambarkan tentang arahan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju 20 (dua puluh) tahun mendatang dan arah kebijakan kewilayahan RPJPN 2025-2045 di wilayah Bali-Nusa Tenggara yang memberikan dampak bagi pertumbuhan wilayah di Provinsi NTT. Dimana, modal dasar pembangunannya bahwa Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang strategis, memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, memiliki potensi pariwisata dan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penduduk dari latar belakang budaya yang beragam, serta memiliki Sumber Daya Manusia yang harus di dorong untuk memiliki daya saing tinggi.

Merujuk telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan dalam kerangka mewujudkan posisi Nusa Tenggara Timur di dalam kesatuan **“Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”**, maka konsep pengembangan wilayah NTT diarahkan untuk memanfaatkan potensi – potensi unggulan daerah yang terkait dengan pengarusutamaan **Ekonomi Hijau** dan **Ekonomi Biru** yang berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, maka fokus utama pembangunan wilayah adalah berdasarkan sistem cluster atau pengelompokan wilayah meliputi kesatuan wilayah daratan Sumba sebagai Sumba Iconic Island, kesatuan wilayah Timor, Rote, Sabu dan Alor (TIROSA) sebagai Timor Biomass Island dan kesatuan wilayah daratan Flores sebagai Flores Geothermal Island.

2.7.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Nusantara dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah dan kelompok pendapatan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan.

Arah pembangunan wilayah untuk Nusa Tenggara Timur selama 20 tahun ke depan dikemas menjadi satukesatuan sebagai **“Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”** yang akan mendorong pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ke kawasan timur Indonesia.

Pembangunan ekosistem kepariwisataan di Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencakup 5 (lima) prioritas antara lain:

Pertama:

- Pengembangan pusat – pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata;
- Sentra - sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan serta Sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan;
- Optimalisasi kawasan eksisting dengan fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, pemanfaatan potensi lokal (rantai pasok) dan nilai investasi melalui PMA dan PMDN dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kedua: pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia SDM lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara ke depan; khususnya disesuaikan dengan sektor potensial Wilayah Bali-Nusa Tenggara yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata, serta didukung oleh infrastruktur pelayanan dasar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ketiga: peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas intra dan antar Wilayah Bali-Nusa Tenggara yang menjadi backbone pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

Keempat: penguatan tata kelola pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kepemimpinan unggul dan masyarakat sipil yang partisipatif untuk menopang percepatan pembangunan wilayah, serta upaya penguatan pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan stabilitas wilayah dan menjadikan NTT sebagai kawasan yang berdaya saing ekonomi tinggi

Kelima: peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, di dalam 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan Indonesia Emas terdapat poin – poin penting tentang arah pembangunan Indonesia Emas antara lain pada Transformasi Indonesia (Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola), Landasan Transformasi (Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi Wilayah Nusa Tenggara dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi), dan kerangka implementasi transformasi (Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta Kesinambungan pembangunan), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut.

GAMBAR 2.81 DELAPAN MISI (AGENDA) DAN 17 (TUJUH BELAS) ARAH PEMBANGUNAN INDONESIA EMAS

TRANSFORMASI INDONESIA		
MISI 1. Transformasi Sosial	MISI 2. Transformasi Ekonomi	MISI 3. Transformasi Tata Kelola
IE 1 Kesehatan untuk Semua	IE 4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	IE 9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif
IE 2 Pendidikan Berkualitas yang Merata	IE 5 Penerapan Ekonomi Hijau	
IE 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif	IE 6 Transformasi Digital	
	IE 7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
	IE 8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
LANDASAN TRANSFORMASI		
MISI 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	MISI 5. Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologi	
IE 10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan demokrasi substansial	IE 13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	IE 16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
IE 11 Stabilitas Ekonomi Makro	IE 14 Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender	IE 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
IE 12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Genter Kawasan	IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas	
KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI		
MISI 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan MISI 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan MISI 8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan		

Sumber: RPJPN 2025-2045

Dengan demikian, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah pelu memperhatikan juga Agenda Kesinambungan Pembangunan meliputi:

1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
2. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional;
4. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;
5. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; dan
6. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *blended finance*.

2.7.2 Pengembangan Pusat – Pusat Pertumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045

2.7.2.1 Penyelarasan Muatan RPJPD dan RTRW Provinsi NTT

Mempedomani penilaian mandiri keselarasan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 dengan muatan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka penentuan arah pembangunan yang dibagi per periode RPJMD (empat periode) dapat memperhatikan aspek – aspek, yaitu:

1. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan pola ruang pada sektor unggulan/potensi daerah;
2. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan struktur ruang mendukung pertumbuhan sektor unggulan/potensi daerah;
3. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan kawasan strategis nasional dan daerah (fokus pada pengembangan kawasan strategis yang mendukung ekonomi, sosial budaya, daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan sebagainya).

Penyelarasan muatan ini dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut.

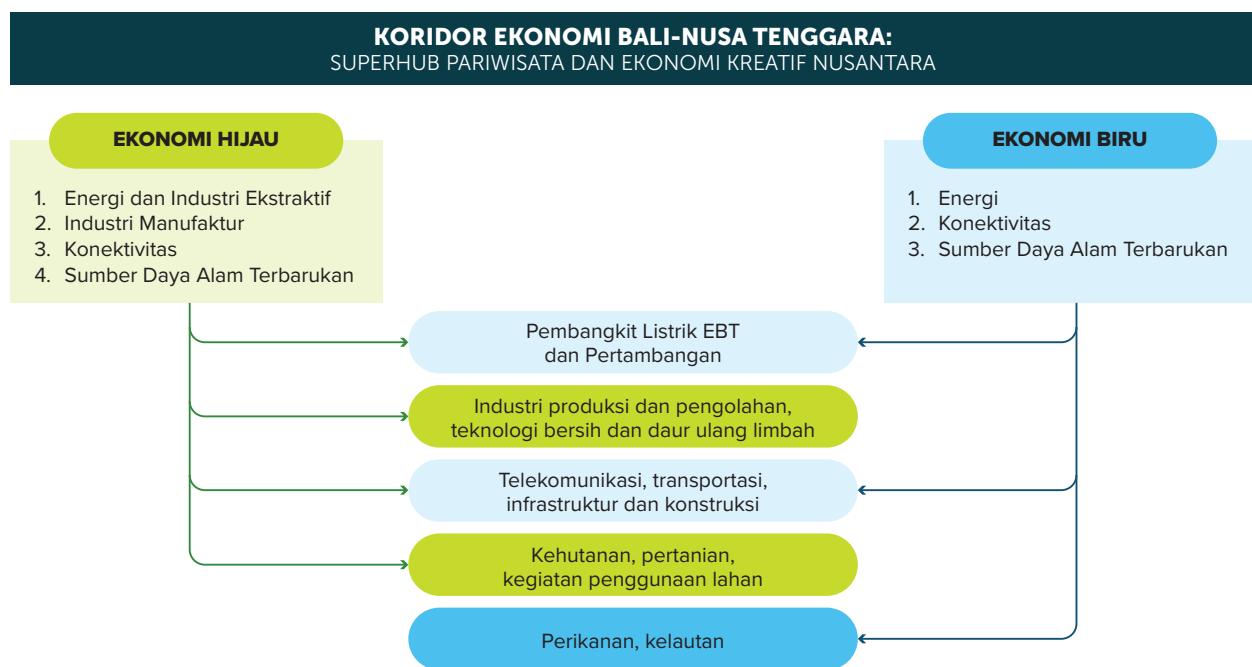
GAMBAR 2.82 PENYELARASAN MUATAN RTRW, RPJPD DAN RPJMD



2.7.2.2 Fokus Utama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju Indonesia Emas 2045

Guna mendukung “**Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara**”, maka kontribusi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kekuatan provinsi kepulauan di wilayah Timur Indonesia dapat dicapai melalui Pengembangan **Ekonomi Hijau** dan pengembangan **Ekonomi Biru** seperti pada Gambar 2.82 di bawah ini. Pada prinsipnya, transformasi pada “**Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara**”, dilakukan melalui pengaruh utamaan **Ekonomi Hijau** (*Green economy*) dan **Ekonomi Biru** (*Blue economy*).

GAMBAR 2.83 KORIDOR EKONOMI BALI- NUSA TENGGARA DALAM KERANGKA EKONOMI HIJAU DAN EKONOMI BIRU



Fokus utama pengelolaan pariwisata yang dikelompokkan ke dalam wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus yang berdasarkan konsep ekowisata yang tanggap bencana alam agar tetap mengkonservasi alam dan melestarikan alam, pemanfaatan wisata budaya dan ritual keagamaan dengan penyelenggaraan event-event (atraksi) budaya dalam rangka perlindungan terhadap adat istiadat dan warisan nenek moyang, penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sebagai mitra kerja dalam bidang *service excellence* di kawasan wisata potensial di dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Sedangkan, pengembangan ekonomi kreatif mencakup fashion (tenun), kriya (anyaman dan pahat), dan kuliner tradisional.

Adapun, secara umum tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi hijau dan ekonomi biru adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan yang iklusif dan merata, menjamin ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, menghasilkan ekosistem yang sehat dan produktif dalam menghasilkan jasa ekosistem dan dalam upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

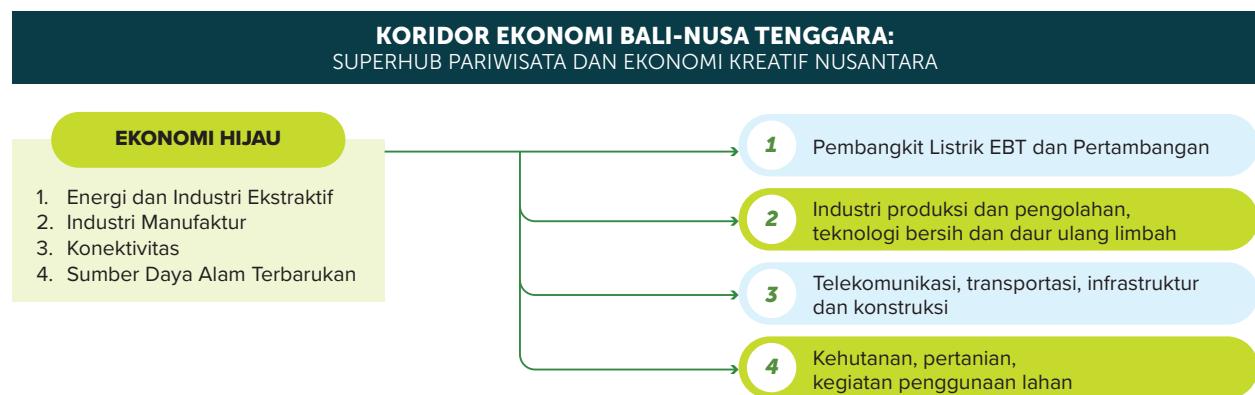
2.7.2.2.1 Arah Pengembangan Ekonomi Hijau

Konsep pengembangan ekonomi hijau di Provinsi NTT berupa komitmen yang kuat dari masyarakat/ para pihak untuk mencapai rencana pertumbuhan ekonomi hijau/green growth plan (GGP), dengan lingkup rekomendasi pada 4 (empat) sektor utama dan rumpun sektor terkait antara lain energi dan industri ekstraktif (Pembangkit Listrik EBT dan Pertambangan), industri manufaktur (industri produksi dan pengolahan, teknologi bersih dan daur ulang limbah), konektivitas (telekomunikasi, transportasi, infrastruktur dan konstruksi) dan sumber daya alam terbarukan (kehutanan, pertanian, perikanan, kegiatan penggunaan lahan dan kegiatan kelautan) yang kemudian melalui peningkatan produktivitas pertanian dan kehutanan dengan menjaga dan memperbaiki hutan melalui kemitraan antara *private sector*, petani, masyarakat, penggiat lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya serta mekanisme insentif dan disinsentif untuk jasa ekosistem pada skala global, nasional dan lokal seperti Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL), REDD+ (mekanisme yang memberikan insentif ekonomi untuk mendorong negara-negara berkembang mengurangi emisi karbon melalui pengelolaan hutan lestari) dan inisiatif lainnya.

Terkait pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, bahwa dengan melakukan skenario pembangunan rendah karbon (PRK)- tinggi dan PRK – Plus maka diperlukan upaya percepatan pembangunan di Provinsi NTT diantaranya dapat melalui upaya transisi ke sumber energi terbarukan (EBT), peningkatan efisiensi energi, penegakan penuh moratorium pertambangan, mematuhi target komitmen terkait sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati dan peningkatan produktivitas lahan sebesar 4% per tahun, pengenalan mekanisme untuk menetapkan harga karbon, target reforestasi yang lebih tinggi, kebijakan untuk meningkatkan efisiensi energi serta pengurangan sampah lebih tinggi terutama di wilayah perkotaan.

Dengan demikian, skema arah pengembangan Wilayah NTT melalui pengembangan **Ekonomi Hijau** (Gambar 2.84) yang mengacu pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi paling besar pada PDRB Provinsi NTT, dan Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, transportasi dan telekomunikasi. Sehingga, kontribusi NTT melalui pembangunan Ekonomi Hijau menuju Indonesia Emas 2045 dapat dijelaskan sebagai berikut:

GAMBAR 2.84 SKEMA PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU NTT



Pertama, peralihan menuju penggunaan sumber-sumber energi rendah karbon dan model-model ekstraksi bernilai tambah dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yang menguntungkan masyarakat dan berpotensi untuk mensuply EBT ke wilayah lain di sekitar Provinsi NTT. Adapun, arah pengembangan energi khususnya EBT difokuskan pada 3 (tiga) wilayah besar yaitu Sumba Iconic Island di wilayah Sumba dengan pengembangan EBT Tenaga Surya, Timor Biomassa di Wilayah Timor dengan Pengembangan EBT Biomassa dan Flores Geothermal di Wilayah Flores untuk pengembangan EBT Geothermal (Panas Bumi). Secara potensi, wilayah Sumba dan Flores akan berkontribusi besar di dalam pengembangan EBT di dalam wilayah Nusa Tenggara maupun ke wilayah Jawa dan Bali termasuk pada penurunan emisi GRK yang mengarah pada substitusi energi fosil.

Sementara itu, dukungan untuk Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur energi terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa depo, Jaringan minyak dan gas bumi termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut, Jaringan infrastruktur ketenaga listrik yang meliputi PLTD, PLTMH, PLTA, PLTP, PLTS, PLTU, PLTMG, PLTB serta Gardu Induk/IBT dan Rencana Pengembangan Gardu Induk/IBT di Provinsi NTT dengan lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Langkah-langkah utama yang direkomendasikan mencakup evaluasi biaya, manfaat, dan kelayakan pembayaran tarif feed-in, menarik sektor swasta untuk berinvestasi dalam energi panas bumi dan memanfaatkan keunggulan komparatif dari adanya fasilitas pengolahan mineral di dekat lokasi sumber-sumber daya tambahan, seperti air dan energi rendah karbon.

Kedua, arah pengembangan Industri produksi dan pengolahan, teknologi bersih dan daur ulang limbah. Guna meneruskan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor ini yang merupakan bagian integral dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama mengingat kesempatan kerja yang cukup besar, maka langkah-langkah utama yang direkomendasikan antara lain mendirikan industri berbasis potensi unggulan daerah, pengolahan limbah dan persampahan yang efektif dan efisien, dan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi bersih.

Arahan pengembangan Industri melalui Pengelolaan kegiatan dengan mempertimbangkan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial, kerjasama dengan pihak investor untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam, mempertahankan/ meningkatkan Kabupaten/ Kota yang memiliki potensi sektor basis Industri serta upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan upaya – upaya rehabilitasi kawasan dan upaya pengendalian pemanfaatan kawasan melalui *buffer zone*. Dengan demikian, kegiatan industri lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan industri meliputi Industri kreatif berupa fashion (motif tenun), kriya (anyaman dan seni pahat) dan kuliner (tradisional), Industri Agro (kopi, pengolahan ikan, kemiri, dan sejenis agro lainnya), Industri ringan (Industri pembuatan perahu kayu, industri kerajinan bambu dan sejenis industri ringan lainnya), dan Industri Berat (Semen Curah, Cetak Beton dan sejenis industri berat lainnya).

Sedangkan, arah pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya berupa jaringan lintas kabupaten/kota yang mencakup sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan sistem jaringan persampahan wilayah. Dimana, untuk pengelolaan limbah (padat dan cair) dilakukan melalui pengolahan peningkatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah medis berkelanjutan yang terintegrasi dari hulu-hilir, dan pengolahan air limbah domestik maupun industri. Kemudian, untuk pengelolaan persampahan baik domestik dan

industri dan persampahan, memaksimalkan TPS3R untuk pengelolaan sampah yang didaur ulang, dimana pengelolaan sampah berfokus pada pemilahan sampah berbasis masyarakat sebelum masuk ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Ketiga, potensi pengembangan untuk perwujudan konektivitas wilayah yang memadai dari sub sektor telekomunikasi, transportasi, infrastruktur dan konstruksi. Bahwa di dalam arahan struktur ruang Provinsi NTT, perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi diarahkan pada upaya meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara memadai dan merata ke seluruh wilayah kabupaten/kota. Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan tetap dan jaringan bergerak di seluruh wilayah Provinsi NTT.

Selanjutnya dalam rangka membangun konektivitas antar moda dan wilayah, maka Pengembangan sistem jaringan transportasi darat di arahkan pada pengembangan jaringan jalan arteri primer (JAP), kolektor primer, jaringan lokal primer, jaringan jalan strategis nasional, jaringan jalan strategis provinsi di seluruh Kabupaten/Kota se NTT dan rencana pengembangan jalan tol dan pengembangan jalan lingkar luar. Termasuk rencana untuk Sistem Jaringan Kereta Api dan Stasiun Kereta Api.

Sedangkan arah pengembangan Terminal mencakup terminal Penumpang Tipe A, Rencana Terminal Terpadu di Pelabuhan *Multipurpose*, pengembangan Terminal Tipe B, pengembangan Terminal Barang, Terminal *Multipurpose*, pengembangan Jembatan Timbang di seluruh Kabupaten/Kota se-NTT termasuk pengembangan jembatan yaitu pembangunan jembatan layang.

Kemudian, untuk Pengembangan Bandar udara umum dan bandar udara khusus berupa Pengembangan Bandar udara pengumpul, pengumpulan, dan rencana pembangunan bandara baru.

Keempat, untuk pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam terbarukan melalui pengembangan sub Sektor Kehutanan, dan Pertanian. Bahwa, pengembangan Sektor Kehutanan dan penggunaan lahan dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi (Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi) serta Kawasan Hutan Rakyat. Dengan syarat, hasil produksi berasal dari kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor. Hasil hutan akan dikembangkan dalam rangka mendukung perekonomian wilayah dan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Sementara itu, rencana pemanfaatan Kawasan Hutan Rakyat di Provinsi NTT mencakup Hasil hutan dapat dikelola oleh rakyat pada lahan milik rakyat/suku di Provinsi NTT, jika kawasan ini terdapat kawasan budaya maka harus dibatasi sehingga tidak dikembangkan lebih lanjut, Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung dan upaya pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.

Untuk arah pengembangan Kawasan tanaman pangan difokuskan pada pengembangan kawasan Agropolitan (padi) dan pencetakan sawah baru pada kawasan potensi yang didukung dengan ketersediaan kondisi lahan serta sistem pengairan, pengembangan pertanian perkotaan, Pengembangan pertanian organik, Penerapan mekanisme komprehensif dan pengembangan rekayasa teknologi, penetapan kawasan pertanian pangan khususnya lahan pertaninan sawah irigasi sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Pemberian insentif kepada masyarakat yang mempertahankan lahan KP2B yang akan diatur lebih dalam Peraturan Bupati/walikota pada masing-masing kabupaten dan kota. Termasuk, untuk pengembangan Kawasan Jagung dan Hortikultura

dengan kriteria mempunyai kesesuaian lahan yang didukung dengan sarana dan prasarana budidaya, panen, dan pasca panen, memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura dan mempunyai akses, prasarana transportasi jalan serta pengangkutan yang mudah dan dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

Sedangkan, fokus pengembangan Sektor Perkebunan mengedepankan komoditas unggulan daerah seperti Jambu Mete, Kopi, dan Kakao. Dengan konsep yang mendukung rantai nilai dan rantai pasok meliputi Rencana penyediaan prasarana, sarana pasca panen, dan pemasaran, penetapan standar pelayanan, pengawasan, perizinan, petunjuk teknis penggunaan benih, pupuk, promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi, Pemberian penguatan modal bagi petani dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertanian, koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait dan upaya rehabilitasi kawasan pertanian yang mengalami degradasi.

Fokus pengembangan Sektor Peternakan diutamakan pada Sapi dan Babi. Arah pengembangan melalui upaya pewujudan penggunaan bibit unggul dan pengembangan peternakan yang berkualitas, melalui penyuluhan, pelatihan dan pemeliharaan, Pemberian penguatan modal bagi usaha dalam upaya menunjang kesinambungan usaha, Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak, Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi sampai perluasan wilayah pemasaran produksi peternakan baik lokal maupun pasar ekspor, Koordinasi dan kerjasama antar *stakeholder* terkait.

Model pengembangan komoditi peternakan di Provinsi Nusa Tenggara ke depan perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi disamping faktor teknis budidaya, potensi ternak dan ketersediaan pakan. Oleh karena itu, arah dan model pengembangan peternakan di Provinsi NTT harus meliputi beberapa aspek, antara lain :

- **Integrated Farming**, Pengembangan peternakan terutama di sentra pengembangan dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan usahatani untuk optimasi pemanfaatan sumberdaya pakan yang tersedia.
- **Community Based Farming**, Pengembangan peternakan di Provinsi NTT dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi rakyat dengan pemanfaatan potensi wilayah.
- **Market Oriented**, Pengembangan usaha ternak yang dikembangkan masyarakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar, baik permintaan pasar lokal dalam jangka pendek maupun permintaan dari luar wilayah/ekspor dalam jangka panjang.

Sedangkan, arah pengembangan sentra ternak sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dilandaskan pada beberapa hal yaitu:

- Optimalisasi sumberdaya lokal terutama sumberdaya pakan, baik hijauan makanan ternak (HMT) maupun bahan pakan yang cukup melimpah;
- Melibatkan partisipasi semua komponen masyarakat, baik pemerintah daerah, swasta, peternak, perguruan tinggi dan *stakeholder* terkait lainnya;
- Upaya pencapaian swasembada daging khususnya sapi potong bahkan dalam jangka panjang dapat menjadi sentra penghasil bibit dan bakalan;
- Meningkatkan populasi dan produksi ternak, juga memperbaiki kualitas ternak; dan
- Dalam bentuk kawasan.

2.7.2.2 Arah Pengembangan Ekonomi Biru

Konsep ekonomi biru mengacu pada penggunaan, tata kelola, pengelolaan, dan konservasi sumber daya laut, laut, dan pesisir yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif, serta ekosistem untuk pertumbuhan ekonomi di sektor yang mendukung pengembangan ekonomi biru.

Ekonomi biru dikembangkan dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, peningkatan lapangan kerja dan perbaikan lingkungan dengan tetap menjaga ekosistem. Kegiatan usaha tersebut meliputi akuakultur, perikanan, pariwisata, transportasi, pelayaran maritim, pembuatan kapal, bioteknologi kelautan, energi laut, dan ekstraksi mineral. Secara umum seperti pada Gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.85 SKEMA PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU NTT



Langkah-langkah umum yang diperlukan antara lain mempertahankan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pembersihan sampah plastik.

Potensi ekonomi biru Provinsi NTT yang ada antara lain pengembangan perikanan tangkap, sarana prasarana termasuk pengembangan industri pengalengan ikan dan pengembangan SDM. Termasuk di dalamnya pengembangan EBT Arus Laut, gelombang laut dan temperatur laut. Kemudian, Pengembangan Industri Garam dan Rumput Laut, serta budidaya kerang mutiara, teripang dan Ikan Kerupu.

Guna mendukung perlindungan biota laut dan keberlanjutan maka diperlukan konservasi hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang di seluruh wilayah pesisir perairan NTT. Dengan demikian, dalam rangka mendukung aksesibilitas dan layanan rantai pasok, perwujudan pemanfaatan dan pengembangan struktur ruang lebih difokuskan pada pengembangan sistem transportasi laut dan Pengembangan Sistem jaringan sungai, danau, yang dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, arah pengembangan pembangkit listrik tenaga EBT melalui potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang bersumber dari sektor kelautan antara lain arus laut, gelombang laut dan temperatur laut. Lokasi potensial pengembangan pembangkit listrik tenaga laut (PLTAL) adalah Selat Pantar di Alor, Selat Gonzalu dan Selat Boleng di Flores Timur dan Selat Molo di Manggarai Barat.

Kemudian, wilayah daratan Sumba sebagai Sumba Iconic Island di EBT PLTS, wilayah daratan Flores sebagai Flores Geothermal Island di EBT Geothermal dan Wilayah daratan Timor dan kepulauan sekitar (TIROSA) sebagai Timor Biomass Island di EBT Biomassa.

Kedua, untuk mendukung konektivitas kemaritiman, maka pengembangan sistem jaringan Telekomunikasi, transportasi, infrastruktur dan konstruksi mencakup arah pengembangan sistem Jaringan Transportasi Laut di fokuskan pada pengembangan dan rencana peningkatan pelabuhan laut pengumpul, pengembangan dan rencana pengembangan pelabuhan laut pengumpul yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kemudian, pengembangan terminal umum berupa terminal Pelra dan *multipurpose*, pengembangan terminal khusus berupa Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan Khusus minyak/energi, Pelabuhan Terpadu, Pelabuhan Ecoport dan Pelabuhan pemanfaatan biji tambang Selanjutnya, Pengembangan Pelabuhan Perikanan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, dan Pengembangan Alur Pelayaran Umum di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan, Pengembangan Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, diarahkan untuk pengembangan lintas penyeberangan antar Negara (Darwin di Australia dan Dili di Timor Leste). Selanjutnya, pengembangan lintas penyeberangan antar provinsi di rencanakan ke beberapa wilayah antara lain ke Bima, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Untuk pengembangan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi termasuk pengembangan pelabuhan penyeberangan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT.

Ketiga, untuk perikanan dan kelautan mencakup perikanan tangkap, pengembangan rumput laut dan industri garam. Termasuk pelestarian hutan mangrove, padang lamun, dan perlindungan ekosistem perairan laut, yang di dalamnya terdapat kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu (TNP Laut Sawu) dimana hampir sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sangat tergantung kepada Laut Sawu yang menyumbang lebih dari 65 % potensi lestari sumberdaya ikan di Provinsi NTT.

Secara khusus tujuan pencadangan TNP Laut Sawu adalah mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya sebagai bagian wilayah ekologi perairan laut Sunda Kecil (*Lesser Sunda Marine Eco-Region*), melindungi dan mengelola ekosistem perairan Laut Sawu dan sekitarnya, sebagai kerangka acuan pembangunan daerah di bidang perikanan, pariwisata, masyarakat pesisir, pelayaran, ilmu pengetahuan dan konservasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

Untuk Kawasan perairan NTT memiliki potensi perikanan tangkap yang tinggi khususnya untuk beberapa jenis ikan bernilai ekonomis. Kawasan perairan tersebut meliputi Kawasan Perairan Laut Flores merupakan wilayah populasi cumi-cumi, ikan tuna, cakalang, tongkol, pelagis kecil dan demersal, Kawasan Perairan Laut Sawu merupakan daerah wilayah ikan pelagis besar seperti marlin, Tuna, Cakalang, Tongkol, Pelagis Kecil, demersal. Selain itu perairan laut sawu merupakan kawasan ruaya dari keluarga setasea, Kawasan perairan laut timor bagian utara dan selatan merupakan daerah penangkapan bagi tuna, cakalang, pelagis kecil dan Kawasan Perairan Sumba adalah daerah perairan yang potensial untuk jenis ikan hiu, parimanta, paus, dan lumba-lumba.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan penangkapan ikan dan menambah rantai nilainya, maka arah pengembangan perikanan tangkap ini difokuskan pada jenis ikan bernilai ekonomis tinggi yang kemudian dikemas di wilayah NTT untuk siap di ekspor, sehingga dibutuhkan penyediaan saran prasarana, teknologi dan SDM terkait industri pengalengan dan pengolahan ikan.

Sedangkan, untuk komoditas garam, secara umum arahannya meliputi pemanfaatan lahan dan penyiapan serta peningkatan produktivitas garam rakyat dengan memperhatikan kondisi lingkungan, penyiapakan zat yodium yang mudah dan terjangkau untuk para petani sehingga memiliki hasil garam yang berkualitas dan pemberian penguatan modal bagi pengusaha dalam upaya menunjang kesinambungan usaha dan investasi serta berorientasi ekspor.

2.7.3 Arah Pengembangan Provinsi NTT dalam RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 - 2043

Secara umum indikasi pertumbuhan wilayah Provinsi NTT dapat dilihat pada kinerja Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043. Dimana RTRW Provinsi NTT ini perlu ditampilkan menjadi satu kesatuan antara perencanaan a-spatial dan perencanaan spatial. Dalam konteks pengembangan wilayah untuk perencanaan jangka panjang, analisis terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sangat diperlukan karena beberapa alasan antara lain kebutuhan wilayah Provinsi NTT untuk berkembang terutama karena ketersediaan sumber daya alam dan adanya kebutuhan masyarakat yang makin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk serta potensi – potensi resiko bencana. Upaya pengembangan wilayah Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dengan demikian, sesuai amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021, bahwa di dalam struktur ruang akan ditelaah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Sedangkan di dalam pola ruang akan dilihat pola distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Sedangkan Kawasan Strategis memuat nilai strategis kawasan, delineasi, dan tujuan serta arah pengembangan kawasan.

2.7.3.1 Tujuan dan Kebijakan Penataan Ruang Provinsi NTT Tahun 2023-2043

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi NTT adalah **“mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang aman, nyaman, produktif, dan terpadu antar sektor di wilayah daratan dan lautan dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana sebagai pendukung ekonomi nasional serta didukung oleh sektor pariwisata yang maju dan berdaya saing dengan mengedepankan kelestarian wilayah daratan dan lautan melalui pengembangan potensi sumber daya manusia, alam dan budaya lokal yang terpadu, bermitra dan berkelanjutan”**.

Kemudian tujuan ini dijabarkan melalui:

1. Terwujudnya keterpaduan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Terwujudnya sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Terwujudnya pusat permukiman yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas; dan
4. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.

Selanjutnya, terdapat 9 (sembilan) kebijakan penataan ruang Provinsi NTT yang meliputi:

1. Peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Strategi pengelolaan wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal;
3. Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan rencana tata ruang nasional;
4. Peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, serta jaringan telekomunikasi;
5. Pengembangan kawasan wisata nasional dan provinsi;
6. Pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan rawan bencana alam dan perubahan iklim;
7. Perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan;
8. Pengembangan kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang; dan
9. Mendukung peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kebijakan-kebijakan ini kemudian dijabarkan melalui strategi penataan ruang wilayah Provinsi NTT seperti yang diuraikan pada Laporan Rencana Revisi RTRWP 2023-2043. Secara umum, dapat dijelaskan masing-masing strategi penataan ruang menitikberatkan pada hal-hal yang memberikan dampak jangka panjang pada pertumbuhan wilayah.

Adapun ringkasan strategi penataan ruang dimaksud memiliki cakupan pelayanan sebagai berikut:

1. Strategi Peningkatan fungsi lindung di wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup diutamakan untuk pengembangan, pengelolaan, peningkatan, perlindungan, perwujudan kelestarian kawasan lindung di darat dan laut serta penataan ruang kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis kerawanan bencananya dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang menimbulkan degradasi lingkungan hidup;
2. Strategi Pengelolaan wilayah wilayah darat, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan kearifan lokal, diarahkan untuk pelestarian, peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup, penyediaan prasarana, pengendalian aktivitas pembangunan, sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pengembangan investasi pada kawasan andalan, pengembangan kegiatan ekonomi dan penyediaan data dan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Pengembangan struktur ruang dan sistem pusat kegiatan sebagai pendukung ekonomi nasional sesuai dengan potensi darat dan lautan yang selaras dengan rencana tata ruang nasional, dititik beratkan pada Pemantapan Kabupaten/Kota PKN, PKW, PKL, dan peningkatan aksesibilitas, percepatan pengembangan sistem prasarana (wilayah, darat, dan udara), percepatan pengembangan sistem prasarana transportasi (darat, laut, udara), pengembangan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), mendorong pengembangan aktivitas ekonomi basis kewilayahan (pertanian, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa) untuk mempercepat pertumbuhan wilayah, mendorong pengembangan sektor ekonomi non basis

yang berpotensi basis sebagai pusat pertumbuhan baru, mendorong basis ekonomi perkotaan melalui pengembangan sektor non pertanian (perdagangan, perhotelan, komunikasi, industri, jasa perusahaan dan pariwisata) dan pengembangan wilayah perdesaan, pengurangan desa miskin serta pembangunan prasarana sosial di wilayah yang sulit terakses meliputi wilayah pegunungan dan pulau-pulau kecil;

4. Strategi peningkatan sistem jaringan energi, infrastruktur ketenagalistrikan, serta jaringan telekomunikasi diarahkan pada perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik dan penyalur, pengembangan energi alternatif, peningkatan pelayanan telekomunikasi, penyediaan sumber daya air dan peningkatan prasarana pendukung lainnya;
5. Strategi pengembangan kawasan wisata nasional dan provinsi, meliputi pengembangan sistem prasarana utama wilayah, Pengembangan jejaring infrastruktur transportasi wilayah, pengembangan terminal penumpang angkutan jalan menjadi terminal wisata terpadu yang merupakan terminal yang dikembangkan dengan pola mix use yakni perpaduan layanan terminal, perhotelan, area komersil, dan pusat informasi wisata sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kepada wisatawan yang akan menggunakan layanan jasa angkutan wisata terpadu, pengembangan pelabuhan, bandar udara perintis dan pengembangan energi alternatif di wilayah terpencil;
6. Strategi pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam dan perubahan iklim, dititikberatkan pada penataan ruang kawasan rawan bencana gempa, rawan gelombang pasang dan tsunami, rawan bencana gunung berapi (tata, masa bangunan, jalur evakuasi, lokasi evakuasi, kelengkapan/ sarana prasarana perlindungan bencana, penyediaan system peringatan dini (early warning system, penetapan zona kerentanan, intensitas pemanfaatan pada zona kerentanan tinggi, penetapan ketebalan pohon/hutan pengendali tsunami), arahan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (zona kerentanan, aksi mitigasi gas rumah kaca, penetapan ruang kawasan intervensi kegiatan adaptasi maupun mitigasi, dan penyediaan sistem pembelajaran kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap bahaya perubahan iklim);
7. Strategi perwujudan sinergitas, kemitraan serta partisipasi antar kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka percepatan pembangunan, diarahkan pada pengembangan kegiatan budidaya potensi unggulan (pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan) untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah, pengembangan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat, kawasan peruntukan (pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman perkotaan dan pedesaan) yang memperhatikan aspek daya dukung lingkungan, kontrol kualitas lingkungan, pemberdayaan sumber daya manusia, potensi alam dan budaya (citra khas) yang dimiliki kawasan termasuk peningkatan sinergitas, kemitraan antar sektor serta partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan spengendalian pemanfaatan kawasan budidaya;
8. Strategi pengembangan kawasan, perkotaan maupun perdesaan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang diarahkan untuk penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi (pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi/basis wilayah (potensi sumber daya alam dan budidaya unggulan) dalam percepatan pengembangan wilayah, peningkatan peluang investasi, pemanfaatan Sumber Daya Alam, pengembangan aksesibilitas dan sarana prasarana penunjang pertumbuhan wilayah.

Kemudian, penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup (pencegahan, pembatasan pemanfaatan yang beresiko pada degradasi lingkungan dan rehabilitasi kawasan) serta penetapan desa sebagai kawasan yang penting untuk dikembangkan; dan

9. Strategi mendukung peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi penetapan dan pengembangan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi Kawasan Perbatasan Negara RI dengan Timor Leste dan Australia (pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya secara selektif, peningkatan sarana prasarana di pertahanan dan keamanan serta menuju kawasan tersebut, penyelesaian konflik perbatasan, memelihara dan menjaga aset pertahanan serta mendukung pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan.

2.7.3.2 Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi NTT

Secara ringkas Struktur, Pola Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijabarkan pada Tabel 2.23, Tabel 2.24 dan Tabel 2.25 sebagai berikut.

TABEL 2.24 PROGRAM UTAMA PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI NTT

No.	PROGRAM UTAMA
I. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG	
1	Sistem Pusat Permukiman
	Penetapan fungsi kawasan PKN
	Penetapan fungsi kawasan PKW
	Penetapan fungsi kawasan PKSN
	Penetapan fungsi kawasan PKL
2	Sistem Jaringan Transportasi
	Perwujudan sistem jaringan jalan
	Pengembangan jaringan jalan arteri primer (JAP)
	Pengembangan jaringan jalan kolektor primer
	Pengembangan jaringan lokal primer
	Pengembangan jaringan jalan strategis nasional
	Pengembangan jaringan jalan strategis provinsi
	Pengembangan jalan tol
	Pengembangan terminal penumpang tipe A
	Pengembangan terminal penumpang tipe B
	Pengembangan terminal barang
	Pengembangan jembatan timbang
	Pengembangan jembatan pembangunan jempatan layang lintas Alor-Pantar-Lembata-Flores
3	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api
	Pengembangan jaringan Lintas Timor dan stasiun kereta api
	Pengembangan jaringan Lintas Flores dan stasiun kereta api

No.	PROGRAM UTAMA
4	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	Pengembangan lintas penyeberangan antar negara
	Pengembangan lintas penyeberangan antar provinsi
	Pengembangan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi
	Pengembangan pelabuhan penyeberangan
5	Sistem Jaringan Transportasi Laut
	Pengembangan pelabuhan laut: pelabuhan pengumpul
	Pengembangan pelabuhan laut: pelabuhan pengumpan
	Pengembangan terminal umum
	Pengembangan terminal khusus
	Pengembangan pelabuhan perikanan
	Pengembangan alur pelayaran umum
6	Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
	Pengembangan bandar udara pengumpul
	Pengembangan bandar udara pengumpan
	Perwujudan sistem jaringan energi
	Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
	Infrastruktur minyak dan gas bumi
	Jaringan minyak dan gas bumi termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut
	Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang meliputi PLTD, PLTMH, PLTA, PLTP, PLTS, PLTU, PLTNG, PLTB
	Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem
	Gardu Induk/IBT dan Rencana Pengembangan Gardu Induk/IBT di Provinsi NTT

TABEL 2.25 PROGRAM UTAMA PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI NTT

No.	PROGRAM UTAMA
PERWUJUDAN POLA RUANG KAWASAN LINDUNG	
A1	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung yang salah satunya merupakan hasil alih fungsi dan menjadi hutan lindung dan atau kawasan strategis berfungsi lindung mahkota permata tanah papua yang merupakan koridor ekosistem, termasuk juga kawasan strategis perlindungan budaya yang merupakan indikatif wilayah adat dan perwujudan ruang kelola masyarakat adat secara berkelanjutan di arahan fungsi budidaya 2. Percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil dari hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan 3. Pengembangan jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam 4. Percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung serta upaya restorasi/agroforestry sebagai wujud pemulihan ekosistem/lahan kritis 5. Pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan hutan lindung, kawasan gambut maupun resapan air 6. Pengelolaan kawasan mangrove berkelanjutan

No.	PROGRAM UTAMA
A2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat
1.	Pengembangan sistem pengendalian banjir pada pengaman pantai
2.	Identifikasi dan inventarisasi potensi fisik, sosial, dan ekonomi wilayah DAS
3.	Pengembangan agroforestry di sepanjang sempadan sungai pada kawasan perkotaan
4.	Rehabilitasi dan pemeliharaan lahan sepanjang garis sempadan sungai
5.	Pembangunan sarana dan prasarana penyelamatan dan pengelolaan kawasan sepadan sungai di seluruh kawasan DAS
6.	Pencegahan pencemaran air dari industri pertambangan
7.	Pengendalian sedimentasi, erosi dan kekeringan
8.	Deliniasi kawasan lindung sekitar danau dan waduk
9.	Pengendalian aktivitas budidaya di kawasan sekitar danau dan waduk
10.	Deliniasi kawasan pantai, mitigasi bencana di wilayah kawasan pesisir pantai
11.	Pengendalian aktivitas budidaya di kawasan pantai
12.	Perlindungan lokasi/tempat spiritual/keramat/sejarah dan kearifan lokal masyarakat lokal/masyarakat tradisional/masyarakat hukum adat
A3	Perwujudan Kawasan Konservasi
1.	Program Pemantapan Status Kawasan
2.	Program pengembangan sarana dan prasarana kawasan
3.	Program perlindungan dan pengamanan kawasan
4.	Program pengembangan institusi dan SDM yang terkait dengan kegiatan konservasi dan pemanfaatan kawasan berfungsi lindung
5.	Program pengembangan integrasi dan koordinasi yang terkait dengan kegiatan konservasi dan pemanfaatan kawasan berfungsi lindung
A4	Pemanfaatan dan Perlindungan Kawasan Kehutanan yang Berada di Seluruh Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
1.	Pemeliharaan fungsi-fungsi perlindungan hutan
2.	Pemantauan dan evaluasi dampak pembangunan terhadap kawasan
3.	Reboisasi hutan
4.	Penelitian dan pendidikan mengenai pengelolaan kawasan
5.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungsi hutan
6.	Pembangunan unit-unit monitoring dan pengawasan sumber daya hutan
7.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi masyarakat di sekitar kawasan kehutanan
A5	Kawasan Lindung Geologi
1.	Penyusunan pemetaan dan zonasi kawasan karst
2.	Mengevaluasi secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona luahan (mata air dan sungai)
3.	Perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi, baik yang dikategorikan sebagai eksokarst maupun endokarst
4.	Perlindungan sistem hidrogeologi karst yang ada
5.	Perlindungan terhadap morfologi karst yang ada harus dikaji dan dijalankan dengan pertimbangan dari aspek/sudut pandang lain seperti misalnya antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan masyarakat sekitar

No.	PROGRAM UTAMA
A6	Kawasan Rawan Bencana <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan pemanfaatan kawasan rawan bencana untuk kegiatan permukiman 2. Perlindungan kawasan rawan gempa bumi dan tsunami melalui upaya mitigasi 3. Pelarangan kegiatan pemanfaatan tanah yang mempunyai potensi bencana 4. Peningkatan efektivitas, pencegahan, adaptasi, dan mitigasi bencana 5. Pembangunan sistem peringatan dini dan perkuatan sarana dan prasarana pendukung penanganan darurat 6. Peningkatan kesiapan terhadap beberapa potensi bahaya yang selama ini masih belum terpetakan 7. Peningkatan proses kaji cepat bencana, pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban serta peningkatan kapasitas pemulihan bencana 8. Penyusunan rencana mitigasi bencana
A7	Kawasan Cagar Budaya <ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan dan menjaga kawasan cagar budaya sesuai dengan karakteristik dan keasliannya 2. Mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan sebagai sarana pusat informasi dan pengelolaan wisata budaya 3. Mengadakan upaya-upaya restorasi, renovasi serta preservasi yang dilakukan pada masing-masing kawasan dengan partisipasi masyarakat 4. Meningkatkan peran kawasan cagar budaya tersebut sebagai pusat kegiatan budaya 5. Meningkatkan perawatan dan perbaikan terhadap bangunan/benda/situs cagar budaya yang ada 6. Mengembangkan kawasan cagar budaya sebagai penggerak perekonomian wilayah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar 7. Penentuan sistem zonasi sebagai arahan dalam pengembangan
A8	Kawasan Ekosistem Mangrove <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian dan konservasi pada kawasan mangrove yang masih asli atau mendekati kondisi asli 2. Pengembangan untuk budidaya ramah lingkungan dan pariwisata pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemanfaatan 3. Audit lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan khususnya yang menyebabkan hilangnya mangrove 4. Pengelolaan untuk perlindungan dan konservasi pada kawasan mangrove yang berfungsi sebagai jalur hijau 5. Pengelolaan ekosistem hutan mangrove berbasis masyarakat (<i>Community Based Management</i>) 6. Menetapkan moratorium penebangan kayu mangrove 7. Meningkatkan produksi mangrove melalui teknologi 8. Menjalin kerjasama rehabilitasi mangrove 9. Meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam upaya perlindungan, pemanfaatan tradisional dan pengawasan pada kawasan mangrove

No.	PROGRAM UTAMA
	PERWUJUDAN POLA RUANG KAWASAN LINDUNG
B	PERWUJUDAN PERUNTUKAN BUDI DAYA
B1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi
	1. Peningkatan produktivitas hutan yang optimal
	2. Pengelolaan hutan produksi ke hutan bekas tebangan
	3. Konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
	4. Pengawasan dalam pemanfaatan dan penggunaannya
B2	Perwujudan Kawasan Pertanian
	1. Kawasan tanaman pangan
	2. Kawasan hortikultura
	3. Kawasan perkebunan
	4. Kawasan peternakan
B3	Kawasan Perikanan
	1. Pembangunan kawasan sentra produksi dan pengolahan perikanan tangkap
	2. Pembangunan kawasan andalan/unggulan
	3. Peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi rakyat
	4. Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya
	5. Pengembangan industri perikanan
	6. Pencadangan kawasan konservasi perairan yang meliputi kawasan konservasi perairan daerah Buruway, Argguni dan Teluk Etna
B4	Kawasan Pertambangan dan Energi
	1. Identifikasi potensi, delineasi potensi, penetapan wilayah, eksplorasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi dan mineral
	2. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi dan mineral yang berbasis pembangunan berkelanjutan
	3. Mendorong penelitian dan optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan
	4. Rehabilitasi dan reklamasi kegiatan eksplorasi dan eksplorasi sumber daya energi dan mineral
	5. Pengembangan sarana prasarana kawasan-kawasan industri pertambangan
	6. Pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat lokal
B5	Kawasan Peruntukan Industri
	1. Pengembangan Kawasan Industri Bolok
	2. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM), kebutuhan kegiatan fisik pembangunan SIKIM di Provinsi Nusa Tenggara Timur
B6	Kawasan Pariwisata
	1. Upaya pemasaran pariwisata
	2. Penyusunan rencana induk pariwisata daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Pengembangan paket wisata Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur
	3. Reorientasi kegiatan kepariwisataan yang ramah lingkungan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional
	4. Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional
	5. Pengembangan pariwisata Raja Ampat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
B7	Perwujudan Kawasan Permukiman
	1. Penataan ruang
	2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pembangunan sarana dan prasarana perkotaan

No.	PROGRAM UTAMA
B8	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan
1.	Pengintegrasian kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan sekitar
2.	Pengintegrasian kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan sekitar perbatasan penggunaan lahan yang mempunyai arti penting untuk kepentingan hankam atau kegiatan yang memiliki intensitas tinggi pada sekitar kawasan militer
3.	Pembatasan penggunaan lahan yang mempunyai arti penting untuk kepentingan hankam atau kegiatan yang memiliki intensitas tinggi pada sekitar kawasan militer pengalokasian khusus untuk kawasan latihan militer
4.	Penetapan rencana tata ruang kawasan perbatasan negara
5.	Pengendalian dan izin pemanfaatan ruang
6.	Pembangunan saran dan prasarana kawasan

TABEL 2.26 KAWASAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

C	KAWASAN STRATEGIS KEWENANGAN PROVINSI
1.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
2.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya
3.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi
4.	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

2.7.4 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Se-NTT

Pembagian pengembangan kewilayahan untuk 22 Kabupaten/Kota se NTT dibagi menjadi 3 (tiga) Cluster besar yaitu Cluster 1 Wilayah TIROSA (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor), Cluster 2 Wilayah Sumba (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya) dan Cluster 3 Wilayah Flores (Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Maumere, Flores Timur dan Lembata) dengan beberapa pertimbangan yaitu bentangan alam, kesamaan sosial budaya, aksesibilitas dan potensi unggulan daerah.

Dalam upaya penentuan arah pembangunan berdasarkan fokus dan lokusnya maka, diuraikan juga tentang isu-isu strategis kewilayahan di Provinsi NTT. Penentuan isu-isu strategis kewilayahan di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan serta potensi strategis yang ada pada setiap wilayah. Dengan penentuan isu-isu strategis ini, diharapkan pembangunan di NTT dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

a. Wilayah Timor dan Pulau Sekitar

Pulau Timor sebagai pusat Ibu Kota Provinsi dan berbatasan langsung dengan Timor Leste memiliki fokus yang kuat pada diversifikasi ekonomi melalui industry pengolahan, pengembangan sektor primer, pemanfaatan pesisir pantai dan penguatan kerjasama dengan Timor Leste. Berikut adalah isu-isu strategis untuk wilayah Timor dan Sekitarnya.

1. Industri Pengolahan belum Optimal akibat lemahnya adomsi teknologi, SDM, dan dukungan sektor hulu. Hal ini menyebabkan belum optimalnya diversifikasi ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi lokal.

2. Pemanfaatan pesisir sebagai industri garam dan rumput laut serta sumber daya laut lainnya belum optimal.
3. Belum optimalnya produksi dan produktifitas sektor hulu termasuk peternakan untuk mendukung industri pengolahan dan ketahanan pangan.
4. Sentra-sentra produksi komoditas unggulan yang menjadi core competent belum optimal dikembangkan.
5. Belum optimalnya kerja sama dalam berbagai aspek dengan Timor Leste.
6. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan Pendidikan.
7. Kualitas dan daya saing SDM masih rendah dimana capaian IPM masih di bawah rata-rata nasional.
8. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja akibat rendahnya *link and match* dengan lapangan kerja.
9. Belum optimalnya infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan antarpulau.
10. Wilayah Timor memiliki sensitivitas mata pencaharian terhadap variabilitas iklim sehingga dampak perubahan iklim.

b. Wilayah Flores dan Pulau Sekitar

Pulau Flores dan sekitarnya lebih menekankan pada pengembangan pariwisata alam dan budaya, pengebangan sektor primer yang mendukung hilirisasi dan industri pariwisata serta pelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi biru. Berikut adalah isu-isu strategis untuk wilayah Flores dan pulau sekitarnya.

1. Labuan Bajo sebagai pusat pariwisata premium namun peran sektor primer belum optimal dalam mendukung industri pariwisata. Hal ini ditandai dengan masih lemahnya suplay komoditas unggulan dan ketersediaan pangan serta produk lokal lainnya yang dibutuhkan di Labuan Bajo.
2. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum inklusif dan berkualitas karena belum optimalnya pengembangan konsep *quality tourism* serta masih rendahnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan Pendidikan.
4. Kualitas dan daya saing SDM masih rendah dimana capaian IPM masih di bawah rata-rata nasional.
5. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja akibat rendahnya link and match dengan lapangan kerja.
6. Belum optimalnya produksi dan produktifitas sektor primer dalam mendukung hilirisasi dan pariwisata dan ketahanan pangan.
7. Sentra-sentra produksi komoditas unggulan yang menjadi core competent belum optimal dikembangkan.
8. Belum optimalnya infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan antarpulau.
9. Pulau Flores dan sekitarnya memiliki potensi sumber daya laut namun pemanfaatannya belum optimal termasuk pemanfaatan arus laut sebagai sumber energi baru.
10. Wilayah Flores dan pulau sekitarnya memiliki keragaman mata pencaharian yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Timor dan Sumba sehingga produktifitas pada berbagai jenis mata pencaharian perlu dioptimalkan.

c. Wilayah Sumba

Pulau Sumba menonjol dalam pengembangan pariwisata berbasis alam dan budaya yang membutuhkan peningkatan besar dalam infrastruktur dasar. Selain itu, Pulau Sumba juga memiliki potensi besar untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang dapat mendukung visi ekonomi biru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut adalah isu-isu strategis wilayah Sumba:

1. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum inklusif dan berkualitas karena belum optimalnya pengembangan konsep quality tourism serta masih rendahnya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Belum optimalnya pengembangan energi baru terbarukan dengan menggunakan potensi energi surya, dan energi angin. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan infrastruktur, kualitas SDM yang masih lemah, adopsi teknologi yang masih sangat terbatas, serta rendahnya pendanaan dan investasi.
3. Belum optimalnya produksi dan produktifitas sektor primer dalam mendukung hilirisasi dan pariwisata dan ketahanan pangan.
4. Sentra-sentra produksi komoditas unggulan yang menjadi *core competen* belum optimal dikembangkan.
5. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan Pendidikan.
6. Kualitas dan daya saing SDM masih rendah dimana capaian IPM masih di bawah rata-rata nasional.
7. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja akibat rendahnya *link and match* dengan lapangan kerja.
8. Rendahnya diversifikasi ekonomi dan belum optimalnya pengembangan sektor unggulan, seperti sektor pertambangan dan sektor pertanian.
9. Wilayah Sumba memiliki sensitivitas Mata Pencaharian terhadap variabilitas iklim sehingga dampak perubahan iklim



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN

3.1.1 Geografi dan Demografi

Aspek geografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mengalami beberapa masalah pada aspek geografi yakni perubahan iklim, menurunnya kualitas lahan, daerah rawan bencana, meningkatnya emisi gas rumah kaca, dan kelangkaan air. Sedangkan aspek demografi memberikan deskripsi ukuran, struktur dan distribusi penduduk yang didasarkan pada kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau entitas tertentu. Aspek demografi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih mengalami beberapa masalah, antara lain belum baiknya struktur penduduk untuk menciptakan bonus demografi, belum meratanya penyebaran dan komposisi penduduk antar Kota dan Desa dan antar Kabupaten/Kota, serta lemahnya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

a. Perubahan Iklim

Perubahan iklim berkaitan dengan masalah tidak terurnya pola hujan, tidak menentunya musim dan terus meningkatnya suhu udara. Proyeksi curah hujan musiman wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami penurunan dalam rentang (-0,5)-0 sampai dengan (-25) - (-20) persen. Selanjutnya, Proyeksi perubahan hari kering wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November mengalami kenaikan dalam rentang 0-5 persen.

Proyeksi perubahan panjang musim hujan wilayah Provinsi NTT periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 September, Oktober, November cukup bervariasi, sebagian besar wilayah di Provinsi NTT mengalami pengurangan dalam kategori rentang berkurang lebih dari 2 dasarian sampai cenderung tetap. Berdasarkan analisis BMKG terkait laju perubahan suhu rata-rata tahunan periode 1981 sampai dengan 2022 untuk wilayah Provinsi NTT pada umumnya meningkat, sehingga perubahan iklim menjadi masalah yang perlu diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang di Provinsi NTT.

b. Menurunnya Kualitas Lahan

Kualitas lahan merupakan karakteristik lahan yang berpengaruh langsung terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan. Kualitas lahan berkaitan dengan kelembapan, ketersediaan oksigen, kondisi fisik dan morfologi tanah, salinitas dan alkhalinitas, toksisitas, resistensi terhadap erosi dan bahaya banjir, rejim temperatur, energi radiasi dan fotoperiode, dan bahaya unsur. Adapun kualitas lahan di NTT terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2018, Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) NTT sebesar 63,84, yang selanjutnya menurun selama beberapa tahun terakhir menjadi 58,74 pada tahun 2022.

c. Daerah Rawan Bencana

Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam daerah dengan resiko rawan bencana, dimana berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki indeks resiko 139,23 (kategori sedang). Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi 576 kejadian bencana di Provinsi NTT. Selain itu, nilai Indeks Resiko Bencana berdasarkan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa semua Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT memiliki kategori Indeks Resiko Bencana dengan kategori Tinggi dan Sedang (10 kabupaten kategori tinggi).

d. Meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pertanian

Dalam 20 tahun terakhir, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Emisi GRK Pertanian Provinsi NTT Pada Tahun 2000 sejumlah 92.060,54 Gg CO₂ yang terus meningkat menjadi 104.698,10 Gg CO₂ pada Tahun 2010 dan terus mengalami peningkatan menjadi 120.887,66 Gg CO₂ pada tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan kegiatan di sektor Pertanian dan Kehutanan seperti *landclearing*-penebangan hutan untuk pertanian secara berpindah dan kebakaran hutan, serta di Sektor Perikanan dan Kelautan berupa penebangan hutan Mangrove untuk budidaya tambak ikan dan tambak garam yang tentunya mengancam kelestarian lingkungan hidup di masa yang akan datang.

e. Kelangkaan Air

Berdasarkan studi oleh World Bank dan Bappenas yang dilakukan pada Tahun 2021, gambaran Status Kelangkaan air di wilayah sungai untuk region Bali dan NTT pada Tahun 2022 yaitu 89 persen kategori parah, 0,3 persen kategori tinggi, 0,1 kategori Sedang dan 0,7 persen tidak memiliki kelangkaan air di wilayah sungai. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis Neraca Air pada 15 sungai yang berada pada wilayah Provinsi NTT, terdapat 2 sungai dengan kategori Tidak Kritis, 6 Sungai dengan kategori Kritis ringan, 5 Sungai dengan kategori kritis Sedang dan 2 sungai dengan kategori kritis berat.

f. Struktur penduduk yang belum cukup baik untuk menciptakan bonus demografi

Struktur penduduk di NTT belum cukup baik merujuk pada belum optimalnya komposisi dan piramida penduduk. Komposisi penduduk di NTT didominasi oleh penduduk perempuan, sedangkan secara piramida, penduduk di NTT didominasi oleh kelompok umur non-produktif. Belum cukup baiknya struktur penduduk di NTT juga tergambar melalui kesenjangan pendidikan dan keterampilan yang belum optimal bagi penduduk usia produktif sehingga menyebabkan rendahnya produktifitas masyarakat.

g. Belum Meratanya Penyebaran Penduduk antar Desa dan Kota dan antar Kabupaten dan Kota

Penyebaran penduduk antar Desa dan Kota atau antar Kabupaten dan Kota masih menjadi masalah di Indonesia. Begitu pula dengan penyebaran penduduk di NTT yang sebagian besarnya berada di wilayah Kota Kupang. Tingkat kepadatan penduduk Kota Kupang jauh lebih tinggi (2.583/km²) bila dibandingkan dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk di 21 kabupaten lainnya (128,428/km²). Di sisi lain, masalah belum meratanya penyebaran penduduk di NTT tergambar melalui arus urbanisasi yang masih cukup tinggi.

h. Lemahnya Pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Lemahnya pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat digambarkan dengan masih banyaknya masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sampai dengan Tahun 2022 belum diidentifikasi untuk didaftarkan, diverifikasi serta disertifikasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Dengan demikian perlindungan dan jaminan terhadap keberadaan serta keberlangsungan masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih lemah.

3.1.2 Belum Optimalnya Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan ekonomi dan kesejateraan sosial budaya. Untuk itu, dalam kaitannya dengan masalah belum optimalnya aspek kesejahteraan masyarakat, dapat tergambar melalui kondisi belum optimalnya kesejahteraan ekonomi dan rendahnya kesejahteraan sosial budaya di Provinsi NTT.

Masalah-masalah terkait aspek kesejahteraan ekonomi dapat terlihat dari beberapa hal, antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi, besarnya ketimpangan antara ekspor dan impor daerah, Menurunnya kesejahteraan petani, masih tingginya kemiskinan, adanya kemiskinan ekstrim, tingginya tingkat setengah pengangguran dan belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia.

Selanjutnya, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial budaya dapat tergambar melalui beberapa hal, antara lain lemahnya indeks keluarga sehat, belum optimalnya peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga, belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, belum optimalnya pembangunan gender, belum optimalnya kemajuan pemuda, dan rendahnya pembangunan kebudayaan.

a. Melambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami penurunan sebesar 2,01 persen selama periode 2010-2022. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010 mencapai 5,06 persen dan kemudian melambat hingga mencapai 3,05 persen pada Tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid 19 dan Badai Siklon Seroja pada Tahun 2021 dan belum mengalami proses pemulihan secara optimal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

b. Besarnya ketimpangan antara Ekspor dan Impor Daerah

Ketimpangan Ekspor dan Impor di NTT dilihat dari nilai impor yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu sedangkan nilai ekspor terus mengalami penurunan. Ketimpangan nilai ekspor dan impor NTT yang cukup tinggi menyebabkan nilai net ekspor NTT terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Nilai Ekspor Provinsi NTT Tahun 2022 hanya 5,17% (menurun dibanding Tahun 2010 sebesar 7,19%). Pada saat yang sama nilai impor NTT mengalami kenaikan dari 48,99% pada Tahun 2010 menjadi 50,24% pada Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor tidak memberi kontribusi yang besar terhadap peningkatan PDRB NTT dan Provinsi NTT masih bergantung pada produk dari luar daerah.

c. Rendahnya Kesejahteraan Petani

Masih rendahnya kesejahteraan petani turut menjadi potret belum optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rendahnya kesejahteraan petani terindikasi dari Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi NTT yang menurun, dimana pada tahun 2022 NTP Provinsi NTT sebesar 95,98 (menurun dibanding tahun 2019 sebesar 106,14). Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) provinsi NTT masih jauh dibawah nasional yang sebesar 107,33 pada tahun 2022. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, dimana mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga kesejahteraan petani turut menjadi potret kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

d. Masih Tingginya Kemiskinan dan adanya Kemiskinan Ekstrim

Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 20,05%, jauh lebih tinggi dari nasional (9,57%). Begitu juga dengan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang jauh lebih tinggi dari angka nasional. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, masih terdapat 13 kabupaten yang memiliki persentase kemiskinan di atas provinsi NTT. Dari angka kemiskinan yang masih tinggi di NTT, di dalamnya terdapat kemiskinan ekstrim yang meningkat dari 6,44% pada tahun 2021 menjadi 6,56% pada tahun 2022.

e. Tingginya Tingkat Setengah Pengangguran

Tingginya tingkat pengangguran masih menjadi masalah serius di Provinsi NTT, dimana kondisi tingkat setengah pengangguran sebesar 12,5 pada tahun 2022, dan masih jauh lebih tinggi (dua kali lipat) dibandingkan tingkat setengah pengangguran Nasional yang sebesar 6,32% pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran masih merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan di NTT untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia

Belum optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia di NTT terindikasi melalui nilai IPM yang masih rendah dibandingkan dengan nilai IPM tingkat Nasional. Data menunjukkan bahwa nilai IPM Provinsi NTT sebesar 67,63% pada Tahun 2022, lebih rendah dari nilai IPM Nasional sebesar 73,77% pada Tahun yang sama. Di sisi lain, nilai IPM 16 Kabupaten di NTT masih lebih rendah dari nilai IPM Provinsi NTT. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, dimana sumber daya manusia merupakan modal sosial untuk mendukung pembangunan kedepan, sehingga peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan hal yang urgent untuk dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

g. Belum Optimalnya Penanganan Gender, Disabilitas dan Sosial Inklusi (Gedsi)

1) Gender

Pembangunan Gender berkaitan dengan beberapa aspek, antara lain; *pertama*) Kesetaraan Gender yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG); *kedua*) Aspek Pemberdayaan Gender yang diukur menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender, dan; *ketiga*) Aspek Ketimpangan Gender yang diukur menggunakan *Gender Inequality Index* (GII). Belum optimalnya pembangunan gender di NTT ditunjukkan melalui beberapa keadaan, sebagai berikut.

Belum adanya pemerataan Kesetaraan Gender untuk seluruh Kabupaten/Kota, meskipun pada Tahun 2022 Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur kesetaraan gender telah mencapai angka 92,96 poin, berada di atas level nasional yakni sebesar 91,63 poin pada tahun yang sama. Tiga kabupaten/kota yang memiliki IPG tertinggi adalah Kabupaten Manggarai Timur, Nagekeo dan Alor sedangkan tiga Kabupaten/Kota yang memiliki IPG terendah yakni Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Timor Tengah Selatan.

Pada tahun 2022, aspek pemberdayaan gender di NTT yang diukur dari IDG masih berada pada angka 75,22 poin atau di bawah angka nasional yakni, sebesar 76,59 poin. Angka ini masih jauh standar maksimal IDG sebesar 100 poin yang harus dicapai untuk menunjukkan keadaan pemberdayaan gender yang optimal.

Pada Tahun 2022, Aspek Ketimpangan Gender di NTT sekalipun menunjukkan penurunan, namun terdapat 6 Kabupaten di NTT yang justru mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan kesetaraan gender semakin baik, namun dari sisi pemerataan seluruh Kabupaten/Kota ternyata belum tercapai secara optimal. Ketimpangan gender Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 0,44 poin, berada di bawah nasional sebesar 0,46 poin. Sedangkan 6 Kabupaten di Provinsi NTT yang mengalami peningkatan nilai IKG selama periode 2018 sampai dengan 2022 diantaranya, yakni Kabupaten Ngada, Sikka, Sumba Barat, Malaka, Timor Tengah Utara serta Rote Ndao.

Capaian Pembangunan Perlindungan Anak diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Pemenuhan Hak Khusus Anak (IPKA). Masalah belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak tergambar melalui angka Indeks Perlindungan Anak (IPA) NTT yang berada pada posisi kedua terendah di indoensia pada 2020-2021, yakni sebesar 48,44 dan 48,12. *Trend* perkembangan IPA dan IPKA mengalami penurunan setiap tahunnya sampai dengan Tahun 2020, sekalipun nilai IPHA mengalami peningkatan yang sedikit dari tahun ke tahun.

2) Penyandang Disabilitas

Akses penyandang disabilitas terhadap program rehabilitasi/pemberdayaan sangat terbatas, karena sangat tergantung pada kapasitas Panti Sosial yang tersedia dan alokasi anggaran yang memadai. Pada tahun 2023, terdapat 116 LKS/Panti Swasta, yang menampung 891 penyandang disabilitas. Terdapat variasi kapasitas/daya tampung diantara 116 LKS/Panti Swasta tersebut. Selain itu, alokasi anggaran dari Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas pada Panti Sosial relatif terbatas. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

3) Penduduk Lanjut Usia (Lansia)

Belum optimalnya penanganan terhadap penduduk lanjut usia (lansia), karena karena keterbatasan jumlah LKS. Hanya terdapat 35 LKS, yang terdiri dari milik Pemerintah Daerah sebanyak 2 LKS dan 33 LKS lainnya dimiliki masyarakat. Secara keseluruhan, 35 LKS tersebut hanya mampu menampung penduduk lanjut usia sebanyak 4.162 orang dari total 368.673 orang. Keberadaan sebagian besar penduduk lanjut usia diluar LKS tidak diketahui, karena tidak tersedia data/informasi.

h. Belum Optimalnya Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga berkaitan dengan beberapa indikator yang mencakup kecukupan akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, aspek legalitas, serta relasi setara gender, hingga ketahanan terhadap rasa peduli dan keeratan sosial. Belum optimalnya Indeks Kualitas Keluarga ditandai dengan laju perkembangan Indeks Kualitas Keluarga yang masih lamban, sekalipun tumbuh positif. Selain itu, Indeks Kualitas Keluarga masih berada di bawah nasional sehingga masih memerlukan upaya optimal guna meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga.

i. Belum Optimalnya Kemajuan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pemuda di Indonesia. IPP terdiri dari komponen Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi. Perkembangan IPP Provinsi NTT sejak Tahun 2015 sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan positif dengan nilai IPP pada tahun 2015 sebesar 46,83 yang terus meningkat sampai dengan tahun 2018 mencapai angka 53,17 poin, lalu turun pada tahun 2019 menjadi 51,67 poin dan pada tahun-tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan secara konsisten, sehingga pada tahun 2022 senilai 52,83.

Namun pada IPP tahun 2022 berada di bawah secara tipis dari angka IPP Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemajuan pemuda pada tahun 2018 sedikit lebih baik dari kondisi pada tahun 2022. Di sisi lain, sekalipun angka IPP sudah tumbuh positif, namun kemajuan pemuda di NTT belum dicapai secara optimal karena masih berada jauh di bawah angka optimal, yakni sebesar 100 poin sehingga masih membutuhkan upaya guna meningkatkan kemajuan pemuda secara optimal dan merata untuk seluruh Kabupaten/Kota.

j. Rendahnya Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan diukur menggunakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Komponen IPK terdiri dari Komponen Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi serta Gender. Perkembangan IPP Provinsi NTT sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan positif sehingga pada tahun 2022 berada pada angka 52,83 poin. Namun, ada beberapa komponen IPK dengan nilai yang masih tergolong rendah, yaitu komponen Ekonomi Budaya, Warisan Budaya serta Ekspresi Budaya. Pencapaian kemajuan pembangunan kebudayaan masih belum optimal mengingat nilai IPK Tahun 2022 masih berada jauh di bawah angka optimal yakni sebesar 100 poin.

3.1.3 Rendahnya Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Namun Provinsi NTT masih dihadapkan pada masih rendahnya aspek daya saing daerah yang ditandai dengan beberapa kondisi, antara lain struktur perekonomian NTT masih didominasi oleh sektor bernilai tambah rendah, rendahnya kontribusi sektor manufaktur (industri), kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sangat rendah, rendahnya PDRB perkapita, menurunnya kemampuan literasi digital NTT, masih tingginya beban ketergantungan di NTT, rendahnya daya saing sumber daya manusia dan menurunnya kemampuan numerasi siswa di NTT.

a. Struktur Perekonomian NTT Masih didominasi oleh Sektor Bernilai Tambah Rendah (Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)

Struktur Perekonomian NTT masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kontribusinya masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan berbagai sektor lain, dimana kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2022 sebesar 29,60% terhadap total PDRB NTT. Meskipun sangat bergantung pada sektor ini, namun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai tambah yang rendah. Sementara sektor tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dalam menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah.

b. Rendahnya Kontribusi Sektor Manufaktur (Industri)

Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh masyarakat agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencarian utama penduduk. Dengan potensi sumber daya yang ada, masyarakat NTT memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan dari sektor agraris menjadi sektor industri. Namun Sektor industri di NTT belum dikembangkan secara optimal, dimana kontribusi sektor industri pengolahan hanya sebesar 1,21% pada tahun 2022 terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada hasil olahan dari daerah lain.

c. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sangat rendah

Sebagai daerah kepulauan, Provinsi NTT memiliki banyak potensi wisata yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah, salah satunya melalui penyediaan akomodasi dan makan minum pada daerah tempat tujuan wisata. Namun kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat rendah yakni sebesar 0,62% terhadap *Produk Domestic Regional Bruto (PDRB)* NTT. Keadaan ini masih belum sejalan dengan misi daerah untuk menciptakan pariwisata 5A sebagai penggerak ekonomi daerah (khususnya *accommodation*).

d. Rendahnya PDRB perkapita

Provinsi NTT memiliki PDRB perkapita terendah di Indonesia. Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita DKI Jakarta, PDRB perkapita NTT masih jauh sangat jauh di bawah. PDRB perkapita Provinsi NTT sebesar 13,2 juta, sedangkan PDRB perkapita DKI Jakarta sebesar 182,9 juta. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing ekonomi NTT terhadap provinsi-provinsi lain Indonesia masih jauh di bawah, yang tentunya berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat di NTT.

e. Menurunnya Kemampuan Literasi Digital NTT

Kemampuan literasi digital diukur melalui indeks literasi digital. Namun Indeks literasi digital di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih rendah dan cenderung menurun dari tahun 2020 sebesar 3,76 menjadi 3,39 pada tahun 2022, dan pada tahun 2022 indeks literasi digital NTT berada di bawah rata-rata nasional, yang terus mengalami peningkatan menjadi 3,54. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan serta kecakapan masyarakat NTT dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya masih rendah.

f. Masih Tingginya Beban Ketergantungan di NTT

Rasio ketergantungan NTT jauh lebih tinggi dari nasional, dimana pada tahun 2020 rasio ketergantungan NTT sebesar 63,4 dan lebih tinggi dari nasional yang hanya sebesar 47,7. Begitu juga dengan angka beban ketergantungan di kabupaten/kota yang masih tinggi, dimana terdapat 13 kabupaten yang memiliki rasio ketergantungan diatas NTT. Hal ini menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

g. Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Rendahnya daya saing sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur terindikasi dari Nilai Indeks Modal Manusia di Provinsi NTT yang masih berada di bawah capaian nasional. Indeks Modal Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 berada pada nilai 0,53 dan turun menjadi 0,52 pada tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bersaing sumber daya manusia di NTT masih rendah dan diperlukan perbaikan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

h. Menurunnya Kemampuan Numerasi Siswa di NTT

Daya saing suatu daerah tergambar dari kualitas sumber daya manusia, yang juga dapat diukur dari kemampuan peserta didik atau siswa yang sedang menempuh pendidikan formal. Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dihadapkan pada masalah dibidang pendidikan yaitu angka numerasi peserta didik yang menurun, dimana pada tahun 2022 angka numerasi peserta didik di Provinsi NTT sebesar 28,33 dan turun menjadi 25,93 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing sumber daya manusia di NTT masih rendah yang dilihat dari keterampilan atau kemampuan setiap orang untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan operasi hitung bilangan pada kehidupan sehari-hari.

3.1.4 Belum Optimalnya Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan Umum di Provinsi NTT masih belum optimal yang terlihat melalui beberapa hal lain belum optimalnya pelayanan publik, belum optimalnya digitalisasi pemerintahan di level kabupaten, rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten/kota di Provinsi NTT, masih lemahnya implementasi Reformasi Birokrasi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dan belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di provinsi NTT.

a. Belum Optimalnya Pelayanan Publik

Kinerja pelayanan publik pada suatu Pemerintah Daerah dapat tergambar melalui Indeks Pelayanan Publik yang diukur berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum dilaksanakan secara optimal yang tergambar dari indeks pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih dalam kategori cukup. Untuk itu diperlukan langkah transformatif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai landasan pembangunan di daerah melalui tata kelola regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

b. Belum Optimalnya Digitalisasi Pemerintahan di Level Kabupaten

Belum optimalnya digitalisasi pemerintahan di level kabupaten tergambar melalui nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kabupaten-kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih berada dibawah rentang predikat baik (2,6-3,5), kecuali Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang memiliki Indeks SPBE dengan predikat baik. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan SDM yang ada, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sosialisasi, serta penyediaan sarana/prasarana untuk menunjang penyelenggaran pemerintahan berbasis digital.

c. Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah untuk kabupaten/kota di Provinsi NTT belum dilaksanakan secara optimal, dimana terdapat sebanyak 13 kabupaten berkategori CC, 2 kabupaten dengan kategori C, dan hanya 7 yang berkategori B. Dengan demikian, belum ada satupun kabupaten /kota di Provinsi NTT yang memiliki kategori A. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi NTT belum berjalan dengan efektif dan efisien, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan belum dilakukan secara optimal.

d. Masih Lemahnya Implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja. Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih belum maksimal dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. Hanya Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT yang sudah mencapai predikat B, sedangkan Kabupaten-kabupaten lainnya memiliki predikat di bawah B.

Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di provinsi NTT

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya. Oleh karena itu, SPM menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik di suatu Pemerintah Daerah. Penerapan SPM di Provinsi NTT masih belum optimal dimana hanya 15 (lima belas) Pemda yang memiliki data capaian SPM. Selain itu, tidak ada satupun Pemda yang mampu mencapai penerapan SPM optimal sebesar 100%. Penerapan SPM tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 82%, sementara Provinsi NTT hanya sebesar 77%.

Jika diamati secara menyeluruh, umumnya pencapaian SPM Pemda Kabupaten-kabupaten pada 6 (enam) bidang SPM dibawah 70% (hanya Kabupaten TTU yang mampu mencapai penerapan SPM optimal, yaitu 100% pada SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman). Oleh karena itu diperlukan evaluasi dan tindak lanjut agar penerapan SPM di Provinsi NTT dapat bejalan dengan optimal, sehingga hak minimal yang wajib diperoleh oleh masyarakat dapat terpenuhi.

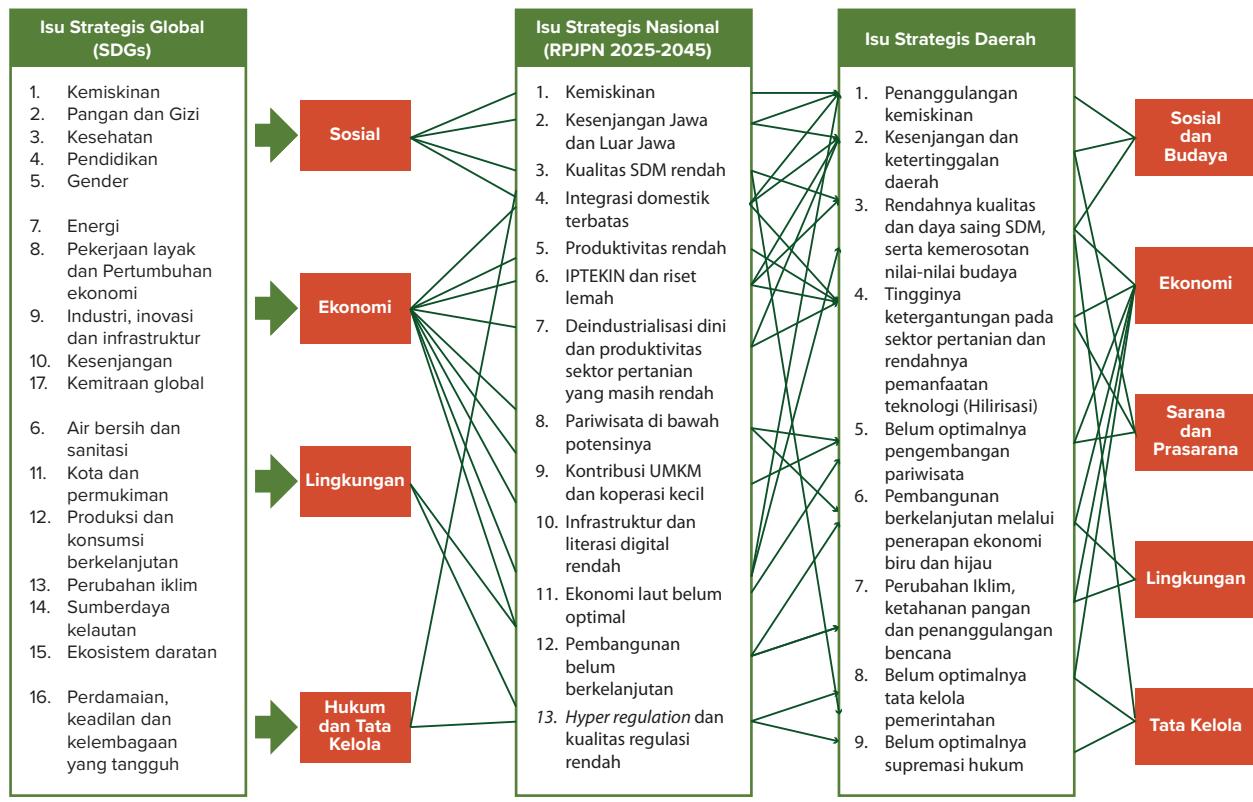
3.1 ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam 20 tahun ke depan.

Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu dalam proses penyusunan isu strategis provinsi, perlu diidentifikasi isu strategis yang kemudian masing-masing dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

Ada lima kriteria pembobotan dalam penyusunan isu strategis pada dokumen RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 ini yaitu: (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani. Sebelum dilakukan pembobotan isu strategis provinsi, dilakukan analisis isu strategis pada tingkat global, nasional dan daerah. Berikut ini analisis isu strategis pada tingkat global, nasional dan Provinsi NTT.

GAMBAR 3.1 ISU-ISU PEMBANGUNAN GLOBAL, NASIONAL DAN DAERAH



Dalam menentukan isu-isu strategis di Provinsi NTT, diperlukan telaahan lebih dahulu terhadap isu-isu yang berkembang di tingkat global, nasional dan regional untuk menentukan isu-isu mana yang sedang berkembang khususnya di provinsi NTT. Isu-isu yang terjadi secara global umumnya bisa menjadi isu-isu yang ada pada tingkat nasional karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat rentan terhadap berbagai isu yang berkembang di dunia. Kemudian isu-isu nasional yang ada merupakan akumulasi dari setiap isu yang terjadi di setiap daerah-daerah di Indonesia, sehingga perlu untuk melihat seberapa jauh keterlibatan daerah untuk mengatasi isu-isu nasional yang terjadi di wilayahnya. Berikut merupakan uraian dari isu-isu yang terjadi pada tingkat global, nasional maupun daerah.

3.2.1 Isu Strategis Global

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Goals dan 169 Target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

-
- Tujuan 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun
- Tujuan 2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- Tujuan 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
- Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
-

2. Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi:

-
- Tujuan 7: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
- Tujuan 17: Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
-

3. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

-
- Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- Tujuan 12: Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- Tujuan 13: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
- Tujuan 14: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
- Tujuan 15: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
-

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi:

-
- Tujuan 16: Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
-

Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Rancangan akhir RPJPN Indonesia 2025-2045, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, Indonesia berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

Target-target SDGs yang direncanakan tercapai pada tahun 2030 kemungkinan tidak akan terealisasi sesuai rencana karena berbagai masalah global yang ada, diantaranya pandemi covid-19 dan konflik geopolitik. Pandemi covid 19 telah mengubah wajah sosial ekonomi dunia secara drastis dan mengubah arah perekonomian global yang semula optimis membaik, menuju resesi. Penularan yang sangat cepat dan menimbulkan korban jiwa, serta upaya mitigasinya yang *unprecedented* menciptakan perubahan besar pada interaksi di tingkat individu hingga pada tingkatan institusi/negara. Pembatasan gerak dan interaksi yang masif membawa konsekuensi pada perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang tidak dapat dihindari seperti *lockdown*, *physical distancing*, *travel ban/restriction*, dan lainnya menimbulkan konsekuensi turunnya aktivitas ekonomi secara signifikan, yang tentunya menghasilkan implikasi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia.

Meskipun ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif di tahun 2023, perlu tetap diwaspadai terjadinya masalah global yang berkepanjangan, seperti Invasi Rusia ke Ukraina, konflik di jalur Gaza, dan konflik geopolitik lainnya. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut Cina Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Konflik yang terjadi kemungkinan mengundang kehadiran negara-negara besar lainnya untuk terlibat yang ditakutkan akan menjadi masalah global yang berkepanjangan, sehingga tentu akan memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi sosial-ekonomi dunia dikarenakan kontribusi negara-negara tersebut yang sangat besar terhadap dunia.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat rentan terhadap berbagai isu yang berkembang di dunia. Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Berikut merupakan isu dan tantangan pembangunan Indonesia ke depan:

1. Kemiskinan

Untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata disektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan perilaku hidup tidak sehat. Hal ini meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Akses pangan yang tidak terjangkau dan pola konsumsi yang tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan gizi makro, serta kelebihan gizi. Sistem kesehatan harus mampu merespon berbagai perubahan, kemajuan teknologi, guncangan kesehatan dan risiko terjadinya pandemi, serta mampu menjawab ketimpangan akses terhadap

pangan, lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kapasitas pembiayaan kesehatan dengan mobilisasi dan inovasi pembiayaan kesehatan.

Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mencapai pembangunan yang optimal di sektor pendidikan, Indonesia harus mampu mengatasi beberapa tantangan, diantaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi.

Adapun tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah. Sementara itu, tantangan penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi meliputi pelaksanaan bantuan sosial terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan penggunaan data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi. Selanjutnya pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana alam dan non alam, serta perubahan iklim. Daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia.

2. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Pembangunan wilayah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan. Meskipun pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan, ketimpangan antar wilayah masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah meningkat menjadi 20,6 persen dari 18,8 persen pada tahun 2000. Jumlah daerah tertinggal pada tahun 2020 adalah 62 kabupaten, jauh menurun dibandingkan jumlah daerah tertinggal pada tahun 2015 yaitu 122 kabupaten. Pembangunan selama ini lebih terpusat di Jawa (*Java Centris*), dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional pada tahun 2022 adalah 57,8 persen. Masih tinggi ketimpangan antar wilayah terutama disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar pulau Jawa terutama di KTI.

Tantangan lainnya adalah masih tingginya permasalahan pertanahan dan sangat terbatasnya RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) kabupaten/kota yang tersedia, rendahnya produktivitas perkotaan akibat desain kota yang tidak optimal, serta tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif. Demikian pula desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan hasil yang diharapkan, ditunjukkan oleh tata kelola yang lemah.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah

Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal, yaitu sebesar US\$7.274,9 per pekerja, di bawah rata-rata kawasan ASEAN sebesar US\$8.449,0 per pekerja. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas di antaranya rendahnya kualitas SDM (56,3 persen

tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah), ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespon perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Untuk mencapai pembangunan yang optimal di sektor pendidikan, Indonesia harus mampu mengatasi beberapa tantangan, diantaranya layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi masih tinggi.

4. Integrasi Domestik Terbatas

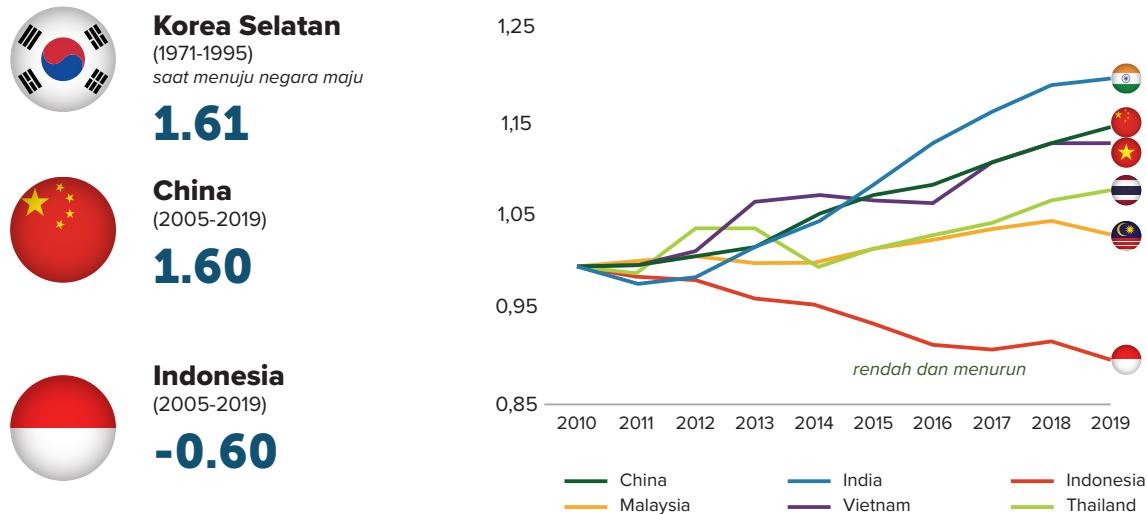
Integrasi ekonomi domestik berperan penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Saat ini, ekonomi domestik Indonesia belum terintegrasi secara optimal, dengan keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan antara lain (a) pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di pulau Jawa, yang berkontribusi sebesar 57,8 persen terhadap PDB (2022); (b) infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya sehingga menyebabkan tingginya biaya logistik; (c) masih banyaknya regulasi yang menghambat; serta (d) kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.

Jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia yang ditunjukkan oleh kontribusi PDB perkotaan per kapita terhadap pertumbuhan penduduk yang hanya mencapai 1,4 persen per 1 persen penduduk (sedangkan Tiongkok mencapai 3,00 persen per 1 persen penduduk), serta tingkat urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun (sementara Tiongkok 1,21 persen), terbatasnya keterhubungan antar perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan pedesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

5. Rendahnya Tingkat Produktivitas

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, tetapi tantangan yang dihadapi adalah tingkat produktivitas yang masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Rata-rata produktivitas yang tercermin dari Total Factor Productivity (TFP) Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,61 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995 dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2005-2019. Kondisi produktivitas yang rendah tersebut diantaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah.

GAMBAR 3.2 TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY INDEX 2010-2019 (2010 = 1,0)



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Kemudian, kapasitas ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi semakin tertekan, tercermin dari pertumbuhan yang hanya mencapai rata-rata 4,0 persen selama tahun 2015-2022. Rendahnya pertumbuhan tersebut juga disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

6. IPTEKIN dan Riset Lemah

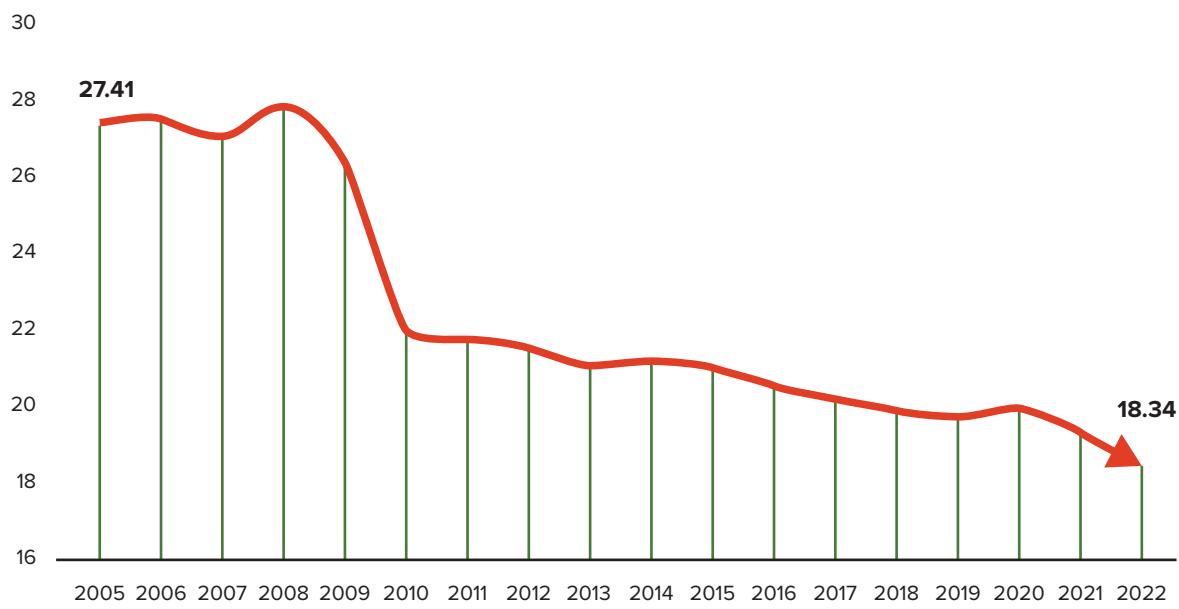
Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, dibutuhkan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin). Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Namun, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi masih menghadapi tantangan di antaranya masih lemahnya komitmen pemerintah terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81), Thailand (1,31) dan Malaysia (1,04) pada tahun 2020.

Selain itu, kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai, tercermin dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388, jauh lebih rendah dibandingkan Thailand (1790), Singapura (7287), dan Korea Selatan (8408) pada tahun 2019. Ekosistem riset dan inovasi juga masih lemah, hasil riset tidak aplikatif karena masih lemahnya kerja sama lembaga riset dan industri, serta masih terbatasnya kerja sama lembaga riset domestik dan internasional. Kondisi ini juga terlihat dari jumlah paten yang diajukan Indonesia hanya sebanyak 1445, jauh tertinggal dari Malaysia (1863), Singapura (9766) dan Korea Selatan (267,527) pada tahun 2021. Sementara dari sisi H-Indeks, Indonesia baru mencapai 284, relatif tertinggal dibandingkan Malaysia (415), Singapura (697) dan Korea Selatan (810). Selain itu, beberapa persoalan lain juga masih harus diatasi Indonesia seperti belum berkembangnya kesadaran ilmiah (*scientific temper*).

7. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah

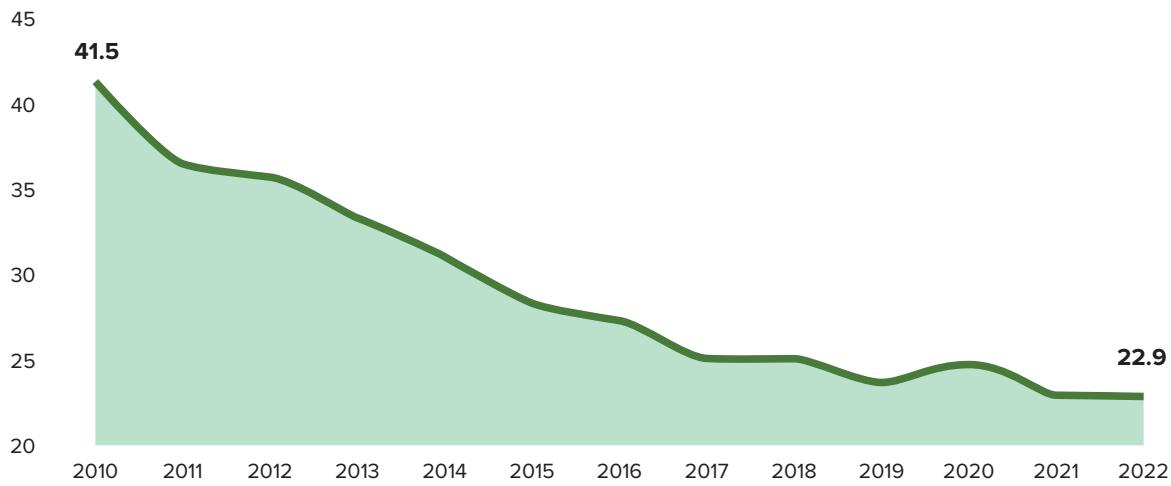
Dari sisi produksi, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dihadapkan pada tantangan deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah. Beberapa penyebab kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun di antaranya akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga.

GAMBAR 3.3 KONTRIBUSI MANUFAKTUR TERHADAP PDB (%PDB)



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

GAMBAR 3.4 PRODUKTIVITAS PERTANIAN (JUTA RUPIAH/PEKERJA)



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang masih rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian. Berbagai faktor tersebut menyebabkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan sebesar 9,07 persen dari semula mencapai 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 18,34 persen pada tahun 2022. Sementara itu, produktivitas sektor pertanian terus melambat sebesar Rp. 18,26 juta per pekerja dari Rp. 41,5 juta per pekerja pada tahun 2010 menjadi hanya 22,9 juta per pekerja pada tahun 2022.

8. Pariwisata di Bawah Potensinya

Kinerja pariwisata di Indonesia meningkat, tetapi masih di bawah potensi yang dimilikinya, sedangkan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif yang besar masih perlu dikembangkan. Adapun kinerja pariwisata berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Di samping itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan disrupti terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Sementara itu, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal dikarenakan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai serta transformasi digital yang belum merata. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem untuk mendukung komersialisasinya belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional juga masih terbatas.

9. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil terhadap Perekonomian

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Proporsi UMKM mencapai 99,99 persen dari total pelaku usaha dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 96,92 persen pada tahun 2019. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar 1,07 persen pada tahun 2019. Beberapa tantangan yang harus dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya adalah :

- a. Sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah;
- b. Rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha;
- c. Rendahnya kapasitas pengelolaan;
- d. Rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; dan
- e. Rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

10. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah

Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, Indonesia dihadapi oleh tantangan infrastruktur digital yang belum optimal, rendahnya literasi digital, serta belum tersedianya talenta digital yang memadai sehingga pemanfaatan digital untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Tantangan pembangunan digital yang masih harus dihadapi di antaranya :

- a. Jumlah pengguna internet hanya 62,1 persen dari total populasi (2021) yang relatif tertinggal dibanding negara sebanding (Malaysia 96,8 persen dan Thailand 85,3 persen);
- b. Masih rendah dan belum meratanya literasi digital dan talenta digital;
- c. Masih belum sepenuhnya masyarakat terjangkau jaringan 4G (96,97 persen) yang berkualitas dan kecepatan internet yang relatif masih terbatas;
- d. Rentannya keamanan siber yang masih harus ditingkatkan;
- e. Ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan produk luar negeri; dan
- f. Sulitnya kondisi geografis di beberapa daerah.

11. Ekonomi Laut Belum Optimal

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada beberapa masalah yaitu :

Masih rendahnya pemanfaatan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan SloC (*Sea Lines of Communication*). Pemanfaatan sumber daya laut tidak optimal dan berkelanjutan, tercermin dari ekspor perikanan yang mencapai US\$6,24 miliar pada tahun 2022 dibandingkan potensi ekonomi kelautan sebesar US\$1.334 miliar;

- a. Terbatasnya pengembangan budidaya perikanan;
- b. Masih lemahnya rantai nilai tambah kekayaan laut;
- c. Terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan;
- d. Rendahnya penangangan sampah plastik yang ditunjukkan dari data kebocoran sampah plastik ke laut sebesar 440.160,7 ton (*land base and sea base*) pada tahun 2021. Kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU) yang masih tinggi, yaitu ditangkapnya 97 kapal ikan, yang terdiri dari 79 kapal ikan Indonesia, 18 kapal asing dan 45 kasus TPKP;
- e. Belum berkembangnya industri pengolahan dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi;
- f. Tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut belum optimal karena hanya lima provinsi (Papua Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Bali) yang sudah melakukan pengintegrasian RZWP3K dengan RTRW.

12. Pembangunan Belum Berkelanjutan

Ekonomi hijau penting diterapkan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Untuk menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh, Indonesia harus mengatasi beberapa hambatan seperti penggunaan energi fosil yang masih tinggi, tercermin dari porsinya untuk produksi listrik sebesar 87,1 persen (2021) dan emisi GRK 1.318 GtCO₂eq (2021) berasal dari pembangkit listrik dan transportasi.

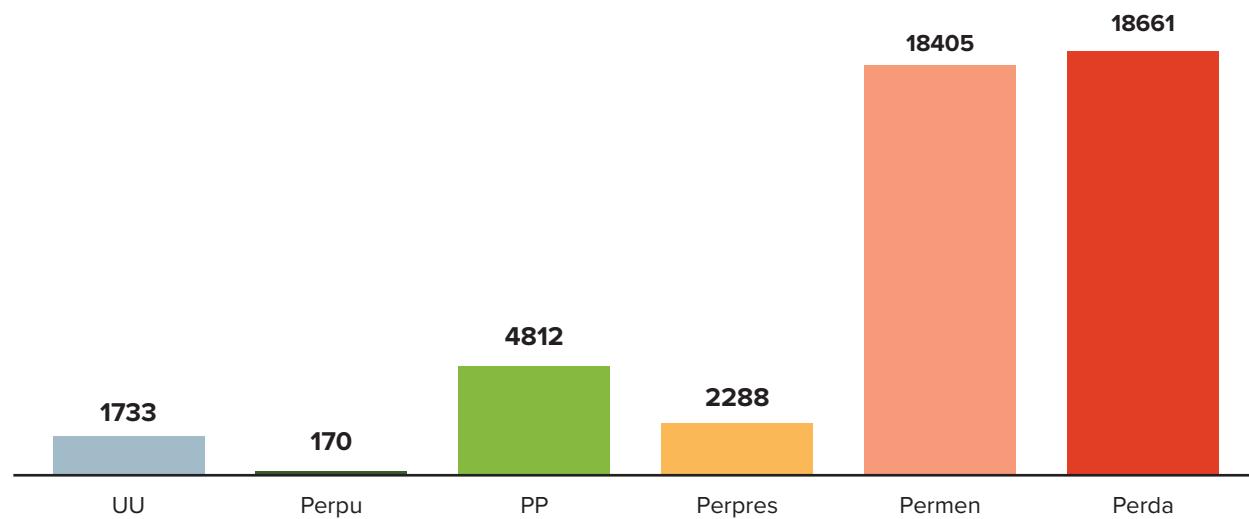
Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan masih rendahnya efisiensi energi. Porsi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat dari 4,24 persen tahun 2005 menjadi 12,30 persen tahun 2022. Namun, ini menunjukkan masih tingginya pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil.

Selain itu, pengelolaan limbah industri cenderung masih lemah, tercermin dari limbah B3 yang mencapai 60 juta ton sepanjang tahun 2022. Regulasi serta sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi hijau juga masih lemah. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploratif, meningkatnya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang meningkatkan degradasi hutan deforestasi, serta masih tingginya pencemaran air permukaan dan meningkatnya kelangkaan air.

13. *Hyper Regulation* dan Kualitas Regulasi Rendah

Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Selama ini tata kelola menjadi kendala utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi regulasi, baik di pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan banyaknya pengujian materiil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi tersebut disebabkan masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM di bidang regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.

GAMBAR 3.5 KONDISI HIPER REGULASI



Sumber: peraturan.bpk.go.id; peraturan.go.id, 2023

Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. Fragmentasi birokrasi menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada berbagai bidang serta melanggengkan ego sektoral. Kementerian/lembaga memiliki tugas, fungsi dan wewenang masing-masing yang diatur dalam peraturan perundangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program pembangunan masih terjadi tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi.

3.2.3 Isu Strategis Daerah

Setelah dilakukan telaahan terhadap berbagai isu strategis pada tingkat global dan nasional serta berbagai permasalahan pembangunan di Provinsi NTT, dapat disimpulkan beberapa isu yang dianggap memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 20 tahun ke depan. Beberapa isu strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Indonesia menargetkan untuk mencapai tingkat kemiskinan nol persen pada tahun 2045 sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Secara nasional, Provinsi NTT per Maret 2023 menempati peringkat ke tiga sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi setelah Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Provinsi NTT dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan mendukung visi pembangunan nasional.

Kemiskinan di NTT menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin di NTT pada maret 2023 adalah sebesar 1,14 juta jiwa (19,96%), menurun dibandingkan dengan Maret 2022 sebesar 1,13 juta jiwa (20,05%). Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 0,09%. Secara kumulatif, persentase penduduk miskin di NTT pada maret 2023 menurun sebesar 8,23% dibandingkan Maret 2005 yang sebesar 28,19%. Sebaran penduduk miskin di NTT pada Maret 2023 masih didominasi wilayah pedesaan yaitu sebanyak 1,01 juta jiwa. Sementara penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 135,57 ribu jiwa.

Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada Maret 2023, indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi NTT sebesar 3,33%, atau meningkat sebesar 0,06% dibandingkan Maret 2012 yang sebesar 3,27%. Sementara pada periode yang sama, indeks keparahan kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret 2023 sebesar 0,80%, menurun sebesar 0,02% dibandingkan Maret 2012 yang sebesar 0,82%. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi NTT juga masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia dan masih jauh dari nasional dengan indeks kedalaman kemiskinan Indonesia sebesar 1,53% dan indeks keparahan kemiskinan Indonesia sebesar 0,38% per Maret 2023. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin di NTT juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin di NTT adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasi, kelemahan jasmani dan psikologi.

Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif serta belum optimalnya pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.

2. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (Masih Banyaknya Daerah Tertinggal)

Wilayah Provinsi NTT saat ini perkembangannya belum merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,632. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting. Selain itu jika dilihat dari kontribusi PDRB berdasarkan Kabupaten/Kota, perekonomian NTT masih didominasi oleh Kota Kupang yaitu sebesar 22,11 persen pada tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi lebih banyak berpusat di Kota Kupang dengan sarana prasarana yang lebih memadai dari daerah lain di NTT.

Isu penting lainnya berkaitan dengan ketertinggalan daerah di Provinsi NTT. Pada Tahun 2020, jumlah daerah tertinggal di Indonesia sebanyak 62 Kabupaten. Sementara di wilayah Nusa Tenggara terdapat 14 Kabupaten dikategorikan sebagai daerah tertinggal dengan 13 diantaranya ada di Provinsi NTT (dari 22 Kabupaten/Kota). Kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Malaka. Kondisi ketertinggalan di wilayah ini terutama dipengaruhi oleh infrastruktur dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, ekonomi dan TIK) yang belum optimal, kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah (PDRB per kapita, pengeluaran dan pekerjaan), serta karakteristik daerah dengan potensi bencana dan konflik sosial yang tinggi.

Data BPS menunjukkan bahwa secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal di Provinsi NTT sebesar 3,15 persen di Tahun 2022, berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang sebesar 3,05 persen di Tahun 2022. Ini mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang dimiliki daerah tersebut untuk keluar dari daerah tertinggal dan menunjang perekonomian NTT. Kemampuan daerah untuk maju tentunya tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mampu mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sektor-sektor unggulan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah namun juga berorientasi ekspor (sektor basis), dan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan sektor-sektor tersebut sebagai sektor unggulan dalam perencanaan pembangunan daerah, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

3. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Provinsi NTT memiliki IPM di bawah rata-rata nasional yaitu peringkat 32 secara nasional, dengan akar permasalahan pada aspek kesehatan dan pendidikan yang masih rendah. NTT masih dihadapkan pada permasalahan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat pendidikan SD. Rendahnya IPM di Provinsi NTT disebabkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) yang berada di bawah capaian nasional akibat dari rendahnya aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan khususnya pada jenjang SD, SMA dan Perguruan Tinggi serta kurang meratanya persebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa Sektor Pendidikan menjadi sektor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Isu pendidikan yang utama adalah bagaimana sistem pendidikan yang ada dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah yang memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi. Hal penting lainnya adalah terkait pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat, serta memperkuat pendidikan budaya dan pendidikan karakter. Isu lain berkaitan dengan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan 20 tahun ke depan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

Ancaman terhadap sumber daya manusia lainnya yang saat ini tengah menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi **“kebhinekatunggalikaan”**, serta banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang memungkinkan akan merambat masuk di Provinsi NTT. Bukan hanya pemahaman tentang budaya bangsa, namun isu pentingnya adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai budaya ke dalam perilaku masyarakat NTT. Penguatan identitas dan bangunan nilai masyarakat demikian penting ditegaskan untuk memastikan jalinan hubungan antar masyarakat untuk maju dan berkembang bersama, maupun sikap dalam menghadapi tantangan global yang pada satu sisi membuka ruang komunikasi dan informasi seluas-luasnya, namun pada sisi lain menghadirkan ancaman melunturnya identitas dan kekuatan budaya, sehingga terdominasi dan disubordinasi oleh kepentingan materialisme komersial pasar dan neoliberalisme. Upaya internalisasi nilai-nilai budaya dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan menguatkan identitas kebudayaan masyarakat NTT melalui pengakuan keragaman budaya dan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi dan kreasi berbagai budaya yang hidup di masyarakat.

4. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) berbasis komoditas unggulan

Struktur perekonomian NTT selama ini didominasi oleh sektor dengan nilai tambah rendah yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,60 persen terhadap perekonomian NTT pada tahun 2022. Sementara sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mendukung industrialisasi masih sangat rendah kontribusinya. Ini menjadi tantangan bagi Provinsi NTT untuk mengembangkan Sektor Industri Pengolahan sebagai langkah transformasi ekonomi dalam menunjang perekonomian daerah agar bisa menjadi salah satu provinsi maju di Indonesia, seperti halnya provinsi-provinsi maju di Indonesia (DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten) yang kontribusi sektor industri pengolahannya sangat besar terhadap ekonomi daerah.

Namun di satu sisi, ini menunjukkan peluang dan potensi Provinsi NTT untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan (Pertanian, Perikanan dan Pertambangan). Provinsi NTT perlu mengembangkan sub sektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan kuat dengan komoditas unggulan daerah untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan yang berorientasi ekspor.

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan Sektor Industri Pengolahan di NTT, yaitu industri pengolahan berbasis pertanian karena kontribusi sektor primer ini cukup tinggi untuk perekonomian. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, Sektor Pertanian Primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja.

Provinsi NTT belum memiliki kawasan industri yang akan dikembangkan. Sektor industri di NTT saat ini didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Peran sektor industri pada pembentukan PDRB NTT tidak dominan karena kontribusi terbesar perekonomian adalah pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam perekonomian hanya sebesar 1,12 persen pada tahun 2022, mengindikasikan ketergantungan NTT terhadap suplai produk olahan dari daerah lain sangat tinggi. Oleh karena itu, industri pengolahan berbasis sumber daya alam perlu ditingkatkan dengan optimalisasi potensi alam NTT. Dengan berkembangnya Sektor Industri, aktivitas di sektor-sektor lain akan turut meningkat karena sektor industri membutuhkan pasokan bahan baku dari sektor primer.

Pertanian di NTT masih sangat minim dalam pemanfaatan teknologi dan cenderung hanya bersifat ekstraksi tanpa adanya pengolahan lebih lanjut untuk menciptakan nilai tambah. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat di NTT. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu di dorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal untuk mendorong transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi NTT dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi pada sektor pertanian perlu dilakukan sehingga ekonomi NTT akan beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (*value creation*).

5. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata

Provinsi NTT memiliki potensi pariwisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata budaya dan wisata buatan yang tersebar di provinsi NTT, serta potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal. Pengembangan potensi ini telah didukung dengan adanya penetapan DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas), KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), dan destinasi pariwisata pengembangan yang diharapkan mampu memberikan multiplier effects pada berbagai sektor terkait.

Pengembangan pariwisata di Provinsi NTT belum optimal dalam menarik Wisatawan Nusantara dan Mancanegara. Kawasan pariwisata yang dikembangkan yaitu Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo, namun belum mampu meningkatkan jumlah wisatawan, dimana jumlah wisatawan di NTT hanya 744 ribu Wisatawan Nusantara dan 58 ribu Wisatawan Mancanegara, jauh lebih rendah dibandingkan Bali yang jumlah Wisatawan Nusantaranya 8,1 juta dan 2,2 juta Wisatawan Mancanegara. Hal ini disebabkan karena koneksi wilayah yang belum optimal, serta daya tarik wisata yang belum dikembangkan dengan baik sehingga wisatawan domestik dan mancanegara masih bertumpu pada Bali sebagai daerah tujuan wisata. Di sisi lain, pengembangan pariwisata di NTT juga terkendala terbatasnya kapasitas masyarakat akan pengembangan pariwisata dan potensi pariwisata juga belum sepenuhnya di dukung oleh pengembangan ekonomi kreatif yang ditunjukkan dengan masih rendahnya indeks potensi ekonomi kreatif daerah.

Sebagai Provinsi yang memiliki destinasi pariwisata tujuan wisatawan mancanegara, Provinsi NTT telah didukung dengan adanya 693 usaha ekonomi kreatif yang dapat terus dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi wilayah. Adapun berdasarkan indikasi geografis, potensi yang ada meliputi Kopi Flores Bajawa, Kopi Robusta Flores Manggarai, Kopi Arabika Flores Manggarai, Vanili Kepulauan Alor, Jeruk Soe Mollo, Gula Lontar Rote, serta potensi kerajinan tenun seperti Tenun Ikat Sikka, Tenun Ikat Alor, dan Tenun Songket Alor. Tenun di Provinsi NTT memiliki motif yang khas sebagai wujud rantai budaya dan tradisi turun temurun yang bernilai ekonomi, serta potensial untuk dikembangkan hingga mampu berkontribusi pada industri fesyen internasional. Dengan potensi yang dimiliki, perlu adanya inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk yang berimplikasi pada peningkatan jumlah wisatawan dan penguatan ekonomi daerah.

6. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

Proses pembangunan harus berwawasan lingkungan dimana akses terhadap sumber daya dapat diterima manfaatnya oleh generasi sekarang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, konsep pengembangan wilayah yang mulai diterapkan di NTT adalah konsep ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk memanfaatkan potensi unggulan daerah dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

a. Ekonomi Biru

Ekonomi biru adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pantai secara berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Ekonomi biru mencakup sektor-sektor seperti Perikanan, Transportasi Laut, Pariwisata Pantai, Energi Laut, dan Teknologi Kelautan. Secara keseluruhan, ekonomi biru menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan laut dan pantai untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Karakteristik wilayah Nusa tenggara yang berciri kepulauan menjadikan laut sebagai potensi besar yang harus dioptimalkan. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan dimana sebagian wilayah di daerah memiliki laut dan garis pantai yang besar. Panjang garis pantai di NTT adalah sebesar 5.700 km² dengan luas laut sebesar 151.414,05 km². Pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja pembangunan. Sasaran pengembangan ekonomi maritim dan kelautan diantaranya termanfaatkannya sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut

dan upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitas laut. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, wilayah dengan potensi maritim besar perlu didorong untuk melakukan percepatan pengembangan ekonomi kelautan. Kondisi Provinsi NTT sebagai daerah kepulauan menjadikan sistem transportasi laut menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan di NTT.

Salah satu kebijakan dalam pembangunan Sektor Kelautan adalah Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kebijakan peningkatan pemakaian EBT diarahkan untuk memanfaatkan potensi laut sebagai sumber energi utama. Perairan NTT memiliki potensi EBT yang bersumber dari 3 (tiga) sumber energi utama, yaitu Arus Laut, Gelombang Laut dan Temperatur Laut. Lokasi potensial bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di NTT adalah Selat Pantar, Selat Gonzalu, Selat Boleng dan Selat Molo. NTT juga memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut, sehingga sumber daya laut di NTT sangat potensial untuk dikembangkan.

b. Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau merupakan komitmen kuat dari masyarakat/para pihak untuk mencapai rencana pertumbuhan ekonomi hijau/*green growth plan* (GGP), dengan lingkup rekomendasi pada sektor berbasis lahan (pertanian, perkebunan, kehutanan dan menyentuh wilayah pesisir dan kelautan) yang merupakan renewable resources (sumber daya berkelanjutan) melalui peningkatan produktivitas pertanian dan kehutanan dengan menjaga dan memperbaiki hutan serta memperkuat kemitraan antara private sector, petani, masyarakat, penggiat lingkungan, dan lain-lain.

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.

Konsep pertumbuhan ekonomi hijau tidak menggantikan pembangunan berkelanjutan, tetapi merupakan bentuk konkret dan sistematis dari penerapan pembangunan berkelanjutan. Ruang lingkup ekonomi hijau yaitu sektor pertanian (perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) dan turunannya. PDRB Provinsi NTT menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB NTT yaitu 29,60 persen pada tahun 2022, sehingga potensi pengembangan ekonomi hijau di Provinsi NTT dalam jangka panjang sangat penting untuk dilakukan.

NTT merupakan wilayah kering yang berisiko lebih parah dengan adanya perubahan iklim, rawan bencana, rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat eksplorasi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan sangat penting untuk dilaksanakan.

7. Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana

Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori “kode merah bagi manusia”. Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga Tahun 2022, kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu tahun 1900 (NOAA, 2023) yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat

Celcius di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan GRK yang signifikan di atmosfer dan berbagai aktivitas manusia. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan bagi daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan.

Isu yang juga menjadi perhatian serius bagi Provinsi NTT adalah terkait dengan ketahanan pangan, dimana Prevalensi Ketidakcukupan Pangan di NTT sebesar 13,74 persen, lebih tinggi dari nasional dan wilayah Nusa Tenggara (Bali dan NTB). Tantangan utama ketahanan pangan terkait dengan sisi *demand*, dimana Pemerintah harus memenuhi permintaan pangan bagi penduduk NTT yang diproyeksikan sebanyak 7,33 juta jiwa pada tahun 2045. Perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan karena menyebabkan terjadinya pergeseran musim hujan atau kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam tanaman pangan. Perubahan iklim ditandai dengan suhu yang semakin tinggi dan curah hujan yang semakin berkurang dan tidak menentu. Lembaga penelitian padi di Philipina melaporkan bahwa peningkatan suhu 1°C dapat mengakibatkan terjadinya penurunan panen padi sebesar 10%. Perubahan iklim dipicu oleh aktivitas manusia (antrophogenik) yang menghasilkan “Emisi Gas Rumah Kaca”. Gas rumah kaca di atmosfer menghasilkan pemanasan global yang mengakibatkan terjadinya El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang mengakibatkan terjadinya penurunan curah hujan dan berpotensi mengakibatkan penurunan produksi pertanian. Penurunan produksi pertanian akan memicu kenaikan harga pangan yang selanjutnya berimbas pada penurunan daya beli pangan rumah tangga. Situasi ini akan meningkatkan jumlah daerah rawan pangan yang pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya kasus kelaparan pangan ekstrim. Selain itu resiko bencana dapat mengakibatkan menurunnya produksi pertanian dan menimbulkan terjadinya kelaparan karena tidak mampu memenuhi konsumsi masyarakat yang jumlahnya terus bertambah.

Provinsi NTT termasuk pada kategori daerah dengan resiko rawan bencana yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan. Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki indeks resiko 139,23 (kategori sedang). Bencana yang sering terjadi di Provinsi NTT di dominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan kekeringan. Selain itu, NTT juga memiliki potensi bencana geologi yang terdiri dari gempa tektonik di jalur patahan Flores yang tersebar sepanjang sisi utara Pula Nusa Tenggara, serta erupsi gunung aktif. Tantangan lainnya terkait dengan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan risiko bencana serta terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana, khususnya wilayah yang rawan terhadap bencana gempa dan tsunami. Secara historis, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi 576 kejadian bencana di NTT, dimana bencana yang paling sering terjadi adalah angin puting beliung, diikuti oleh banjir, tanah longsor dan kekeringan.

8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Provinsi NTT masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik ditunjukkan dengan standar pelayanan yang belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya praktik pungutan liar. Pencapaian SPM yang belum optimal ditunjukkan dengan Indeks Pelayanan Publik Provinsi NTT yang masuk dalam kategori cukup. Selain itu, terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur

digital, keterbatasan kapasitas SDM, belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan, ditandai dengan belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan kebijakan.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dituntut untuk terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Kontribusi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pendapatan daerah sangat rendah dan lebih banyak bergantung pada dana transfer dari pusat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber-sumber PAD yang ada tidak mampu membiayai beban belanja APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan umum sekaligus pembangunan di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa.

9. Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan dan kepastian hukum

Proses penegakan hukum memberikan jaminan pada ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2022, Capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi NTT belum benar-benar diwujudkan secara merata di seluruh kabupaten/kota. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 93 persen. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 76 persen, Kabupaten Alor sebesar 70 persen serta Kabupaten Rote Ndao sebesar 68 persen. Masih terdapat 12 Kabupaten di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Isu-isu strategis sebagaimana yang dikemukakan di atas tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di Provinsi NTT, dimana setiap isu strategis memiliki keterkaitan atau akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi NTT dengan memperhatikan isu-isu yang terjadi secara global, nasional maupun regional. Berikut merupakan keterkaitan antara permasalahan pokok dan isu strategis di Provinsi NTT tahun 2025-2045.

TABEL 3.1 MASALAH POKOK DAN ISU STRATEGIS PROVINSI NTT TAHUN 2025-2045

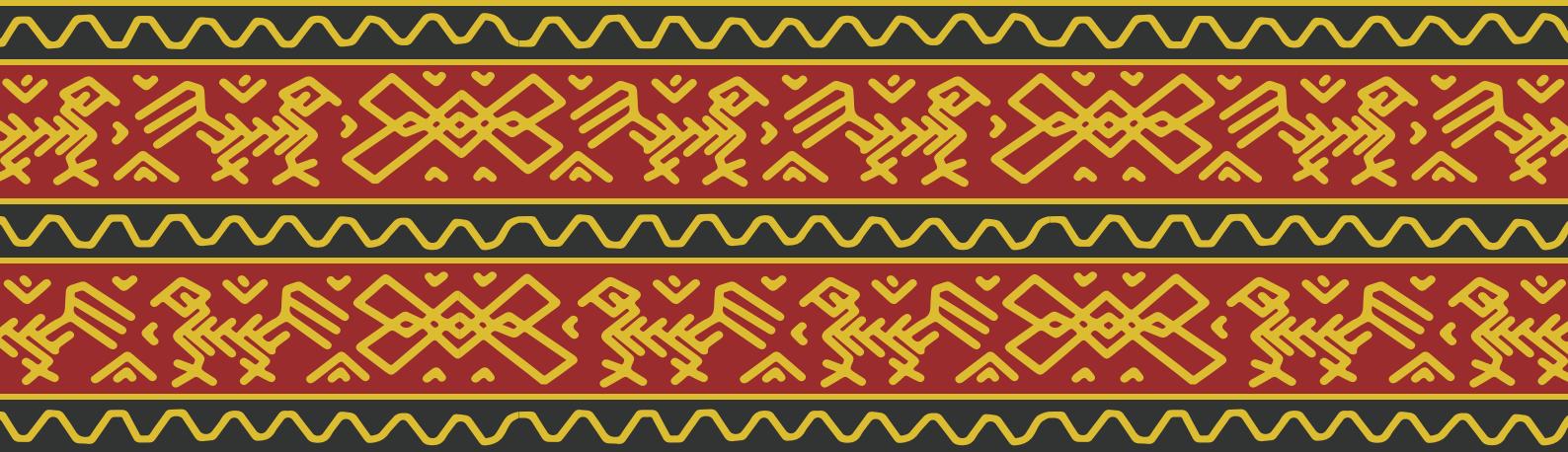
MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
Belum Optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat a. Masih tingginya kemiskinan dan adanya kemiskinan ekstrim b. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia	1. Kemiskinan
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah c. Masih tingginya beban ketergantungan di NTT d. Rendahnya daya saing sumber daya manusia	
Aspek Geografi dan Demografi a. Struktur Penduduk yang belum cukup baik untuk menciptakan bonus Demografi b. Belum Meratanya Penyebaran Penduduk antar Kabupaten dan Kota	2. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (Masih Banyaknya Daerah Tertinggal)
Belum Optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat c. Masih tingginya kemiskinan dan adanya kemiskinan ekstrim d. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia	
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah e. Masih tingginya beban ketergantungan di NTT f. Rendahnya daya saing sumber daya manusia	
Belum Optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat a. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia b. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak c. Belum optimalnya peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga d. Belum optimalnya penanganan Gedsi (pembangunan gender, penanganan disabilitas dan sosial inklusi) e. Belum optimalnya kemajuan pemuda f. Rendahnya pembangunan kebudayaan	3. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemererosotan Nilai-Nilai Budaya
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah g. Menurunnya kemampuan literasi digital NTT h. Rendahnya daya saing sumber daya manusia i. Menurunnya kemampuan numerasi siswa di NTT	
Aspek Geografi dan Demografi j. Lemahnya Pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat	

MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah	
<ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya ketergantungan pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan b. Kontribusi sektor manufaktur (industri) sangat rendah c. Menurunnya kemampuan literasi digital NTT d. Rendahnya daya saing sumber daya manusia 	
Belum Optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
<ul style="list-style-type: none"> e. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi f. Besarnya ketimpangan antara ekspor dan impor daerah g. Rendahnya kesejahteraan petani h. Tingginya tingkat setengah pengangguran 	
Belum Optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
<ul style="list-style-type: none"> a. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi b. Tingginya Tingkat Setengah Pengangguran 	5. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah	
<ul style="list-style-type: none"> c. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sangat rendah d. Rendahnya PDRB per kapita e. Menurunnya kemampuan Literasi Digital NTT f. Rendahnya daya saing sumber daya manusia 	
Aspek Geografi dan Demografi	
<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan iklim b. Menurunnya kualitas lahan c. Daerah rawan bencana d. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) e. Kelangkaan air 	6. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau
Belum Optimalnya Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
<ul style="list-style-type: none"> f. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi g. Besarnya ketimpangan antara ekspor dan impor daerah h. Rendahnya kesejahteraan petani i. Masih tingginya kemiskinan dan adanya kemiskinan ekstrim j. Tingginya tingkat setengah pengangguran 	
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah	
<ul style="list-style-type: none"> k. Tingginya ketergantungan pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan l. Kontribusi sektor manufaktur (industri) sangat rendah m. Kontribusi Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sangat rendah n. Rendahnya PDRB perkapita o. Masih Tingginya Beban Ketergantungan di NTT 	

MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
Aspek Geografi dan Demografi <ul style="list-style-type: none">a. Perubahan iklimb. Menurunnya kualitas lahanc. Daerah rawan bencanad. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)e. kelangkaan air	7. Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana
Belum Optimalnya Aspek Pelayanan Umum <ul style="list-style-type: none">a. Belum optimalnya pelayanan publikb. Belum optimalnya digitalisasi pemerintahan di level kabupatenc. Rendahnya akuntabilitas kinerja pemda kabupaten/ kota di provinsi NTTd. Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi pada pemda kabupaten/kota di provinsi NTTe. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di provinsi NTT	8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
Rendahnya Aspek Daya Saing Daerah <ul style="list-style-type: none">f. Menurunnya Kemampuan Literasi Digital NTTg. Rendahnya daya saing sumber daya manusia	
Belum Optimalnya Aspek Pelayanan Umum <ul style="list-style-type: none">a. Belum optimalnya pelayanan publikb. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di provinsi NTT	9. Belum Optimalnya Supremasi Hukum yang Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum

Dari tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh isu strategis memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang ada atau merupakan akumulasi dari permasalahan-permasalahan pembangunan di Provinsi NTT. Permasalahan yang ada merupakan kesenjangan antara harapan dan realisasi pembangunan di Provinsi NTT, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk melihat seberapa besar masalah tersebut mampu memberikan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik penting, mendasar dan mendesak untuk kemudian disimpulkan sebagai isu-isu strategis yang akan sangat menentukan tujuan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Provinsi NTT dalam 20 tahun ke depan.





BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 VISI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD pada dasarnya merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Visi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2025- 2045 adalah:

"Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045"

Visi tersebut dibangun dengan spirit integratif bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh masyarakat Provinsi NTT dan Indonesia secara keseluruhan. Visi ini sejalan dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Visi ini menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045 yakni:

Mandiri ditandai dengan terpenuhinya hak dasar seseorang untuk dihargai dan dihormati, dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai warga negara, baik dalam nilai agama, etika, moralitas, hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Manusia yang berdaya saing merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan, kesehatan, hidup yang layak serta memiliki perlindungan sosial yang adaptif melalui cakupan kepesertaan jaminan sosial.

Mandiri mengandung arti bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan akan dipayakan terutama melalui pemanfaatan kekuatan potensi sumberdaya lokal yang dimiliki didukung oleh pemanfaatan peluang eksternal sebagai bagian dari proses pembangunan secara integratif dan menyeluruh bagi seluruh umat manusia.

Mandiri harus berangkat dari apa yang dimiliki daerah tersebut. Kita sebut sebagai potensi daerah. Potensi, tidak akan melahirkan nilai (daya) jika tidak mampu dikelola dengan baik. Potensi yang berhasil diberdayakan akan melahirkan kompetensi. Potensi menjadi impoten jika gagal dikelola menjadi satu kekuatan yang bernilai lebih. Kemandirian bersifat multi-dimensi, yaitu mandiri secara ekonomi (*self-sustaining growth* dan daya saing), mandiri secara politik (ukuran otonomi urusan dan otonomi fiskal), mandiri secara pangan (swa-sembada), mandiri secara budaya (keunikan dan ketangguhan budaya serta etos kerja tinggi) dan mandiri secara demografis (pertumbuhan penduduk dan mutu sumberdaya manusia).

Potensi setiap daerah tentu berbeda-beda. Setiap daerah juga memiliki prioritas dan arah pembangunan masing-masing. Yang pasti adalah, semua daerah dalam membangun pasti bertujuan, salah satunya, adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan pembangunan yang utama adalah meningkatkan kualitas hidup warganya. Karena itu, potensi yang digali dalam rangka melahirkan kompetensi, tidak lain adalah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Potensi daerah sebagai modal dan sumber daya pembangun tentu beragam di setiap daerah. Potensi itu bisa berupa komoditi primer, atau juga produk-produk manufaktur yang bernilai ekonomi. Bisa juga dalam bentuk layanan atau jasa-jasa lembaga pemerintahan dan swasta. Itu semua merupakan potensi, yang bisa sekadar bernilai komparatif atau juga kompetitif. Potensi yang mampu dikelola secara baik, tentu menjadi kompetensi dari pengelolanya. Daerah yang mampu mengelola dan meningkatkan nilai dari potensi yang dimilikinya, akan melahirkan kompetensi daerah atau daya saing daerah. Maka, sampai disini, daerah memiliki ruang untuk membangun kompetensinya masing-masing, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Artinya, kompetensi dan daya saing daerah tidak harus seragam.

Maju merepresentasikan terwujudnya peningkatan taraf hidup yang dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau kualitas kehidupan yang terus meningkat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Daerah adalah Provinsi yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Provinsi Nusa Tenggara Timur sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejateraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Berkelanjutan menjelaskan bahwa pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berorientasi pada keberlanjutan dalam bidang ekonomi (*economic prosperity*), sosial (*social equity*), budaya (*cultural vitality*) dan lingkungan hidup (*environmental sustainability*), demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus.

4.1.1 Sasaran Visi Daerah

Adapun Sasaran Visi RPJPN 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Sehingga sasaran Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Daya Saing Daerah yang meningkat.
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif, dan inovatif.
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

4.1.2 Indikator Sasaran Visi Daerah

TABEL 4.1 SASARAN VISI DAN INDIKATOR VISI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045
1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB per kapita (Rp Juta) • Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) • Kontribusi PDRB sektor industri (%) 	<ul style="list-style-type: none"> 24,57 - 24,85 60,41 1,31 - 1,34 	<ul style="list-style-type: none"> 154,72 - 176,22 233,21 2,25 - 2,76
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemiskinan (%) • Rasio gini (Indeks) • Kontribusi PDRB Provinsi • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> 15,32 – 15,82 0,319 – 0,324 0,62 4,75-5,65 	<ul style="list-style-type: none"> 0,01-1,01 0,257 – 0,308 0,79 6,21-7,63
3. Daya Saing Daerah yang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Daya Saing Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 3,20 (2022) 	<ul style="list-style-type: none"> 3,9 – 4,45
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Modal Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> 0,47 	<ul style="list-style-type: none"> 0,72
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju net zero emission	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan intensitas emisi GRK (%) • Indek Kualitas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> 61,82 80,02 	<ul style="list-style-type: none"> 98,59 86,31

4.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, RPJPD ini merumuskan 8 (Delapan) Misi Daerah sebagai berikut:

Misi 1: Membangun Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan terlindungi Hak Dasarnya

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan layanan kesehatan yang berbanding lurus dengan upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan perlindungan sosial yang adaptif melalui peningkatan cakupan Jaminan sosial.

Sumber Daya Manusia (*human capital*) merupakan persoalan yang sangat penting karena menjadi penentu dalam mengatasi persoalan kemiskinan. *Human Capital* adalah kunci untuk menuntaskan kemiskinan dan ketidaksetaraan, dimana investasi pada *Human Capital* adalah pondasi untuk kemakmuran dan kunci penggerak *high-income growth*. Kesehatan adalah faktor penting yang mempengaruhi kualitas modal manusia. Kekurangan gizi adalah salah satu masalah serius yang juga dapat menyebabkan stunting yang bisa merusak masa depan bangsa.

Kualitas sumber daya manusia sering diindikasikan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang diharapkan semakin tinggi produktivitasnya dan semakin tinggi pendapatannya serta semakin besar peluangnya untuk tergolong tidak miskin. Keterkaitan seperti inilah yang sering dipakai untuk merancang program-program pembangunan suatu daerah atau negara dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki nilai-nilai etika terlebih pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan sumberdaya manusia yang berkarakter dan religius.

Misi ini perlu ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non-formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai etika dan religius dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari Misi ini adalah untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan kesetaraan gender.

Misi 2: Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang mengedepankan ide, kreativitas, pengetahuan dan teknologi sebagai faktor utama dalam produksi, dengan berbasis pada sector sumberdaya ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud bertujuan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi produk ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Di dalam mata rantai hilirisasi tersebut, aktivitas budidaya pada bagian hulu dan pengolahan pada bagian tengah bermuara pada bagian hilir untuk menjangkau konsumen. Pariwisata merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi pada bagian hilir, karena memiliki keterkaitan ke belakang, dan depan, sambil mengantisipasi dampak ikutan (*side effect*) sehingga memberi dampak pelipatgandaan (*multiplier effect*) yang besar terhadap penciptaan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, yang pada ujungnya berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan pemerataan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTT.

Seluruh upaya pembangunan dalam mewujudkan ekonomi NTT yang maju, mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan akan dilakukan dengan tetap memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup secara bertanggungjawab dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya dimaksud demi kelangsungan hidup generasi kini dan masa mendatang.

Misi 3: Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*). Kondisi ini akan dicapai apabila dengan didukung oleh optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penerapan inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas manajemen ASN serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan akuntabilitas keuangan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik berpusat pada perubahan budaya dan perilaku birokrasi dari orientasi mengatur dan memerintah berubah menjadi orientasi melayani; dari pendekatan monolog berubah ke arah fleksibel, agile, kolaboratif dan dialogis; serta, dari ciri-ciri yang sloganistik menuju cara-cara kerja yang realistik-pragmatis. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan dengan menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat memberikan suatu implikasi bahwa informasi menjadi urgen dan penentu perubahan. Kondisi menguatnya teknologi informasi telah memberikan ruang hidup tersendiri bagi birokrasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Teknologi informasi telah menciptakan kehidupan dunia yang semakin tidak ada batasnya. Informasi yang cepat diterima akan menimbulkan pemaknaan atas informasi. Apabila suatu informasi berkenaan dengan pemerintahan dan pelaksanaan birokrasi disuatu pemerintahan daerah dinilai baik, maka akan memunculkan efek image yang baik terhadap pemerintahan tersebut.

Kondisi seperti ini membawa implikasi lebih luas terkait dengan persepsi terhadap kualitas pemerintahan, stabilitas politik, dan aspek lainnya. Informasi positif yang diterima oleh masyarakat luar daerah tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi dunia usaha dan investor untuk menanamkan modal (investasi), ditambah lagi dengan jaminan rasa aman berusaha dan derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Terkait dengan kondisi seperti ini, maka birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peluang untuk mendongkrak kinerja pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyerap harapan dan kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah dan murah. Pengetahuan yang tepat terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat, di satu sisi dapat memudahkan birokrasi untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang efektif dan di sisi lain sebagai faktor penggerak kemauan birokrasi untuk meningkatkan kompetensinya untuk mengelola potensi dengan cara-cara baru guna meningkatkan daya saing daerah.

Akhirnya, layanan publik yang profesional mengindikasikan telah terlembaganya sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, adil, terukur sesuai fungsi pemerintahan. Semua perubahan itu akan tercapai melalui sumber daya aparatur yang kompeten, berkarakter, profesional dan sejahtera untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegrasи, efektif dan terpercaya.

Misi 4: Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin Keadilan, Kepastian, Stabilitas Ekonomi dan Demokrasi

Stabilitas hukum yang adil dan nyaman akan mendukung terlaksananya demokrasi dan kestabilan ekonomi. Para pelaku ekonomi atau investor memerlukan kepastian Hukum ditandai dengan rendahnya angka kriminalitas serta adanya aturan yang menjamin kenyamanan investasi.

Pengelolaan stabilitas hukum di era keterbukaan ini diperlukan karena keinginan membangun demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan keterbukaan, penegakan hukum dan toleransi. Adapun salah satu upaya struktural yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menegakkan supremasi hukum.

Misi 5: Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Konsep pembangunan inklusif dan berkertahanan sosial budaya dan ekologi dalam misi ini adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan di masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Dampak buruk terhadap lingkungan hidup harus dihindari dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga di masa sekarang dan di masa mendatang.

Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Eseni pembangunan kewilayahan adalah mengembangkan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama berupa ekosistem (lingkungan dan ruang) dengan subsistem ekonomi, sosial dan budaya dari satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang menghasilkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan (seimbang, harmonis dan optimal).

Provinsi NTT yang terbentuk dari berbagai pulau, memiliki subsistem lingkungan dan ruang (ekosistem) serta sub subsistem ekonomi, sosial dan budaya yang bervariasi, baik potensi maupun karakteristiknya. Pembangunan yang mengabaikan aspek kewilayahan, berpotensi menciptakan disparitas antar wilayah, sehingga tujuan mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan sulit terwujud. Karena itu misi pembangunan ini hendak menegaskan bahwa, aspek kewilayahan di Provinsi NTT harus dibangun secara merata, didorong percepatannya, ditingkatkan dayasainnya secara seimbang, harmonis dan optimal, sehingga masyarakat NTT pada setiap wilayah berkesempatan terlibat dan menikmati hasil yang merata dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Misi 7: Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata bertujuan untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengembangan Infrastruktur yang handal dan pemerataan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Misi 8: Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan daerah

Kesinambungan pembangunan daerah mengandung makna proses dan hasil pembangunan dari satu tahap ke tahap berikutnya harus koheren, meningkat dan berkelanjutan. Karena itu pada tahap awal, pemanfaatan potensi dimiliki harus mampu mendorong percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan dayasaing daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Siklus percepatan pembangunan, peningkatan dayasaing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut berkelanjutan dari satu tahap ke tahap berikutnya.

Siklus kesinambungan pembangunan daerah tersebut, secara teknis harus didukung dengan keterpaduan dan kohensi dari sisi perencanaan pembangunan, pelaksanaan (tatakelola) pembangunan dan pembiayaan pembangunan. Keberadaan ketiga unsur teknis tersebut perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjamin kesinambungan pembangunan daerah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Karena itu misi pembangunan ini hendak menegaskan bahwa, pencapaian kesejahteraan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat NTT adalah hasil dari proses pembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan terwujudnya koherensi perencanaan pembangunan, tatakelola pembangunan yang adaptif serta kemampuan pembiayaan pembangunan yang semakin baik.

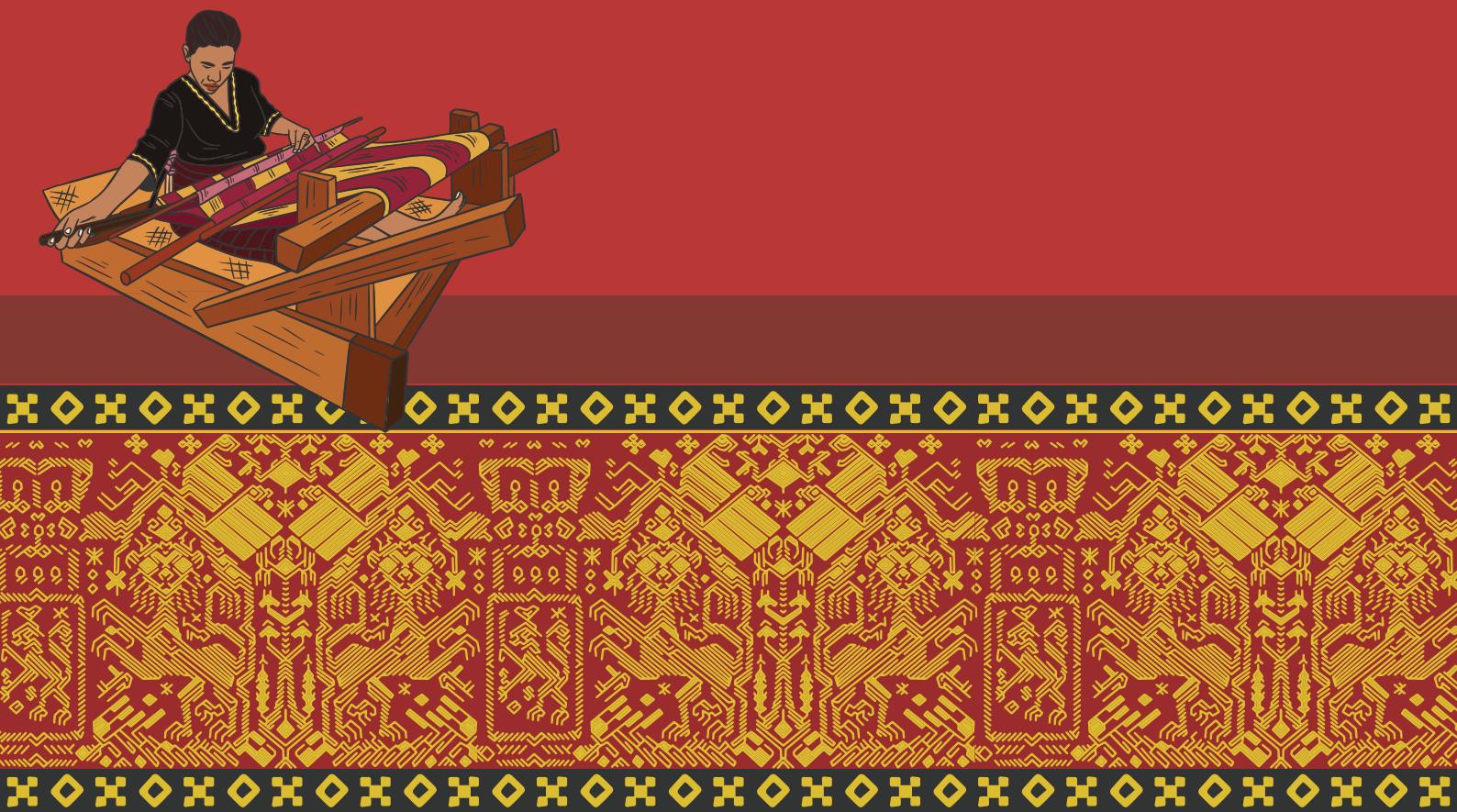
4.3 KESELARASAN VISI, MISI RPJPD DENGAN VISI, MISI RPJPN

Visi dan Misi RPJPD sebagaimana dijabarkan di atas selanjutnya diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJPN yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

TABEL 4.2 KESELARASAN VISI, MISI RPJPD DENGAN VISI, MISI RPJPN

NO	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045
	VISI	
	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045
SASARAN VISI		
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
3	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat	Daya Saing Daerah yang meningkat
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>
MISI		
1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Sumber Daya Manusia NTT yang Berdaya Saing dan Terlindungi Hak Dasarnya
2	Transformasi Ekonomi	Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
3	Transformasi Tata Kelola	Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif
4	Supremasi Hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi	Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi
6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan daerah





BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran pokok selama 4 (empat) periode pembangunan. Pada bagian ini disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD

Arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada 4 (empat) periode RPJMD tahun 2025-2045 adalah sebagaimana Tabel 5.1.

TABEL 5.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
Membangun Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan terlindungi hak dasarnya	Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM, berkualitas dan inklusi	Penguatan Daya Saing SDM yang berkelanjutan	Terwujudnya Sumberdaya Manusia NTT yang unggul dan sejahtera
Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Pemenuhan infrastruktur dasar basis ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai landasan pembangunan ekonomi	Percepatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Penguatan rantai nilai dan rantai pasok untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis ekonomi hijau dan biru	Terwujudnya NTT sebagai Daerah berpendapatan menengah
Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif.	Penguatan Tata Kelola yang tepat fungsi	Percepatan Tata Kelola yang kolaboratif	Perluasan Tata Kelola yang kompetitif	Mewujudkan Tata Kelola yang adaptif dan berintegritas

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas sebagai landasan transformasi dan pembangunan	memantapkan supremasi hukum, stabilitas untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan	NTT yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansial, aman dan damai	Mewujudkan NTT yang adil, aman dan damai
Mewujudkan Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Pembangunan NTT yang berkelanjutan
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahannya yang merata dan berkeadilan	Memperluas pemerataan pembangunan antar wilayah	Mendorong percepatan pembangunan antar wilayah	Mewujudkan daya saing setiap daerah	Mewujudkan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan
Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Menginisiasi pembangunan sarana dan prasarana ramah lingkungan	Memperluas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ramah lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana ramah lingkungan	Mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang kuat dan berdaya saing
Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan daerah	Mendorong percepatan pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki	Meningkatkan daya saing daerah berbasis potensi yang dimiliki	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan	Menjamin keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah

Selain itu, Arah kebijakan Pembangunan Daerah perlu menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terkait serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

TABEL 5.2 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMATIF DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

TRANSFORMASI SOSIAL	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Daerah Provinsi)	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
PERLUASAN UPPAYA PROMOTIF-PREVENTIF DAN PEMBUDAYAAN PERILAKU HIDUP SEHAT.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	V	V	V	V
PERKUATAN PEMENUHAN TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN YANG DIDUKUNG DENGAN PEMBERIAN BANTUAN/INSENTIF DAN AFFIRASI PENDAYAGUNAAN TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN DARI MASYARAKAT LOKAL TERUTAMA DI DAERAH AFFIRASI 3TP.	Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP.	V	V	V	V
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT, SERTA MASALAH KESEHATAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM.	Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.	V	V	V	V
PENUNTASAN STUNTING DAN ELIMINASI MALARIA.	Penuntasan stunting dan eliminasi malaria.	V	V	V	V
PEMENUHAN SARANA PRASARANA MENDUKUNG POLA HIDUP SEHAT TERMASUK RUANG TERBUKA HIJAU, SARANA UNTUK AKTIVITAS FISIK, DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI, SERTA SARANA PRASARANA PENANGANAN LIMBAH MEDIS.	Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan koneksi transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.	V	V	V	V
PERINGKATAN AKSES KESEHATAN MELALUI SISTEM RUJUKAN KEPULAUAN (TERMASUK RS PERAIKAN) DAN PENGUATAN TELEMEDICINE SERTA SISTEM SISTER HOSPITAL DENGAN RS DI WILAYAH LAIN.	Peningkatan akses kesehatan melalui sistem rujukan kepulauan (termasuk RS Peraihan) dan penguatan telemedicine serta sistem sister hospital dengan RS di wilayah lain.	V	V	V	V
PERCEPATAN WAJIB BELAJAR 13 TAHUN (1 TAHUN PRA-SEKOLAH DAN 12 TAHUN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	V	V	V	V
PERLUASAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PAUD HI UNTUK MENDUKUNG TERPENUHNYA KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK SECARA UTUH, YANG MELIPUTI KESEHATAN DAN GIZI, PENDIDIKAN, PERLINDUNGAN PENGASUHAN DAN KESAJAHERAAN ANAK USIA DINI.	Perluasan dan peningkatan kualitas PAUD HI untuk mendukung terpenuhnya kebutuhan esensial anak secara utuh, yang meliputi Kesehatan dan gizi, Pendidikan, perlindungan pengasuhan dan kesejahteraan anak usia dini.	V	V	-	-
PEMERATAAN KUALITAS ANTARSATUAN PENDIDIKAN DAN ANTARDAERAH UNTUK MEMASTIKAN LULUSAN DENGAN KUALITAS YANG SETARA DAN TINGKAT KEBEKERJAAN TINGGI.	Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.	V	V	V	V
PERCEPATAN PENINGKATAN PARTISIPASI PENDIDIKAN TINGGI, SERTA PENGADAAN PRODI PERGURUAN TINGGI (STEAM) YANG SESUAI DENGAN KOMODITAS UNGGULAN WILAYAH.	Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah.	-	-	V	V
PERKUATAN PENGELOLAAN TENAGA PENDIDIK DENGAN MENINGKATKAN KUALITAS DAN KOMPETENSI PENDIDIK YANG MODERN DAN ADAPTIF, SERTA PENINGKATAN PROPORSI DOSEN KUALIFIKASI STRATA-3 DAN PELIBATAN PROFESIONAL MENGAJAR.	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dan pelibatan profesional mengajar.	-	-	V	V
PERINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN VOKASI SESUAI DENGAN POTENSI EKONOMI SEPERTI PERTANIAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF, SERTA KETERIKAITAN DENGAN DUDI.	Peringkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta keterikaitan dengan DUDI.	V	V	V	V

TRANSFORMASI	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Daerah Provinsi)	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
ARAH KEBIJAKAN					
Penyediaan akses pendidikan, terutama untuk daerah kepulauan yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.		V	V	V	V
Pengentasan kemiskinan pada daerah affirmasi 3TP melalui perlindungan sosial adaptif.		V	V	V	V
Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penentra upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.		V	V	V	V
Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.		V	V	V	V
Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.		V	V	V	V
Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perlindungan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.		V	V	-	
Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.		V	V	V	V
Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.		-	-	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJP Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
TRANSFORMASI EKONOMI	<p>ARAH KEBIJAKAN</p> <p>Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif sepanjang koridor daerah, sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.</p>	V	V	V	-
	<p>Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan terdiri dari sektor peternakan (sapi potong, kerbau, kuda babi dan kambing), pertanian (kelapa, kopi, kkao, jambu mete) kelautan dan perikanan (rumput laut, ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, garam).</p>	V	V	V	V
	<p>Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.</p>	-	V	V	V
	<p>Peningkatan diversifikasi ekonomi dan integrasi pembangunan jangka panjang kepariwisataan Wilayah Bali-Nusa Tenggara dengan menekankan Labuan Bajo sebagai destinasi berbasis ekowisata premium yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.</p>	-	V	V	V
	<p>Pengembangan kawasan pariwisata premium seperti Labuan Bajo, serta pengembangan ekonomi kreatif tenun, kopi, dan mete.</p>	V	V	V	V
	<p>Pengembangan kawasan pariwisata massal (mass tourism) untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal, serta sebagai kawasan penyanga bagi kawasan pariwisata premium yang berfokus pada pemecahan konsentrasi dan perpanjangan lama tinggal wisatawan.</p>	V	V	V	V
	<p>Pengembangan tourism hub Bali-Nusa Tenggara melalui kerja sama multipihak yang didukung pengembangan paket perjalanan dan penambahan rute penerbangan domestic dan internasional.</p>	V	V	V	V
	<p>Pengembangan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan dan perubahan iklim, kemudahan investasi, serta pertumbuhan industry pariwisata dan industri kreatif lainnya.</p>	V	V	V	V
	<p>Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya tenun, kopi, dan mete, pada sentra-sentra ekonomi lokal.</p>	-	V	V	V
	<p>Penerapan pertanian organik dan pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.</p>				

TRANSFORMASI	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Daerah Provinsi)	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
ARAH KEBIJAKAN					
Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (<i>added value</i>) tinggi yang berorientasi ekspor.		-	V	V	V
Pelaksanaan afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.		V	V	V	V
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata premium berkelas dunia atau <i>ecotourism</i> .		V	V	V	V
Penyajian sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta perkutan keterkaitan desa-kota.		V	V	-	-
Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai kawasan penyanga di kawasan pariwisata premium yang akan dikembangkan.		-	V	V	V
Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.		V	V	V	V
Revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.		V	V	V	V
Penguatan koneksi antara sentra produksi, pengolahan, dan pasar baik dalam dan luar negeri.		V	V	V	V
Penerapan transportasi ramah lingkungan <i>Electric Vehicle</i> (EV).		-	-	V	V
Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.		V	V	V	V
Peningkatan akses dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan sesuai standar untuk tiap jenjang pendidikan dengan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar-mengajar.		V	V	V	V
Pemanfaatan TIK untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran bagi pariwisata dan ekonomi kreatif.		V	V	V	V

TRANSFORMASI	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Daerah Provinsi)	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
ARAH KEBIJAKAN					
Penguatan TIK untuk memperluas akses pasar pada skala nasional hingga global, salah satunya dengan pemanfaatan e-commerce dan penguatan branding produk.		V	V	V	V
Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.		V	V	V	V
Industrialisasi koperasi melalui penguatan kemitraan usaha, proses bisnis, dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi.		V	V	V	V
Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peringkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemaseran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.		V	V	V	V
Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.		-	-	-	V
Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.		V	V	V	V
Peningkatan produktivitas BUMD.		V	V	V	V
Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.		V	V	V	

TRANSFORMASI	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Daerah Provinsi)	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
KEBIJAKAN					
Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penunrasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	V	V	V	V	
TRANSFORMASI	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.	V	V	V	V
TATA KELOLA	<p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil penguatan dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</p> <p>Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat</p> <p>Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah</p> <p>Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</p> <p>Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</p> <p>Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.</p> <p>Penguatan regulasi perdataan jalur lalu lintas laut dan penangkapan ikan serta peningkatan kapasitas masyarakat.</p> <p>Penguatan Integritas Partai Politik.</p>	V	V	V	V

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Daerah Provinsi)		Periode Pelaksanaan RPJMD			
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH	<p>Peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.</p> <p>Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.</p> <p>Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembelaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas bekerja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.</p> <p>Penguatan pengendalian inflasi daerah.</p> <p>Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.</p>	V	V	V	V
KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI	<p>Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.</p> <p>Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.</p> <p>Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.</p> <p>Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.</p> <p>Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/food estate termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regeneratif sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.</p> <p>Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan prinsip rendah karbon dan berkelanjutan iklim, untuk mewujudkan masyarakat tangguh iklim dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi dan air.</p> <p>Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor pentahelix dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.</p>	V	V	V	V

TRANSFORMASI	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Daerah Provinsi)	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
ARAH KEBIJAKAN	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti rainwater harvesting, diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi peranian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan.	V	V	V
IMPLEMENTASI TRANSFORMASI	Modernisasi irigasi.	V	V	V	V
Perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.	Pengendalian banjir terpadu di wilayah pariwisata dan perlindungan pulau-pulau kecil dari risiko abrasi.	V	V	V	V
Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.	Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	V	V	V	V
Penuntasan RDTB kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut.	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	V	V	V	V
Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.	Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi termasuk pariwisata di antaranya Pelabuhan Tenau Kupang (NTT) dan Labuan Bajo (NTT) secara terpadu.	V	V	V	V
Pemanfaatan ALKI III secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut dan penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik serta pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang untuk mengangkut komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai bagian transportasi multimoda yang menjangkau seluruh daerah.	V	V	V	V

TRANSFORMASI	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Daerah Provinsi)	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
ARAH KEBIJAKAN					
Pengembangan bandara utama Bandara Internasional El Tari di Kupang dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan seaplane untuk mendukung pariwisata dan konektivitas daerah afirmasi 3TP.		V	V	V	V
Penyelesaian Trans Flores (NTT) serta jalan trans pada pulau-pulau 3TP serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalan/daerah.		V	V	V	V
Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Kota Kupang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang.		V	V	V	V
Peningkatan kegiatan ekonomi dan keamanan perbatasan.		V	V	V	V
Pembangunan tumpungan air sejuta guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.		V	V	V	V
Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketerhanan bencana dan iklim.		V	V	V	V
Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.		V	V	V	V
Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.		V	V	V	V
Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.		V	V	V	V
Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.		V	V	V	V
Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.		V	V	V	V
Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarang (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.		V	V	V	V
Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal separtiganya melalui daur ulang).		V	V	V	V

TRANSFORMASI	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Daerah Provinsi)	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
SINKRONISASI	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	V	V	V	V
KEBIJAKAN	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	V	-	-	V
PERKUATAN	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	V	V	V	V
PENGENDALIAN	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	V	V	V	V
PENGANGANAN	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	V	V	V	V
PENERAPAN	Penerapan bauplan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	V	V	V	V
KARAKTERISTIK	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah kepulauan dan afirmasi.	V	V	V	V
KOLABORASI	Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan.	V	V	V	V
PENGEMBANGAN	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	V	V	V	V

5.2 SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif sebagaimana pada Tabel 5.3.

TABEL 5.3 SASARAN POKOK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket.
				Baseline 2025	Target 2045	
1	Terwujudnya Kesehatan untuk Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,05	78,02	
			2 Kesehatan Ibu dan Anak:			
			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	226	26	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	33,1	8,4	
			3 Insidensi Tuberkulosis (per 100,000 penduduk):			
			Cakupan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	66	95	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	92,8	98	
			4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96,28	99,5	
2	Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas dan merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5 Hasil pembelajaran			
			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
			• Literasi Membaca	9,09-9,09	68,18-72,73	
			• Numerasi	0,00-4,55	59,09-63,64	
			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
			• Literasi Membaca	20,10-22,10	62,31-64,31	
			• Numerasi	15,25-17,25	57,24-59,24	
			c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,61 - 8,62	10,87 - 10,95	
			d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,47-13,48	14,85-14,96	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		
				Baseline 2025	Target 2045	Ket.
			6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) [*]	10,53	10,53-12,11	
			7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	79,63	90,00	
3	Terwujudnya Masyarakat yang terlindungi	Perlindungan sosial yang adaptif	8 Tingkat Kemiskinan (%)	15,32-15,82	0,01-1,01	
			9 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	28,42	72,35	
			10 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	15	45	
4	Terwujudnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	1,31-1,34	2,25-2,76	
			12 Pengembangan Pariwisata			
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) [*]	0,75	1,66	
			b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang) [*]	95,22	304,69	
			13 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		-	
			14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	7,45	9,41	
			b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	0,34	0,76	
			c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,35	3,97	
			d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	3,48	5,08	
			e. <i>Return on Aset (ROA)</i> BUMD (%)	1,04	4,56	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		
				Baseline 2025	Target 2045	Ket.
			15 Penciptaan Lapangan Kerja Baik			
			a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,49-2,99	1,60-2,62	
			b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	27	55	
			16 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	70,12	85,4	
			17 Tingkat Penguasaan IPTEK/ Tingkat Digitalisasi Koperasi			
5	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
			a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	67,04	83,47	
			b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	26,20	58,03	
6	Terwujudnya Transformasi Digital	Transformasi Digital	19 Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	5,3	7,3	
7	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20 Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	11,49	5,89	
			21 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	46,09	46,51	
			22 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	2,29	5,96	
8	Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23 Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
			a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah terhadap nasional (%)			
			b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	50,76	100	
			c. Persentase Desa Mandiri (%)	0,00	3,12	
9	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	24 Indeks Reformasi Hukum*	70	100	
			25 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,40	5,00	
			26 Indeks Pelayanan Publik	3,66	5,00	
			27 Indeks Integritas Nasional	65,65	79,08	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		
				Baseline 2025	Target 2045	Ket.
10	Terwujudnya Kepatuhan Hukum, Keamanan dan Demokrasi	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28 Tingkat Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak%	-	95	
			a. Presentase penegakan hukum Peraturan daerah	70	100	
			b. Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	60	80	
11	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	29 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	64,03	81,41	
			30 Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi	
			31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,36	4,80	
			32 Tingkat Inflasi (%)	2,4-3,3	0,8-2,7	
			33 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
12	Terwujudnya Efektifitas Kepemimpinan Daerah	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan	a. Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB (%)	28,68	79,50	
			b. Aset Dana Pensiun/ PDRB (%)	0,72	7,58	
			c. Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	562.363,86	4.972.755,32	
			d. Total Kredit/PDRB (%)	36,3	77,2	
13	Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	34 Inklusi Keuangan (%)	92,07	99,02	
			35 Konflik SARA (Jumlah Peristiwa)			
			36 Efektifitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah			
14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,18-54,22	62,91-63,28	
			38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	86,46 - 86,51	94,63 - 95,15	
15	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,1 - 60,14	64,16 - 64,47	
			40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407 - 0,405	0,195 - 0,174	
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					
				0,465	0,628	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket.
				Baseline 2025	Target 2045	
			42 Kualitas Lingkungan Hidup			
			a. Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	80,02	86,31	
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	2,50	50,00	*
			c. Pengelolaan Sampah			
			• Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	5	90,00	
			• Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	15	100	
16	Terwujudnya ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43 Ketahanan energi, air, dan pangan			
			a. Ketahanan Energi			
			• Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	253	785	
			• Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	150	100	
			b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	13,5	0,75	
			c. Ketahanan Air			
			• Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)*	0,04	8,15	
			• Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,36	100	
17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44 Indeks Risiko Bencana (IRB)*	186,87	159,13-135,34	
			45 Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
			a. Kumulatif	19,85	47,82	
			b. Tahunan	34,27	91,18	

5.3 UPAYA TRANSFORMASI SUPER PRIORITAS NTT (GAME CHANGERS NTT)

Secara umum, arahan RPJPN Tahun 2025-2045 terkait Upaya Transformasi Super Prioritas atau Game changers diadopsi sebanyak 16 (enam belas) oleh Provinsi NTT sesuai kebutuhan dan kesesuaian dengan konteks NTT seperti pada Tabel 5.4 di bawah ini.

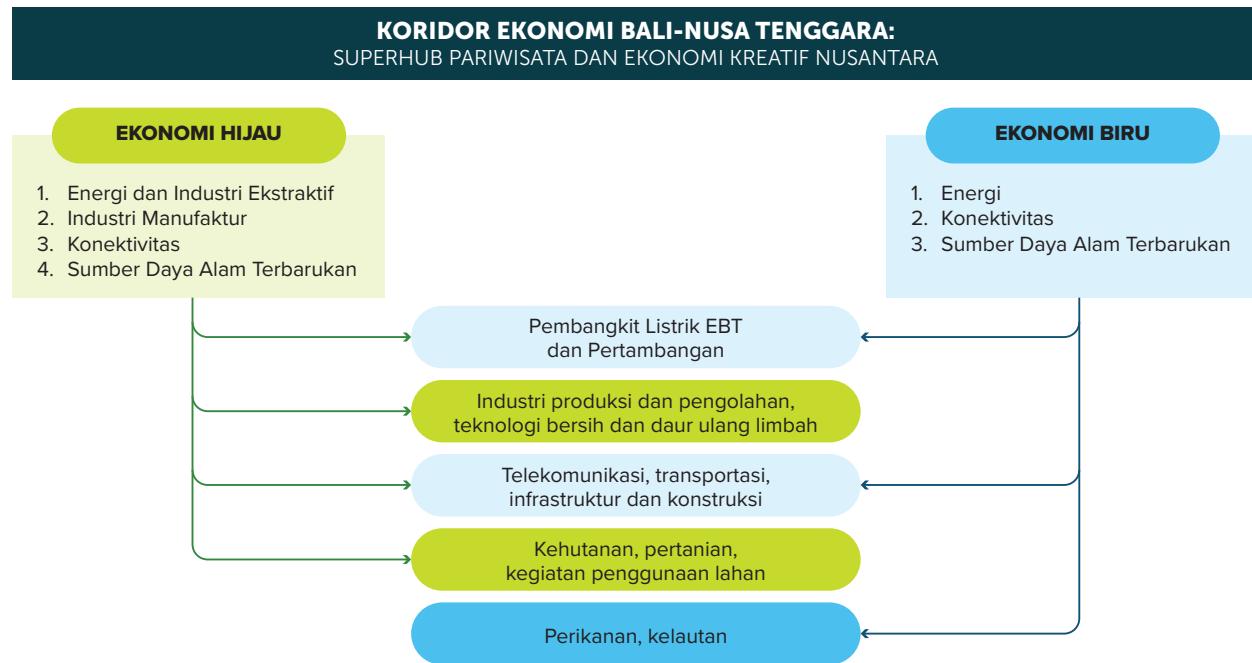
TABEL 5.4 GAME CHANGERS NTT TAHUN 2025-2045

TRANSFORMASI	GAME CHANGERS
TRANSFORMASI SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) 2. Peningkatan partisipasi Lulusan SMA, SMK Ke Pendidikan Tinggi STEAM 3. Investasi pelayanan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan kusta) 4. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsossek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
TRANSFORMASI EKONOMI	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri 6. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor 7. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau 8. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital 9. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi
TRANSFORMASI TATA KELOLA	<ol style="list-style-type: none"> 10. Transformasi manajemen ASN dan pemberantasan korupsi
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	<ol style="list-style-type: none"> 11. Penguatan integritas partai politik 12. Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBD; serta transformasi kelembagaan perencanaan fiskal 13. Reformasi energi terbarukan dan penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu dan tepat sasaran
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	<ol style="list-style-type: none"> 14. Penguatan karakter dan jati diri bangsa 15. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir 16. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water)

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Secara khusus, seperti yang sudah dibahas di Sub Sub Bab 2.7.2.2 Fokus Utama Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju Indonesia Emas 2045, maka *game changers* Provinsi NTT yang menjadi andalan utama guna mendukung “Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara: Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”, dimana kontribusi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kekuatan provinsi kepulauan di wilayah Timur Indonesia dapat dicapai melalui Pengembangan Ekonomi Hijau dan pengembangan Ekonomi Biru seperti pada Gambar 5.1 di bawah ini. Pada prinsipnya, transformasi pada “Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara”, dilakukan melalui pengarus utamaan Ekonomi Hijau (*Green economy*) dan Ekonomi Biru (*Blue economy*).

GAMBAR 5.1 KORIDOR EKONOMI BALI- NUSA TENGGARA DALAM KERANGKA EKONOMI HIJAU DAN EKONOMI BIRU



Sedangkan, fokus utama pengelolaan pariwisata yang dikelompokkan ke dalam wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus yang berdasarkan konsep ekowisata yang tanggap bencana alam agar tetap mengkonservasi alam dan melestarikan alam, pemanfaatan wisata budaya dan ritual keagamaan dengan penyelenggaraan event-event (atraksi) budaya dalam rangka perlindungan terhadap adat istiadat dan warisan nenek moyang, penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sebagai mitra kerja dalam bidang *service excellence* di kawasan wisata potensial di dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Sedangkan, pengembangan ekonomi kreatif mencakup fashion (tenun), kriya (anyaman dan pahat), dan kuliner tradisional.



BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan jangka panjang 20 Tahun ke depan yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan pada setiap sektor. RPJPD Tahun 2025 – 2045 Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

RPJPD Tahun 2025 – 2045 Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pedoman dalam:

1. Penyusunan RPJMD, dan Dokumen Perencanaan sektoral dalam penyelengaraan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Penyusunan RPJPD tahun 2025 – 2045 Kabupaten/Kota;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian Visi Misi nasional dan daerah;
5. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan; dan
7. Memastikan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, maupun hasil capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka Panjang daerah provinsi dan kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan visi **“Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menjaga keseimbangan dan kesinambungan pembangunan.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

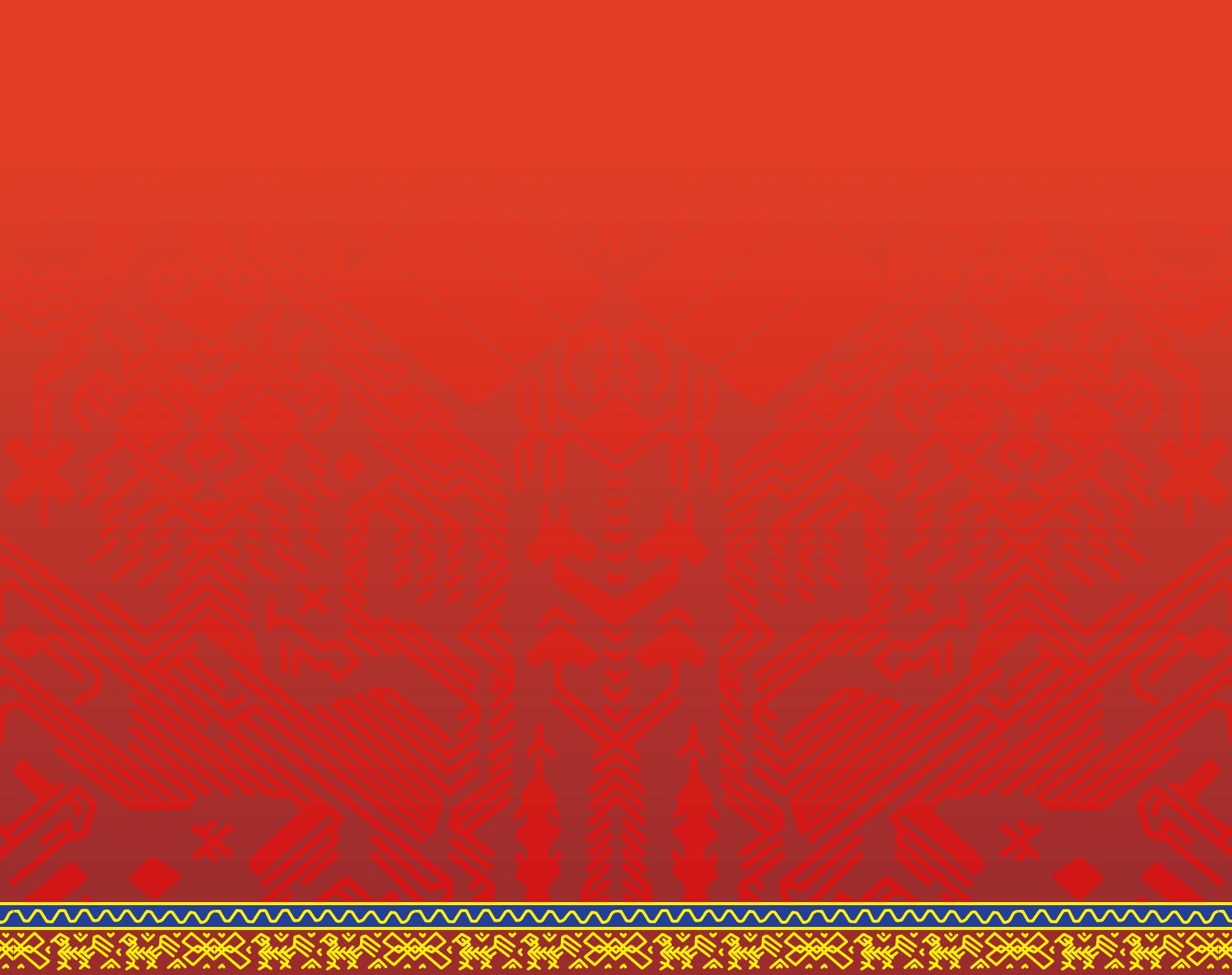


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Koordinasi	
Kepala Badan Bapperida	
Sekretaris Bapperida	
Kepala Bidang PPEPD	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	





BAPPERIDA PROVINSI NTT
2024